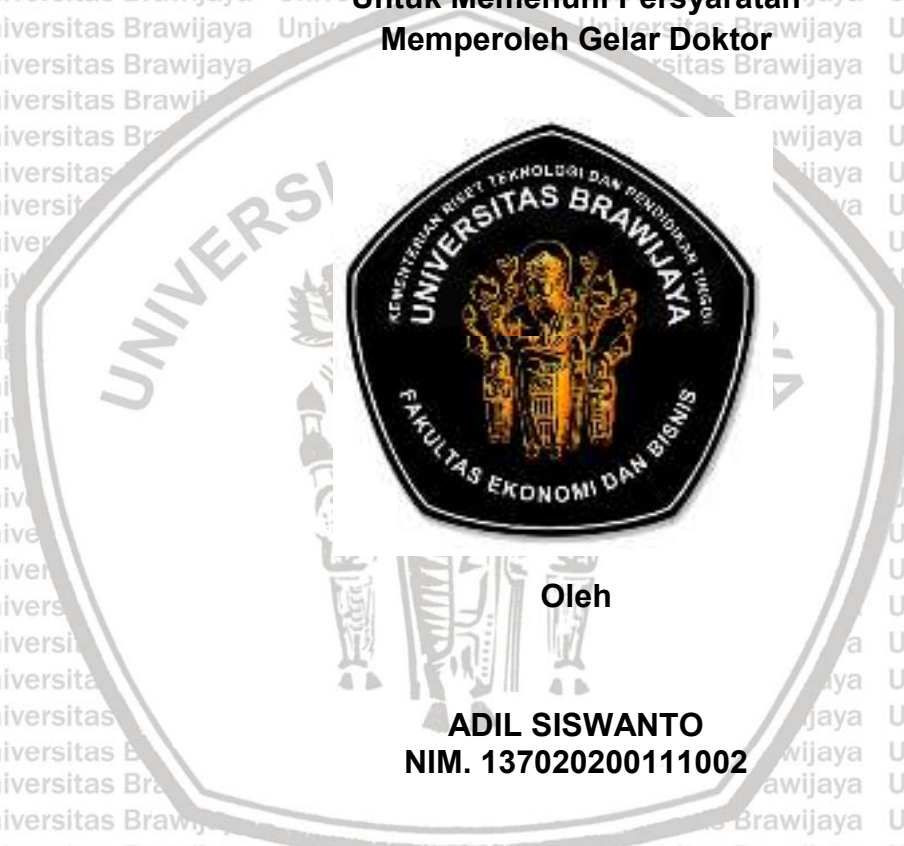


**PENGARUH HUBUNGAN KELEMBAGAAN,
INSENTIF PROGRAM PARTISIPASI, MODAL SOSIAL,
DAN SOCIAL LEARNING TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT, DIMEDIASI KESEJAHTERAAN
DALAM PENGELOLAAN HUTAN
(Studi Pada Hutan Konservasi Taman Nasional Baluran-Situbondo)**

DISERTASI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Doktor**



Oleh

**ADIL SISWANTO
NIM. 137020200111002**

**PROGRAM DOKTOR ILMU MANAJEMEN
PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**M A L A N G
2018**



LEMBAR IDENTITAS PROMOTOR DAN PENGUJI

Judul : PENGARUH HUBUNGAN KELEMBAGAAN, INSENTIF PROGRAM PARTISIPATIF, MODAL SOSIAL, DAN SOCIAL LEARNING TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DIMEDIASI KESEJAHTERAAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI TAMAN NASIONAL BALURAN SITUBONDO

Nama Mahasiswa : ADIL SISWANTO
Program Studi : ILMU MANAJEMEN

KOMISI PROMOTOR

Promotor : Prof. Dr. Mueljadi, SE., SU., M.Sc
Promotor 1 : Prof. Dr. Djumilah Hadwidjojo, SE.
Promotor 2 : Dr. Rofaty, SE., MM

TIM PENGUJI

Dosen Penguji 1 : Prof. Dr. Armanu, SE., M.Sc
Dosen Penguji 2 : Dr. Fatchur Rohman, SE., M.Si
Dosen Penguji 3 : Ainur Rofiq, SE., S.Kom., MM., Ph.D
Dosen Penguji Luar 1 : Prof. Dr. Widji Astuti, MM

Tanggal Ujian : 28 Januari 2018

a.n. Dekan
 Ketua Program Studi Doktor Ilmu Manajemen



Prof. Dr. Noermijati, SE., MTM
 19611108 19660 1 2002

DISERTASI


**PENGARUH HUBUNGAN KELEMBAGAAN, INSENTIF PROGRAM
PARTISIPATIF, MODAL SOSIAL, DAN *SOCIAL LEARNING* TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT DIMEDIASI KESEJAHTERAAN DALAM
PENGELOLAAN HUTAN DI TAMAN NASIONAL BALURAN SITUBONDO**

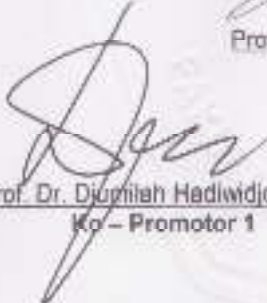
Oleh :


ADIL SISWANTO
137020200111002

Diperthahankan di depan penguji
Pada tanggal : **26 Januari 2018**
Dan dinyatakan memenuhi syarat


Komisi Promotor,


Prof. Dr. Mocljaji, SE., SU., M.Sc
Promotor


Prof. Dr. Djumilah Hadliwidjojo, SE
Ko - Promotor 1


Dr. Rofiaty, SE., MM
Ko - Promotor 2

Mengetahui,
a/n. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya
Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen


Prof. Dr. Noermijati, SE., MTM
19611108 19860 1 2002

PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah DISERTASI dengan judul:

PENGARUH HUBUNGAN KELEMBAGAAN, INSENTIF PROGRAM PARTISIPATIF, MODAL SOSIAL, DAN SOCIAL LEARNING TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DIMEDIASI KESEJAHTERAAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI TAMAN NASIONAL BALURAN SITUBONDO

Tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah DISERTASI ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia DISERTASI ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (DOKTOR) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU NO. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 26 Januari 2018

Mahasiswa,



Nama	: ADIL SISWANTO
NIM	: 137020200111002
PS	: DOKTOR ILMU MANAJEMEN PPS FEB UB

RIWAYAT HIDUP

Adil Siswanto, lahir di Banyuwangi, 10 Nopember 1974, anak pertama dari Abdul Makmur (Alm) dan Suriyani. Tahun 1982-1988 menempuh sekolah pendidikan sekolah dasar negeri Kalibaru Wetan IV. Tahun 1988-1991 menempuh sekolah SMP Negeri 1 Kalibaru. Tahun 1993-1996 menempuh sekolah lanjutan tingkat atas SMA PGRI 4 Kalibaru. Tahun 2002-2006 menempuh pendidikan Diploma 4 Pariwisata Universitas Udayana-Bali. Tahun 2008-2010 menempuh pendidikan strata dua (Pasca Sarjana pada Program Studi Magister Kajian Pariwisata Universitas Udayana –Bali), beasiswa BPPS. Dikti. Tahun 2013 memperoleh beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, untuk menempuh pendidikan Program Doktor Ilmu Manajemen, Universitas Brawijaya-Malang.

Penghargaan yang pernah diperoleh: (1) lulusan tercepat program studi Diploma 4 pariwisata Universitas Udayana; (2) *the best salesman of the year* 2005, PT. Puratos Indonesia; (3) peserta terbaik diklat bahasa Korea kerjasama dengan *Indonesian Korean Culture and Studies* (IKCS) dan P4TK Bahasa Jakarta; (4) pembina Jawara SMK dan LKS bidang *Housekeeping*.

Pengalaman mengajar: guru pariwisata SMK Triatmajaya Badung-Bali (2006-2007). Dosen AKPAR Muhammadiyah Jember 2007-2009, dan Dosen FIA UB prodi pariwisata dan *hospitality* (2014-2017). Sejak tahun 2009 sampai sekarang sebagai guru PNS pada SMKN 2 Bondowoso.

Malang, Januari 2018

Penulis

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan Izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul: “Pengaruh Hubungan Kelembagaan, Insentif Program Partisipasi, Modal Sosial, dan *Social Learning* Terhadap Partisipasi Masyarakat, Dimediasi Kesejahteraan Dalam Pengelolaan Hutan (Studi Pada Hutan Konservasi Taman Nasional Baluran-Situbondo)”. Dengan penuh kesadaran penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak tidak akan mungkin disertasi ini akan dapat terselesaikan. Untuk itu perlu kiranya penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang takterhingga kepada Bapak, Ibu dan saudara/i:

1. Rektor Universitas Brawijaya, yang memberikan kesempatan dan fasilitas selama saya menempuh studi Program Doktor Ilmu Manajemen.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang memberi kesempatan dan fasilitas selama saya menumpuh pendidikan pada Program Doktor Ilmu Manajemen
3. Ketua Pengelola Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
4. Prof. Dr. Dra. Noermijati, MTM., CPHR, selaku Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen yang telah banyak memberikan dukungan, dan motivasi selama menempuh pendidikan pada Program Doktor Ilmu Manajemen
5. Prof. Dr. Moeljadi, SE., SU., M.Sc, selaku Promotor yang dengan ketulusan, dan kesabaran membimbing, mengarahkan dan mengkoreksi secara detail sehingga tulisan ini sempurna.
6. Prof. Dr. Djumilah Hadiwidjojo, SE, selaku Ko-Promotor 1 yang dengan ketulusan dan kesabaran dalam membimbing, mengarahkan dan mengkoreksi secara detail sehingga tulisan ini bisa bermakna dan sempurna

7. Dr. Rofiaty, SE., MM, selaku Ko-Promotor 2 yang dengan ketulusan dan kesabaran membimbing dan mengarahkan sehingga tulisan ini dapat difahami sebagai buah karya dari keikhlasan dalam menulis
8. Prof. Armanu, SE., M.Sc., Ph.D selaku penguji yang telah banyak memberikan dukungan, dan motivasi selama menempuh pendidikan
9. Dr. Fachtur Rahman, SE, M.Si, selaku Tim Penguji yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran dan saran perbaikan demi penyempurnaan disertasi ini
10. Ainur Rofiq, S.Kom., SE., MM., Ph.D, selaku Tim Penguji yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan sumbangan pemikiran dan saran perbaikan demi penyempurnaan disertasi ini
11. Para Dosen Pengajar pada Program Doktor Ilmu Manajemen FEB UB, yang telah memberikan wawasan keilmuan bagi penulis selama ini
12. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang telah memberikan beasiswa pendidikan pada Program Doktor Ilmu Manajemen.
13. Bupati Bondowoso Bapak Drs. Amin Said Husni, atas perkenannya memberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas belajar pada Program Doktor Ilmu Manajemen
14. Kepala dinas pendidikan Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten Bondowoso, atas perkenannya menempuh pendidikan pada program Doktor Ilmu Manajemen.
15. Bapak Drs. Faturrahman, M.MPd, dewan guru dan staff SMKN 2 Bondowoso, atas dukungannya untuk menempuh pendidikan pada Program Doktor Ilmu Manajemen
16. Ir. Emy Endah Suwarni, M.Sc, Kepala Balai Taman Nasional Baluran atas perkenannya kepada penulis selama proses penelitian

17. Bapak Resi Soworo, SH, Kasub Penyelia dan PPNS Taman Nasional Baluran
18. Ibu Arif Pratiwi, S.Hut, M.Hut, selaku ketua sub Pengelolaan Ekosistem Hutan yang telah membantu memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini
19. Bapak Rohman dan segenap Polisi Hutan Taman Nasional Baluran atas informasi terkait dengan obyek penelitian
20. Bapak Siyanto Penyuluh kehutanan Taman Nasional Baluran atas informasi terkait obyek penelitian dan masyarakat desa penyangga
21. Seluruh Staff dan karyawan Taman Nasional Baluran atas bantuan dan informasi yang diberikan
22. Rekan-rekan sejawat angkatan 2013 Program Doktor Ilmu Manajemen atas jalinan persaudaraan mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap penyelesaian disertasi ini
23. Kepada ayahanda Abdul Makmur (alm), ibunda tersayang Suriyani, yang selama ini banyak mendukung penulis, begitu banyak bantuan yang diberikan, baik doa maupun materi
24. Kepada mertua (Bapak Juhri dan Ibu Sumiati), dan pamanku Bapak H. Usman, yang selama ini banyak mendukung penulis, begitu banyak bantuan yang diberikan, baik doa maupun materi
25. Isteri tercinta Uswatun Hasanah dan anak-anakku tersayang Naura Safira Putri Adilana, Jeffry Putra Adilana dan Sulthon Brawijaya Putra Adilana, yang selama ini selalu menjadi bagian yang selalu memberi doa, motivasi dan inspirasi untuk terus berjuang menyelesaikan studi Program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

26. Ikatan Awardee LPDP Malang, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, doa, dan dorongan untuk penyelesaian disertasi ini.

Demikian semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semua, Amin.

Malang, Januari 2018



Penulis



ABSTRAK

Adil Siswanto: Program Doktor Ilmu Manajemen Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2018. Pengaruh Hubungan Kelembagaan, Insentif Program Partisipasi, Modal Sosial, dan *Social Learning* Terhadap Partisipasi Masyarakat, Dimediasi Kesejahteraan Dalam Pengelolaan Hutan (Studi Pada Hutan Konservasi Taman Nasional Baluran-Situbondo). Promotor : Moeljadi. Ko-Promotor : Djumilah Hadiwidjojo dan Rofiaty.

Latar belakang penelitian bahwa Taman Nasional sebagai kawasan hutan konservasi memiliki berbagai jenis flora, fauna dan kekayaan alam. Namun demikian kawasan konservasi menghadapi berbagai ancaman atau gangguan seperti perladangan dan perambahan liar. Dengan demikian, peran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, merupakan hal yang sangat penting.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan: (1) pengaruh hubungan kelembagaan, insentif program partisipasi, modal sosial, *social learning*, dan kesejahteraan masyarakat terhadap partisipasi masyarakat; (2) kesejahteraan masyarakat didalam memediasi pengaruh hubungan kelembagaan, insentif program partisipasi, modal sosial, dan *social learning* terhadap partisipasi masyarakat.

Pendekatan penelitian kuantitatif dengan alat analisis *Structural Equation Modelling Partial Least Square* (SEM PLS). Unit analisis adalah kepala rumah anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan sebanyak 120 orang sebagai responden.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) hubungan kelembagaan, insentif program partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap partisipasi masyarakat; (2) modal sosial, dan *social learning* tidak berpengaruh positif signifikan terhadap partisipasi masyarakat; (3) kesejahteraan masyarakat memediasi pengaruh insentif program partisipasi secara penuh, dan modal sosial secara parsial terhadap partisipasi masyarakat; (4) kesejahteraan masyarakat tidak memediasi pengaruh hubungan kelembagaan dan *social learning* terhadap partisipasi masyarakat.

Implikasi praktis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, yaitu dengan meningkatkan: (1) peran lembaga kehutanan; (2) peran tim/kelompok Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan; (3) program partisipasi dan pemberdayaan; (4) keeratan hubungan lembaga sebagai *good governance*; insentif program partisipasi; potensi modal sosial; *social learning* sebagai upaya peningkatan kualitas hidup yang lebih baik, dan program kesejahteraan masyarakat.

Keterbatasan penelitian: (1) responden merupakan kepala rumah tangga kelompok Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan, sebagai penerima manfaat, sedangkan pihak penyedia manfaat (pengelola) tidak dilibatkan; (2) tidak menguji variabel karakteristik sosio-demografi yang diprediksi berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat.

Kata kunci: partisipasi, kesejahteraan, konservasi, dan Taman Nasional.

ABSTRACT

Siswanto, Adil. Doctoral Program in Management, Faculty of Economics and Business, Brawijaya University. 2018. **The Influence of Forest Institution Connectedness, Participation Program Incentives, Social Capital, and Social Learning on Public Participation Mediated by Forest Management Welfare (A Study in Conservation Forest of Baluran National Park in Situbondo)**. Promoter: Moeljadi, Co-Promoters: Djumilah Hadiwidjojo and Rofiaty.

Despite its richness in flora and fauna, Baluran National Park is facing threats and disruptions of illegal encroachment and farming. Thus, public participation in forest management is essential.

Using quantitative approach with Structural Equation Modeling Partial Least Square (SEM PLS), this study aims to analyze and explain the influence of forest institution connectedness, participation program incentives, social capital, social learning, and welfare on public participation. In addition, this study also explores the role of welfare in mediating the aforementioned relation. The respondents of this study are 120 heads of families, member of Forestry Community Training Center.

The results of this study indicate that forest institution connectedness, participation program incentives, and welfare positively and significantly influence public participation, but social capital and social learning do not have positive and significant influence on it. Furthermore, welfare fully mediates the influence of participation program incentives and partially mediates the influence of social capital on public participation. However, it does not mediate the influence of forest institution connectedness and social learning.

The results imply that public participation in forest management can be improved by increasing the role of forest institutions, Forestry Community Training Center team, and participation and empowerment program. In addition, improving forest institutions connectedness as a good governance, participation program incentives, the use of social capitals potencies, social learning to create a better life, and welfare program might further enhance the participation.

This study is limited to that the respondents of this study are benefit receivers, not involving the providers, and that it does not examine socio-demographic characteristics that influence public participation.

Keywords: participation, welfare, conservation, national park



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala berkah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan perjuangan dan perjalanan yang cukup panjang dari proses penulisan disertasi yang berjudul "Pengaruh Hubungan Kelembagaan, Insentif Program Partisipasi, Modal Sosial, dan *Social Learning* Terhadap Partisipasi Masyarakat, Dimediasi Kesejahteraan Dalam Pengelolaan Hutan (Studi Pada Hutan Konservasi Taman Nasional Baluran-Situbondo)".

Disertasi ini ditulis sebagai wujud keinginan pribadi untuk turut memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pentingnya partisipasi dan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan hutan di Taman Nasional Baluran. Di satu sisi, hutan semakin rusak dan pengelolaan hutan belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat desa penyangga hutan.

Penulis menyadari bahwa kekurangan dan keterbatasan menjadikan disertasi ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak agar disertasi ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan bagi siapapun yang membutuhkan.

Malang, Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL **i**

LEMBAR IDENTITAS PROMOTOR DAN TIM PENGUJI **ii**

UCAPAN TERIMAKASIH **iii**

PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI **v**

ABSTRAK **vi**

DAFTAR ISI **vi**

DAFTAR TABEL **xii**

DAFTAR GAMBAR **xiv**

DAFTAR LAMPIRAN **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang **1**

1.2. Perumusan Masalah **12**

1.3. Tujuan Penelitian **13**

1.4. Manfaat Penelitian **14**

1.4.1 Manfaat Teoritis **14**

1.4.2 Manfaat Praktis **14**

BAB II KAJIAN PUSTAKA **15**

2.1. Kajian Teori **15**

2.1.1 Perkembangan Dalam Strategi Manajemen **15**

2.1.2 Strategi Pengelolaan Sumberdaya Manusia **24**





2.1.3 Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Penyangga	
Hutan Konservasi	35
2.1.4 Pengertian Partisipasi Masyarakat	39
2.1.5. Hubungan Kelembagaan Kehutanan	45
2.1.6. Insentif Program Partisipasi	46
2.1.7. Modal Sosial	48
2.1.8. <i>Social Learning</i>	49
2.1.9. Kesejahteraan Masyarakat	50
2.2. Kajian Impiris	51
2.2.1. Hubungan Kelembagaan Kehutanan Terhadap Partisipasi	
Masyarakat	51
2.2.2. Hubungan Kelembagaan Kehutanan Terhadap Kesejahteraan	
Masyarakat	53
2.2.3. Insentif Program Partisipasi Terhadap Partisipasi Masyarakat	55
2.2.4. Insentif Program Partisipasi Terhadap Kesejahteraan Masya-	
rakat	58
2.2.5. Modal Sosial Terhadap Partisipasi Masyarakat	59
2.2.6. Modal Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	59
2.2.7. <i>Social Learning</i> Terhadap Partisipasi Masyarakat	62
2.2.8. <i>Social Learning</i> Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	63
2.2.6. Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Tingkat Partisipasi	
Masyarakat	64
BAB III KERANGKA KONSEP PENELITIAN	66
3.1 Kerangka Konseptual Penelitian	66

3.2 Hipotesis	75
3.2.1. Hubungan Kelembagaan Terhadap Partisipasi Masyarakat	75
3.2.2. Hubungan Antara Keeratan Hubungan Kelembagaan, Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, dan Tingkat Partisipasi Masyarakat	76
3.2.3. Hubungan Insentif Program Partisipasi Terhadap Partisipasi Masyarakat	78
3.2.4. Hubungan Antara Insentif Program Partisipasi, Kesejahteraan Masyarakat, dan Partisipasi Masyarakat	80
3.2.5. Hubungan Modal Sosial Terhadap Partisipasi Masyarakat	81
3.2.6. Hubungan Antara Modal Sosial, Kesejahteraan Masyarakat, dan Partisipasi Masyarakat	82
3.2.7. Hubungan <i>Social Learning</i> Terhadap Partisipasi Masyarakat	83
3.2.8. Hubungan Antara <i>Social Learning</i> , Kesejahteraan Masyarakat, dan Partisipasi Masyarakat	85
3.2.9. Hubungan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat	86

3.3 Definisi Operasional Variabel	86
---	----

BAB IV METODE PENELITIAN **93**

4.1. Pendekatan Penelitian	93
4.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	94
4.2.1. Lokasi	94
4.2.2. Waktu Penelitian	94

4.3. Populasi, Sampel dan Pengukuran Instrumen Penelitian	94
4.3.1. Populasi	94
4.3.2. Sampel	95
4.3.3. Pengukuran Instrumen Penelitian	97
4.4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	97
4.4.1. Data Primer	97
4.4.2. Data Sekunder	97
4.4.3. Teknik Pengumpulan Data	98
4.5. Uji Instrumen Penelitian	98
4.5.1. Uji Validitas	99
4.5.2. Uji Reliabilitas	103
4.6. Analisis Data	107
4.6.1. Analisis Deskriptif	107
4.6.2. Analisis Kuantitatif	108
4.6.3. Analisis Model Struktural (<i>Structural Equation Modelling</i>)	
SEM PLS	108
4.6.4. Uji Hipotesis	110
4.6.5. Analisis Jalur	111
4.6.6. Efek Mediasi	111

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **114**

5.1. Profile Taman Nasional Baluran	114
5.1.1. Ekosistem Taman Nasional Baluran	116
5.1.2. Profil Pegawai Balai TN Baluran Menurut Tingkat Pendidikan	116



5.2. Profil Masyarakat Desa Penyangga Hutan TN Baluran	117
5.2.1. Karakteristik Responden	117
5.3. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian	119
5.3.1 Uji Validitas	119
5.3.2 Uji Reliabilitas	122
5.4. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian	127
5.4.1 Deskripsi Variabel Hubungan Kelembagaan	127
5.4.2 Deskripsi Variabel Insentif Program Partisipasi	128
5.4.3 Deskripsi Variabel Modal Sosial	130
5.4.4 Deskripsi Variabel <i>Social Learning</i>	131
5.4.5 Deskripsi Variabel Kesejahteraan Masyarakat	133
5.4.6 Deskripsi Variabel Partisipasi Masyarakat	134
5.5. Analisis <i>Partial Least Square</i> (PLS)	135
5.5.1. Evaluasi Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	135
5.5.2. Pengujian <i>Loading Factor</i> (<i>Outer Model</i>)	136
5.6. Hasil Analisis Jalur	138
5.7. Efek Mediasi	140
5.8. Pembahasan Hasil Penelitian	150
5.8.1. Deskripsi Variabel Berdasarkan Nilai <i>Outer Loading</i> dan Nilai <i>Mean</i>	151
5.8.2 Analisis Kesejahteraan Masyarakat	167
5.8.3 Kontribusi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Terhadap Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat	172

5.9. Analisis Partisipasi Masyarakat Program Pengelolaan Hutan di TN Baluran, Situbondo-Jawa Timur	176
5.9.1. Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Program Perencanaan	176
5.9.2. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program	178
5.9.3. Analisis Partisipasi Penerimaan Manfaat	179
5.9.4. Analisis Partisipasi Evaluasi dan Monitoring	181
5.9.5. Analisis Klasifikasi Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan di TN Baluran	182
5.10. Perumusan Strategi Pengelolaan Hutan Konservasi di TN Baluran	185
5.10.1 Peran Lembaga Kehutanan TN Baluran Dalam Pengelolaan Hutan	186
5.10.2 Pentingnya Program Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Konservasi di TN Baluran	192
5.10.3 Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Hutan di TN Baluran	210
5.11. Temuan Penelitian	214
5.12. Kontribusi Penelitian	215
5.12.1. Kontribusi Teoritis	215
5.12.2. Kontribusi Praktis	220

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 222

6.1 Kesimpulan 222

6.2 Keterbatasan 223

6.2 Saran 223

DAFTAR PUSTAKA 226

LAMPIRAN 234



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi SDM suatu perusahaan	27
3.1. Definisi Operasional Variabel	92
4.1. Jumlah Kebutuhan Sampel Penelitian	96
4.2. Hasil Pengujian <i>Convergent Validity Try Out</i>	101
4.3. Hasil Pengujian <i>Discriminant Validity Tahap Try Out</i> (<i>Correlations Among Latent Variabels with Square Roots of AVEs</i>)	102
4.4. Ringkasan Hasil Analisis Uji Reliabilitas Indikator Instrumen <i>Try Out</i>	104
4.5. Hasil Pengujian <i>Composite Reliability Try Out</i>	105
4.6. Hasil Uji Relibilitas Internal Konsistensi (<i>Cronbach Alpha Coefficients</i>)	105
4.7. Hasil Uji Reliabilitas Indikator (<i>Indicators Weight</i>)	106
4.8. Hasil Uji Kolinieritas (<i>Full Collinearity VIFs</i>)	107
4.9. <i>Model Fit Indices dan P-Value</i>	109
5.1. Data Rekapitulasi Wisatawan TN Baluran Periode 2011-2016	115
5.2. Profil Desa Penyangga TN Baluran	117
5.3. Karakteristik Responden Kepala Rumah Tangga	118
5.4. Hasil Pengujian Validitas Konvergen <i>Post Test</i>	121
5.5. Hasil Pengujian <i>Discriminant Validity Tahap Post Test</i> (<i>Correlations</i> <i>Among Latent Variabels with Square Roots of AVEs</i>)	122
5.6. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Indikator Instrumen <i>Post Test</i>	123
5.7. Hasil Pengujian <i>Composite Reliability</i>	124
5.8. Hasil Uji Relibilitas Internal Konsistensi (<i>Cronbach Alpha Coefficients</i>)	125
5.9. Hasil Uji Reliabilitas Indikator (<i>Indicators Weight</i>)	126
5.10. Hasil Uji Kolinieritas (<i>Full Collinearity VIFs</i>)	126
5.11. Distribusi Frekuensi Indikator dan Item Pertanyaan Variabel Hubungan Kelembagaan (X1)	127



5.12. Distribusi Frekuensi Indikator dan Item Pertanyaan Variabel Insentif Program Partisipasi (X2)	129
5.13. Distribusi Frekuensi Indikator dan Item Pertanyaan Variabel Modal Sosial (X3)	130
5.14. Distribusi Frekuensi Indikator dan Item Pertanyaan Variabel <i>Social Learning</i> (X4)	132
5.15. Distribusi Frekuensi Indikator dan Item Pertanyaan Variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y1)	133
5.16. Distribusi Frekuensi Indikator dan Item Pertanyaan Variabel Partisipasi Masyarakat (Z1)	134
5.17. <i>Model Fit Indices</i> dan <i>P-Value (Inner Model) Post Test</i>	136
5.18. Nilai <i>Outer Loading</i> Variabel Penelitian	137
5.19. Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung	138
5.20. Analisis Signifikansi <i>Path Coefficient Indirect Effect</i>	146
5.21. Persepsi Responden Terhadap Variabel Penelitian Berdasarkan Nilai <i>Outer Loading</i> dan Nilai <i>Mean</i>	152
5.22. Potensi Desa Penyangga TN Baluran	173
5.23. Pendapatan Dari Hasil Usaha Tani/KK/Per Tahun	174
5.24. Pendapatan Dari Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) /KK/Per Tahun	174
5.25. Pendapatan Dari Hasil Usaha Ternak /KK/Per Tahun	175
5.26. Kontribusi HHBK terhadap Pendapatan Responden Desa Penyangga	175
5.27. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pengelolaan Hutan di TN Baluran	177
5.28. Partisipasi responden dalam Pelaksanaan Pengelolaan Hutan di TN Baluran	178
5.29. Partisipasi responden dalam Penerimaan Manfaat Pengelolaan Hutan di TN Baluran	180
5.30. Partisipasi Responden Dalam Evaluasi dan Monitoring Pengelolaan Hutan di TN Baluran	182

5.31. Klasifikasi Partisipasi Responden Desa Penyangga TN Baluran 183

5.32. Tipologi Partisipasi Arnstein Dan Hubungannya dengan Klasifikasi 183

5.33. Luas Garapan Lahan (ha)/KK 184

5.34. Tindak Kriminalitas Pembakaran Hutan Periode 2011-2015
TN Baluran Situbondo 191



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
2.1.	Model <i>Strategic Management</i>	20
3.1.	Kerangka Konseptual Penelitian	75
4.1.	Prosedur Analisis Mediasi SEM-PLS	113
5.1.	<i>Structural Equation Modelling (SEM) Pendekatan WarpPLS</i> <i>Hipotesis Secara Langsung (Direct Effect)</i>	141
5.2.	<i>Structural Equation Modelling (SEM) Pendekatan WarpPLS</i>	142
5.3.	Alur Pikir Perumusan Strategi Pengelolaah Hutan di TN Baluran	185



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
1.	Research Gap	234
2.	Lampiran Instrumen Penelitian	236
3.	Hasil Analisis SEM PLS <i>Pre Test</i>	244
4.	Hasil Analisis SEM PLS <i>Post Test</i>	252
5.	Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI)	260



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Taman Nasional sebagai kawasan konservasi memiliki berbagai jenis flora dan fauna serta sebagai salah satu kekayaan alam yang dapat dijadikan andalan dalam menjamin kelangsungan hidup manusia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang (PHKA, 2008). Hampir semua kawasan konservasi mengalami ancaman dan gangguan baik berupa perambahan maupun perladangan liar yang terus meningkat dari waktu ke waktu (PHKA, 2008; Ujud, 2015).

Ancaman dan gangguan pada hutan konservasi dikarenakan: (1) peran kelembagaan kehutanan yang masih lemah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat lokal, (2) tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap nilai-nilai konservasi lingkungan, (3) tingkat pendidikan masyarakat lokal yang masih rendah, (4) keterbatasan lahan pertanian, serta (5) terisolirnya desa-desa di sekitar kawasan konservasi. Peran kelembagaan kehutanan diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan konservasi, yaitu meningkatkan keeratannya dengan masyarakat lokal (Muntasib, 1999).

Peran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, merupakan hal yang sangat penting. Pertimbangannya bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar hutan merupakan ancaman dan gangguan bagi suatu kawasan hutan.

Masyarakat berusaha memenuhi kebutuhan hidup dari produk sumberdaya hutan. Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan, merupakan bagian dari solusi untuk mencegah adanya berbagai gangguan dan ancaman di bidang kehutanan (Robert, *et al.*, 2007).



Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan khususnya di Indonesia telah dibahas dalam kongres kehutanan dunia ke VIII, di Jakarta pada tahun 1978 dengan tema “*forest for people*”. Kondisi hutan pada era 1978, masih relatif baik. Kondisi saat ini hutan semakin rusak dan pengelolaannya belum mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat (Kartodihardjo, 2013).

Selama periode 2000-2005, deforestasi hutan seluas 1.089.560 ha, dengan total luas deforestasi diperkirakan mencapai 21% (Kartodihardjo, 2011).

Indonesia merupakan pemilik hutan tropis dan keanekaragaman hayati terkaya ketiga di dunia setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo (Zaire) dengan luas kawasan mencapai 130,68 juta ha, dan sebanyak 72% dari luas kawasan tersebut telah rusak. Kerusakan hutan juga terjadi di kawasan Taman Nasional Baluran (TN Baluran) propinsi Jawa Timur.

Berdasarkan informasi dari Baluran (2014a:36), dan Sabarno (2001), bahwa ancaman dan gangguan hutan di TN Baluran meliputi: (1) Kebakaran hutan seluas 659 ha (periode tahun 1999-2000). Periode 2000-hingga tahun 2016 terjadi kebakaran hutan hingga 54 kejadian kebakaran dengan luasan areal yang terbakar sekitar 287,75 ha. Total lahan hutan yang rusak akibat kebakaran mencapai ± 946,75 ha atau sekitar 4% dari total luas lahan TNB. Penyebab sebagian besar kebakaran hutan di TN Baluran adalah: (a) adanya perilaku masyarakat yang tidak bertanggung jawab; (b) kurangnya penjagaan dari tenaga pengamanan hutan; dan (c) lemahnya penegakan hukum di bidang kehutanan;

(2) Aktivitas pembukaan lahan untuk usaha tanaman pertanian; (3) Pencurian kayu khususnya di dalam *resort* Labuhan Merak, meliputi: kayu bakar dan recek, rumput, gadung, buah asam, buah kemiri, gebang dan ikan hias; (4) Penggembalaan liar yang merupakan permasalahan yang cukup menonjol terutama di daerah Karangtekok, Labuhan Merak, dan Balanan luas wilayah

3.450 ha. Jenis ternak yang digembalakan yaitu sapi dan kambing rata-rata 1.447 ekor ternak setiap hari.

Deforestasi hutan tidak hanya terjadi pada hutan tropis, tetapi juga terjadi pada hutan kemasyarakatan (HKM) yang berada sekitar 10 km dari tepi wilayah hutan, hingga mencapai 3,8 juta ha per tahun, atau berarti 7,2 ha per menit.

Kerusakan hutan juga terjadi di TN Baluran seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Hutan Baluran terancam kelestariannya dan cenderung mengalami kerusakan, dikarenakan hutan Baluran terletak berbatasan langsung dengan lima desa penyangga, meliputi desa: Wonorejo, Sumber Waru, Sumber Anyar, Watu Kebo, dan Bajul Mati. Masyarakat desa penyangga kerap kali memanfaatkan hasil sumberdaya hutan sebagai sumber mata pencaharian dan menjadi penyebab ketergantungan yang berdampak pada menurunnya kelestarian kawasan itu sendiri (Nugroho, *et al.*, 2008; Ujud, 2015; Arief, 1994).

Motivasi masyarakat memanfaatkan produk hutan sebagai tempat mencari sumber kehidupan, dan dikarenakan adanya desakan kebutuhan ekonomi. Keadaan ekonomi yang kurang baik dapat menimbulkan sikap ketergantungan masyarakat terhadap produk sumberdaya hutan semakin tinggi. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, merupakan hal yang sangat penting adanya.

Darusman (2002), mengatakan pentingnya program partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, adalah: (1) masyarakat merupakan bagian integral dari ekosistem hutan; (2) masyarakat sebagai bagian yang sangat besar dari subyek dan obyek pembangunan; (3) masyarakat sebagai pihak yang selama ini terpinggirkan dalam pembangunan; dan (4) masyarakat merupakan kekuatan yang sangat besar dan signifikan baik secara positif maupun negatif terhadap keberadaan kawasan hutan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi seseorang meliputi: adanya kebutuhan, motivasi, struktur, dan stratifikasi sosial dalam masyarakat.

Seseorang akan berpartisipasi apabila dapat memenuhi kebutuhan akan kepuasan, mendapatkan keuntungan dan dapat meningkatkan statusnya.

Usaha mengatasi permasalahan dan gangguan di bidang kehutanan, maka pihak *State Forest Company* dalam hal ini adalah Perhutani, menginisiasikan adanya program kehutanan sosial (*social forestry program*). *Social Forestry Program* yang lebih dikenal Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

dengan pendekatan kesejahteraan/kemakmuran (*Prosperity Approach/PA*) pada tahun 1970. Setahun berikutnya dibentuklah pembangunan masyarakat desa hutan (PMDH) atau *Forest Village Community Development* pada tahun 1980.

Kedua program ini mempunyai perhatian yang sama dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pengelolaan lahan hutan.

Berdasarkan fenomena diatas motivasi peneliti melakukan penelitian ini adalah: (a) menganalisis apakah rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan kurang optimalnya pengelolaan hutan di TN Baluran; dan (b) memberi sumbangan pemikiran dalam hal strategi menjaga dan melestarikan kawasan konservasi yang ada di Propinsi Jawa Timur berdasarkan fungsi dan perananan TN Baluran sebagai kawasan konservasi.

Penelitian yang mengkaitkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan telah banyak dilakukan, khususnya yang berhubungan dengan variabel yang memiliki pengaruh tingkat partisipasi masyarakat.

Berdasarkan studi empiris, beberapa peneliti mengatakan bahwa hubungan kelembagaan kehutanan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan adalah karena keeratan hubungan kelembagaan kehutanan

(dalam hal ini adalah perhutani) dengan masyarakat (Baynes, *et al.*, 2015; Akamani & Hall, 2015; Muro & Namusonge, 2015; dan Lise, 2000). Hubungan kelembagaan dilihat dari aspek keeratan hubungannya, selain berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat, juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Alasannya bahwa hubungan kelembagaan yang baik, merupakan ciri-ciri dari *good governance*. Peningkatan kualitas kelembagaan sebagai *good governance* akan mampu menciptakan keamanan, kepercayaan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Wagener, 2004), dan Akib, *et al.*, 2016).

Sejumlah peneliti ada yang menyatakan bahwa pengelolaan hutan kemasyarakatan memerlukan adanya insentif program partisipasi bagi masyarakat. Insentif program partisipasi selain diimplementasikan pada hutan kemasyarakatan, juga pada pengelolaan hutan negara sejak awal abad ke-19 dengan istilah yang populer "Tumpang Sari". Penelitian tentang insentif program partisipasi yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dilakukan oleh Adhikari, *et al.* (2014); Djamhuri, (2012); dan Kaseya & Kihonge, (2016). Insentif program partisipasi ternyata berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Rahut, *et al.*, 2015; William & Elias, 2013; Das & Sarker, 2010) yang dilakukan dengan perbedaan pengukuran insentif program partisipasi antar peneliti.

Peneliti lainnya mengatakan bahwa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proyek pembangunan adalah karena adanya potensi modal sosial sebagaimana dilakukan oleh Sara, *et al.* (2011), dan Sharpe (2012). Modal sosial juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dalam suatu proyek pembangunan. Potensi modal sosial dalam *trust* mengakar dalam faktor kultural (etika, dan moral yang berdampak positif bagi kesejahteraan ekonomi, serta pembangunan lokal), bahkan memainkan peran penting dalam manajemen lingkungan (Grootaet, 1999; dan Narayan & Pritchett, 1997), yang dilakukan dengan pengukuran yang berbeda-beda.

Proses *social learning* berpeluang adanya tukar pikiran, berbagi informasi dan pengetahuan yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat (Fernandez, *et al.*, 2008; Berkes, 2009; dan Muro & Jeffry, 2012). Proses dalam *social learning* memungkinkan adanya peningkatan kreatifitas dan produktifitas masyarakat yang berpengaruh terhadap kesejahteraan (Hemerijck, 2005; dan Yamauchi, 2005).

Kesejahteraan masyarakat dominan memicu partisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan. Dasar pertimbangannya bahwa kesejahteraan masyarakat dapat menciptakan *sense of community* dan *sense of belonging* (Rahut, *et al.*, 2015; dan Akamani & Hall, 2015).

Berdasarkan penelitian dari Rahut, *et al.* (2015); dan Akamani & Hall (2015), maka variabel kesejahteraan masyarakat dalam penelitian ini, diposisikan sebagai variabel mediasi pengaruh hubungan kelembagaan, insentif pogram partisipasi, modal sosial, dan *social learning* terhadap partisipasi masyarakat. Alasannya adalah dengan dimediasi oleh kesejahteraan masyarakat sebagaimana disarankan oleh Rahut, *et al.* (2015), dan Akamani & Hall (2015), maka pengaruh masing-masing variabel terhadap partisipasi masyarakat, akan memiliki nilai signifikansi yang lebih besar melalui jalur mediasi variabel kesejahteraan masyarakat, daripada pengaruh secara langsung terhadap partisipasi masyarakat. Peran atau efek mediasi variabel kesejahteraan masyarakat, diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar, baik terhadap partisipasi masyarakat, maupun terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Penelitian masing-masing variabel diatas telah banyak yang meneliti, dan dilakukan dalam hubungan model yang terpisah-pisah, sehingga masih timbul beberapa pertanyaan penting yang belum terjawab: (1) apakah tiap-tiap variabel prediktor tersebut jika digabung dalam satu kesatuan model hubungan yang

lengkap (*integrative*), masing-masing masih tetap berpengaruh signifikan?; (2) bagaimana urutan besar pengaruh tiap-tiap variabel untuk mengkaitkan dengan partisipasi masyarakat?. Pertanyaan-pertanyaan tersebut belum terjawab karena belum diteliti, sehingga menjadi celah penelitian untuk diteliti lebih lanjut; dan (3) kesenjangan penelitian timbul karena beberapa peneliti menggunakan variabel yang sama yaitu variabel insentif program partisipasi dan modal sosial yang dilakukan dengan pengukuran yang berbeda-beda sebagai berikut.

Penggunaan variabel insentif program partisipasi, dengan pengukuran yang berbeda-beda dilakukan oleh Adhikari, *et al.* (2014), mengukur variabel insentif program partisipasi dengan 6 (enam) indikator meliputi: kemudahan akses ke hutan, pendapatan rumah tangga, keamanan sosial, infrastruktur masyarakat lokal, hak milik (*property rights*) sumberdaya hutan bagi kelompok *community forest user's group/CFUG*, dan pembayaran jasa pelayanan lingkungan. Indikator insentif program partisipasi yang digunakan oleh Adhikari, *et al.* (2014) tidak semua cocok untuk diterapkan pada obyek penelitian hutan konservasi di TN Baluran. Beberapa indikator yang tidak cocok dan tidak dapat diterapkan pada obyek penelitian kawasan hutan konservasi TN Baluran, meliputi: (1) kemudahan akses ke hutan, hal ini dikarenakan jika semua masyarakat diberi kemudahan akses ke hutan, maka hutan akan berpotensi besar mengalami degradasi akibat adanya eksploitasi pemanfaatan sumber daya hutan oleh masyarakat; (2) infrastruktur masyarakat lokal berupa sarana jalan atau pembangunan sarana umum untuk memudahkan ke hutan, hal ini juga tidak tepat diterapkan karena dengan pembangunan infrastruktur masyarakat lokal akan memicu semakin tingginya tingkat kriminalitas di bidang kehutanan; dan (3) hak milik (*property rights*) sumberdaya hutan bagi kelompok *community forest user's group/CFUG*, hal ini juga tidak dapat diterapkan, alasannya adalah jika hutan dijadikan sebagai hak milik masyarakat, maka pengelolaan hutan tidak

dapat dikuasai oleh negara atau pemerintah sebagai pengambil kebijakan untuk dimanfaatkan kemakmuran rakyat, sehingga bertentangan dengan UUD 1945 pasal 33, ayat 2 dan 3. Indikator yang masih dapat diterapkan, meliputi: (1) pendapatan rumah tangga, sudah terwakili dan dijadikan indikator variabel kesejahteraan dalam penelitian ini; (2) keamanan sosial, sudah terwakili dalam pengukuran modal sosial dengan salah satu indikatornya adalah kesepakatan terhadap norma sosial; dan (3) pembayaran jasa pelayanan lingkungan, sudah terwakili dengan insentif uang tunai yang diberikan oleh pihak pengelola hutan kepada masyarakat anggota Sentra Penyuluhan Kehutan Pedesaan (SPKP) yang diperoleh dari hasil jasa pelayanan lingkungan.

Djamhuri (2012), mengukur insentif program partisipasi dengan 7 (tujuh) indikator meliputi: populasi masyarakat desa hutan, wilayah pemangku hutan/WPH, keanggotaan dalam lembaga masyarakat desa hutan/LMDH, persentase Petani Tumpang Sari sebagai anggota LMDH, jumlah lembaga LMDH yang baru dibentuk, jumlah pohon yang ditanam, dan kehadiran dalam rapat anggota LMDH. Berdasarkan pengukuran variabel insentif program partisipasi yang dilakukan oleh Djamhuri (2012), sebagian besar indikatornya dapat diterapkan pada obyek penelitian di TN Baluran, hanya saja tidak ada Petani Tumpang Sari. Indikator populasi masyarakat desa hutan, WPH, dan LMDH, sudah terwakili dengan populasi masyarakat desa penyangga sebagai anggota kelompok Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) yang juga sebagai anggota LMDH sebagai responden dalam penelitian ini. Sementara

Kaseya & Kihonge (2016), mengukur insentif program partisipasi dengan 2 indikator terdiri dari: insentif uang transport, dan insentif uang makan.

Pengukuran insentif program partisipasi yang dilakukan oleh Kaseye & Kihonge (2016), dapat diterapkan pada obyek penelitian ini, dengan diganti istilah insentif uang tunai (*cash payement*) dalam penelitian ini.

Berdasarkan penelitian dari para peneliti tersebut, maka penelitian variabel insentif program partisipasi dalam penelitian ini adalah untuk menguji peranan insentif program partisipasi bagi kelompok masyarakat anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) sebagai kepanjangan tangan lembaga TN Baluran, bertujuan untuk meningkatkan partisipasinya dalam pengelolaan hutan. Pengukuran insentif program partisipasi dengan indikatornya dalam penelitian ini, tetap mengacu pada peneliti sebelumnya, memilih indikator yang cocok dan dapat diterapkan pada obyek penelitian atau indikatornya sudah terwakili dengan kondisi obyek penelitian. Hasil pengukuran variabel insentif program partisipasi dalam penelitian ini adalah lebih tepat dibandingkan peneliti sebelumnya. Indikator insentif program partisipasi dalam penelitian ini, sebanyak empat indikator, meliputi: (1) insentif pelatihan; (2) insentif peralatan pertanian; (3) insentif uang tunai; dan (4) insentif pengelolaan lahan pertanian. Alasan pemilihan variabel insentif program partisipasi dengan indikator sebagaimana telah disebutkan, dikarenakan: (1) insentif pelatihan sebagai salah satu bentuk *reward* bagi anggota masyarakat sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan partisipasi dan kinerja tim/kelompok melalui program pelatihan atau diklat (Krajewski, 1999); (2) insentif peralatan pertanian, merupakan bantuan infrastruktur berupa peralatan pertanian bagi masyarakat dengan tujuan untuk menunjang dalam peningkatan produktifitas hasil pertanian, sehingga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat; (3) insentif uang tunai atau *cash payment*, baik yang didapatkan karena ikut berpartisipasi dalam program pengelolaan hutan, menghadiri undangan rapat yang diadakan oleh pihak pengelola, ataupun pemberian uang tunai dari program bantuan pemerintah program pemberdayaan sebagai suatu strategi meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat; dan (4) insentif pengelolaan lahan merupakan bentuk akses pengolahan lahan hutan sebagai lahan pertanian, yang diberikan kepada

anggota masyarakat dalam wujud hak guna usaha (HGU) yang tidak dapat diperjual belikan kepada pihak lain.

Penggunaan variabel modal sosial dengan pengukuran yang berbeda-beda dilakukan oleh Grootaet (1999); dan Narayan & Pritchett (1997). Grootaet (1999), mengukur modal sosial melalui lima variabel independen dan enam indikator.

Variabel independen modal sosial meliputi: (1) sumberdaya modal sosial keluarga, (2) sumberdaya manusia keluarga, (3) sumberdaya keluarga lainnya, (4) karakteristik keluarga, dan (5) karakteristik wilayah/desa. Indikator modal

sosial meliputi: (1) kepadatan keanggotaan dalam organisasi/kelompok, (2) heterogenitas kelompok (*gender*, pendidikan, umur, agama, kekerabatan, pekerjaan keluarga, dan status ekonomi), (3) kehadiran dalam pertemuan, (4)

tingkat keaktifan dalam pengambilan keputusan, (5) pembayaran iuran, dan (6) orientasi masyarakat. Narayan & Pritchett (1997), mengukur modal sosial dengan tiga variabel dan tiga indikator. Variabel modal sosial meliputi: (1) heterogenitas

kelompok, (2) *inclusiveness* kelompok, dan (3) performa kelompok. Indikator modal sosial yang diukur meliputi: (1) keanggotaan dalam kelompok, (2) karakteristik kelompok; (3) nilai dan tingkah laku individu.

Pengukuran modal sosial dalam penelitian ini tetap mengacu pada Grootaet (1999) dan Narayan & Pritchett (1997), dan tetap menyesuaikan dengan kondisi obyek penelitian yang bertujuan menghasilkan pengukuran

modal sosial yang lebih tepat. Pengukuran modal sosial sebagaimana dilakukan oleh Grootaet (1999), dan Narayan & Pritchett (1997), mempunyai tujuan yang sama yaitu mengurangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian modal sosial dalam penelitian ini adalah menyempurnakan pengukurannya sebagaimana telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Pengukuran modal sosial dalam penelitian ini adalah untuk menguji peranan lembaga kehutanan TN Baluran sebagai institusi lokal dalam hal menyediakan

pelayanan kepada masyarakat anggota SPKP, melalui keeratan hubungan lembaga kehutanan yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan konservasi. Indikator modal sosial dalam penelitian ini berjumlah lima indikator, meliputi: (1) sikap tolong menolong dengan tetangga; (2) kesepakatan terhadap norma sosial; (3) interaksi jejaring masyarakat dengan lembaga kehutanan; (4) tingkat kepercayaan pada anggota kelompok masyarakat; dan (5) bantuan kelompok desa penyangga.

Penelitian ini juga menggunakan variabel-variabel yang telah digunakan oleh para peneliti sebelumnya, yang dibentuk dalam satu kesatuan model hubungan yang lengkap. Alasan pemilihan variabel tersebut adalah adanya indikasi bahwa variabel hubungan kelembagaan, insentif program partisipasi, modal sosial, *social learning*, dan kesejahteraan masyarakat merupakan variabel prediktor yang tepat dan sesuai dengan kondisi obyek penelitian untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan di TN Baluran.

Variabel-variabel yang telah digunakan peneliti sebelumnya, dimasukkan dalam satu kesatuan model, maka sumbangan masing-masing variabel terhadap partisipasi masyarakat dapat dikaji lebih mendalam. Jika ke enam variabel prediktor partisipasi masyarakat, disusun dalam satu model, maka peran atau pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat dapat diketahui lebih jelas.

Orisinalitas penelitian ini adalah: (1) menguji bangunan model *integrative* yang digunakan dalam penelitian ini, dengan tujuan untuk membuktikan apakah hubungan kelembagaan, insentif program partisipasi, modal sosial, *social learning*, dan kesejahteraan masyarakat masing-masing terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat; dan (2) menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dilihat dari aspek perencanaan program,

pelaksanaan, penerimaan manfaat, evaluasi dan monitoring program pengelolaan hutan di TN Baluran.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian teoritis dan studi empiris yang telah disampaikan, maka dikembangkan sebuah penelitian yang ditujukan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh variabel prediktor partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan konservasi di TN Baluran Situbondo-Jawa Timur.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1a: Apakah hubungan kelembagaan berpengaruh positif signifikan terhadap partisipasi masyarakat?
- 1b: Apakah kesejahteraan masyarakat memediasi pengaruh hubungan kelembagaan terhadap partisipasi masyarakat?
- 2a: Apakah insentif program partisipasi berpengaruh positif signifikan terhadap partisipasi masyarakat?
- 2b: Apakah kesejahteraan masyarakat memediasi pengaruh insentif program partisipasi terhadap partisipasi masyarakat?
- 3a: Apakah modal sosial berpengaruh positif signifikan terhadap partisipasi masyarakat?
- 3b: Apakah kesejahteraan masyarakat memediasi pengaruh modal sosial terhadap partisipasi masyarakat?
- 4a: Apakah *social learning* berpengaruh positif signifikan terhadap partisipasi masyarakat?
- 4b: Apakah kesejahteraan masyarakat memediasi pengaruh *social learning* terhadap partisipasi masyarakat?

5. Apakah kesejahteraan masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat?

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah:

1a: Menganalisis dan menjelaskan pengaruh hubungan kelembagaan terhadap partisipasi masyarakat.

1b: Menganalisis dan menjelaskan kesejahteraan masyarakat didalam memediasi pengaruh hubungan kelembagaan terhadap partisipasi masyarakat.

2a: Menganalisis dan menjelaskan pengaruh insentif program partisipasi terhadap partisipasi masyarakat.

2b: Menganalisis dan menjelaskan kesejahteraan masyarakat didalam memediasi pengaruh insentif program partisipasi terhadap partisipasi masyarakat.

3a: Menganalisis dan menjelaskan pengaruh modal sosial terhadap partisipasi masyarakat.

3b: Menganalisis dan menjelaskan kesejahteraan masyarakat didalam memediasi pengaruh modal sosial terhadap partisipasi masyarakat.

4a: Menganalisis dan menjelaskan pengaruh *social learning* terhadap partisipasi masyarakat.

4b: Menganalisis dan menjelaskan kesejahteraan masyarakat didalam memediasi pengaruh *social learning* terhadap partisipasi masyarakat.

5. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh kesejahteraan masyarakat terhadap tingkat partisipasi masyarakat.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini memperkuat pengembangan teori hubungan kelembagaan, insentif program partisipasi, modal sosial, *social learning*, kesejahteraan masyarakat, dan partisipasi masyarakat, dengan melakukan pengukuran yang lebih tepat yaitu menyesuaikan obyek penelitian yang dibangun dalam satu kesatuan hubungan model yang lengkap (*integrative*).

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan oleh pemangku kepentingan untuk memberikan informasi kepada pengelola hutan di TN Baluran, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal bahwa: (a) partisipasi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat sebagai elemen kunci suksesnya program pengelolaan hutan konservasi; (b) pentingnya peningkatan partisipasi masyarakat dibidang pengamanan hutan, pengembangan dan restorasi kawasan serta jasa lingkungan dan pelayanan pengunjung; serta (c) sebagai bahan kajian bagi institusi TN Baluran dan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

Sub bab ini membahas tentang: sejarah perkembangan pemikiran dalam ilmu manajemen, strategi pengelolaan sumberdaya manusia, strategi pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, hubungan kelembagaan kehutanan, insentif program partisipasi, modal sosial, *social learning*, kesejahteraan masyarakat, serta hasil studi empiris.

2.1.1 Perkembangan Dalam Strategi Manajemen

Manajemen strategi sebagai bidang ilmu yang bersifat *interdisciplinery* dan berkembang cepat seiring dengan perkembangan ilmu: (1) pemasaran; (2) ekonomi mikro; (3) ekonomi makro; (4) perilaku organisasi, dan (5) ilmu-ilmu lain. Perkembangan manajemen strategi, juga sejalan dengan perubahan lingkungan, seperti: (1) persaingan di industri; (2) perilaku konsumen; dan (3) teknologi. Perusahaan harus mampu menyesuaikan perubahan supaya dapat bertahan dalam dunia bisnis. Hal ini dikarenakan jika tidak beradaptasi, maka akan terlindas oleh perubahan tersebut. Untuk tetap dapat bertahan, banyak konsep yang diperkenalkan oleh para pakar (Wandrial, Son, 2004).

Evolusi rencana strategi (*strategic planning*), meliputi; (1) *budgeting and financial control*; (2) *long-range planning*; (3) *business strategic planning*; (4) *corporate strategic planning*; (5) perubahan pandangan terhadap segmentasi bisnis; dan (6) *strategic management* (Wandrial, Son, 2004).

Penjelasan dari masing-masing evolusi rencana strategi adalah sebagai berikut:

A. Budgeting and financial control (Pengawasan Anggaran dan Keuangan)

Arnoldo (1984), mengatakan bahwa *budgeting and financial control* (pengawasan anggaran dan keuangan), merupakan: (1) permulaan *managerial system*; (2) prosedur formal untuk menetapkan proses administrasi yang digunakan oleh para manajer dalam menjalankan perusahaan; (3) *budgets* merupakan proyeksi dari *revenue* dan *costs* dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun); (4) *master budget* dipakai untuk memonitor perkembangan bisnis perusahaan, meliputi: *sales, manufacturing, administrative activities, investment, dan cash management*; (5) *financial control* merupakan suatu sistem administrasi sebagai respons terhadap kebutuhan manajemen kas yang lebih baik, efisiensi dalam operasional, penurunan biaya, dan keterbatasan sumber daya keuangan; dan (6) penggunaan rasio keuangan sebagai suatu alat ukur, meliputi: (a) *liquidity ratios*; (b) *leverage ratios*; (c) *profitability ratios*; (d) *turnover ratios*; dan (e) *common stock security ratios*.

B. Long-Range Planning (Rencana Jangka Panjang)

Long-range planning mengacu pada: (1) organisasi yang telah memahami tentang *objectives, goals, program, dan budget*; (2) muncul sebagai respons dari pertumbuhan pasar yang belum pernah terjadi sebelumnya; (3) *starting point* merupakan *multi year forecast* dari penjualan perusahaan; (4) *forecasting* berdasarkan pada proyeksi historis, biasanya lima tahun; (5) dalam *long-range planning*, pertama kali diperkenalkan penggunaan teknik *pay-back* dan *discounted cash flow*; (5) *long-range planning*, dapat dijalankan jika: (a) pertumbuhan pasar semakin naik; (b) tren yang dapat diprediksi; (c) perusahaan memiliki satu bisnis

tunggal; dan (d) tingkat persaingan yang relatif rendah; (6) jika salah satu dari kondisi tersebut tidak dapat terpenuhi, maka *long-range planning* tidak mampu berjalan dengan baik; dan (7) *long-range planning* juga tidak dapat bekerja dengan baik, jika terjadi perubahan lingkungan eksternal dan tingkat persaingan yang semakin ketat (Arnoldo, 1984).

C. Business Strategic Planning

Arnoldo (1984), mengatakan bahwa *business strategic planning*, pertama kali muncul pada tahun 1960-an. *Business strategic planning* terjadi karena: (1) adanya perubahan lingkungan penting di Amerika Serikat. (2) bergesernya perhatian manajerial dari produksi ke pemasaran; (3) terdapat peningkatan pada diversifikasi perusahaan melalui proses akuisisi; (4) munculnya konsep segmentasi bisnis, membagi-bagi bisnis dalam suatu unit atau entitas tertentu yang independen dan *autonomous*, entitas tersebut yang sekarang dikenal dengan *strategic business unit*; (5) dengan munculnya *strategic business unit*, maka memungkinkan manajer secara bebas mengontrol bisnis yang dibawahinya, bebas menentukan strategi yang tepat, memiliki konsumen tertentu, menghadapi pesaing tertentu, tidak harus tergantung dengan bisnis *strategic business unit* lainnya; (6) munculnya *business portfolio approach*, dengan model yang digunakan seperti: (a) *Boston Consulting Group Approach* (BCG); dan (b) *General Electric (GE) Approach*; (7) mulai diperkenalkan dan digunakannya konsep analisis persaingan model dari Porter, meliputi: (a) *Five forces porter industry analysis: competing among firms rivalry, bargaining power of buyer, bargaining power of supplier, new entrants, substitute product*; (b) *Porter's generic strategy: overall cost leadership, differentiation, focus*; (8) beberapa elemen dasar dalam *business strategic planning*, meliputi: (a) misi dari bisnis; (b) analisis lingkungan: eksternal dan internal; (c) formulasi strategi bisnis; (d) mendefinisikan dan evaluasi program;

(e) alokasi sumber daya; dan (f) *budgeting*, program pendanaan strategis; (9) *formal business strategic planning process*, meliputi: (a) *the mission of the business*; (b) *formulation of business strategy and broad action program*; (c) *formulation and evaluation of specific actions program*; (d) *resources allocation and definition of performance measurements for management control*; (e) *budgeting at business level*; (f) *budgeting considerations and approval of strategic and operational funds*; (10) *business strategic planning* juga merupakan suatu proses pembelajaran; dan (11) *sharing* dalam hal *corporate value*, *corporate philosophy*, pemahaman mendalam terhadap kumpulan bisnis dari perusahaan, serta kompetensi manajerial dan profesionalisme.

D. Corporate Strategic Planning

Corporate strategic planning atau rencana strategi perusahaan ditandai (Arnoldo, 1984), adanya: (1) perkembangan di bidang elektronik yang berdampak pada perubahan yang pesat di bidang teknologi; (2) bisnis dari perusahaan yang berhadapan dengan pesaing baru, yaitu Jepang menjadi pesaing terkuat; (3) proyeksi pasar internasional terjadi karena adanya ketidakpastian yang disebabkan oleh: (a) inflasi, (b) nilai tukar mata uang asing, dan (c) perbedaan kondisi perekonomian Negara di dunia; (4) ketidakpastian muncul disebabkan karena adanya perilaku yang tegas dari kelompok masyarakat dan menuntut perhatian besar dari perusahaan terhadap lingkungannya. Kelompok dalam hal ini adalah *stakeholders*, meliputi: (a) pemegang saham, (b) *creditor*, (c) klien, (d) *supplier*, (e) manager, (f) karyawan, (g) pemerintah, (h) masyarakat, (i) konsumen, dan (j) aktivis lingkungan hidup; (5) tekanan lingkungan eksternal menuntut perusahaan untuk mempertimbangkan kembali kebijakan alokasi atau *sharing* sumber daya, meliputi: (a) fasilitas manufakturing, (b) jaringan distribusi, dan (c) tenaga penjualan yang dimiliki oleh masing-masing

strategic business unit. Pertimbangan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi untuk memenangkan persaingan.

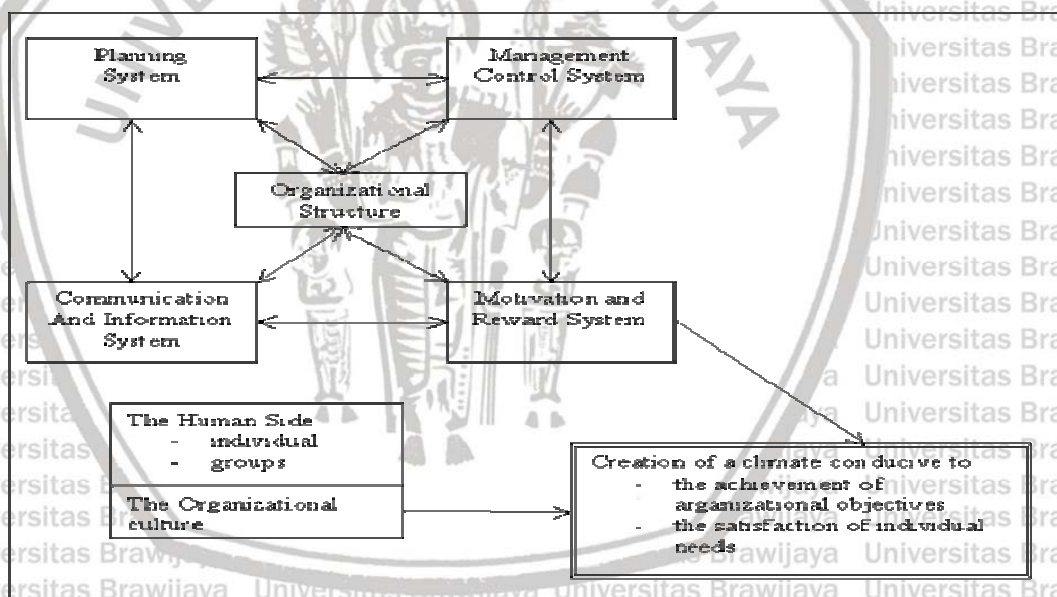
E. Perubahan Pandangan terhadap Segmentasi Bisnis

Perubahan pandangan terhadap segmentasi bisnis (Wandrial, Son, 2004), ditandai dengan: (1) munculnya upaya untuk menciptakan kesesuaian dan konsistensi antara fokus strategi dengan segmen pasar yang berbeda dengan struktur organisasi fungsional. Tim/kelompok dalam struktur organisasi dapat menjembatani antara struktur dan strategi; (2) *Interrelationship* antara satu *strategic business unit* dengan lainnya, yaitu *shared resources* dan *shared concerns*. Digunakannya konsep *value-added chain* untuk mengidentifikasi *shared resources* dan *shared concerns*; (3) dalam proses *corporate strategic planning* terdapat tiga level hierarki dari *planning*, meliputi: (a) *corporate level*, (b) *business level*, dan (c) *functional level*; (4) *corporate strategic planning process* atau proses rencana strategi perusahaan, meliputi: (a) *the vision of the firm: corporate philosophy, mission of the firm and identification of strategic business unit and their interactions*; (b) *strategic posture and planning guidelines: corporate strategic thrust, corporate performance objectives and planning challenge*; (c) *the mission of the business: business scope and identification of products market segments*; (d) *formulation of business strategy and broad action programs*; (e) *formulation of functional strategy*; (f) *consolidation of business and functional strategies*; (g) *definition and evaluation of specific action program at the business level*; (h) *definition and evaluation of specific action program at the functional level*; (i) *resources allocation and definition of performance measurements for management control*, (j) *budgeting at business level*; (k) *budgeting at functional level*; dan (l) *budgeting consolidations and approval of strategic and operational funds*.

F Strategic Management

Menurut Arnoldo (1984), bahwa *strategic management*, ditandai dengan adanya: (1) *strategic planning* tidak akan berguna bila tidak ada dukungan, masukan, dan komitmen dari *lower level manager*; (2) *planning* harus terintegrasi dengan sistem administrasi yang ada di perusahaan, seperti *management control*, komunikasi dan informasi, serta motivasi dan *rewards*; (3) sistem administrasi dan struktur organisasi harus dapat dikoordinasikan dengan baik dengan *culture* (budaya) dari perusahaan. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan modal *strategic management* (Gambar 2.1).

Gambar 2.1
Model Strategic Management



Sumber: Arnoldo, 1984.

Gambar 2.1, menjelaskan bahwa *strategic management* berawal dari sistem rencana (*planning system*) perusahaan dan sistem pengawasan manajemen (*management control system*). *Planning system*, dan *management control system*, memerlukan adanya struktur organisasi. Struktur organisasi akan menjadi baik, jika tersedianya sistem informasi komunikasi (*communication and information*

system), dan sistem *reward* dan motivasi (*motivation and reward system*).

Communication and information system, dan *motivation and reward system*

berhubungan erat dalam penciptaan iklim yang kondusif untuk: (1) pencapaian

tujuan organisasi; dan (2) kepuasan kebutuhan individu, baik dilihat dari sisi

individu, kelompok, dan budaya organisasi.

G. Pandangan Baru Tentang Strategi

Prahald (1990), menyatakan bahwa menciptakan masa depan adalah lebih

menantang, daripada mengejar ketertinggalan dengan kita harus membuat sendiri

peta jalan kita. Tujuannya bukan sekedar meniru produk dan proses pesaing serta

meniru metodenya, melainkan mengembangkan titik pandang yang independen

tentang peluang masa depan dan bagaimana memanfaatkannya.

Pandangan tentang strategi sangat berbeda dari pandangan yang dianut di

banyak perusahaan. Pandangan tentang strategi yang menyadari bahwa

perusahaan harus melepaskan sebagian besar masa lalunya sebelum perusahaan

dapat menemukan masa depan. Pandangan tersebut tidaklah cukup dengan

hanya mendapatkan posisi optimal di pasar yang sudah ada; namun masih ada

tantangannya yaitu menanggulangi adanya ketidakpastian dan mengembangkan

wawasan ke depan. Pandangan tentang strategi yang menyadarinya hal

tersebut, sangatlah diperlukan lebih daripada sekedar rencana tahunan tetapi

yang dibutuhkan adalah arsitektur strategik yang memberikan cetak biru untuk

membangun kompetensi yang diperlukan untuk mendominasi pasar masa depan.

Pandangan baru tersebut, tidak perlu memikirkan ketidakcocokan antara

tujuan dan sumber daya tetapi lebih mementingkan penciptaan tujuan abadi

(*stretch goals*) yang menantang para karyawan untuk mencapai apa yang

nampaknya tidak mungkin. Strategi adalah upaya untuk mengatasi kendala

sumber daya melalui kegiatan kreatif tanpa akhir untuk mendapatkan *resource leverage* yang lebih baik.

H. Keunggulan Bersaing

D'Aveni & Robert (1994), mengatakan bahwa pada tahun 1980, Michael Porter dalam bukunya *Competitive Strategy* memberikan suatu teknik untuk menganalisis struktur industri dan lingkungan persaingan serta menyarankan langkah tepat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Keunggulan yang dimiliki perusahaan dapat memenangkan persaingan. Berbagai perusahaan telah menempuh cara yang disarankan Porter untuk mendapatkan keunggulan bersaing. Perusahaan berusaha memperoleh keunggulan bersaing sehingga tingkat persaingan semakin ketat. Keunggulan yang dimiliki ternyata tidak dapat bertahan lama. Persaingan untuk mengungguli antara para pemain dalam suatu industri telah mengubah situasi persaingan dalam industri, dari yang tadinya relatif statis menjadi lebih dinamis, sehingga menyebabkan keunggulan bersaing tidak dapat bertahan lama (*sustainable*) karena keunggulan lainnya yang diciptkan pesaing.

Cara lama melihat keunggulan bersaing, yaitu dengan cara melihat persaingan berada dalam situasi relatif statis. Keunggulan bersaing dalam situasi statis tersebut, diperoleh dari keberhasilan dalam empat arena kunci persaingan (D'Aveni & Robert, 1994), meliputi: (1) harga dan kualitas (*price and quality*); (2) waktu dan pengetahuan (*time dan know-how*); (3) daerah kekuasaan (*strongholds*); dan (4) dompet tebal (*deep pocket*).

Pandangan dinamis tentang keunggulan bersaing, menurut D'Aveni & Robert (1994), didasarkan pada tiga prinsip dasar, meliputi: (1) interaksi strategis yang dinamis; (2) strategi adalah relatif; dan (3) kecenderungan dalam empat arena persaingan.

Mintzberg berpendapat bahwa dalam memformulasikan strategi akan lebih efektif jika proses formulasi strategi tidak hanya berjalan secara mekanis tetapi lebih dari itu. Strategi diformulasikan melalui proses kreatif yang dikerjakan oleh orang yang ahli dan memiliki keharmonisan antara keterampilan dan bakat.

Hal itulah yang merupakan esensi dari *crafting strategy* (D'Aveni & Robert, 1994).

D'Aveni & Robert (1994), menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam *crafting strategy*, meliputi: (1) strategi adalah gambaran antara kapasitas perusahaan di masa lalu dan kemampuan perusahaan memperoleh peluang yang muncul di masa depan serta menghadapi ancaman yang muncul dalam lingkungan bisnis; (2) strategi dapat ditentukan tidak hanya disengaja melalui suatu proses yang mekanis dan sistematis tetapi sering muncul dari proses kreatif dengan pola yang terkadang tidak sistematis; (3) strategi yang efektif dikembangkan melalui berbagai cara yang cenderung tidak lazim tetapi justru efektif dalam menentukan strategi yang tepat bagi perusahaan; (4) dengan kondisi lingkungan yang semakin mengalami perubahan, maka penerapan manajemen strategi konvensional menjadi tidak efektif. Reorientasi strategi terjadi dengan cepat, sehingga muncul istilah yang disebut *quantum leap*.

Penekanannya terletak pada kemampuan perusahaan dalam mengembangkan strategi baru dan kemampuan organisasi dalam beradaptasi dengan munculnya orientasi bisnis baru; (5) mengelola strategi, seorang ahli strategi digambarkan sebagai perencana atau penentu visi perusahaan yang harus memiliki kemampuan untuk: (a) mampu mengelola kestabilan sehingga dapat meminimalkan faktor ketidakpastian; (b) mampu mendeteksi suatu tren yang tidak umum atau tidak biasa, sehingga tantangan besar dalam *crafting strategy* adalah dalam mendeteksi munculnya tren yang tidak umum atau tidak biasa dan memasukkannya dalam memprediksi bisnis di masa depan; (c) memiliki

pengetahuan yang mendalam mengenai bisnis yang dihadapinya, bukan hanya pengetahuan intelektual dan kemampuan analisis terhadap fakta dan angka tetapi keterampilan pribadi, bakat, dan pemahaman yang mendalam mengenai bisnis yang sangat menentukan keberhasilan seseorang dalam mengelola strategi;

(d) mampu mengelola pola yang ada, sehingga dengan kemampuan tersebut dapat mendeteksi pola yang ada dan membantu perusahaan dalam menentukan bentuknya. Organisasi yang kompleks berarti mengembangkan suatu struktur yang fleksibel, mempekerjakan sumber daya manusia yang kreatif, mendefinisikan strategi dalam konteks yang luas, dan memperhatikan terhadap pola yang mungkin muncul; dan (e) mampu merekonsiliasi perubahan yang terjadi dengan kontinuitas.

2.1.2 Strategi Pengelolaan Sumberdaya Manusia

Menurut Krajewski (1999), dalam bukunya yang berjudul "*Operations Management Strategy and Analysis*", berdasarkan konsep *workforce management strategy*, bahwa sumberdaya manusia merupakan hal yang penting sebagai aspek proses teknologi. Kemampuan manajer dan tenaga kerja dan bagaimana mereka diorganisir, dilatih, dan dimotivasi, maka dapat memberikan daya saing bagi suatu perusahaan. Organisasi *restructuring* dilakukan dengan tujuan memperbaiki kemampuan perusahaan untuk memenuhi kepuasan pelanggan (Krajewski, 1999:167).

Manajemen sumberdaya manusia yang efektif memerlukan strategi manajemen sumber daya manusia yang koheren dan efektif, meliputi: (1) menetapkan tujuan-tujuan bisnis strategis; (2) mengidentifikasi struktur organisasi yang cocok; (3) mengevaluasi kebutuhan sumberdaya manusia (SDM); (4) mengkonsultasikan dengan pekerja tentang kebutuhan dan strategi; dan (5) mengadopsi dan menerapkan strategi sumber daya manusia (ILO, 2013).

ILO (2013), mengatakan bahwa penetapan tujuan-tujuan bisnis strategi yaitu dengan menetapkan prioritas, rencana dan kegiatan untuk pengelolaan sumber daya manusia. Rencana pengelolaan tenaga kerja harus selaras dengan tujuan bisnis secara keseluruhan. Fokusnya adalah untuk mendapatkan orang yang tepat, di tempat yang tepat, dan pada waktu yang tepat.

Tahap kedua yaitu mengidentifikasi struktur organisasi yang cocok, yaitu bahwa struktur organisasi mendefinisikan siapa yang melakukan tugas-tugas dan apa yang menjadi tanggung jawab dan akuntabilitas. Struktur organisasi mencerminkan perbedaan pembagian kerja baik vertikal dan horizontal.

Pembagian vertikal mengacu pada hirarki dan otoritas dalam organisasi di tingkat organisasi, dan pelaporan hubungan antara karyawan pada tingkat yang sama.

Pembagian Horizontal mengacu pada pembagian kerja pada tingkat organisasi yang berbeda, dengan mengelompokkan tugas-tugas ke dalam fungsi atau ke dalam departemen. Struktur organisasi harus mendukung tujuan bisnis strategis yang ditetapkan.

Tahap ketiga adalah mengevaluasi kebutuhan sumberdaya manusia (SDM), yaitu untuk mendefinisikan pekerjaan yang dibutuhkan dalam perusahaan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Hasil analisis pekerjaan akan memungkinkan manajer berkonsultasi dengan tenaga kerja untuk menentukan kesenjangan antara situasi perusahaan saat ini dan kebutuhan masa depan tenaga kerja.

Langkah ke-empat adalah mengkonsultasikan dengan pekerja tentang kebutuhan dan strategi, yaitu dengan cara kerjasama tim/kelompok di tempat kerja yang merupakan suatu proses dimana para pekerja dan manajemen berpartisipasi bersama-sama melalui keterlibatan dan diskusi dalam menyelesaikan isu-isu yang menjadi perhatian bersama. Tiga elemen penting untuk mencapai tempat kerja

yang memiliki kerjasama yang efektif, meliputi: (1) komunikasi yang efektif; (2) respek; dan (3) kepercayaan. Konsultasi tidak hanya memberikan saran kepada pekerja atau wakil mereka dari perubahan yang akan dibuat. Konsultasi yang murni dan efektif meliputi: (1) informasi yang relevan tentang masalah bersama dengan pekerja; (2) pekerja diberi kesempatan yang wajar untuk mengekspresikan pandangan mereka mengangkat isu-isu dan berkontribusi terhadap proses pengambilan keputusan tentang bagaimana untuk menangani masalah; (3) pandangan pekerja diperhitungkan; dan (4) pekerja diberi tahu tentang hasil konsultasi secara tepat waktu.

Tahap terakhir adalah mengadopsi dan menerapkan strategi sumber daya manusia, yaitu bahwa untuk merencanakan dan mengelola perkembangan sumber daya manusia dalam organisasi harus memikirkan tahap yang berbeda yang dapat dilakukan seorang pekerja di tempat kerja dari mulai rekrutmen sampai pemisahan dan interaksi antara manajemen dengan para pekerja manapun yang terjadi, meliputi: (1) rekrutmen/seleksi; (2) motivasi staf termasuk remunerasi dan kondisi pekerjaan; (3) pengembangan dan kinerja staf termasuk pelatihan dan manajemen kinerja; (4) pemisahan atau transfer termasuk pemecatan; dan (5) pendekatan.

Tidak ada satupun organisasi yang bebas dari pengaruh lingkungannya. Lingkungan di mana perusahaan beroperasi dapat memiliki dampak yang signifikan pada semua aspek pengelolaan operasi, termasuk bagaimana para pekerja dikelola. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi SDM suatu perusahaan, terdiri dari: faktor internal dan eksternal (Tabel 2.1).

Tabel 2.1
Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi SDM suatu perusahaan

Internal	Eksternal
<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan strategis bisnis • Struktur organisasi • Budaya perusahaan • Kebijakan perusahaan • Hubungan buruh dan setiap perjanjian dan pengaturan yang timbul 	<ul style="list-style-type: none"> • Konteks ekonomi • Kebijakan industri • Perilaku pesaing • Hukum dan peraturan nasional • Hubungan buruh dan setiap perjanjian dan pengaturan yang timbul • Standar Perburuhan Internasional • Masalah demografi dan pasokan tenaga kerja - termasuk pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan kesejahteraan penduduk, peningkatan partisipasi perempuan

Sumber: ILO (2013: 13).

Tabel 2.1, menjelaskan bahwa yang mempengaruhi strategi sumberdaya manusia (SDM) bersumber dari faktor internal dan eksternal, sehingga untuk menciptakan strategi SDM yang efektif, salah satunya pentingnya peranan tim/kelompok untuk terlibat dan berdiskusi dalam menyelesaikan isu-isu yang menjadi perhatian bersama.

Krajewski (1999:167), menyatakan bahwa keterlibatan tenaga kerja, juga dinamakan partisipasi tenaga kerja (*worker participation*) atau keikutsertaan pengelolaan tenaga kerja (*labour management jointness*), merupakan kunci strategi memperbaiki daya saing perusahaan. Salah satu cara untuk menciptakan keterlibatan tenaga kerja, yaitu dengan pemanfaatan peranan tim/kelompok.

Tim/kelompok merupakan kelompok kecil yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai tujuan, kinerja dan pendekatan serta bertanggung jawab terhadap kesuksesan suatu perusahaan (Krajewski, 1999:167).

Penyelenggaraan tim dilakukan karena pada saat ini tekanan persaingan semakin meningkat, para ahli menyatakan bahwa keberhasilan organisasi akan



semakin bergantung pada tim daripada bergantung pada individu-individu yang menonjol. Konsep tim maknanya terletak pada ekspresi yang menggambarkan munculnya sinergi pada orang-orang yang mengikatkan diri dalam kelompok yang disebut dengan tim (Krajewski, 1999:167).

Tracy (2006), menyatakan bahwa tim merupakan kegiatan yang dikelola dan dilakukan sekelompok orang yang tergabung dalam satu organisasi. Tim dapat meningkatkan kerja sama dan komunikasi di dalam dan di antara bagian-bagian perusahaan. Biasanya tim beranggotakan orang-orang yang memiliki perbedaan keahlian sehingga dijadikan kekuatan dalam mencapai tujuan perusahaan.

Robbins dan Timothy (2008), menyatakan tim adalah kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Tim menghasilkan sinergi positif melalui usaha yang terkoordinasi. Kinerja yang dicapai oleh sebuah tim lebih baik daripada kinerja perindividu di suatu organisasi ataupun suatu perusahaan.

Teori yang dikemukakan oleh Robbins dan Timothy (2008), senada dengan teori tim yang efektif yang dikemukakan oleh Smither (1996). Menurut Smither (1996), tim yang efektif adalah sebuah tim yang memungkinkan anggotanya untuk bisa menghasilkan penyelesaian tugas yang lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan hasil kerja perorangan karena hasil kerjanya merupakan hasil dari kontribusi anggota-anggota tim secara bersama-sama.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Burn (2004), yang menyatakan bahwa efektifitas tim atau tim yang efektif merupakan tim kerja yang anggota-anggotanya saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama dan memiliki sikap yang saling mendukung dalam kerjasama tim.

A. Jenis-Jenis Tim

Daft (2000), jenis-jenis *tim* terdiri dari 6 (enam) jenis, yaitu: (1) Tim Formal, yaitu sebuah tim yang dibentuk oleh organisasi sebagai bagian dari struktur organisasi formal; (2) Tim Vertikal, yaitu sebuah tim formal yang terdiri dari seorang manajer dan beberapa orang bawahannya dalam rantai komando organisasi formal; (3) Tim Horizontal, yaitu sebuah tim formal yang terdiri dari beberapa karyawan dari tingkat hirarki yang hampir sama tapi berasal dari area keahlian yang berbeda; (4) Tim dengan Tugas Khusus yaitu sebuah tim yang dibentuk diluar organisasi formal untuk menangani sebuah proyek dengan kepentingan atau kreativitas khusus; (5) Tim Mandiri sebagai sebuah tim yang terdiri dari 5 hingga 20 orang pekerja dengan beragam keterampilan yang menjalani rotasi pekerjaan untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa secara lengkap, dan pelaksanaannya diawasi oleh seorang anggota terpilih; dan (6) Tim Pemecahan Masalah merupakan sebuah tim yang biasanya terdiri dari 5 hingga 12 karyawan yang dibayar perjam dari departemen yang sama, dimana mereka bertemu untuk mendiskusikan cara memperbaiki kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja.

Krajewski (1999:168-169), mengatakan ada tiga jenis tim, meliputi: (1) *problem solving team*, pertama kali dikenalkan pada tahun 1920-an dan menjadi populer pada tahun 1970-an setelah Jepang menerapkannya dengan sukses.

Problem solving team adalah kelompok kecil *supervisor* dan tenaga kerja yang melakukan identifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah produk dan kualitas produk; (2) *special purpose team*, merupakan pemecahan masalah khusus yang berhubungan dengan manajemen, tenaga kerja atau tentang keduanya; dan (3) *self managing teams*, merupakan pemecahan masalah

kelompok kecil tenaga kerja yang bekerja bersama-sama untuk menghasilkan porsi umum, bahkan seluruh produk dan pelayanan.

Hariandja (2006), mengatakan ada 3 (tiga) jenis tim, yaitu: (1) *Problem solving team* yang merupakan sebuah tim yang dibentuk untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul dalam upaya memperbaiki produktivitas. Pada dasarnya, kegiatan tim ini adalah mengidentifikasi berbagai masalah, mendiskusikan bagaimana memecahkan masalah tersebut dan melakukan tindakan untuk memperbaiki. Anggota tim biasanya berasal dari satu departemen yang beranggotakan kurang lebih sepuluh orang yang melakukan pertemuan rutin setiap minggu; (2) *Self managed team* adalah sebuah tim yang dimaksudkan untuk memperbaiki produktivitas dengan memberikan kewenangan pada kelompok untuk mengatur kerja mereka, misalnya menjadwalkan kerja, menentukan metode kerja, mengawasi anggota, memberi *reward* dan hukuman bagi anggota dan merekrut anggota. Keanggotaan ini biasanya berasal dari satu departemen yang melakukan tugas yang sama; dan (3) *Cross functional team* yaitu sebuah tim yang ditujukan untuk menyelesaikan tugas-tugas khusus, misalnya pengembangan produk baru atau perencanaan dan perubahan sistem kompensasi. Anggota tim ini berasal dari berbagai departemen yang memiliki keahlian dan orientasi yang berbeda yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan.

B. Tahap Perkembangan Tim

Mewujudkan keutuhan sebuah tim agar dapat berkinerja dan berdaya guna, yaitu dengan melakukan perancangan tim yang baik. Pentingnya perancangan tim yang baik diuraikan Griffin (2004), dengan membagi ke dalam 4 (empat) tahap perkembangan, yaitu: (1) *Forming* (pembentukan), adalah tahapan di mana para anggota setuju untuk bergabung dalam suatu tim. Kelompok baru dibentuk

maka setiap orang membawa nilai-nilai, pendapat dan cara kerja sendiri-sendiri. Konflik sangat jarang terjadi, setiap orang masih sungkan, malu-malu, bahkan seringkali ada anggota yang merasa gugup. Kelompok cenderung belum dapat memilih pemimpin (kecuali tim yang sudah dipilih ketua kelompoknya terlebih dahulu); (2) *Storming* (merebut hati), adalah tahapan di mana kekacauan mulai timbul di dalam tim. Pemimpin yang telah dipilih seringkali dipertanyakan kemampuannya dan anggota kelompok tidak ragu-ragu untuk mengganti pemimpin yang dinilai tidak mampu; (3) *Norming* (pengaturan norma), adalah tahapan di mana individu-individu dan sub *group* yang ada dalam tim mulai merasakan keuntungan bekerja bersama dan berjuang untuk menghindari *team* tersebut dari kehancuran. Karena semangat kerjasama sudah mulai timbul, setiap anggota mulai merasa bebas untuk mengungkapkan perasaan dan pendapatnya kepada seluruh anggota tim; dan (4) *Performing* (melaksanakan), adalah tahapan merupakan titik kulminasi di mana tim sudah berhasil membangun sistem yang memungkinkannya untuk dapat bekerja secara produktif dan efisien. Pada tahap ini keberhasilan tim akan terlihat dari prestasi yang ditunjukkan.

C. Peranan Anggota Tim

Williams (2008), membagi ada 5 (lima) hal yang menunjukkan peranan anggota dalam membangun kerja tim yang efektif, yaitu: (1) anggota mengerti dengan baik tujuan tim dan hanya dapat dicapai dengan baik pula dengan dukungan bersama, dan oleh karena itu mempunyai rasa saling ketergantungan, rasa saling memiliki tim dalam melaksanakan tugas; (2) anggota menyumbang keberhasilan tim dengan menerapkan bakat dan pengetahuannya untuk sasaran tim, dapat bekerja dengan secara terbuka, dapat mengekspresikan gagasan, opini dan ketidaksepakatan, peranan dan pertanyaannya disambut dengan baik;

(3) anggota berusaha mengerti sudut pandang satu sama lain, didorong untuk mengembangkan keterampilannya dan menerapkan pada pekerjaan, untuk itu mendapat dukungan dari tim; (4) anggota mengakui bahwa konflik adalah hal yang normal, atau hal yang biasa, dan berusaha memecahkan konflik tersebut dengan cepat dan konstruktif (bersifat memperbaiki); dan (5) anggota berpartisipasi dalam keputusan tim, tetapi mengerti bahwa pemimpin mereka harus membuat peraturan akhir setiap kali tim tidak berhasil membuat suatu keputusan, dan peraturan akhir itu bukan merupakan persesuaian.

D. Dimensi Tim yang Efektif

Smither (1996), menyatakan ada 9 (sembilan) dimensi dalam model efektifitas tim yang dapat digunakan untuk mengevaluasi anggota tim dan mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan yang ada di dalam tim, yaitu: (1) Pemahaman, relevansi, dan komitmen pada tujuan, yaitu bahwa setiap anggota tim harus memahami tujuan tim secara jelas dan memiliki kemauan untuk mewujudkan tujuan-tujuan tim karena tujuan tim adalah merupakan hasil dari tujuan bersama dimana tujuan tim pada akhirnya akan mendorong terwujudnya kerjasama dalam tim sehingga kerjasama dalam tim mampu untuk meningkatkan prestasi, produktivitas, dan menciptakan hubungan kerja yang positif diantara sesama anggotanya; (2) Komunikasi mengenai ide dan perasaan yaitu komunikasi di antara anggota tim harus melibatkan penyampaian dan penerimaan informasi tentang ide-ide dan perasaan. Tim yang tidak efektif, komunikasi sering satu arah dan memfokuskan secara eksklusif hanya pada ide saja. Mengabaikan atau menekan perasaan, maka tim berisiko kehilangan informasi yang berharga dan dapat melemahkan kohesivitas tim; (3) Kepemimpinan yang berpartisipasi, yaitu bahwa kepemimpinan harus berpartisipasi dan mendistribusikan peran kepemimpinannya kepada semua

anggota tim; (4) Fleksibel dalam menggunakan prosedur pembuatan keputusan, yaitu bahwa prosedur pengambilan keputusan harus sesuai dengan kebutuhan tim dan sifat keputusannya. Keterbatasan waktu, keterampilan anggota dan implikasi dari semua keputusan tim harus dinilai secara hati-hati; (5) Manajemen konflik yang konstruktif, yaitu bahwa tim yang tidak efektif sering mencoba untuk mengabaikan atau menekan konflik, sedangkan tim yang efektif dapat menggunakan konflik dengan cara yang konstruktif. Ketika dikelola dengan baik, konflik dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang baik pula yakni memecahkan masalah dengan lebih kreatif, dan jumlah partisipasi anggota tim yang lebih tinggi; (6) Kekuasaan berdasarkan keahlian, kemampuan, dan informasi, yaitu bahwa anggota tim harus mampu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain untuk mengkoordinasikan kegiatan tim. Kekuasaan dan saling mempengaruhi ini harus terwujud secara merata dalam tim. Apabila kekuasaan dan kegiatan saling mempengaruhi ini hanya dipusatkan pada beberapa orang anggota tim saja maka kemungkinan efektifitas tim, komunikasi dan kohesivitas tim akan menjadi berkurang; (7) Kohesi tim yaitu bahwa dalam tim yang kohesif, setiap anggota merasa saling menyukai antara satu sama lainnya dan merasa puas dengan keanggotaan tim mereka. Meskipun kohesi tidak mengarah kepada efektifitas namun ia memiliki peranan yang penting dalam mewujudkan tim yang efektif yaitu ketika ia dikombinasikan dengan dimensi lain dari efektifitas tim maka sebuah tim yang memiliki kohesivitas yang tinggi cenderung meningkatkan produktivitas; (8) Strategi pemecahan masalah, yaitu bahwa tim harus mampu mengenali masalah dan menghasilkan solusi secara tepat. Setelah solusinya diimplementasikan, tim harus mengevaluasi keefektifan dari solusi tersebut. Ketika sebuah tim mampu untuk mengenali masalah-masalah yang sering muncul dan menyelesaikannya dengan memberikan solusi yang tepat

maka sebuah tim yang efektif juga akan mampu untuk mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang akan muncul dikemudian hari serta mampu memberikan solusi yang inovatif; dan (9) Efektivitas interpersonal, yaitu bahwa anggota tim harus mampu untuk berinteraksi dengan anggota tim lainnya secara efektif sehingga membuat efektifitas interpersonal anggota tim menjadi meningkat. Efektifitas interpersonal dapat diukur dengan menggabungkan konsekuensi tindakan anggota kelompok dengan tujuan anggota tim. Kecocokan antara tujuan anggota tim dan konsekuensi dari peningkatan perilaku mereka, maka membuat interpersonal efektifitas anggota tim juga menjadi meningkat.

Krajewski (1999:167), mengatakan bahwa tim mempunyai perbedaan dengan kelompok kerja (*working group*), hal ini dikarenakan: (1) anggota tim mempunyai komitmen yang kuat guna mencapai tujuan perusahaan, dan masing-masing anggota percaya bahwa setiap individu dalam tim mempunyai prioritas untuk mencapai tujuan tersebut; (2) peranan ketua tim sangat penting untuk dapat menginspirasi anggota tim sebagai ketua tim yang kuat; (3) kesuksesan perusahaan bukan semata-mata karena kontribusi individu, namun merupakan kontribusi semua anggota dalam tim; (4) anggota tim harus bersikap terbuka, terlebih lagi dalam pelaksanaan rapat anggota; dan (5) seluruh anggota dalam tim harus bekerja bersama-sama sebagai tim yang *solid*.

Manajemen mempunyai peranan penting untuk menentukan bagaimana tim dapat sukses. Menurut Katzebach & Smith (1993), dalam penelitiannya yang berjudul "*The dicipline of team*", menyatakan bahwa tim akan sukses, apabila: (1) proyek tim harus bermanfaat dan mudah dipahami standar dan petunjuk kerjanya; (2) mempunyai perhatian dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif; (3) seluruh anggota tim harus membuat aturan yang jelas terkait ketidakhadiran anggota tim dalam suatu pertemuan atau rapat yang disepakati bersama; (4) untuk

menciptakan rasa memiliki, maka tim harus mempunyai orientasi tugas yang baik untuk mencapai tujuan kelompok dalam waktu yang direncanakan; (5) orang yang tidak terlibat dalam keanggotaan kelompok, maka harus tetap diberi bimbingan tentang ide baru dan informasi; (6) jika memungkinkan, maka anggota tim harus banyak menggunakan waktu secara bersama-sama guna mencapai ide-ide yang kreatif dan bersifat membangun kepribadian; dan (7) manajer harus mencari jalan dalam pemberian kompensasi secara langsung sebagai bentuk apresiasi dalam peningkatan positif tim.

E. Manfaat dan Fungsi Tim

Chang & Curtin (2001), menyatakan manfaat tim bagi individu dan tim bagi organisasi. Manfaat tim bagi individu yaitu: (1) pekerjaan lebih bervariasi; (2) lebih banyak kebebasan untuk membuat dan menindaklanjuti keputusan yang benar; dan (3) meningkatkan kesempatan untuk mempelajari keahlian baru. Sedangkan manfaat tim bagi organisasi, yaitu: (1) meningkatkan komitmen terhadap keputusan yang diambil; (2) meningkatkan produktivitas tim kerja; (3) lebih fleksibel dalam operasional kerja; dan (4) Meningkatkan rasa tanggungjawab.

2.1.3 Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Penyangga Hutan Konservasi

Ife dan Tesoriero (2008), menyatakan bahwa program pemberdayaan masyarakat hanya mungkin dapat mewujudkan indikator-indikator keberdayaan jika dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan, seperti prinsip *holisme*, keberlanjutan, keanekaragaman, perkembangan organik, perkembangan yang seimbang, dan mengatasi struktur yang merugikan. Paradigma *bottom-up* yang berpusat pada rakyat terus mendapatkan posisi sebagai strategi pemberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan publik, upaya konservasi lingkungan, dan mengelola sumber daya alam yang dapat diterapkan dilapangan (Chambers, 1996).

Peranan masyarakat sebagai pusat pemberdayaan masyarakat perlu didorong dan dimaksimalkan (Ife dan Tesoriero, 2008). Partisipasi masyarakat yang tinggi akan menjamin berjalannya proses-proses dalam pengembangan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat merupakan alat dan tujuan. Pembangunan partisipatif adalah proses melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh keputusan substansial yang terkait dengan kehidupan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat, dengan atau tanpa dukungan pihak luar, agar mampu secara terus menerus mengembangkan daya atau potensi yang dimiliki dengan tujuan untuk perbaikan mutu kehidupannya secara mandiri dan berkelanjutan (PHKA, 2008b).

PHKA (2008b), mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga kawasan konservasi merupakan segala upaya yang bertujuan untuk: (a) terus meningkatkan keberdayaan masyarakat di daerah penyangga sekitar kawasan konservasi, (b) memperbaiki kesejahteraan, dan (c) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam segala kegiatan konservasi sumberdaya hayati dan ekosistem secara berkelanjutan. Prinsip yang digunakan sebagai kebijakan dasar dalam pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Permenhut No. P. 01/Menhut-II/2004, pasal 5 yaitu: (1) penciptaan suasana iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat; (2) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat; dan (3) melindungi masyarakat melalui keberpihakan kepada masyarakat untuk mencegah persaingan yang tidak sehat.

Pengelolaan pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga, yang dilakukan perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) prinsip pendekatan kelompok, yaitu bahwa segala kegiatan yang dilakukan dalam

pemberdayaan masyarakat harus dilakukan berdasarkan pendekatan kelompok, sehingga menumbuhkan kelompok-kelompok yang terus bergerak secara dinamis untuk melanjutkan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang ditumbuhkan dari, oleh dan untuk kepentingan warga masyarakat desa di dalam dan sekitar kawasan konservasi; (2) prinsip keserasian, bahwa setiap kelompok pemberdayaan masyarakat haruslah terdiri dari warga masyarakat desa di dalam dan sekitar kawasan konservasi yang saling mengenal, saling percaya dan mempunyai kepentingan yang sama, sehingga akan tumbuh kerjasama yang kompak dan serasi; (3) prinsip kepemimpinan, yaitu dengan cara memberi kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga masyarakat desa di dalam dan sekitar kawasan konservasi untuk mengembangkan kepemimpinan dari kalangan masyarakat; (4) prinsip pendekatan kemitraan, dengan memperlakukan warga masyarakat desa di dalam dan sekitar kawasan konservasi sebagai mitra kerja pembangunan kehutanan, yaitu dengan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan. Peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dapat mewujudkan masyarakat sebagai mitra kerja yang aktif dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan yang lestari; (5) prinsip swadaya, yaitu bahwa semua kegiatan yang dilakukan berupa bimbingan, dukungan dan kemudahan haruslah mampu menumbuhkan keswadayaan dan kemandirian; (6) prinsip belajar sambil bekerja (partisipatif), dengan cara merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang partisipatif, baik yang dilakukan sendiri oleh warga masyarakat desa di dalam, maupun oleh masyarakat sekitar kawasan konservasi, akan mampu menemukan sendiri masalah-masalah serta alternatif pemecahannya; (7) prinsip pendekatan keluarga, yaitu bahwa pemberdayaan bukan hanya bagi pihak laki-laki dewasa saja, tetapi juga bagi para ibu dan anak-anaknya, sehingga seluruh anggota keluarga warga

masyarakat desa di dalam dan sekitar kawasan konservasi memperoleh pemberdayaan sesuai dengan masalah dan kebutuhan masing-masing (PHKA, 2008b).

Pengelolaan pemberdayaan masyarakat perlu memperhatikan beberapa strategi (PHKA, 2008b), sebagai berikut: (1) pengelolaan usaha diprioritaskan berbasis sumber daya hutan yang efisien dalam arti mampu menghasilkan keuntungan untuk kemakmuran masyarakat, yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan konservasi; (2) pemanfaatan, konservasi, dan rehabilitasi potensi sumber daya hutan demi menjaga kelestarian sumber daya hutan dan lingkungan hidup; (3) pelestarian nilai-nilai sosial budaya dan kearifan tradisional kaitannya dengan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya hutan; dan (4) memberikan akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Strategi pelaksanaan pengelolaan pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga, bertujuan untuk: (1) pemihakan dan pemberdayaan masyarakat; (2) pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan serta mengembangkan peran serta masyarakat; (3) modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial, ekonomi, budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat; (4) Memperhatikan potensi, lokasi, aspirasi dan tuntutan masyarakat setempat; (5) pemberdayaan masyarakat haruslah merupakan program pembelajaran yang dilakukan melalui suatu proses yang berkelanjutan dan sistematis; (6) mampu mengakses terhadap permodalan; (7) mampu mengakses terhadap teknologi; (8) mampu mengakses pasar; (9) mendorong dan membimbing warga masyarakat desa di dalam dan sekitar kawasan konservasi agar mampu bekerjasama di bidang ekonomi secara individu maupun kelompok; (10) menumbuhkembangkan gabungan atau jaringan antara

kelompok atau asosiasi pemberdayaan masyarakat. Kelompok-kelompok yang sudah tumbuh didorong dan dibimbing agar mau dan mampu bekerjasama antar kelompok dalam bentuk organisasi yang lebih besar, yang disebut gabungan kelompok atau asosiasi. Bergabung dalam asosiasi akan mampu memberi manfaat dalam hal menghimpun modal usaha yang lebih besar, memperbesar skala usaha, meningkatkan posisi tawar-menawar (*bargaining position*), meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha; dan (11) menumbuhkan lembaga ekonomi formal, yaitu bahwa gabungan kelompok/asosiasi peserta pemberdayaan masyarakat didorong agar mereka mau dan mampu menjadi satu lembaga ekonomi formal, yang antara lain adalah koperasi (PHKA, 2008b).

2.1.4 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat sejak dari adanya pendekatan hingga pada pendekatan partisipasi masyarakat yang sesungguhnya (Arnstein, 1969). Partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan secara langsung dimana masyarakat, baik individu atau bahkan melalui suatu kelompok organisasi dapat bertukar informasi, mengekspresikan pendapat dan kepentingan, serta mempunyai potensi yang dapat mempengaruhi suatu keputusan atau hasil secara spesifik (Beckley *et al.* 2005, p. 14).

International Association of Public Participation/IAP2 (IAP2, 2007), telah mengidentifikasi nilai-nilai utama partisipasi masyarakat terdiri dari: (a) partisipasi masyarakat didasarkan pada kepercayaan bahwa mereka yang dipengaruhi oleh sebuah keputusan mempunyai hak terlibat dalam proses pembuatan keputusan; (b) partisipasi masyarakat termasuk janji bahwa kontribusi masyarakat akan mempengaruhi suatu keputusan; (c) partisipasi masyarakat memberikan suatu keputusan yang berkelanjutan dengan cara mengetahui dan mengkomunikasikan kebutuhan dan kepentingan dari seluruh partisipan termasuk dalam hal ini adalah

pembuat keputusan; (d) partisipasi masyarakat memfasilitasi keterlibatan masyarakat yang berpotensi dipengaruhi oleh suatu kepentingan dalam keputusan; (e) partisipasi masyarakat merupakan suatu input dari para partisipan dalam hal bagaimana mereka berpartisipasi; (f) partisipasi masyarakat menyediakan berbagai informasi yang mereka perlukan untuk berpartisipasi dalam berbagai cara yang bermanfaat; (g) partisipasi masyarakat mengkomunikasikan kepada para partisipan bagaimana input mereka dapat mempengaruhi suatu keputusan.

International Association of Public Participation/IAP2 (2010), juga telah menetapkan kode etik bagi anggota atau kelompok partisipan, meliputi: (a) tujuan (*purpose*) bahwa kita mendukung adanya partisipasi masyarakat sebagai sebuah proses yang bertujuan untuk membuat keputusan lebih baik dan menitik beratkan pada pengaruh para *stakeholder* serta memenuhi kebutuhan pembuatan keputusan, (b) peran praktisi (*role of practitioner*), artinya mendukung partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan membantu pembuat keputusan menjadi lebih responsif terhadap saran dan kebutuhan masyarakat, (c) percaya (*trust*) akan melaksanakan dan mendukung aksi dengan membangun kepercayaan dan kredibilitas bagi suatu proses diantara anggota partisipan, (d) penentuan peran masyarakat (*defining the public's role*), yaitu mempertimbangkan dengan seksama dan akurat tentang peran masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, (e) keterbukaan (*openness*), mendukung seluruh informasi yang berhubungan bagi pemahaman masyarakat dan evaluasi keputusan, (f) akses proses (*access to the process*), memastikan bahwa *stakeholder* mempunyai hak dan kesempatan akses yang sama terhadap proses partisipasi masyarakat dan kesempatan untuk mempengaruhi keputusan, (g) menghargai segenap masyarakat (*respect for communities*), mencegah adanya resiko perpecahan

ketidaksamaan kepentingan atau bahkan menimbulkan perbedaan dan perpecahan, (h) advokasi (*advocacy*) melakukan advokasi untuk proses partisipasi masyarakat dan tidak akan mengadvokasi untuk kepentingan tertentu, (i) komitmen (*commitments*) memastikan bahwa seluruh komitmen yang telah dibuat bagi masyarakat termasuk pembuat keputusan telah dibuat dengan suatu perjuangan yang baik, dan dukungan praktis (*support of the practice*) bahwa kita akan mementor para praktisi baru dan mendidik pembuat keputusan dan masyarakat tentang nilai dan penggunaan partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dijadikan sebagai suatu strategi penting dalam memperbaiki lingkungan bahkan sebagai *key word* setiap pembangunan masyarakat dan harus ada dalam setiap rumusan kebijakan. Partisipasi masyarakat sepadan dengan arti peran serta, ikut serta, keterlibatan atau proses belajar bersama, saling memahami, menganalisis, merencanakan, dan melakukan tindakan oleh sejumlah masyarakat.

Partisipasi seseorang dipengaruhi oleh kebutuhan, motivasi, struktur, dan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Masyarakat berpartisipasi apabila dapat memenuhi kebutuhan akan kepuasan, mendapatkan keuntungan dan meningkatkan statusnya. Jenis-jenis partisipasi masyarakat, dibedakan sebagai berikut: (1) partisipasi mengembangkan fikiran, (2) Partisipasi tenaga, (3) Partisipasi fikiran dan tenaga atau partisipasi aktif, (4) Partisipasi dengan keahlian, (5) Partisipasi barang, (6) Partisipasi dengan masyarakat, dan (7) Partisipasi jasa.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan keikutsertaan masyarakat baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan sebagai akibat terjadinya interaksi sosial antara individu atau kelompok masyarakat dalam pembangunan yang mencakup partisipasi dalam pembuatan keputusan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan

serta pemanfaatan hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat didasarkan pada :

(i) derajat kesukarelaan, (ii) cara keterlibatan, (iii) keterlibatan dalam proses pembangunan, (iv) tingkatan organisasi, (v) intensitas frekuensi kegiatan, (vi) lingkup kegiatan, (vii) efektifitas kegiatan, (viii) pihak yang terlibat, serta (ix) gaya partisipasi. Dalam proses ini masyarakat dibantu untuk mengidentifikasi masalah kebutuhan dan kesempatan hidup, difasilitasi dalam merancang solusi-solusi yang tepat, serta dilatih agar memiliki kapasitas yang mampu mengakses sumber-sumber yang ada didalam maupun diluar komunitasnya.

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat terdiri dari: (i) partisipasi melalui kontak dengan pihak lain, (ii) partisipasi dalam memperhatikan atau menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi baik dalam arti menerima atau menolak, (iii) partisipasi dalam perencanaan termasuk dalam pengambilan keputusan, (iv) partisipasi dalam hal pelaksanaan pembangunan, (v) partisipasi dalam hal menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan, (vi) partisipasi dalam hal menilai atau melakukan evaluasi dan monitoring.

Suatu definisi partisipatif baik deskriptif maupun normatif terutama harus menekankan bahwa segala perkembangan masyarakat dan pembangunan merupakan proses yang hanya bisa berhasil jika dijalankan bersama dengan dan oleh rakyat sendiri, terlebih orang miskin (Muller, 2006). Masyarakat harus ikut secara aktif dalam menentukan dan menjalankan upaya program bantuan dari pemerintah, dan dengan demikian dapat menentukan keadaan hidup mereka sendiri mulai dari saat pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasannya hingga perawatan suatu program.

Partisipasi masyarakat memiliki dua dimensi (Daniel dan Nieldalina, 2006), meliputi: partisipasi langsung, dan (2) partisipasi tidak langsung. Partisipasi langsung meliputi keterlibatan pemangku kepentingan dalam kegiatan seperti:

menghadiri pertemuan tentang perlindungan hutan, mengambil bagian aktif dalam pertemuan, kontribusi tenaga kerja terhadap pengelolaan hutan, pemantauan, dan patroli untuk pengamanan hutan. Partisipasi tidak langsung mengacu pada ketaatan individu untuk: mematuhi peraturan dan perlindungan kehutanan, memotivasi orang lain dan anggota keluarga untuk ikut berpartisipasi dalam usaha perlindungan hutan, memberikan dukungan moral kepada masyarakat untuk menjamin keadilan, dan transparansi dalam pengelolaan hutan. Faktor identitas sosial sebagai kategorisasi diri, psikologi, organisasi dan sumber motivasi secara langsung akan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu organisasi (Himadri, 2000).

Cohen (1997), membagi partisipasi masyarakat kedalam 4 (empat) tahapan, yaitu: (1) tahap perencanaan program yang diwujudkan melalui keikutsertaan dalam rapat untuk pengambilan keputusan, (2) tahapan pelaksanaan, yang merupakan tahapan penting dalam pembangunan, karena inti dari pembangunan adalah pelaksanaan wujud nyata dari partisipasi. Tahap ini partisipasi digolongkan dalam tiga tahap yaitu: partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk tindakan sebagai anggota program, (3) tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program. Melihat posisi masyarakat sebagai subyek pembangunan, maka semakin besar manfaat program yang dirasakan, berarti program tersebut berhasil dan sesuai sasaran, dan (4) tahap evaluasi dan monitoring, merupakan tahap yang penting karena partisipasi masyarakat dalam tahap ini merupakan umpan balik yang dapat memberikan masukan untuk perbaikan bagi pelaksanaan program selanjutnya.

Huraerah (2008), menjelaskan keberhasilan partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh penggagas partisipasi, baik dari pemerintah atau lembaga

swadaya masyarakat (LSM). Penggagas partisipasi memegang peranan penting dalam hal: untuk siapa partisipasi itu dilaksanakan (untuk kepentingan pemerintah atau masyarakat itu sendiri), siapa yang memegang kendali (dari pemerintah pusat, pemerintah daerah atau lembaga donor). Selanjutnya hubungan pemerintah dengan masyarakat: (1) apakah ada kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah, dan (2) apakah ada kepercayaan dari pemerintah terhadap masyarakat. Kedua pertanyaan tersebut berdampak pada kultur daerah yang memiliki tradisi dalam berpartisipasi (proses pengambilan keputusan melalui musyawarah), sehingga cenderung lebih mudah dan berlanjut.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan adalah keseluruhan tahapan proses pembangunan kehutanan (pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dan pemanfaatan hasil pembangunan) memberikan kesempatan dan kedudukan yang setara dan dilaksanakan bersama masyarakat setempat (PHKA, 2008). Landasan hukum yang mengatur tentang peran serta masyarakat di bidang Kehutanan (PHKA, 2008), adalah sebagai berikut : (1) Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Bab I pasal 4 dan Bab IX pasal 37); dan (2) Undang-undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Bab X pasal 70). Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 menyatakan bahwa konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah serta masyarakat. Dipertegas dengan pasal 37 yang menjelaskan bahwa pemerintah berkewajiban untuk mendorong peran serta masyarakat melalui pendidikan dan penyuluhan. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 pasal 2, lebih lanjut dijelaskan bahwa penyelenggaraan kehutanan berazaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Lestari yang dimaksud dalam undang-undang ini

adalah adanya keseimbangan antara fungsi ekologi, fungsi sosial budaya dan fungsi ekonomi.

2.1.5 Hubungan Kelembagaan Kehutanan

World Bank (2005), yang dimaksud lembaga kehutanan adalah: *forest organizational providers which have a mandate, derived from policy, to support frontline professionals to deliver services to clients which ensure that forests are sustainably managed. The objectives of management are to provide forest goods and services for forest industries and for households on the one hand, while continuing to perform their public goods functions (such as watershed protection and biodiversity conservation) on the other*".

Kelembagaan Kehutanan merupakan sistem yang ada dalam suatu lembaga sebagai pengendali sosial yang mempunyai hak mengawasi, menekan, menghukum, dan menjatuhkan sanksi-sanksi terhadap warganya yang melanggar peraturan tentang kebijakan hukum pengelolaan hutan lindung (Bakhdal dan Darmawan, 2007).

Kelembagaan kehutanan adalah institusi atau pihak pengelola hutan sebagai penyedia manfaat (*provider*) yang diberi wewenang untuk melaksanakan kebijakan dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan, dengan tujuan agar dapat memberikan nilai manfaat baik secara ekonomi, ekologi, politik, sosial dan budaya.

Hubungan kelembagaan kehutanan antara pihak pengelola hutan TN Baluran dengan lembaga masyarakat (SPKP) dalam pengelolaan hutan adalah penting. Hal ini dikarenakan SPKP sebagai lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh pihak pengelola hutan dengan para tokoh masyarakat sebagai kepanjangan atau mitra TN Baluran. SPKP dibentuk untuk menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pengelola, agar pengelolaan hutan dapat memberikan nilai manfaat baik secara ekonomi dan sosial bagi masyarakat dan pengelola. Dengan

demikian tercipta hubungan yang *symbiosis mutualisme* (hubungan saling menguntungkan).

2.1.6 Insentif program partisipasi.

Insentif program partisipasi sebagai *reward* tenaga kerja baik secara individu atau sebagai tim/anggota kelompok bertujuan untuk meningkatkan produktifitas kerja. Menurut Krajewski (1999:172-173), ada tiga jenis insentif yang sering digunakan oleh suatu perusahaan dalam upaya meningkatkan produktifitas tenaga kerja, meliputi: (1) *individual based plans* (perencanaan insentif berbasis individu), terdiri dari: (a) *piece rate* yaitu suatu jenis kompensasi tradisional berdasarkan *output* atau jumlah unit yang dibuat atau kinerja pelayanan dalam kurun waktu sehari atau seminggu; (b) *pay for skills plans*, yaitu tenaga kerja diberikan *reward* atas keterampilan/*skill* yang mereka raih dan sangat berharga bagi keberlanjutan tim; (c) *bonus point plans*, yaitu tenaga kerja memperoleh poin secara akumulasi atas partisipasinya dalam aktifitas keterlibatan kerja; (2) *team based plans* (perencanaan insentif berbasis tim/kelompok), terdiri dari: (a) *production/quality goals*, yaitu anggota tim/kelompok memperoleh peningkatan gaji atau pembayaran bonus atas capaian berdasarkan kualitas standar perusahaan; (b) *public recognitions plans* merupakan insentif atas usaha tim/kelompok suatu perusahaan, pertanian, perusahaan media cetak, atau bahkan perbankan; dan (3) *group based plans* (perencanaan insentif berdasarkan *group*), terdiri dari: (a) *profit sharing*, yaitu *reward* bagi tenaga kerja atau *group* dimana suatu perusahaan dimana mereka bekerja telah memperoleh keuntungan pada tingkat yang baik; dan (b) *gain sharing*, yaitu *reward* atas kinerja kolektif *group* karena perhatiannya terhadap *cost output* (biaya *output*) yang berada dalam pengawasan tenaga kerja untuk menciptakan keuntungan.

Incentive participation program as those mechanisms that positively impact on an individual's attitude and behavior, which then motives their active participation in collective arrangements for improved governance and management of their forests resources" (Adhikari, et al. 2014).

Insentif program partisipasi merupakan mekanisme bantuan baik berupa materi dan non materi yang bertujuan untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta berdampak positif terhadap partisipasi masyarakat secara aktif dalam pengelolaan sumberdaya hutan (Adhikari, et al. 2014).

Insentif program partisipasi merupakan konsep yang telah diaplikasikan dalam pengelolaan hutan negara di pulau Jawa sejak abad ke 19 yang lebih dikenal dengan istilah Tumpang Sari. Sistem Tumpang Sari merupakan sebuah langkah konvensional yang sejak pertama kali dikenalkan oleh penjajahan Belanda di Indonesia dengan tujuan agar masyarakat lokal mau berpartisipasi atau terlibat dalam pengelolaan hutan dengan mengalokasikan hadiah lahan hutan negara bagi rumah tangga petani, pemerintahan dan sumberdaya hutan (Djamhuri, 2012).

Insentif program partisipasi dalam hal ini merupakan pemberian yang berfungsi meningkatkan penghasilan suatu rumah tangga yang diberikan oleh pihak pengelola hutan di TN Baluran. Adapun jenis insentif program partisipasi yang diberikan meliputi: insentif pelatihan, insentif peralatan pertanian, insentif uang tunai, dan insentif pengelolaan lahan pertanian.

Insentif program partisipasi diberikan kepada masyarakat atau rumah tangga oleh pengelola hutan, alasannya adalah insentif program partisipasi sebagai salah satu cara untuk meningkatkan motivasi masyarakat atau anggota kelompok Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) agar berpartisipasi khususnya dalam pengelolaan hutan di TN Baluran. Hal ini dikarenakan tanpa adanya insentif

program partisipasi dalam pengelolaan hutan, maka sulit untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

2.1.7 Modal Sosial

Modal sosial merupakan norma yang dapat mendorong kerjasama antar anggota masyarakat (Fukuyama, 1999). Kehidupan sehari-hari, modal sosial dapat diwujudkan melalui sikap saling percaya antar warga masyarakat.

Berdasarkan ilustrasi dari Fukuyama (1995), bahwa modal sosial dalam *trust*, *believe* dan *vertrauen*, artinya bahwa pentingnya kepercayaan yang mengakar dalam faktor kultural seperti etika dan moral. *Trust* muncul maka komunitas membagikan sekumpulan nilai-nilai moral, sebagai jalan untuk menciptakan pengharapan umum dan kejujuran, ia juga menyatakan bahwa asosiasi dan jaringan lokal sungguh mempunyai dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi dan pembangunan lokal serta memainkan peran penting dalam manajemen lingkungan.

Modal sosial sebagai alat untuk memahami aksi sosial yang secara teoritis mengkombinasikan perspektif sosiologi dan ekonomi (Coleman, 1999). Pengertian ini dipertegas oleh Serageldin (1998), bahwa modal sosial selalu melibatkan masyarakat dan menjadikan masyarakat, dan muncul bukan semata dari interaksi pasar dan memiliki nilai ekonomis.

Modal sosial adalah mekanisme dan hubungan antara kepercayaan, norma, dan jaringan dalam pengaturan sosial di suatu daerah (Woolcock, 1998).

Modal sosial merupakan kemampuan masyarakat dalam bekerja untuk mencapai tujuan bersama dalam beberapa komunitas dan organisasi (Coleman, 1999).

Secara umum ada tiga parameter modal sosial, yaitu: (1) kepercayaan, (2) norma, dan (3) jaringan (Putnam, 1993).

Bourdieu (1986), modal sosial didefinisikan sebagai jumlah dari sumberdaya, aktual dan virtual, yang bertambah kepada individu atau kelompok yang memiliki jaringan yang berkesinambungan. Penjelasan modal sosial tidak dapat dipisahkan dari tiga jenis modal sosial yang diidentifikasi oleh (Woolcock, 1998). Modal sosial terdiri dari tiga jenis, yaitu *bonding*, *bridging*, dan *linking*.

Modal sosial *bonding* merupakan hubungan antara individu dengan karakteristik sosio-demografi masyarakat yang diekspresikan dalam bentuk kerjasama yang dihasilkan dari hubungan dalam kelompok yang homogen. Modal sosial *bridging* dalam hal ini adalah lembaga dan mekanisme dalam sebuah komunitas. Modal sosial *bridging* adalah ikatan sosial yang muncul dalam menanggapi berbagai karakteristik kelompok yang muncul dalam menghadapi berbagai permasalahan. Modal sosial *linking* adalah hubungan atau jaringan sosial yang ditandai dengan adanya hubungan antara berbagai tingkat kekuatan sosial dan Status Sosial keluarga di masyarakat (Woolcock, 1998).

Modal sosial dalam penelitian ini merupakan modal yang dimiliki oleh masyarakat desa penyangga sebagai anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki dalam pengelolaan hutan di TN Baluran, dengan tujuan untuk dapat mengatasi segala permasalahan dalam hidupnya. Dengan demikian modal sosial merupakan faktor penting untuk peningkatan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan.

2.1.8 Social Learning

Era globalisasi berpengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan, terlebih terhadap gaya hidup (*life style*) masyarakat. Bergesernya nilai-nilai lama menjadi nilai-nilai baru, merupakan pengaruh dari gaya hidup masyarakat. Dengan demikian, maka masyarakat harus peduli dan berusaha mengimbangi perubahan,

yaitu dengan cara belajar. Belajar untuk dapat mengimplementasikan dirinya dengan baik di dalam kehidupannya.

Teori *social learning* Albert Bandura menjelaskan mengenai hubungan antara tingkah laku, kepribadian, dan lingkungan seseorang berada. Menurut teori *social learning*, bahwa tingkah laku, kepribadian, dan lingkungan merupakan tiga faktor yang berpengaruh terhadap sikap individu. Dikatakan dalam teori tersebut, bahwa faktor sosial atau faktor lingkungan, kognitif dan tingkah laku merupakan faktor penting dalam pembelajaran.

Menurut Kusumanto, *et al.* (2005), bahwa dimensi *social learning* terdiri dari: (1) kumpulan pengembangan pengetahuan diantara anggota kelompok, (2) adanya *sharing* pengetahuan dan informasi diantara pemangku kepentingan yang berbeda-beda, (3) membangun komunikasi dan hubungan diantara *stakeholder*, dan (4) pembentukan kapasitas strategi.

Social learning sebagaimana dijelaskan merupakan proses pembelajaran sosial yang sangat penting dalam pengelolaan hutan, dan harus didukung oleh pemahaman serta tingkat pendidikan masyarakat yang baik. *Social learning* dalam penelitian ini, merupakan proses berpeluangnya tukar pikiran, tukar informasi dan pengetahuan, serta diharapkan ada jalinan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pihak pengelola dan *stakeholder*. Hasilnya diharapkan, pengelolaan hutan akan menjadi baik, jika adanya proses *social learning* masyarakat yang baik pula.

2.1.9 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi seseorang atau masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya, berupa kecukupan sandang, pangan, terpenuhinya hak asasi dan partisipasi, serta terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Menkokesra, 2010).

Konstruk kesejahteraan umum meliputi standard material atau ekonomi masyarakat, pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik masyarakat, peran serta masyarakat dalam pembangunan, lembaga kemasyarakatan dan lingkungan. Aspek lainnya dengan pemerintahan dan ekonomi swasta (Ivanovich & Fujiartanto, 2014).

Maipita (2014), mengatakan bahwa masyarakat yang tidak sejahtera (miskin) dilihat dari sudut pandang: (1) miskin menurut standar kebutuhan hidup layak, yaitu kelompok yang berpendapat bahwa kemiskinan terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar. Artinya seseorang atau suatu rumah tangga termasuk dalam kategori miskin jika keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sesuai dengan standar hidup layak. Kemiskinan seperti ini disebut juga dengan kemiskinan absolut. (2) miskin menurut tingkat pendapatan, yaitu pandangan yang berpendapat bahwa kemiskinan terjadi disebabkan oleh kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.

2.2 Kajian Empiris

2.2.1 Hubungan Kelembagaan Kehutanan Terhadap Partisipasi Masyarakat

Penelitian terkait hubungan kelembagaan kehutanan dengan tingkat partisipasi masyarakat telah dilakukan oleh Bakhdal dan Darmawan (2007), mengatakan bahwa keberhasilan dalam pengelolaan hutan lindung, tergantung pada peran lembaga kehutanan. Lembaga kehutanan dengan segenap struktur organisasi yang ada masih lemah payung hukumnya dalam pengelolaan hutan lindung, sehingga tidak mampu mencegah terjadinya gangguan dan ancaman terhadap hutan tersebut. Usaha untuk meningkatkan peran kelembagaan kehutanan diperlukan adanya: (1) peraturan yang konsisten, (2) dukungan tenaga,

(3) dukungan finansial, (4) dukungan lembaga penegak hukum, dan (5) kolaborasi antara Lembaga Kenagarian dan Dinas Kehutanan.

Salah satu faktor terpenting pengaruh suksesnya program *community forest* adalah (a) karena adanya hubungan antar pemerintahan yang bersifat demokrasi yang menyangkut tentang kepemimpinannya; (b) melakukan *voting*; dan (c) memberlakukan *benefit sharing* untuk dapat memotivasi masyarakat terlibat dan berpartisipasi dalam aktifitas *community forest groups/CFGs*. Hubungan dan dukungan antar pemerintahan dengan partisipasi masyarakat sangat menentukan kesuksesan program CFGs (Baynes, *et al.* 2015).

Kualitas peran kelembagaan kehutanan berpengaruh positif signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam *Community Forest Management/CFM* (Akamani & Hall, 2014). Kelembagaan kehutanan yang baik karena adanya: (1) hubungan atas dasar kepercayaan (*trust based relationship*), (2) adanya hubungan timbal balik dengan jaringan (*networks of reciprocity*), (3) kemudahan informasi (*access to information*) dari institusi kehutanan serta dengan pihak lain yang terkait. Selanjutnya informasi yang diperoleh dapat diimplementasikan dalam pemecahan masalah dalam berbagai kehidupan sosial masyarakat untuk menciptakan kemandirian masyarakat (*community resilience*).

Hutan merupakan sumberdaya yang dapat digunakan sebagai sumber pendapatan penting bagi pemerintah di India. Pengelolaan hutan yang baik sangat diperlukan dalam usaha untuk memperbaiki hutan yang rusak. Namun pemerintah tidak berdaya ketika masyarakat menolak berpartisipasi dalam pengelolaan hutan. Partisipasi masyarakat dibentuk dan diprakarsai oleh dinas tenaga kerja (*government employees*), ketua lokal, atau melalui lembaga masyarakat yang kuat (Lise, W, 2000).

2.2.2 Hubungan Kelembagaan Kehutanan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam proyek pembangunan dimotivasi oleh gaya kepemimpinan suatu lembaga berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* yang mempengaruhi produktifitas, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut UNDP (2000), beberapa karakteristik dari *good governance*: (1) adanya partisipasi dari setiap warga untuk menggunakan haknya dalam proses pembuatan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan publik, (2) penegakan hukum dan aturan yang adil bagi seluruh warga tanpa adanya perkecualian, (3) adanya transparansi yang dapat menciptakan saling percaya antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi, dan (4) adanya kesamaan kesempatan bagi setiap warga masyarakat untuk memperbaiki kesejahteraannya.

Penelitian pentingnya *good governance* terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat di lakukan oleh Wagener (2004), penelitiannya bertujuan mencari tahu mekanisme *good governance* dan tatanan ekonomi mempengaruhi hasil ekonomi.

Pengujian hipotesisnya meliputi, (1) *good governance* menciptakan keamanan, kepercayaan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan (2) *bad governance* menciptakan ketidakpercayaan, kecemasan, dan ketidakpastian perekonomian.

Selanjutnya Wagener (2004) mengemukakan perbedaan antara *Good Governance* dengan *Bad Governance*. bahwa *Good Governance*, bercirikan: (1) *voice and accountability*, (2) *participation democratic rights*, (3) *freedom of press*, (4) *government effectiveness*, (5) *transparent administration*, (6) *credibility*, (7) *ability to compromise*, (8) *rule of law*, (9) *enforceability of contracts*, (10) *predictability of courts*, and (11) *respect of the instructions*. Sedangkan perbedaan

Bad Governance, meliputi: (1) *political instability and violence*, (2) *unconstitutional*

conduct, (3) *interference of the military*, (4) *political terrorism*, (5) *regulatory burden*, (6) *incompetent personnel*, (7) *market unfriendly policies*, (8) *ineffective judicial control*, (9) *graft*, (10) *corruption*, (11) *state capture*, and (12) *rent seeking*.

Selanjutnya dikatakan Widodo (2001), bahwa ciri-ciri *good governance* meliputi: (1) adanya partisipasi setiap warga negara dalam pengambilan keputusan, secara langsung atau melalui lembaga hukum yang mewakili kepentingan mereka, (2) adanya aturan hukum yang diterapkan tanpa adanya unsur diskriminasi berdasarkan hak asasi manusia, (3) adanya transparansi berdasarkan kebebasan informasi, proses yang diterima masyarakat yang membutuhkannya, (4) bersikap responsif dalam melayani para *stakeholder*, (5) menjadi *mediator* perbedaan kepentingan dalam menetapkan kebijakan dan prosedur, (6) bersikap adil dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga dalam meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak, (7) efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan sumberdaya, (8) akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dengan penuh tanggung jawab kepada lembaga publik, dan (9) mempunyai visi strategis.

Akib, *et al.* (2016), melakukan penelitian tentang *good governance* terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitiannya bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan menjelaskan pengaruh *good governance* terhadap kesejahteraan masyarakat dengan indikatornya GDP, *private consumption* dan *human development index* (HDI); (2) mengidentifikasi dan menjelaskan pengaruh *good governance* terhadap kesejahteraan masyarakat dengan indikatornya GDP, *public consumption*, dan *human development index* melalui *local government finance report*, dan (3) mengidentifikasi dan menjelaskan pengaruh *good governance* terhadap kesejahteraan masyarakat dengan indikatornya GDP, *public consumption* dan *human development index* (HDI) melalui opini *audit report*. Penelitiannya

menggunakan *secondary data* dengan 37 pemerintahan lokal yang terdiri dari pemerintahan lokal pertama Sulawesi Selatan dengan 24 kota/kecamatan dan pemerintahan lokal Sulawesi Tenggara dengan 12 kota/kecamatan dengan menggunakan metode sensus. Data dianalisis dengan menggunakan *path analysis*. Hasil penelitian mengatakan bahwa: 1) Kelembagaan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dengan indikator konsumsi dan *human development index* (HDI), 2) Kelembagaan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dengan konsumsi khusus dan indikator *human development index* (HDI) melalui laporan audit, 3) Kelembagaan tidak berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat melalui bantuan finansial pemerintahan lokal, dan (4) Kelembagaan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dengan indikator GDP melalui laporan audit.

2.2.3 Insentif Program Partisipasi Terhadap Partisipasi Masyarakat

Penelitian tentang insentif program partisipasi terhadap partisipasi masyarakat program pengelolaan *social forestry*. Adhikari, *et al.* (2014), melakukan penelitian dengan tujuan utama mengidentifikasi hubungan insentif program partisipasi yang diberikan dengan tingkat partisipasi masyarakat kelompok *community forest user's groups*/CFUG. Variabel insentif program partisipasi diukur dengan 6 indikator terdiri dari: (a) kemudahan akses ke hutan, (b) pendapatan rumah tangga, (c) keamanan sosial, (d) infrastruktur masyarakat lokal, (e) hak milik (*property rights*) sumberdaya hutan bagi kelompok CFUG, dan (f) pembayaran jasa pelayanan lingkungan. Untuk variabel partisipasi diukur dengan 6 indikator: (a) masa keanggotaan CFUG, (b) perwakilan eksekutif komite, (c) tingkat partisipasi pada pertemuan, (d) pembuatan keputusan, (e) implementasi, dan (f) tingkat partisipasi pada keseluruhan keuntungan.

Penelitian Adhikari, *et al.* (2014), mengatakan bahwa insentif program partisipasi yang diberikan bagi pengelolaan sumberdaya dan pemerintahan dibawah pengawasan *community forestry program* di Nepal, belum mampu dan tidak cukup untuk menciptakan partisipasi masyarakat secara efektif, dikarenakan adanya perbedaan status sosial keluarga, budaya dan kelembagaan.

Djamhuri, (2012), melakukan penelitian pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengatasi gangguan-gangguan hutan yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan menggunakan teknik *random sampling*, sebanyak 60 orang Petani Tumpang Sari sebagai responden. Penelitiannya mengatakan bahwa tumpang sari sebagai salah satu insentif program partisipasi merupakan cara tradisional dalam pengelolaan hutan. Dikatakan masalah yang perlu diselesaikan dalam PHBM adalah masalah kompensasi/insentif program partisipasi.

Pengelolaan sumberdaya hutan bukan kayu (HHBK) tidak hanya dilakukan oleh Petani Tumpang Sari (*TS farmers*). Namun juga dilakukan oleh kelompok masyarakat di sekitar hutan milik negara (*State Forest Community/SFC*).

Pengelolaan sumberdaya HHBK meliputi: pengelolaan produk kayu bakar, biji-bijian, dedaunan dan produk lainnya. Sebagai contoh, SFC mengizinkan pemanfaatan kayu bakar hanya dari ranting atau cabang pohon yang jatuh, dimana hal ini juga berlaku bagi pemanfaatan daun pohon hutan. Pengambilan rumput (*grazing*) diijinkan tetapi hanya pada kawasan tertentu pada hutan dengan umur pohon yang lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Namun kenyataannya, pengambilan rumput terjadi juga pada kawasan yang dilarang atau dilindungi. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka diajukan model ilustrasi insentif program partisipasi hasil manfaat kayu bagi setiap LMDH dan memberikan ijin pengajuan kawasan permanen untuk *grazing area* melalui WPH dengan persetujuan SFC.

SFC juga menyadarkan para petani untuk ikut menanam rumput untuk memenuhi kebutuhan ternaknya. Meskipun seluruh LMDH menyatakan bahwa sumberdaya hutan tersedia dalam suatu WPH, namun harus dimanfaatkan secara baik dan tidak *over exploitasi*. Sehingga masyarakat desa hutan (*forest village*) diharapkan ikut berpartisipasi melalui program LMDH dan SFC. Perlu adanya penetapan zona tradisional (*traditional zone*) oleh PHBM untuk mengatasi adanya *over grazing* pada area yang dilarang untuk dimanfaatkan masyarakat, selain masyarakat diharapkan juga menanam rumput sendiri di kebun atau pekarangan rumahnya.

Kaseya & Kihonge (2016), melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat secara efektif di pemerintahan tingkat kabupaten Nairobi di Kenya. Hasil penelitian mengatakan bahwa pendidikan warga negara (*civic education*) merupakan peranan penting terhadap partisipasi masyarakat secara efektif di kabupaten Nairobi Kenya. Sebanyak 68.5% penduduk yang tinggal di kabupaten tersebut telah berpartisipasi dalam forum-forum pendidikan. Forum-forum pendidikan diadakan oleh organisasi masyarakat sipil dan pemerintah kabupaten. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa pendidikan warga negara (*civic education*) efektif dalam forum/pertemuan dengan dihadiri masyarakat sebesar 86%. Akhirnya beberapa strategi diusulkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, meliputi: (1) menawarkan adanya program insentif program partisipasi, (2) pemberitahuan lebih awal forum partisipasi masyarakat, (3) penggunaan berbagai macam metode dalam hal ini meliputi: *mass media*, *social media*, *website*, *others*, dan *public meeting*, (4) mengalokasikan dana lebih banyak untuk pendidikan warga negara, (5) dan formulasi kebijakan untuk mengarahkan partisipasi masyarakat diantara mereka.

2.2.4. Insentif Program Partisipasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pendapatan produk hutan berhubungan positif dan signifikan terhadap pendapatan kepala rumah tangga yang memiliki akses lebih luas terhadap sumberdaya hutan. Rumah tangga yang sejahtera di Nigeria dapat diperbaiki melalui program yang dapat menstimulasi peningkatan pendapatan setidaknya dari hasil sumberdaya hutan (William & Elias, 2009).

Joint Forest Management Program (JFM program) merupakan agenda kerjasama pengelolaan dan konservasi hutan berbasis masyarakat lokal. Argumentasi yang mendasari program ini adalah bahwa sumberdaya hutan lokal mempunyai peranan penting bagi kehidupan masyarakat yang tinggal baik didalam kawasan maupun yang tinggal di sekitar kawasan hutan. *Joint Forest Management Program* (JFM) memberikan kontribusi dalam bentuk insentif program partisipasi yang dapat meningkatkan pendapatan bersih riil tahunan perkapita masyarakat miskin, akan berdampak pula pada peningkatan partisipasi masyarakat program JFM di West Bengal-India (Das & Sarker, 2010).

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan masyarakat oleh rumah tangga dapat menurunkan kemiskinan dalam rentang nilai 5–12 persen. Nilai koefisien kepemilikan lahan di hutan adalah positif dan signifikan pada tingkat 5%.

Artinya bahwa semakin besar kepemilikan lahan, maka semakin besar pula partisipasinya dalam program pengelolaan hutan masyarakat. Semakin kaya atau sejahtera rumah tangga maka akan semakin besar berpartisipasi dalam pengelolaan hutan masyarakat (*community forest management*) dibanding dengan rumah tangga yang lebih miskin (Rahut, *et al.* 2015).

Partisipasi masyarakat program *Collaborative Forest Management* (CFM) berdampak positif signifikan terhadap tingkat nutrisi rumah tangga, artinya bahwa hanya rumah tangga yang sejahtera dan kecukupan nutrisi makanannya yang

akan mempengaruhi tingkat partisipasinya dalam program CFM (Akamani & Hall, 2014). Selanjutnya dikatakan bahwa semakin sejahtera anggota masyarakat, maka akan berpengaruh positif terhadap partisipasi dalam program pengelolaan hutan secara kolaborasi.

2.2.5. Modal Sosial Terhadap Partisipasi Masyarakat

Sara, *et al.* (2011), melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh modal sosial terhadap partisipasi warga dalam usaha pengelolaan hutan di Taman Nasional Tehran Iran. Analisis korelasi menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan dan positif antara kesediaan warga untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan di Taman Nasional Tehran dan modal sosial pada tingkat 0/001. Hasil analisis ANOVA menunjukkan bahwa kesediaan untuk berpartisipasi dalam bidang eksekutif dan aktifitas manajerial Taman Nasional Teheran adalah berbeda-beda signifikansinya antar warga dengan perbedaan tingkat modal sosial (pada level 0/005). Kesimpulan bahwa partisipasi dan modal sosial mempunyai hubungan yang erat serta meningkatnya modal sosial juga akan meningkatkan partisipasi warga.

Sharpe (2012), melakukan penelitian yang bertujuan mengembangkan konsep hubungan masyarakat, partisipasi masyarakat dan modal sosial dalam proses pembangunan lokal yang berkaitan dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan keterlibatan NGO dalam usaha menyelamatkan dan mengamankan kawasan hutan. Penelitiannya mengatakan bahwa masyarakat dan lembaga masyarakat lokal berkaitan erat dengan modal sosial.

2.2.6. Modal Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Penelitian tentang modal sosial hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat juga dilakukan oleh Grootaet (1999), yang membahas mengenai hubungan antara modal sosial, dan kesejahteraan keluarga miskin di Indonesia.

Grootaert menggunakan model kesejahteraan dengan 5 variabel independen, meliputi: (1) sumberdaya modal sosial keluarga, (2) sumberdaya manusia keluarga, (3) sumberdaya keluarga lainnya, (4) faktor karakteristik keluarga, dan (5) faktor karakteristik wilayah/desa. Untuk mengukur modal sosial, Grootaert (1999) menggunakan 6 indikator meliputi: (1) kepadatan keanggotaan dalam organisasi/kelompok, (2) heterogenitas kelompok (*gender*, pendidikan, umur, agama, kekerabatan, pekerjaan keluarga, dan status ekonomi), (3) kehadiran dalam pertemuan, (4) tingkat keaktifan dalam pengambilan keputusan, (5) pembayaran iuran, dan (6) orientasi masyarakat. Dengan menggunakan metode regresi yang bertujuan menguji peranan institusi lokal dalam: (1) menyediakan pelayanan, dan (2) mempengaruhi kesejahteraan dan kemiskinan. Instrumen yang digunakan, meliputi: (1) Informasi pelayanan masyarakat yang diperoleh dari wawancara dengan informan kunci seperti: kepala desa, guru, petugas kesehatan dan lainnya, (2) pelayanan masyarakat dengan kelompok rumah tangga yang bertujuan mempelajari perspektif masyarakat terhadap kualitas layanan, pengalaman-pengalaman dengan kegiatan kolektif, pandangannya terhadap institusi lokal serta proyek-proyek pembangunan, dan (3) institusi lokal dengan para ketua dan anggota kelompok, dan non anggota kelompok untuk memperoleh keseimbangan pandangan peran institusi di desa, pembangunan masyarakat, aktifitas utama, dan hubungan dengan institusi dan pemerintahan lain. Teknik pengumpulan data dilakukan dari pada 48 desa yang diambil sebanyak 25 kepala rumah tangga dari setiap desa untuk berpartisipasi dalam *survey* rumah tangga. Desa tersebut berasal dari kecamatan Sarolangon Bangko, Batang Hari di Jambi, Banyumas dan Wonogiri di Jawa Tengah, Timor Tengah Selatan serta Ngada di NTT. Total responden adalah 1.200 kepala rumah tangga. Pengumpulan data dilakukan dengan cara *survey* rumah tangga (*household survey*) yang bertujuan

meraih partisipasi aktual rumah tangga dalam institusi lokal, penggunaan layanan dan informasi yang mengidentifikasi tingkat kesejahteraan rumah tangga.

Instrument yang digunakan memuat 6 (enam) bagian, meliputi: (1) informasi demografi anggota rumah tangga, (2) partisipasi pada institusi lokal, (3) karakteristik kelompok yang paling penting, (4) profil layanan provisi, (5) persepsi kepercayaan dan kolaborasi masyarakat, dan (6) ekonomi rumah tangga.

Pengukuran modal sosial dalam penelitian ini mengacu pada Grootaert (1999), dikarenakan penelitiannya mengukur modal sosial untuk mengurangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Kesejahteraan akan meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Peningkatan partisipasi masyarakat akan memperkecil biaya transaksi dan biaya kendali yang mampu menghasilkan *output* yang tinggi dan selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat..

Narayan & Pritchett (1997), melakukan penelitian tentang "*cent and socialibility: Household Income and Social Capital in Tanzania*" dengan menyusun sebuah indeks modal sosial dan mengujinya untuk melihat pengaruhnya terhadap pengeluaran rumah tangga di pedesaan Tanzania. dalam penelitiannya dengan menyusun sebuah indeks modal sosial dan mengujinya menggunakan metode regresi untuk melihat pengaruhnya terhadap pengeluaran rumah tangga di pedesaan Tanzania. Penyusunan indeks oleh Narayan dan Pritchett (1999), yaitu dengan mengkombinasikan berbagai variabel meliputi: (1) heterogenitas kelompok, (2) *inclusiveness* kelompok, dan (3) performa kelompok. Modal sosial dan survey kemiskinan (*The Social Capital and Poverty Survey/SCPS*) dilakukan di Tanzania pada bulan April dan Mei 1995. Responden merupakan rumah tangga yang dipilih secara *random* dengan sistem *cluster*. Total responden dari SCPS yang dijadikan sampel sebanyak 1376 rumah tangga yang berlokasi atau tinggal

pada 87 kluster. Indikator modal sosial meliputi: (1) keanggotaan dalam kelompok, (2) karakteristik kelompok, (3) nilai dan tingkah laku individu. Sebagian besar kelompok adalah masyarakat Kristen, Islam, kelompok wanita dan partai politik. Kelompok dibagi menjadi lima kategori, meliputi: 1) heterogenitas anggota kelompok kin, 2) heterogenitas pendapatan anggota, 3) fungsi kelompok, 4) kelompok pembuat keputusan, dan 5) anggota voluntir. Sebelum menguji hipotesis, informasi, situasi dan aktifitas masyarakat dilakukan melalui *survey*. Masyarakat di Tanzania sangat miskin dimana rata-rata tingkat pengeluaran konsumsi per rumah tangga hanya 50 sen per hari atau sekitar 180\$ per tahun (periode 1993-1994). Hasil penelitian menemukan bahwa meningkatnya satu persen standar deviasi dari indeks modal sosial akan meningkatkan 20 persen pengeluaran rumah tangga per kapita. Dengan demikian modal sosial adalah sangat penting untuk menganalisa pendapatan dan kemiskinan. Pengeluaran rumah tangga pada satu desa sebagai fungsi modal sosial dari rumah tangga lainnya pada desa yang sama dan menemukan pengaruh yang kuat pada tingkat rumah tangga dan masyarakat.

2.2.7. *Social Learning* Terhadap Partisipasi Masyarakat

Penelitian oleh Fernandez, *et al.* (2008), mengatakan bahwa keuntungan yang diperoleh melalui pengelolaan sumberdaya secara kolaborasi dapat meningkatkan pemahaman dan *social learning* diantara masyarakat yang berpartisipasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan (*trust*) dan *sense of community* yang mana berpotensi untuk kemandirian masyarakat itu sendiri. Hasil penelitiannya menemukan bahwa *monitoring* secara kolaboratif dapat menciptakan: (1) pemahaman bersama tentang ekologi, (2) membangun kepercayaan internal, dan (3) membangun kredibilitas eksternal.

Penelitian oleh Berkes (2009), mengatakan bahwa *social learning* sebagai peningkatan partisipasi dalam program *co-management* menghasilkan: (1) tingkat kepercayaan yang tinggi, dan (2) sikap proaktif berhubungang positif dengan *social learning* yang baru, (3) *social learning* berhubungang positif dengan: kinerja, kepuasan kerja, dan identifikasi organisasi. Adapun variabel yang diteliti meliputi: (1) pembelajaran dan proses sosialisasi, (2) taktik sosialisasi, (3) sikap proaktif, dan (4) penilaian. *Bridging organizations* dan *knowledge* merupakan dua karakter yang penting dalam sistem *co-management*. *Networking* didapatkan melalui *bridging organizations* yang juga membantu mengatasi konflik, membangun kepercayaan, kemudahan terhadap sumberdaya yang dibutuhkan, membangun visi dan menginformasikan tujuan serta kinerja. *Bridging organizations* sangat penting, karena mampu menyediakan sejumlah layanan, dan fasilitas yang berhubungan.

2.2.8. Social Learning Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Nur Jannah (2015), mengatakan bahwa untuk menghasilkan proses yang berkelanjutan program pembangunan masyarakat (*community development program*), maka keseluruhan aktivitas yang melibatkan baik masyarakat maupun pihak eksternal ditempatkan sebagai bagian dari *social learning*. Melalui proses *social learning* tersebut masyarakat akan menjadi semakin kompeten terhadap berbagai persoalan di lingkungan komunitasnya maupun di lingkungan yang lebih makro. Kompetensi warga masyarakat ditunjukkan oleh dua komponen yaitu tanggung jawab sosial dan kapasitas. Bertanggung jawab untuk selalu berusaha memperbaiki kondisi kehidupan yang lebih baik dan sejahtera dilakukan baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bersama. Dengan demikian melalui proses *social learning* akan meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan

masyarakat melalui program pembangunan masyarakat (*community development program*).

Penelitian tentang *social learning* terhadap kesejahteraan masyarakat oleh Hemerijck (2005), mengatakan bahwa sebagian besar anggota negara Uni Eropa (*Member State of the European Union/EU*) telah melakukan reformasi kesejahteraan yang komprehensif sejak tahun 1990-an. Kehidupan *social learning*, partisipasi aktif merupakan hal yang sangat penting, karena partisipasi dalam kehidupan sosial adalah krusial untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Sikap saling menghormati, dan berkesempatan berpartisipasi secara aktif harus dilakukan oleh setiap orang untuk meraih kesejahteraan.

Yamauchi (2005), melakukan penelitian dengan menguji pengaruh *social learning* suatu generasi dengan pendapatan rumah tangga di desa. Berikutnya juga menguji pengaruh pembelajaran lintas masyarakat (*cross-community schooling*) terhadap pendapatan rumah tangga. Penelitiannya menyebutkan bahwa rumah tangga dari kalangan petani yang berpendidikan mampu meraih pendapatan yang lebih tinggi daripada rumah tangga yang tidak berpendidikan. Asumsinya bahwa, ukuran kepemilikan rata-rata lahan yang dimiliki oleh petani dengan latar pendidikan yang baik, menghasilkan panen yang lebih baik selama kurang lebih tiga tahun, sedangkan petani yang tidak mempunyai pendidikan, menghasilkan panen yang lebih rendah. Dengan demikian pembelajaran dalam proses *social learning* berpengaruh meningkatkan pendapatan rumah tangga.

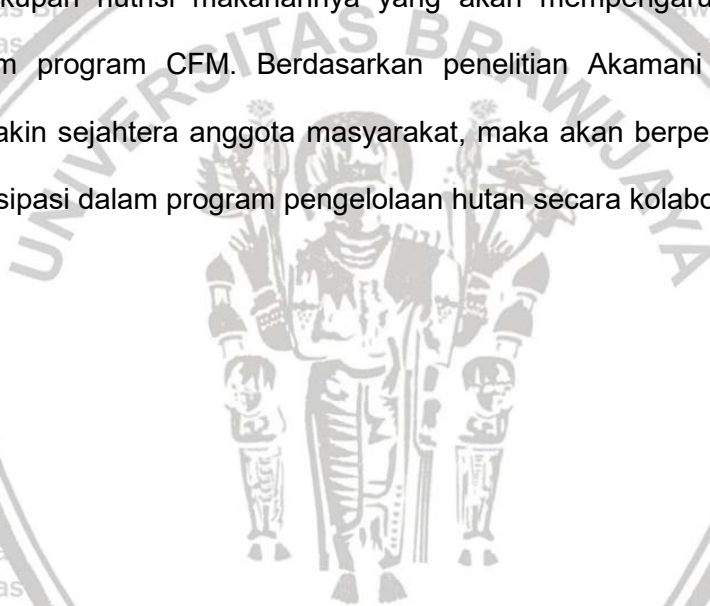
2.2.9. Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat

Penelitian oleh Rahut, *et al.* (2015) mengatakan bahwa hanya rumah tangga yang berpendidikan, usia muda dan sejahtera yang mempengaruhi tingkat partisipasinya dalam program pengelolaan hutan masyarakat (*community forest management*). Hal ini disebabkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan

masyarakat, maka semakin berpeluang untuk memperoleh pekerjaan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat.

Semakin muda usia anggota masyarakat, maka semakin berpeluang untuk berpartisipasi dalam program pembangunan, dibanding dengan usia tua yang cenderung sulit menerima perubahan dan hal-hal baru.

Akamani & Hall (2014), menyatakan bahwa partisipasi masyarakat program *collaborative forest management* berdampak positif signifikan terhadap tingkat nutrisi rumah tangga, artinya bahwa hanya rumah tangga yang sejahtera dan kecukupan nutrisi makanannya yang akan mempengaruhi tingkat partisipasinya dalam program CFM. Berdasarkan penelitian Akamani & Hall (2014), maka semakin sejahtera anggota masyarakat, maka akan berpengaruh positif terhadap partisipasi dalam program pengelolaan hutan secara kolaborasi.



BAB III

KERANGKA KONSEP PENELITIAN

3.1 Kerangka Konsep Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, kajian teori dan empiris, disusunlah sebuah kerangka konseptual penelitian, meliputi: (1a) hubungan kelembagaan kehutanan dengan partisipasi masyarakat; (1b) hubungan kelembagaan kehutanan dengan kesejahteraan masyarakat; (2a) insentif program partisipasi dengan partisipasi masyarakat; (2b) insentif program partisipasi dengan kesejahteraan masyarakat; (3a) modal sosial dengan partisipasi masyarakat; (3b) modal sosial dengan kesejahteraan masyarakat; (4a) *social learning* dengan partisipasi masyarakat; (4b) *social learning* dengan kesejahteraan masyarakat; dan (5) kesejahteraan masyarakat dengan tingkat partisipasi masyarakat.

Kerangka konseptual sebagaimana disebutkan diatas, dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Hubungan kelembagaan kehutanan dengan partisipasi masyarakat, oleh Baynes, *et al.* (2015), dikatakan bahwa pengelolaan hutan lindung, dan/atau hutan masyarakat (HKM) sangat memerlukan adanya keeratan hubungan lembaga kehutanan. Keeratan hubungan lembaga kehutanan dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam implementasi program pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Akamani & Hall (2014), mengatakan bahwa ada tiga indikator kelembagaan yang baik (*good governance*). Indikator dari *good governance*, meliputi: (a) adanya hubungan atas dasar kepercayaan (*trust based relationship*); (b) adanya hubungan timbal balik dengan jaringan (*networks of reciprocity*); (c) kemudahan informasi (*access to information*) dari institusi kehutanan serta pihak lain yang terkait.

Muro & Namusonge (2015), mengatakan bahwa indikator kelembagaan yang baik meliputi: (a) mengedepankan prinsip akuntabilitas; dan (b) mengedepankan prinsip transparansi. Kelembagaan yang baik akan memotivasi masyarakat berpartisipasi dalam program pembangunan berkelanjutan. Lise, W (2000) mengatakan bahwa hutan digunakan sebagai sumber pendapatan penting bagi pemerintah di India. Pengelolaan hutan yang baik sangat diperlukan dalam usaha memperbaiki hutan yang rusak. Kelembagaan kehutanan (*forest institution*) memegang peranan penting meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan di India.

Good governance merupakan pemerintahan yang mengimplementasikan tanggung jawab secara efisien dan efektif serta menjaga sinergi interaksi yang konstruktif dengan negara, sektor swasta dan masyarakat (Widodo, 2001). Keeratan kelembagaan kehutanan terhadap kesejahteraan masyarakat, oleh Wagener (2004), penelitiannya bertujuan mencari tahu mekanisme *good governance* dan tatanan ekonomi mempengaruhi hasil ekonomi. Pengujian hipotesisnya meliputi; (1) *good governance* menciptakan keamanan, kepercayaan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat; dan (2) *bad governance* menciptakan ketidakpercayaan, kecemasan, dan ketidakpastian perekonomian. Akib, et al. (2016), mengatakan bahwa: 1) Kelembagaan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dengan indikator konsumsi dan *human development index* (HDI); 2) Kelembagaan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dengan konsumsi khusus dan indikator *human development index* (HDI) melalui laporan audit; 3) Kelembagaan tidak berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat melalui bantuan finansial pemerintahan lokal; dan (4) Kelembagaan tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dengan indikator GDP melalui laporan audit.

Adhikari, *et al.* (2014), menyatakan bahwa insentif program partisipasi merupakan mekanisme bantuan baik berupa materi dan non materi yang bertujuan membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta berdampak positif terhadap partisipasi masyarakat secara aktif dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

Hubungan insentif program partisipasi dengan partisipasi masyarakat, oleh Adhikari, *et al.* (2014), menyebutkan bahwa nilai-nilai lingkungan dan pelayanan dapat diberikan kepada masyarakat sebagai insentif program partisipasi meningkatkan partisipasi dalam program *community forest user's group* (CFUG), dimana masyarakat lokal harus diberikan kompensasi atas usahanya memperkuat komitmennya mengelola hutan dan menyelamatkan lingkungan. Djamhuri (2012), mengatakan bahwa pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) di Kabupaten Bora, Jawa Tengah adalah mengatasi permasalahan dan gangguan hutan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa Tumpang Sari sebagai salah satu Insentif program partisipasi yang merupakan cara tradisional dalam pengelolaan hutan. Bahkan masalah yang perlu diselesaikan dalam PHBM adalah masalah kompensasi/insentif program partisipasi. Kaseya & Kihonge (2016), melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat secara efektif di pemerintahan tingkat kabupaten Nairobi di Kenya. Insentif program partisipasi dalam bentuk bantuan finansial dikatakan secara efektif mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sebesar 62,5%.

Strategi yang ditempuh untuk memperbaiki partisipasi masyarakat yaitu: (1) pemberian insentif program partisipasi finansial (37.5%), (2) pertemuan/forum diadakan pada waktu yang tepat (37.5%); (3) meningkatkan kesadaran masyarakat (12.5%); dan (4) perpindahan partisipasi yang diadakan dari kabupaten, dilakukan ke kota lain (12.5%).

Hubungan insentif program partisipasi dengan kesejahteraan masyarakat oleh Rahut, *et al.* (2015), mengatakan bahwa rumah tangga yang berpendidikan, usia muda dan sejahtera berpengaruh terhadap partisipasi dalam program pengelolaan hutan masyarakat (*community forest management*).

Menggunakan analisis *propensity score matching* (PSM) dan *probit model*. Hasil penelitian menyatakan bahwa partisipasi dalam pengelolaan hutan masyarakat oleh rumah tangga dapat menurunkan kemiskinan dalam rentang nilai 5–12 persen. Nilai koefisien kepemilikan lahan di hutan adalah positif dan signifikan

pada tingkat 5% signifikan. Semakin besar kepemilikan lahan, semakin besar pula partisipasinya dalam program pengelolaan hutan masyarakat. Artinya

bahwa semakin kaya atau sejahtera rumah tangga, akan semakin besar berpartisipasi dibanding rumah tangga yang lebih miskin. Penelitian oleh William & Elias (2013), yang menguji dampak distribusi pendapatan hasil hutan terhadap

kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Nigeria. Temuan dalam penelitiannya menyatakan bahwa pendapatan hutan mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Nigeria. Analisis determinan pendapatan hutan menggunakan *Heckman's 2 step sample selection model*, yang menandakan

bahwa keputusan berpartisipasi dalam pengelolaan hutan akan meningkat jika: (1) adanya akses yang lebih luas terhadap kawasan hutan masyarakat; (2) tingkat pendidikan; serta (3) semakin tingginya nilai transfer hasil pendapatan.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa pendapatan dari produk hutan berhubungan positif dan signifikan terhadap pendapatan kepala rumah tangga yang memiliki akses lebih luas terhadap sumberdaya hutan. Rumah tangga yang sejahtera di

Nigeria dapat diperbaiki melalui: (1) kebijakan dan program yang dapat menstimulasi peningkatan pendapatan setidaknya dari hasil sumberdaya hutan,; (2) membantu rumah tangga miskin mencari pendapatan dari alternatif sumber

pendapatan seperti pertanian dan perdagangan. Das & Sarker (2010),

mengatakan bahwa *joint forest management program* (JFM program) merupakan agenda kerjasama pengelolaan dan konservasi hutan berbasis masyarakat lokal.

Argumentasi yang mendasari program ini adalah bahwa sumberdaya hutan lokal mempunyai peranan penting bagi kehidupan masyarakat yang tinggal baik didalam kawasan maupun yang tinggal di sekitar kawasan hutan. *Joint Forest Management* (JFM) memberikan kontribusi dalam bentuk insentif program partisipasi yang dapat meningkatkan pendapatan bersih riil tahunan perkapita masyarakat miskin, akan berdampak pula pada peningkatan partisipasi masyarakat program JFM di West Bengal-India.

Pengukuran variabel insentif program partisipasi dalam penelitian ini yaitu menyesuaikan pengukuran insentif program partisipasi berdasarkan kondisi obyek dan berdasarkan penelitian dari Adhikari, *et al.* (2014); Djamhuri (2012); dan Kaseya & Kihonge (2016). Insentif program partisipasi yang diberikan oleh pihak lembaga kehutanan TN Baluran kepada masyarakat, meliputi: (1) insentif pelatihan; (2) insentif peralatan pertanian; (3) insentif uang tunai yang dapat digunakan sebagai peningkatan modal usaha; dan (4) insentif pengolahan lahan pertanian/kebun.

Program peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan akan berlangsung secara beriringan antara program pemerintah dengan penguatan kapasitas (*character building*) yang bersumber dari kelembagaan kehutanan, status sosial keluarga, budaya, dan aturan/norma masyarakat setempat yang tidak lain disebut sebagai modal sosial. Bentuk modal sosial di wilayah penelitian berkaitan dengan pengelolaan hutan di TN Baluran dan kegiatan ekonomi masyarakat lokal. Modal sosial yang ditemukan dalam penelitian, berkaitan adanya tukar menukar kebaikan antar anggota organisasi masyarakat Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP).

Hubungan modal sosial dengan partisipasi masyarakat, oleh Sara, *et al.* (2011) melakukan penelitian yang bertujuan menguji pengaruh modal sosial terhadap partisipasi warga dalam usaha pengelolaan hutan di Taman Nasional Tehran Iran. Analisis korelasi menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan dan positif antara kesediaan warga berpartisipasi dalam pengelolaan hutan di Taman Nasional Tehran dan modal sosial pada tingkat 0/001. Sharpe (2012), melakukan penelitian yang bertujuan mengembangkan konsep hubungan masyarakat, partisipasi masyarakat dan modal sosial dalam proses pembangunan lokal yang berkaitan dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan keterlibatan NGO dalam usaha menyelamatkan dan mengamankan kawasan hutan. Penelitiannya mengatakan bahwa masyarakat dan lembaga masyarakat lokal berkaitan erat dengan modal sosial.

Hubungan modal sosial dengan kesejahteraan masyarakat, oleh Grootaert (1999), mengukur modal sosial menggunakan 6 indikator meliputi: (1) kepadatan keanggotaan dalam organisasi/kelompok, (2) heterogenitas kelompok (*gender*, pendidikan, umur, agama, kekerabatan, pekerjaan keluarga, dan status ekonomi), (3) kehadiran dalam pertemuan, (4) tingkat keaktifan dalam pengambilan keputusan; (5) pembayaran iuran; dan (6) orientasi masyarakat. Menggunakan metode regresi yang bertujuan menguji peranan institusi lokal dalam: (1) menyediakan pelayanan; dan (2) mempengaruhi kesejahteraan dan kemiskinan. Instrumen yang digunakan, meliputi: (1) Informasi pelayanan masyarakat yang diperoleh dari informan kunci seperti: kepala desa, guru, petugas kesehatan dan lainnya; (2) pelayanan masyarakat kelompok rumah tangga yang bertujuan mempelajari perspektif masyarakat terhadap kualitas layanan, pengalaman-pengalaman kegiatan kolektif, pandangannya terhadap institusi lokal serta proyek-proyek pembangunan; dan (3) institusi lokal dengan para ketua dan anggota kelompok, dan non anggota kelompok memperoleh

keseimbangan pandangan peran institusi di desa, pembangunan masyarakat, aktifitas utama, dan hubungan institusi dan pemerintahan lain. Teknik pengumpulan data dilakukan dari pada 48 desa yang diambil sebanyak 25 kepala rumah tangga dari setiap desa berpartisipasi dalam *survey* rumah tangga. Desa tersebut berasal dari kecamatan Sarolangon Bangko, Batang Hari di Jambi, Banyumas dan Wonogiri di Jawa Tengah, Timor Tengah Selatan serta Ngada di NTT. Total responden adalah 1.200 kepala rumah tangga. Pengumpulan data dilakukan *survey* rumah tangga (*household survey*) yang bertujuan meraih partisipasi aktual rumah tangga dalam institusi lokal, penggunaan layanan dan informasi yang mengidentifikasi tingkat kesejahteraan rumah tangga. Instrument yang digunakan memuat 6 (enam) bagian, meliputi: (1) informasi demografi anggota rumah tangga; (2) partisipasi pada institusi lokal; (3) karakteristik kelompok yang paling penting; (4) profil layanan provisi; (5) persepsi kepercayaan dan kolaborasi masyarakat; dan (6) ekonomi rumah tangga.

Narayan & Prichett (1997), mengukur modal sosial dengan tiga variabel meliputi: (1) heterogenitas kelompok, (2) *inclusiveness* kelompok, dan (3) performa kelompok. Indikator modal sosial yang diukur meliputi: (1) keanggotaan dalam kelompok, (2) karakteristik kelompok; (3) nilai dan tingkah laku individu.

Hasil penelitian menemukan bahwa meningkatnya satu persen standar deviasi dari indeks modal sosial akan meningkatkan 20 persen pengeluaran rumah tangga per kapita. Modal sosial adalah sangat penting untuk menganalisa pendapatan dan kemiskinan. Pengeluaran rumah tangga pada satu desa sebagai fungsi modal sosial dari rumah tangga lainnya pada desa yang sama dan menemukan pengaruh yang kuat pada tingkat rumah tangga dan masyarakat.

Pengukuran modal sosial dalam penelitian ini menggunakan analisis SEM PLS yang menguji peranan modal sosial masyarakat anggota kelompok Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) terhadap partisipasi masyarakat dan

kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan di TN Baluran. Indikator variabel modal sosial dalam penelitian ini mengacu pada penelitian dari Grootaert (1999), dan menyesuaikan kondisi obyek penelitian, meliputi: (a) sikap tolong menolong, (b) kesepakatan terhadap norma sosial, (c) interaksi jejaring masyarakat dengan lembaga kehutanan (pengelola hutan, pengurus SPKP, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat), (d) tingkat kepercayaan pada anggota kelompok masyarakat, dan (e) bantuan kelompok desa penyangga. Pengumpulan data dilakukan *survey* kepala rumah tangga anggota SPKP yang bertujuan meraih partisipasi aktual rumah tangga terhadap partisipasinya dalam pengelolaan hutan di TN Baluran serta mengidentifikasi tingkat kesejahteraan rumah tangga.

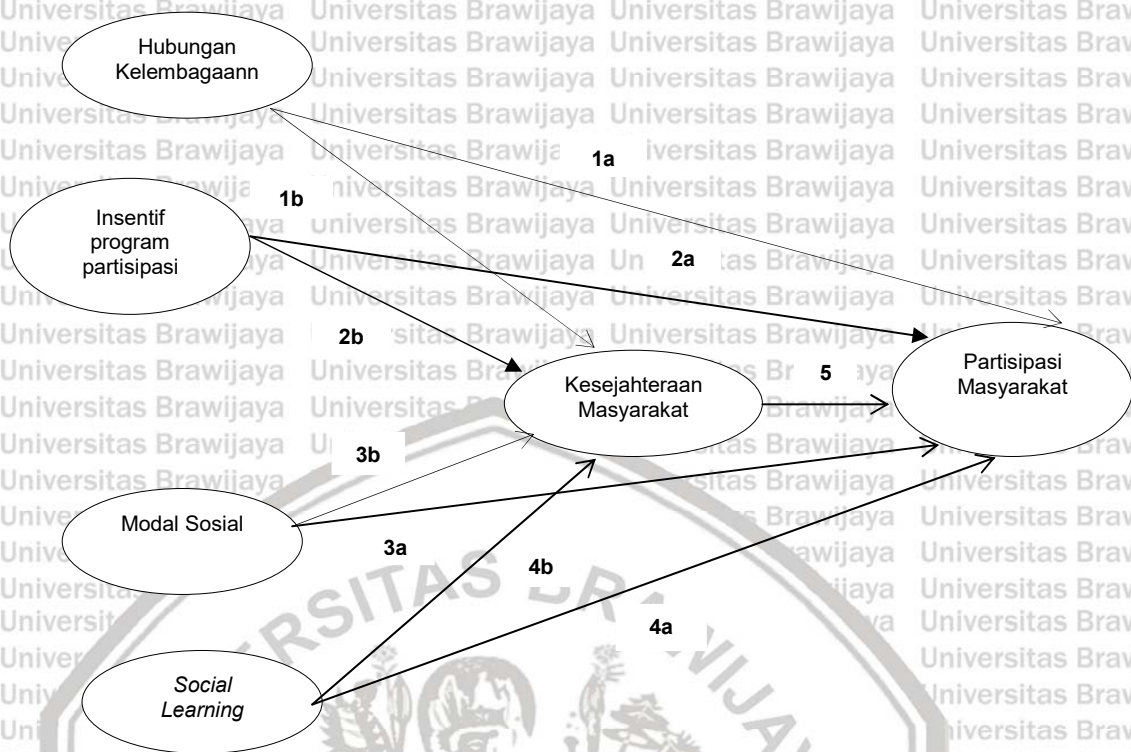
Hubungan *social learning* terhadap partisipasi masyarakat, oleh Berkes (2009), mengatakan bahwa *social learning* merupakan langkah yang paling efisien dalam hal: (1) pemecahan masalah bersama; (2) refleksi berbagi pengalaman; dan (3) berbagi ide. *Social learning* sangat tepat jika diterapkan terkait permasalahan partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan. Fernandez, et al. (2008), mengatakan bahwa keuntungan yang diperoleh melalui pengelolaan sumberdaya secara kolaborasi dapat meningkatkan pemahaman dan *social learning* diantara *participants* sehingga dapat meningkatkan *trust* dan *sense of community* yang berpotensi pada *community resilience*. Muro & Jeffry (2012), mengatakan bahwa *social learning* telah berkembang pesat sebagai kunci komponen partisipasi dan diambil secara khusus sebagai elemen penting dari partisipasi dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Hubungan *social learning* terhadap kesejahteraan masyarakat, oleh Hemerijck (2005), mengatakan bahwa sebagian besar anggota negara Uni Eropa (*Member State of the European Union/EU*) telah melakukan reformasi

kesejahteraan yang komprehensif sejak tahun 1990-an. Selain itu dikatakan bahwa dalam kehidupan *social learning*, partisipasi aktif merupakan hal yang sangat penting, karena partisipasi dalam kehidupan sosial adalah krusial mendapatkan penghargaan dari orang lain. Sikap saling menghormati, dan berkesempatan berpartisipasi secara aktif harus dilakukan oleh setiap orang meraih kesejahteraan. Yamauchi (2005) melakukan penelitian yang bertujuan menguji pengaruh *social learning* suatu generasi dengan pendapatan rumah tangga di desa. Berikutnya juga menguji pengaruh pembelajaran lintas masyarakat (*cross-community schooling*) terhadap pendapatan rumah tangga. Penelitiannya menyebutkan bahwa rumah tangga dari kalangan petani yang berpendidikan dan terlibat dalam proses *social learning*, mampu meraih pendapatan yang lebih tinggi daripada kalangan rumah tangga yang tidak berpendidikan.

Penelitian hubungan kesejahteraan dengan tingkat partisipasi masyarakat, oleh Rahut, *et al.* (2015). Penelitiannya mengatakan bahwa rumah tangga yang berpendidikan, usia muda dan sejahtera akan mempengaruhi motivasinya berpartisipasi dalam *community forest management*. Akamani & Hall (2014), menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat yang makin baik akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan masyarakat (*community forest management*). Hubungan antar variabel tersebut disajikan pada kerangka konseptual penelitian seperti pada gambar 3.1 berikut.

Gambar 3.1
Kerangka Konsep Penelitian



Keterangan:

- 1a : Baynes, *et al.* (2015); Akamani & Hall (2014); Muro & Namusonge (2015); Lise, W (2000).
- 1b : Wagener (2004); Akib, *et al.* (2016).
- 2a : Adhikari, *et al.* (2014); Djamhuri, (2012); Kaseya & Kihonge (2016)
- 2b : Rahut, *et al.* (2015); William & Elias, (2013); Das & Sarker (2010).
- 3a : Sara, *et al.* (2011); Sharpe (2012).
- 3b : Grootaet (1999); Narayan & Pritchett (1997).
- 4a : Berkes (2009); Fernandez, *et al.* (2008); Muro & Jeffry (2012).
- 4b : Hemerijck (2005); Yamauchi (2005).
- 5 : Rahut, *et al.* (2015); Akamani & Hall (2014)

3.2. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, tujuan penelitian, uraian-uraian teoritis dan studi empiris serta kerangka konseptual di atas, dikemukakan hipotesis yang merupakan jawaban sementara sebagai berikut.

3.2.1. Hubungan Kelembagaan Terhadap Partisipasi Masyarakat

Baynes, *et al.* (2015), menemukan faktor utama yang berpengaruh terhadap suksesnya *community forest groups (CFGs)* baik secara langsung dan tidak langsung (faktor pendukung). Penelitiannya mengatakan bahwa salah satu

faktor terpenting pengaruh suksesnya program *community forest* adalah (a) karena adanya hubungan antar pemerintahan yang bersifat demokrasi yang menyangkut tentang kepemimpinannya; (b) melakukan *voting*; dan (c) memberlakukan *benefit sharing* dapat memotivasi masyarakat terlibat dan berpartisipasi dalam aktifitas *CFGs*. Hubungan dan dukungan antar pemerintahan dengan partisipasi masyarakat sangat menentukan kesuksesan program *community forest groups*.

Akamani & Hall (2014), melakukan penelitian tentang model kemandirian masyarakat. Hipotesisnya adalah (1) keeratan hubungan kelembagaan kehutanan diharapkan mempunyai pengaruh positif secara langsung terhadap kapabilitas dan secara tidak langsung berpengaruh melalui partisipasi masyarakat dalam program *collaborative forest management* (CFM).

Lise, W (2000), mengatakan bahwa hutan digunakan sebagai sumber pendapatan penting bagi pemerintah di India. Pengelolaan hutan yang baik sangat diperlukan dalam usaha memperbaiki hutan yang rusak. Pemerintah tidak berdaya ketika masyarakat menolak berpartisipasi dalam pengelolaan hutan. Partisipasi masyarakat dibentuk dan diprakarsai oleh dinas tenaga kerja (*government employees*), ketua lokal, atau melalui lembaga masyarakat yang kuat. Peranan negara atau lembaga berpengaruh terhadap motivasi masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan hutan di India. Berdasarkan uraian tersebut, diusulkan hipotesis 1a, sebagai berikut.

Hipotesis 1a: Hubungan Kelembagaan Berpengaruh Positif signifikan Terhadap Partisipasi Masyarakat.

3.2.2. Hubungan Antara Keeratan Hubungan Kelembagaan, Kesejahteraan Masyarakat, dan Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam proyek pembangunan dimotivasi oleh gaya kepemimpinan suatu lembaga berdasarkan prinsip-prinsip *good*

governance yang mempengaruhi produktifitas, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Menurut UNDP (2000), beberapa karakteristik dari *good governance*: (1) adanya partisipasi dari setiap warga menggunakan haknya dalam proses pembuatan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan publik, baik secara langsung maupun secara tidak langsung; (2) penegakan hukum dan aturan yang adil bagi seluruh warga tanpa adanya perkecualian; (3) adanya transparansi yang dapat menciptakan saling percaya antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi; dan (4) adanya kesamaan kesempatan bagi setiap warga masyarakat memperbaiki kesejahteraaannya.

Penelitian pentingnya *good governance* terhadap kesejahteraaan masyarakat dilakukan oleh Wagener (2004), penelitiannya menguji hipotesis yang mengacu pada *Lorenzetti Hypothesis* bahwa *good governance* menciptakan keamanan, kepercayaan dan kesejahteraaan ekonomi masyarakat.

Akib, *et al.* (2016), melakukan penelitian yang bertujuan mengidentifikasi dan menjelaskan pengaruh *good governance* terhadap kesejahteraaan masyarakat. Data dianalisis menggunakan path analysis. Hasil penelitian mengatakan bahwa *good governance* berpengaruh terhadap kesejahteraaan masyarakat dengan indikator konsumsi dan *human development index*.

Rahut, *et al.* (2015), mengatakan bahwa hanya rumah tangga yang sejahtera yang mempengaruhi tingkat partisipasinya dalam program pengelolaan hutan masyarakat (*community forest management*). Akamani & Hall (2014), menyatakan bahwa partisipasi masyarakat program *collaborative forest management* berdampak positif signifikan terhadap tingkat nutrisi rumah tangga, artinya bahwa hanya rumah tangga yang sejahtera dan kecukupan nutrisi makanannya yang akan mempengaruhi tingkat partisipasinya dalam program CFM.

Berdasarkan penelitian Akamani & Hall (2014), bahwa semakin sejahtera anggota masyarakat, berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan hutan secara kolaborasi dengan melibatkan semua unsur yang berkepentingan. Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian Akib, *et al.* (2016) yang menyatakan pengaruh *good governance* terhadap kesejahteraan masyarakat, diturunkan hipotesis 1b, sebagai berikut:

Hipotesis 1b: Kesejahteraan Masyarakat Memediasi Pengaruh Hubungan Kelembagaan Terhadap Partisipasi Masyarakat

3.2.3. Hubungan Insentif Program Partisipasi Terhadap Partisipasi Masyarakat

Penelitian tentang insentif program partisipasi terhadap partisipasi dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan oleh Adhikari, *et al.* (2014), bertujuan melakukan penelitian secara sistematis apakah pengelolaan hutan kemasyarakatan di Nepal-India telah benar-benar memfasilitasi masyarakat dengan insentif program partisipasi yang cukup, memotivasi masyarakat bersedia terlibat dalam pengelolaan sumberdaya dan pemerintahan. Selain itu Adhikari, *et al.* (2014), juga mengidentifikasi insentif program partisipasi mana yang mampu meyakinkan kesediaan masyarakat berpartisipasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa insentif program partisipasi akan membedakan tingkat partisipasi anggota kelompok masyarakat pengguna sumberdaya.

Djamhuri (2012), mengatakan bahwa partisipasi anggota kelompok LMDH memiliki beberapa implikasi sebagai berikut: pertama, bahwa anggota kelompok LMDH berpartisipasi hanya jika ada insentif program partisipasi materi segera diberikan. Upah dan gaji tahunan bagi anggota kelompok LMDH adalah hanya insentif program partisipasi materi yang dapat memotivasi partisipasinya dalam pengelolaan dan perlindungan hutan. Hal ini disebabkan bahwa biaya

hidup mereka tidak memiliki interaksi dekat dengan hutan, dan partisipasi hanya berjalan jika anggota kelompok LMDH dibayar mahal. Kedua, di wilayah pemangku hutan (WPH) dimana anggota kelompok LMDH menerima hasil pembagian panen kayu seharusnya dapat membiayai biaya keamanan hutan. Wilayah Pemangku Hutan (WPH) sumberdaya hutan yang sedikit tidak mampu memberikan pembagian manfaat hasil hutan kepada masyarakat, maka mereka tidak mau berpartisipasi sesuai fungsinya sebagai anggota LMDH. Ketiga, jika proporsi pembagian hasil kayu kepada masyarakat kurang tepat, juga akan menurunkan partisipasi masyarakat. Pada pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM), pembagian manfaat hasil kayu diberikan berdasarkan investasi jangka pendek oleh LMDH.

Kaseya & Kihonge (2016), mengatakan bahwa Insentif program partisipasi finansial dikatakan secara efektif mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sebesar 62,5%. Insentif program partisipasi finansial yang diberikan oleh organisasi sosial masyarakat dan pemerintahan, berupa insentif program partisipasi uang transport dan uang makan. Insentif program partisipasi dapat memperbaiki dan meningkatkan persentase tingkat kehadiran peserta pertemuan/forum. Mewujudkan tingkat partisipasi meningkat secara efektif, maka jadwal pertemuan/forum sebaiknya diadakan selama akhir pekan (*during weekends*). Strategi yang ditempuh untuk memperbaiki partisipasi masyarakat yaitu: (1) pemberian insentif program partisipasi finansial (37.5%), (2) pertemuan/forum diadakan pada waktu yang tepat (37.5%); (3) meningkatkan kesadaran masyarakat (12.5%); dan (4) perpindahan partisipasi dari kabupaten ke kota lain (12.5%). Berdasarkan penelitian tersebut, diusulkan Hipotesis 2a, sebagai berikut:

Hipotesis 2a: Insentif program partisipasi Berpengaruh Positif signifikan Terhadap Partisipasi Masyarakat.

3.2.4. Hubungan Antara Insentif program partisipasi, Kesejahteraan Masyarakat, dan Partisipasi Masyarakat.

Penelitian oleh William & Elias (2009), menyatakan bahwa pendapatan produk hutan berhubungan positif dan signifikan terhadap pendapatan kepala rumah tangga yang memiliki akses lebih luas terhadap sumberdaya hutan. Rumah tangga yang sejahtera di Nigeria dapat diperbaiki melalui program yang dapat menstimulasi peningkatan pendapatan setidaknya dari hasil sumberdaya hutan.

Das & Sarker (2010), mengatakan bahwa *joint forest management program* (JFM program) merupakan agenda kerjasama pengelolaan dan konservasi hutan berbasis masyarakat lokal. Argumentasi yang mendasari program ini adalah bahwa sumberdaya hutan lokal mempunyai peranan penting bagi kehidupan masyarakat yang tinggal baik didalam kawasan maupun yang tinggal di sekitar kawasan hutan. JFM program memberikan kontribusi dalam bentuk insentif program partisipasi yang dapat meningkatkan pendapatan bersih riil tahunan perkapita masyarakat miskin, akan berdampak pula pada peningkatan partisipasi masyarakat program JFM di West Bengal-India.

Rahut, *et al.* (2015), mengatakan bahwa partisipasi dalam pengelolaan hutan masyarakat oleh rumah tangga dapat menurunkan kemiskinan dalam rentang nilai 5–12 persen. Nilai koefisien kepemilikan lahan di hutan adalah positif dan signifikan pada tingkat 5%. Artinya bahwa semakin besar kepemilikan lahan, semakin besar pula partisipasinya dalam program pengelolaan hutan masyarakat. Selain itu semakin kaya atau sejahtera rumah tangga, semakin besar berpartisipasi dalam pengelolaan hutan masyarakat (*community forest management*) dibanding rumah tangga yang lebih miskin.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kesejahteraan masyarakat juga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam

program pembangunan. Sebagaimana Rahut, *et al.* (2015), mengatakan bahwa hanya rumah tangga yang berpendidikan, usia muda dan sejahtera yang mempengaruhi tingkat partisipasinya dalam program pengelolaan hutan masyarakat (*community forest management*).

Selain itu Akamani & Hall (2014), juga menyatakan bahwa partisipasi masyarakat program *collaborative forest management* berdampak positif signifikan terhadap tingkat nutrisi rumah tangga, artinya bahwa hanya rumah tangga yang sejahtera dan kecukupan nutrisi makanannya yang akan mempengaruhi tingkat partisipasinya dalam program CFM. Berdasarkan penelitian Akamani & Hall (2014), bahwa semakin sejahtera anggota masyarakat, berpengaruh positif terhadap partisipasi program pengelolaan hutan secara kolaborasi yang melibatkan semua unsur yang berkepentingan. Berdasarkan telaah empiris yang telah diuraikan, diajukan hipotesis 2b sebagai berikut:

Hipotesis 2b: Kesejahteraan Masyarakat Memediasi Pengaruh Insentif program partisipasi Terhadap Partisipasi Masyarakat.

3.2.5. Hubungan Modal Sosial Terhadap Partisipasi Masyarakat

Sara, *et al.* (2011), melakukan penelitian yang bertujuan menguji pengaruh modal sosial terhadap partisipasi warga dalam usaha pengelolaan hutan di Taman Nasional Teheran Iran. Analisis korelasi menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan dan positif antara kesediaan warga berpartisipasi dalam pengelolaan hutan di Taman Nasional Tehran dan modal sosial pada tingkat 0/001. Hasil analisis ANOVA menunjukkan bahwa kesediaan berpartisipasi dalam bidang eksekutif dan aktifitas manajerial Taman Nasional Tehran adalah berbeda-beda signifikansinya antar warga dengan perbedaan tingkat modal sosial (pada level 0/005). Kesimpulannya bahwa partisipasi dan modal sosial mempunyai hubungan yang erat serta meningkatnya modal sosial juga akan meningkatkan partisipasi warga.

Sharpe (2012), melakukan penelitian yang bertujuan mengembangkan konsep hubungan masyarakat, partisipasi masyarakat dan modal sosial dalam proses pembangunan lokal yang berkaitan dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan keterlibatan NGO dalam usaha menyelamatkan dan mengamankan kawasan hutan. Penelitiannya mengatakan bahwa masyarakat dan lembaga masyarakat lokal berkaitan erat dengan modal sosial.

Masyarakat dalam kesehariannya sebagian besar melakukan pembangunan dan bahkan sumberdaya hutan dimanfaatkan secara besar bahkan di eksploitasi hingga habis. Keberadaan modal sosial mempunyai banyak manfaat untuk dianalisis dan diaplikasikan dalam kehidupan. Implikasi penelitiannya mengatakan bahwa pemerintah harus mampu memberikan perlindungan dan keamanan bagi masyarakat, melakukan pembangunan ekonomi dengan penyediaan berbagai fasilitas publik agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang konservasi dan pengelolaan hutan. Berdasarkan uraian ini, diajukan hipotesis 3b sebagai berikut:

Hipotesis 3a: Modal Sosial Berpengaruh Positif signifikan Terhadap Partisipasi Masyarakat

3.2.6. Hubungan Antara Modal Sosial, Kesejahteraan Masyarakat, dan Partisipasi Masyarakat.

Grootaet (1999), mengatakan bahwa modal sosial mempunyai beberapa manfaat jangka panjang seperti: kemudahan akses kredit yang baik, dan kemampuan memperoleh hasil pendapatan melalui pinjaman atau akumulasi modal. Secara empiris hasil studinya mengkonfirmasi validitas proposisi bahwa heterogenitas internal dan keanggotaan partisipasi aktif dalam pembuatan keputusan merupakan faktor kunci. Keanggotaan dalam produksi dan hubungan sosial mempunyai pengaruh yang sangat luas terhadap kesejahteraan rumah tangga dimana pengaruhnya dapat berkisar antara 4-6 kali lebih luas dari

keanggotaan asosiasi yang disponsori pemerintah. Ketika rumah tangga berpartisipasi aktif dalam pembuatan keputusan, manfaatnya bagi rumah tangga akan meningkat secara signifikan. Modal sosial berpengaruh terhadap kesejahteraan rumah tangga, tetapi dapat juga sebaliknya, semakin kaya rumah tangga akan berpeluang semakin tingginya permintaan bagi anggota asosiasi dan mempunyai lebih banyak waktu berpartisipasi meskipun *opportunity cost* dari mereka juga lebih tinggi.

Narayan & Pritchett (1997), mengatakan bahwa modal sosial rumah tangga desa merupakan faktor penting dalam menentukan pendapatan rumah tangga. Ahli ekonomteri mengestimasi dari tingkat modal sosial pada seluruh pendapatan rumah tangga yang ada di desa. Penelitiannya bertujuan memahami mekanisme modal sosial yang berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga di Tanzania.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian yang mengatakan kesejahteraan masyarakat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dilakukan oleh Rahut, *et al.* (2015) dan Akamani & Hall (2014). Berdasarkan penjelasan diatas, diajukan hipotesis 3b sebagai berikut:

Hipotesis 3b: Kesejahteraan Masyarakat Memediasi Pengaruh Modal Sosial Terhadap Partisipasi Masyarakat.

3.2.7. Hubungan *Social Learning* Terhadap Partisipasi Masyarakat

Penelitian yang mengamati tentang *social learning* kaitannya dengan partisipasi masyarakat dilakukan oleh Fernandez, *et al.* (2008): Berkes (2009).

Fernandez, *et al.* (2008), mengatakan bahwa keuntungan yang diperoleh melalui pengelolaan sumberdaya secara kolaborasi dapat meningkatkan pemahaman dan *social learning* diantara masyarakat yang berpartisipasi. *Social learning* dapat meningkatnya kepercayaan dan *sense of community*, yang berpotensi pada peningkatkan *community resilience* dan partisipasi masyarakat.

Berkes (2009), mengatakan bahwa *social learning* merupakan sekumpulan ilmu pengetahuan yang meliputi: pendidikan dan bisnis manajemen.

Manajemen lingkungan, dan pendekatan berbasis pembelajaran merupakan hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan. Fokus pada *learning-by-doing* melalui kegiatan interaktif, evaluasi dan modifikasi, *social learning* menjadi hal yang perlu dipertimbangkan didalam manajemen adaptif. Manajemen adaptif dan manajemen kolaborasi saling berkaitan. Hal ini dikarenakan manajemen adaptif tanpa kolaborasi akan kekurangan legitimasinya, begitu pula manajemen kolaborasi tanpa *learning-by-doing* tidak dapat membangun kemampuan memecahkan masalah. Lebih lanjut dikatakan Berkes (2009), bahwa strategi yang harus diambil untuk memfasilitasi atau memperbaiki manajemen kolaborasi meliputi: menjembatani dan memproduksi pengetahuan kolaborasi (*bridging and co-producing knowledge*); penelitian partisipasi (*participatory research*); monitoring secara kolaborasi (*collaborate monitoring*); membangun skenario partisipasi (*participatory scenario building*); mengukur distribusi yang merata dari kekuasaan manajemen kolaborasi dan akuntabilitas.

Muro & Jeffry (2012), mengatakan bahwa partisipasi masyarakat berperan secara terus-menerus sebagai pusat pengelolaan sumberdaya alam, walaupun sedikit pengetahuan tentang proses atau hasil yang baik. Keberhasilan proses partisipasi mendorong peneliti dan praktisi meneliti serta mengembangkan pendekatan baru, metode dan model keterlibatan masyarakat.

Social learning telah berkembang pesat sebagai kunci komponen partisipasi dan diambil secara khusus sebagai elemen penting dari partisipasi dalam pengelolaan sumberdaya alam. *Social learning* yang didiskusikan dalam konteks keterlibatan masyarakat dalam hal sekumpulan proses dan komunikasi pembelajaran yang diharapkan dapat membagikan pengetahuan dan pemahaman situasi dan kesepakatan tertentu. Teori *social learning* diharapkan

sebagai model yang berguna membentuk desain proses kolaborasi.

Berdasarkan uraian diatas, diusulkan hipotesis 4a, sebagai berikut:

Hipotesis 4a: Social Learning Berpengaruh Positif signifikan Terhadap Partisipasi Masyarakat.

3.2.8. Hubungan Antara Social Learning, Kesejahteraan Masyarakat, dan Partisipasi Masyarakat

Penelitian tentang *social learning* terhadap kesejahteraan masyarakat oleh Hemerijck (2005). Hasil penelitiannya mengatakan bahwa sebagian besar anggota negara Uni Eropa (*Member State of the European Union/EU*) telah melakukan reformasi kesejahteraan yang komprehensif sejak tahun 1990-an. Selain itu dikatakan bahwa dalam kehidupan sosial, partisipasi aktif (dalam pekerjaan) merupakan hal yang sangat penting, karena partisipasi dalam kehidupan sosial adalah krusial untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Saling menghormati merupakan kesempatan berpartisipasi aktif dalam masyarakat yang harus dilakukan oleh setiap orang.

Yamauchi (2005), melakukan penelitian yang bertujuan menguji pengaruh *social learning* suatu generasi dengan pendapatan rumah tangga di desa. Berikutnya juga menguji pengaruh pembelajaran lintas masyarakat (*cross-community schooling*) terhadap pendapatan rumah tangga. Penelitiannya menyebutkan bahwa rumah tangga dari kalangan petani yang berpendidikan mampu meraih pendapatan yang lebih tinggi daripada rumah tangga yang tidak berpendidikan. Yamauchi melakukan estimasi pengaruh marginal pembelajaran terhadap pendapatan panen dari setiap lahan. Ternyata pembelajaran dalam proses *social learning* berpengaruh meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian yang mengatakan kesejahteraan masyarakat berpengaruh terhadap partisipasi

masyarakat dilakukan oleh Rahut, *et al.* (2015) dan Akamani & Hall (2014).

Berdasarkan uraian diatas, diajukan hipotesis 4b, sebagai berikut:

Hipotesis 4b: Kesejahteraan Masyarakat Memediasi Pengaruh *Social Learning* Terhadap Partisipasi Masyarakat.

3.2.9. Hubungan Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat

Penelitian tentang kesejahteraan berpengaruh terhadap partisipasi, telah dilakukan oleh Rahut, *et al.* (2015), mengatakan bahwa secara empiris, hasil penelitiannya mengatakan bahwa partisipasi rumah tangga dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan di Bhutan, memiliki tingkat pendapatan lebih tinggi pada kisaran Ngultrum 2605–3169. Selain itu hasil penelitiannya juga menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam *community forest management* dapat menurunkan tingkat kemiskinan rumah tangga pada kisaran 5–12 persen.

Dari uraian sebelumnya yang dikemukakan oleh Rahut, *et al.* (2015) maupun Akamani & Hall (2014), dinyatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat yang makin baik akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan masyarakat. Disarankan oleh Akamani & Hall (2014), bahwa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program *Collaborative Forest Management* (CFM), lebih mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pada uraian terdahulu, hipotesis 5, sebagai berikut:

Hipotesis 5: Kesejahteraan Masyarakat Berpengaruh Positif signifikan Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat

3.3. Definisi Operasional Variabel

Seperti yang tersaji pada Gambar 3.2, seluruh variabel merupakan variabel laten, dengan kata lain variabel tersebut tidak langsung dapat diukur (*unobserved variable*) dan dijabarkan melalui indikator dan item untuk mengukur variabel tersebut. Variabel penelitian ini meliputi: (1) variabel eksogen terdiri dari:

keeratan hubungan kelembagaan, insentif program partisipasi, modal sosial, dan dan *social learning*; dan (2) variabel endogen terdiri dari: kesejahteraan masyarakat dan partisipasi masyarakat.

Seluruh variabel yang diteliti dalam penelitian ini diukur menggunakan *Skala Likert* lima poin. *Skala Likert* merupakan sebuah nilai berlapis sesuai tingkat kecenderungan jawaban responden (skor 1 = sangat tidak setuju, skor 2 = tidak setuju, skor 3 = ragu-ragu, skor 4 = setuju, dan skor 5 = sangat setuju).

Kesepahaman pengertian mengenai suatu variabel sangat dibutuhkan sebagai upaya mencegah perbedaan pendapat dan persepsi serta perlu diberikan definisi operasional dari masing-masing variabel secara jelas.

Mengetahui karakteristik yang ada pada masing-masing variabel penelitian, diperlukan suatu teknik tertentu agar menghasilkan suatu indikator empiris. Langkah tersebut diawali dengan menjabarkan masing-masing konsep atau variabel menjadi suatu definisi operasional, yaitu seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana mengukur variabel atau konsep tersebut. Menguji kesempurnaan definisi operasional dari masing-masing variabel atau konsep yang akan dituangkan kedalam instrumen penelitian.

Berdasarkan hipotesis yang telah disajikan, secara operasional ada 7 (tujuh) variabel penelitian yang dianalisis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hubungan kelembagaan merupakan hubungan lembaga kehutanan TN Baluran yang diwujudkan melalui keeratan hubungan dengan prinsip-prinsip *good governance* kepada anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) sebagai lembaga masyarakat. Ada 5 (lima) indikator keeratan hubungan kelembagaan meliputi:

- a. Akuntabilitas: merupakan perwujudan pertanggungjawaban lembaga kehutanan dalam mengelola sumber daya (SDM, dana, sarana prasarana, metode kerja) yang telah diberikan dan dikuasai dalam

rangka pencapaian tujuan melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas secara periodik.

b. Transparansi: adalah prasyarat utama mewujudkan akuntabilitas sebagai landasan pertanggungjawaban lembaga kehutanan dalam menyampaikan pendapat, saran, kritik, maupun argumentasi terhadap perbaikan kondisi kinerja atau kegiatan yang lebih baik dan terarah.

c. Hubungan berbasis kepercayaan: merupakan hubungan kelembagaan kehutanan dengan masyarakat atas dasar kepercayaan

d. Kesesuaian pelaksanaan peraturan kehutanan: merupakan payung hukum pengelolaan hutan yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat.

e. Kemudahan memperoleh informasi: adalah informasi yang diberikan oleh lembaga kehutanan kepada masyarakat tentang fungsi dan wewenang kelembagaannya .

2. Insentif program partisipasi merupakan pemberian tambahan penghasilan bagi segenap masyarakat anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) yang diberikan oleh pihak lembaga/pengelola hutan di TN Baluran bertujuan menumbuhkan motivasi berpartisipasi dalam pengelolaan hutan.

Ada 4 (empat) indikator pengukuran insentif program partisipasi meliputi:

a. Insentif pelatihan: adalah insentif berupa pelatihan yang diberikan kepada anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) oleh pemerintah atau lembaga kehutanan kepada masyarakat.

b. Insentif peralatan pertanian: adalah insentif berupa alat-alat pertanian sebagai penunjang produktifitas pertanian yang diberikan kepada anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) oleh pemerintah atau oleh lembaga kehutanan.

c. Insentif uang tunai: adalah insentif berupa uang tunai (*cash payement*) kepada anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP)

sebagai modal usaha yang bertujuan meningkatkan kemandirian dan kewirausahaan, baik yang diberikan oleh kehutanan sebagai wakil dari lembaga pemerintah.

d. Insentif pengelolaan lahan pertanian: adalah insentif berupa hak guna usaha (HGU) lahan hutan yang diberikan kepada anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) sebagai area pertanian.

3. Modal sosial merupakan norma yang dapat mendorong adanya kerjasama anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) sebagai lembaga masyarakat yang diwujudkan melalui sikap saling percaya antar warga masyarakat dengan lembaga kehutanan TN Baluran. Indikator modal sosial meliputi:

- a. Sikap tolong menolong dengan tetangga: merupakan kecenderungan saling tukar kebaikan antar anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP).
- b. Kesepakatan terhadap norma sosial: merupakan sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh seluruh anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) pada suatu entitas sosial tertentu.
- c. Interaksi jejaring masyarakat dengan lembaga kehutanan: merupakan hubungan yang tersusun akibat interaksi sosial anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) baik didalam maupun diluar komunitas dengan pemerintah daerah dan pengelola hutan.
- d. Tingkat kepercayaan pada anggota kelompok masyarakat: adalah bentuk kejujuran yang dimiliki oleh anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP), layak dipercaya, berperilaku konsisten, bertanggung jawab, saling menghargai/ menghormati dan tulus ikut berpartisipasi menjaga kelestarian hutan yang didukung pengelola.

e. Bantuan kelompok desa penyangga: merupakan bentuk bantuan modal usaha yang diperoleh anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) meningkatkan kemandirian masyarakat.

4. *Social learning* merupakan pengembangan pengetahuan dengan cara berbagi pengetahuan atau informasi terkait antara pengelola hutan dengan anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) untuk mengatasi permasalahan secara bersama unsur/pelaku yang berbeda-beda (*different actors*). Indikator *social learning* dalam penelitian ini meliputi:

- a. Berbagi pengetahuan: merupakan pengetahuan tentang pengelolaan hutan dari lembaga terkait disosialisasikan kepada anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP).
- b. Membangun komunikasi: merupakan jalinan komunikasi diantara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, *stakeholder*, dan anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) dalam pengelolaan hutan.
- c. Hubungan dengan *stakeholder*: merupakan jalinan hubungan yang harmonis antara *stakeholder* dengan anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP).

5. Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi rumah tangga anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) yang diukur berdasarkan pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas penunjang usaha.

Pengukuran kesejahteraan masyarakat dalam penelitian ini, digunakan 4 (empat) indikator meliputi:

- a. Pendapatan keluarga: merupakan penghasilan keluarga anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) dari usaha utama, tambahan dan usaha lainnya dalam 1 bulan.

- b. Pendidikan keluarga: merupakan kemudahan bagi keluarga anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) dalam mendapatkan pendidikan melalui jalur formal maupun non formal dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
- c. Kesehatan keluarga: merupakan kemudahan keluarga anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
- d. Fasilitas penunjang usaha: merupakan kepemilikan aset penunjang usaha oleh keluarga anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) yang digunakan untuk keperluan usaha.

6. Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) sebagai lembaga masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan pengelolaan hutan yang mencakup partisipasi perencanaan, pelaksanaan, penerimaan manfaat hingga kegiatan evaluasi dan monitoring. Pengukuran indikator partisipasi masyarakat meliputi:

- a) Partisipasi perencanaan program merupakan partisipasi masyarakat anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) dalam pengambilan keputusan melalui undangan rapat/pertemuan
- b) Partisipasi pelaksanaan merupakan partisipasi masyarakat anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) yang diwujudkan dengan memberikan sumbangan pemikiran, materi, dan tindakan sebagai anggota program.
- c) Partisipasi penerimaan manfaat merupakan manfaat yang diterima masyarakat anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) atas partisipasinya dalam pengelolaan hutan dan lingkungan hidup.

d) Partisipasi evaluasi dan monitoring merupakan partisipasi anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) memberikan saran perbaikan bagi pelaksanaan program selanjutnya.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel Laten	Indikator	Jumlah Item Pertanyaan	Sumber
Hubungan Kelembagaan	1. Akuntabilitas	2	Akamani & Hall (2014)
	2. Transparansi	2	
	3. Hubungan Berbasis Kepercayaan	2	
	4. Kesesuaian Pelaksanaan Peraturan Kehutanan	3	
	5. Kemudahan Memperoleh Informasi	2	
Insentif	1. Insentif Pelatihan	3	Adhikari, <i>et al.</i> (2014)
	2. Insentif Peralatan Pertanian	2	
	3. Insentif Uang Tunai	2	
	4. Insentif Pengelolaan Lahan Pertanian	2	
Modal Sosial	1. Sikap Tolong Menolong	4	Grootaet (1999)
	2. Kesepakan Terhadap Norma sosial	4	
	3. Interaksi Jejaring Masyarakat Dengan Lembaga Kehutanan	4	
	4. Tingkat Kepercayaan Pada Anggota Kelompok Masyarakat	4	
	5. Bantuan Kelompok Desa Penyangga	6	
Social learning	1. Berbagi Informasi atau Pengetahuan	2	Albert Bandura
	2. Membangun Komunikasi	2	
	3. Hubungan Dengan <i>Stakeholder</i>	2	
Kesejahteraan Masyarakat	1. Pendapatan Keluarga	3	Rahut, <i>et al.</i> (2015).
	2. Pendidikan Keluarga	3	
	3. Kesehatan Keluarga	3	
	4. Fasilitas Penunjang Usaha Keluarga	2	
Partisipasi Masyarakat	1. Partisipasi Perencanaan Program	2	Cohen (1997)
	2. Partisipasi Pelaksanaan	2	
	3. Partisipasi Penerimaan Manfaat	2	
	4. Partisipasi Evaluasi dan Monitoring	2	

Sumber: Penelitian, diolah (2017).

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan *positivist* yang bekerja dengan angka, datanya berwujud bilangan, dianalisis menggunakan statistik untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat spesifik, dan untuk melakukan estimasi bahwa suatu variabel tertentu mempengaruhi variabel lainnya (Creswell, *et al.* 2003).

Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini adalah untuk: (1) mengestimasi pengaruh hubungan kelembagaan, insentif program partisipasi, modal sosial, *social learning*, dan kesejahteraan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan konservasi, (2) mengetahui pengaruh variabel tingkat kesejahteraan yang diposisikan sebagai mediasi pengaruh variabel hubungan kelembagaan, insentif program partisipasi, modal sosial, dan *social learning* terhadap partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan konservasi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan alat analisis *Structural Equation Modelling (SEM) PLS*. Alasan penggunaan SEM PLS dalam penelitian ini karena terdapat variabel penelitian yang terbentuk dari indikator formatif yaitu KSJ (kesejahteraan masyarakat) dan variabel KLM (hubungan kelembagaan), ISN (insentif program partisipasi), MDS (modal sosial), SCL (*social learning*) serta PAR (partisipasi masyarakat) yang terbentuk dari indikator reflektif, serta hubungan model bersifat rekursif.

Solimun (2010:23), menjelaskan bahwa jika model struktural yang akan dianalisis memenuhi model rekursif dan variabel laten telah memiliki indikator yang bersifat

formatif, reflektif atau campuran, pendekatan yang paling tepat digunakan adalah *Structural Equation Modelling (SEM) PLS*.

Structural Equation Modelling (SEM) PLS merupakan metode analisis yang *powerfull* karena dapat diterapkan pada semua skala data, tidak membutuhkan banyak asumsi, dan ukuran sampel tidak harus besar. *Structural Equation Modelling (SEM) PLS* juga dapat digunakan sebagai konfirmasi teori (uji hipotesis) dan dapat digunakan pula untuk membangun hubungan yang belum ada landasan teorinya atau pengujian proposisi.

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

4.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada daerah atau kawasan wisata Taman Nasional Baluran (TNB) di Kabupaten Situbondo-Jawa Timur. Motivasi penelitian ini dikarenakan TN Baluran selain sebagai kawasan konservasi dengan berbagai potensi alam dan mempunyai daya tarik wisata, belum mampu sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan. Disisi lain hutan yang ada cenderung mengalami degradasi dan eksploitasi oleh masyarakat. Hal inilah yang menjadi motivasi penelitian dengan melakukan analisis partisipasi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat sebagai kunci suksesnya pengelolaan hutan.

4.2.2 Waktu Penelitian

Pengumpulan data dilakukan selama kurun waktu 6 bulan (Juli-Desember 2017) dengan melakukan wawancara dengan responden terhadap kuesioner yang berkaitan dengan variabel-variabel yang telah ditentukan dalam penelitian.

4.3 Populasi, Sampel dan Pengukuran Instrumen Penelitian

4.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat desa penyangga hutan sebagai anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP). Unit

analisis yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah rumah tangga yang diwakili oleh kepala rumah tangga sebagai anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP). Kepala rumah tangga dijadikan sebagai unit analisis dalam penelitian ini, dikarenakan kepala rumah tangga merupakan *decision maker* dalam suatu rumah tangga.

Anggota populasi merupakan kepala rumah tangga yang bertempat tinggal di lima (5) desa penyangga sebagai satu kesatuan wilayah pengelolaan hutan (WPH) TN Baluran serta menjadi anggota SPKP yang berjumlah 170 orang.

Adapun rincian anggota SPKP meliputi: (a) desa Wonorejo sebanyak 62 orang, (b) desa Sumber Anyar sebanyak 50 orang, (c) desa Sumber Waru sebanyak 33 orang, (d) desa Watu Kebo sebanyak 15 orang, dan (e) desa Bajul Mati sebanyak 10 orang.

4.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik, kualitas, dan ciri yang sama, serta dianggap mewakili suatu populasi (Sekaran, 2006).

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini, adalah *proportional random sampling*. Alasannya adalah populasi dalam penelitian ini adalah kepala rumah tangga sebagai anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) yang memiliki perbedaan dalam hal: umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan/th. Responden dipilih secara *random* namun tetap secara proporsional dipilih dari lima desa penyangga (Wonorejo, Sumber Anyar, Sumber Waru, Watu Kebo, dan Bajulmati).

Penentuan jumlah sampel digunakan rumus Slovin, dengan langkah-langkah: (1) menghitung jumlah populasi dengan menggabungkan seluruh anggota SPKP dari lima desa penyangga TN Baluran, (2) menentukan jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian dengan rumus *Slovin* dengan presisi

5%, (3) menentukan kebutuhan sampel dari masing-masing desa penyangga berdasarkan prosentase jumlah anggota SPKP.

Rumus Slovin untuk penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n : Ukuran sampel N : Ukuran populasi

e : persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan yaitu maksimal 5 %

$$n = \frac{170}{1 + 170 (0.05)^2}$$

$n = 119,30$ orang yang dibulatkan menjadi 120 orang.

Jumlah kebutuhan sampel penelitian untuk masing-masing desa penyangga disajikan pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Kebutuhan Sampel Penelitian

No	Nama Desa Penyangga	Jumlah Kebutuhan Sampel
1	Desa Wonorejo	$62/170 \times 120 = 43$ orang
2	Desa Sumber Anyar	$50/170 \times 120 = 35$ orang
3	Desa Sumber Waru	$33/170 \times 120 = 24$ orang
4	Desa Watu Kebo	$15/170 \times 120 = 10$ orang
5	Desa Bajulmati	$10/170 \times 120 = 8$ orang
Total Sampel		120 orang

Sumber: Analisis data primer, 2017.

Tabel 4.1, menjelaskan bahwa tiap-tiap desa dijadikan responden yang diambil secara proporsional dengan distribusi sebagai berikut: (a) desa Wonorejo 43 responden, (b) desa Sumber Waru 35 responden, (c) desa Sumber Anyar 24 responden, (d) desa Watu Kebo 10 responden, dan (e) desa Bajul Mati 8 responden.

4.3.3 Pengukuran Instrumen Penelitian

Variabel–variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan dalam bentuk daftar pertanyaan/ Pernyataan berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan masing-masing variabel penelitian. Pertanyaan/ pernyataan dalam daftar pertanyaan/ pernyataan diukur dengan menggunakan skala *likert*, yaitu skala yang dapat mengukur responden subjek kedalam 5 poin skala dengan interval yang sama (Hartono, 2004:67; dan Hartono, 2008:131).

Variabel-variabel dalam penelitian ini diukur dengan cara meminta responden untuk menyatakan persepsinya dengan memilih salah satu dari alternatif jawaban berupa lima angka penilaian: (5) sangat setuju, (4) setuju, (3) ragu-ragu atau netral, (2) tidak setuju, (1) sangat tidak setuju. Semakin besar nilai skor menunjukkan jawaban yang mendukung pertanyaan, begitu pula sebaliknya.

4.4 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

4.4.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden (Kumar & Phrommathed, 2005). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data mengenai persepsi responden kepala rumah tangga sebagai anggota SPKP tentang hubungan kelembagaan, insentif program partisipasi, modal sosial, *social learning*, kesejahteraan masyarakat dan partisipasi masyarakat.

4.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari berbagai instansi terkait dengan penelitian meliputi: bukti, catatan atau laporan-laporan, dokumen-dokumen yang telah tersusun dalam data dokumenter yang diterbitkan atau dipublikasikan. Data sekunder ini diperlukan untuk memperjelas dan menguatkan

hasil pengumpulan data penelitian yang diperlukan (Kumar & Phrommthed, 2005). Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi: data jumlah kunjungan wisatawan lima tahun terakhir, profil obyek penelitian, data kerusakan dan ancaman hutan TN Baluran, data dan luas lahan kebakaran hutan, program pemberdayaan dan bantuan ekonomi masyarakat desa penyangga, serta jenis sumberdaya yang dimanfaatkan masyarakat.

4.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisisioner, wawancara, dan studi dokumentasi.

- a. Kuisisioner yaitu dengan cara membuat daftar pertanyaan atau pernyataan yang berhubungan dengan penelitian, kemudian mendatangi responden dan membagikan angket atau kuisisioner kepada seluruh responden. Pengisian daftar pertanyaan atau pernyataan menyesuaikan waktu dan kesempatan dari tiap-tiap responden. Daftar pertanyaan atau pernyataan tersebut dipastikan selesai diisi dengan lengkap sebelum diambil berdasarkan kesepakatan antara responden dengan peneliti.
- b. Wawancara yaitu menggali informasi yang bersifat kualitatif dari satu atau beberapa responden melalui pertanyaan-pertanyaan yang bebas tidak terstruktur jika diperlukan tambahan informasi.
- c. Studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data dengan cara meneliti dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang ada di lembaga TN Baluran dan berhubungan dengan penelitian.

4.5 Uji Instrumen Penelitian

Penelitian kuantitatif untuk mendapatkan data penelitian yang baik atau akurat hanya bisa didapat dengan menggunakan instrumen yang handal (Zikmund, *et al.* 2012). Upaya menjamin kehandalan instrumen yang akan digunakan dalam pengumpulan data, maka instrumen sebelum disebarkan

kepada responden, terlebih dahulu harus dilakukan pengujian instrumen yang meliputi: (1) uji validitas isi (*content validity*), (2) uji validitas wajah (*face validity*), dan (3) uji validitas konstruk (*construct validity*) untuk variabel dengan indikator reflektif, meliputi: (a) validitas konvergen (*convergent validity*), (b) validitas diskriminan (*discriminant validity*), (c) reliabilitas indikator (*indikator reliability*), (d) reliabilitas konsistensi internal (*internal consistency reliability*) yang terdiri dari: (a) reliabilitas komposit (*composite reliability*), (b) *cronbach alpha*, dan (c) uji multikolinieritas (*multycollinierity test*) untuk variabel dengan jenis indikator formatif.

4.5.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur kehandalan instrumen penelitian, dalam hal ini adalah kuisisioner. Kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut (Zikmund, *et al.*, 2012). Instrumen dalam penelitian ini telah melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Validitas isi (*content validity*). Validitas isi (*content validity*) merupakan derajat bahwa suatu alat ukur mampu mengukur cakupan substansi masalah yang akan diukur. Untuk menjamin validitas isi daripada kuisisioner dalam penelitian, maka dilakukan pengumpulan literatur dan referensi yang terkait (jurnal, buku-buku yang terkait dengan variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini).
2. Validitas wajah (*face validity*). Validitas wajah (*face validity*) dalam penelitian ini digunakan untuk memastikan bahwa instrumen sudah dirancang dengan baik, mengikuti teori, dan konsep serta ketentuan yang ada. Validitas wajah (*face validity*) didasarkan pada pertimbangan para pakar atau ilmuwan. Dalam penelitian ini, validitas wajah (*face validity*) terkait penggunaan indikator, ketepatan struktur bahasa, dan tampilan kuisisioner yang telah disetujui oleh para dosen pembimbing (Promotor dan Co-promotor).

3. Validitas konstruk (*construct validity*). Validitas konstruk (*construct validity*) merupakan langkah terakhir untuk memastikan bahwa ketepatan rancangan instrumen penelitian diawali dengan uji coba dengan cara menyebarkan kuisisioner kepada para responden kepala rumah tangga yang tinggal di desa penyangga TN Baluran sebanyak 40 eksemplar kuisisioner kepada 40 responden. Dari 40 eksemplar yang disebar, dinyatakan lengkap pengisiannya: ini karena kuisisioner yang disebar diberi tenggang waktu sesuai kesepakatan antara responden dengan peneliti. Berdasarkan data yang terkumpul, kemudian dilakukan uji validitas konstruk (*construct validity*) dengan menggunakan *software WapPLS 5.0*. Validitas konstruk (*construct validity*) merupakan penilaian validitas atau ketepatan suatu item benar-benar dapat mengukur sesuatu yang harus diukur berdasarkan keterkaitan antar item pertanyaan yang mengukurnya. Tahapan pengujian validitas konstruk (*construct validity*) untuk variabel dengan jenis indikator reflektif, berbeda dengan variabel dengan indikator formatif.

Mengacu pada pendapat Kock (2015), bahwa tahapan uji validitas konstruk (*construct validity*) adalah sebagai berikut:

a) Uji variabel dengan indikator reflektif:

1. Uji validitas konvergen (*Convergent Validity*), yaitu pengukuran korelasi antar skor indikator reflektif dengan skor variabel latennya. Untuk hal ini nilai *loading* harus lebih besar dari 0.5.

Tabel 4.2
Hasil Pengujian Convergent Validity Try Out

Variabel	Indikator Variabel	Item Butir	Outer Loading	Keterangan
Hubungan Kelembagaan (X ₁)	Akuntabilitas (X _{1.1})	X111	0.561	Valid
		X112	0.503	Valid
	Transparansi (X _{1.2})	X121	0.586	Valid
		X122	0.613	Valid
	Hubungan Berbasis Kepercayaan (X _{1.3})	X131	0.583	Valid
		X132	0.561	Valid
	Kesesuaian Pelaksanaan Peraturan Kehutanan (X _{1.4})	X141	0.847	Valid
		X142	0.873	Valid
		X143	0.873	Valid
	Kemudahan Memperoleh informasi (X _{1.5})	X151	0.513	Valid
X152		0.531	Valid	
Insentif Program Partisipasi (X ₂)	Insentif Pelatihan (X _{2.1})	X211	0.552	Valid
		X212	0.532	Valid
	Insentif Peralatan Pertanian (X _{2.2})	X221	0.560	Valid
		X222	0.623	Valid
	Insentif Uang Tunai (X _{2.3})	X231	0.678	Valid
		X232	0.741	Valid
Insentif Pengelolaan Lahan Untuk Pertanian (X _{2.4})	X241	0.568	Valid	
	X242	0.535	Valid	
Modal Sosial (X ₃)	Tolong menolong (X _{3.1})	X311	0.518	Valid
		X312	0.520	Valid
		X313	0.524	Valid
	Norma sosial (X _{3.2})	X321	0.583	Valid
		X322	0.585	Valid
		X323	0.586	Valid
		X324	0.573	Valid
	Interaksi jejaring (X _{3.3})	X331	0.547	Valid
		X332	0.554	Valid
		X333	0.550	Valid
		X334	0.552	Valid
	Tingkat kepercayaan (X _{3.4})	X341	0.501	Valid
		X342	0.503	Valid
		X343	0.505	Valid
		X344	0.508	Valid
	Bantuan kelompok (X _{3.5})	X351	0.555	Valid
		X352	0.556	Valid
		X353	0.553	Valid
X354		0.557	Valid	
X355		0.557	Valid	
X356		0.556	Valid	
Social Learning (X ₄)	Berbagi informasi atau Pengetahuan (X _{4.1})	X411	0.564	Valid
		X412	0.590	Valid
	Membangun komunikasi (X _{4.2})	X421	0.546	Valid
		X422	0.562	Valid
Hubungan dengan <i>stakeholder</i> (X _{4.3})	X431	0.572	Valid	
	X432	0.567	Valid	
Partisipasi Masyarakat (Z ₁)	Partisipasi perencanaan program (Z _{1.1})	Z111	0.546	Valid
		Z112	0.505	Valid
	Partisipasi pelaksanaan (Z _{1.2})	Z121	0.544	Valid
		Z122	0.588	Valid
	Partisipasi penerimaan manfaat (Z _{1.3})	Z131	0.571	Valid
		Z132	0.562	Valid
Partisipasi evaluasi dan monitoring (Z _{1.4})	Z141	0.553	Valid	
	Z142	0.564	Valid	

Sumber: Pengolahan Data Try Out, 2017

Tabel 4.2, dapat disimpulkan bahwa indikator masing-masing variabel, yang meliputi: (1) hubungan kelembagaan, (2) insentif program partisipasi, (3) modal sosial, (4) *social learning*, dan (5) partisipasi masyarakat, telah memenuhi syarat validitas konvergen (*convergent validity*) karena setiap indikator variabel dengan item butirnya, memiliki nilai *outer loading* lebih besar dari 0.50 (> 0.50).

Seluruh indikator variabel penelitian ini adalah valid dan memenuhi syarat *convergent validity*.

2. Uji validitas diskriminan (*discriminant validity*), yaitu pengukuran indikator reflektif berdasarkan *cross loading* dengan variabel latennya. Bilamana nilai *cross loading* setiap indikator pada variabel bersangkutan terbesar dibandingkan dengan *cross loading* pada variabel latennya, maka dikatakan valid.

Metode lain dengan membandingkan nilai *Square Root of Average Variance Ectracted* (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antar konstruk latennya dalam model. Jika *Square Root of Average Variance Ectracted* (AVE) konstruk lebih besar dari korelasi dengan seluruh konstruk lainnya, maka dikatakan memiliki *discriminant validity* yang baik begitu pula sebaliknya (Kock, 2015).

Tabel 4.3
Hasil Pengujian *Discriminant Validity* Tahap *Try Out*
(*Correlations Among Latent Variables with Square Roots of AVEs*)

Variabel	Akar AVE	Skor Korelasi Antar Variabel Laten				
		KLM (X1)	ISN (X2)	MDS (X3)	SCL (X4)	PAR (Z1)
KLM (X1)	0.604		0.568	0.247	0.153	0.545
ISN (X2)	0.938	0.568		0.299	0.189	0.681
MDS (X3)	0.755	0.247	0.299		0.732	0.304
SCL (X4)	0.824	0.153	0.189	0.732		0.150
PAR (Z1)	0.892	0.545	0.681	0.304	0.150	

Sumber: Pengolahan Data *Try Out*, 2017.

Tabel 4.3, dapat disimpulkan bahwa indikator variabel hubungan kelembagaan, insentif program partisipasi, modal sosial, *social learning* dan partisipasi masyarakat telah memenuhi syarat validitas diskriminan (*discriminant*

validity), karena nilai dari *correlations among latent variables and errors* lebih besar dibandingkan korelasinya terhadap variabel yang lain.

4.5.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji untuk mengukur konsistensi suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Sekaran, 2006). Kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Neuman and Neuman, 2006).

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini, dilakukan dengan:

1. Reliabilitas Indikator (*Indicator Reliability*)

Reliabilitas indikator adalah besar kecilnya korelasi antara indikator dengan konstruk latennya, yang pada variabel dengan indikator reflektif ditunjukkan oleh hasil analisis *loading* faktor. Kuisioner memenuhi syarat reliabilitas indikator jika nilai *loading factor* >0.50 dan nilai *p-value* <0.05 .

Tabel 4.4, dapat dijelaskan bahwa semua indikator variabel dalam penelitian ini telah memenuhi syarat reliabilitas indikator, karena nilai faktor *loading* semuanya lebih besar dari ≥ 0.5 dan nilai *p-value* <0.001 . dinyatakan valid.

Tabel 4.4

Ringkasan Hasil Analisis Uji Reliabilitas Indikator Instrumen *Try Out*

Variabel	Indikator Variabel	Item Butir	Outer Loading	P-Value	Keterangan
Hubungan Kelembagaan (X ₁)	Akuntabilitas (X _{1.1})	X111	0.561	<0.001	Valid
		X112	0.503	<0.001	Valid
	Transparansi (X _{1.2})	X121	0.586	<0.001	Valid
		X122	0.613	<0.001	Valid
	Hubungan Berbasis Kepercayaan (X _{1.3})	X131	0.583	<0.001	Valid
		X132	0.561	<0.001	Valid
	Kesesuaian Pelaksanaan Peraturan Kehutanan (X _{1.4})	X141	0.847	<0.001	Valid
		X142	0.873	<0.001	Valid
		X143	0.873	<0.001	Valid
	Kemudahan Memperoleh informasi (X _{1.5})	X151	0.513	<0.001	Valid
X152		0.531	<0.001	Valid	
Insentif Program Partisipasi (X ₂)	Insentif Pelatihan (X _{2.1})	X211	0.552	<0.001	Valid
		X212	0.532	<0.001	Valid
		X213	0.535	<0.001	Valid
	Insentif Peralatan Pertanian (X _{2.2})	X221	0.560	<0.001	Valid
		X222	0.623	<0.001	Valid
	Insentif Uang Tunai (X _{2.3})	X231	0.678	<0.001	Valid
		X232	0.741	<0.001	Valid
	Insentif Pengelolaan Lahan Untuk Pertanian (X _{2.4})	X241	0.568	<0.001	Valid
		X242	0.535	<0.001	Valid
	Modal Sosial (X ₃)	Tolong menolong (X _{3.1})	X311	0.518	<0.001
X312			0.520	<0.001	Valid
X313			0.524	<0.001	Valid
X314			0.518	<0.001	Valid
Norma sosial (X _{3.2})		X321	0.583	<0.001	Valid
		X322	0.585	<0.001	Valid
		X323	0.586	<0.001	Valid
Interaksi jejaring (X _{3.3})		X324	0.573	<0.001	Valid
		X331	0.547	<0.001	Valid
		X332	0.554	<0.001	Valid
		X333	0.550	<0.001	Valid
Tingkat kepercayaan (X _{3.4})		X334	0.552	<0.001	Valid
		X341	0.501	<0.001	Valid
		X342	0.503	<0.001	Valid
		X343	0.505	<0.001	Valid
		X344	0.508	<0.001	Valid
		X351	0.555	<0.001	Valid
Bantuan kelompok (X _{3.5})		X352	0.556	<0.001	Valid
	X353	0.553	<0.001	Valid	
	X354	0.557	<0.001	Valid	
	X355	0.557	<0.001	Valid	
	X356	0.556	<0.001	Valid	
Social Learning (X ₄)	Berbagi informasi atau Pengetahuan (X _{4.1})	X411	0.564	<0.001	Valid
		X412	0.590	<0.001	Valid
	Membangun komunikasi (X _{4.2})	X421	0.546	<0.001	Valid
		X422	0.562	<0.001	Valid
	Hubungan dengan stakeholder (X _{4.3})	X431	0.572	<0.001	Valid
		X432	0.567	<0.001	Valid
Partisipasi Masyarakat (Z ₁)	Partisipasi perencanaan program (Z _{1.1})	Z111	0.546	<0.001	Valid
		Z112	0.505	<0.001	Valid
	Partisipasi pelaksanaan (Z _{1.2})	Z121	0.544	<0.001	Valid
		Z122	0.588	<0.001	Valid
	Partisipasi penerimaan manfaat (Z _{1.3})	Z131	0.571	<0.001	Valid
		Z132	0.562	<0.001	Valid
	Partisipasi evaluasi dan monitoring (Z _{1.4})	Z141	0.553	<0.001	Valid
		Z142	0.564	<0.001	Valid

Sumber: Pengolahan Data *Try Out*, 2017

2. Uji Reliabilitas Internal Konsistensi (*Consistency Internal Reliability*)

- a) Reliabilitas Komposit (*Composite Reliability*), merupakan kelompok indikator yang mengukur sebuah variabel reliabilitas komposit yang baik jika memiliki nilai batas yang diterima untuk tingkat *composite reliability* >0.70 . Berdasarkan ketentuan ini, maka hasil uji reliabilitas komposit dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
Hasil Pengujian *Composite Reliability Try Out*

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	Keterangan
Hubungan Kelembagaan (X_1)	0.861	Valid
Insentif Program Partisipasi (X_2)	0.862	Valid
Modal Sosial (X_3)	0.977	Valid
<i>Social Learning</i> (X_4)	0.874	Valid
Partisipasi Masyarakat (Z_1)	0.920	Valid

Sumber: Pengolahan Data *Try Out*, 2017

Hasil uji reliabilitas komposit sebagaimana disajikan pada Tabel 4.5, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian memenuhi syarat reliabilitas komposit, karena memiliki nilai *composite reliability coefficients* >0.70 .

- b) *Cronbach Alpha*. Suatu konstruk atau variabel dikatakan memenuhi unsur reliabilitas internal konsistensi, jika memiliki nilai *Cronbach Alpha* ≥ 0.60 . Berdasarkan ketentuan ini, hasil uji *Cronbach Alpha* dapat dilihat pada Tabel 4.6 dibawah ini.

Tabel 4.6
Hasil Uji Reliabilitas Internal Konsistensi (*Cronbach Alpha Coefficients*)

Variabel Penelitian	<i>Cronbach's Alpha</i>	Kriteria	Keterangan
Hubungan Kelembagaan (X_1)	0.822	≥ 0.60	Reliabel
Insentif Program Partisipasi (X_2)	0.816	≥ 0.60	Reliabel
Modal Sosial (X_3)	0.975	≥ 0.60	Reliabel
<i>Social Learning</i> (X_4)	0.825	≥ 0.60	Reliabel
Partisipasi Masyarakat (Z_1)	0.894	≥ 0.60	Reliabel

Sumber: Pengolahan Data *Try Out*, 2017

Hasil uji reliabilitas konsistensi sebagaimana tertera pada Tabel 4.6, disimpulkan bahwa instrumen penelitian memenuhi syarat reliabilitas konsistensi, karena memiliki nilai *Cronbach Alpha* ≥ 0.60 .

Uji keakuratan instrumen dengan variabel formatif, digunakan uji *full collinearity variances inflations factor* untuk mengetahui tingkat kolinieritasnya, meliputi:

1. Reliabilitas Indikator.

Variabel dengan indikator formatif, dalam penelitian ini adalah variabel kesejahteraan masyarakat, dapat dikatakan memenuhi reliabilitas indikator, jika *indicators weighth* signifikan, dengan ketentuan $VIF < 3.3$ dan $p\text{-value} < 0.05$. Berdasarkan ketentuan ini, hasil uji *indicators weighth* dapat dilihat pada Tabel 4.7. Instrumen dalam penelitian ini telah memenuhi syarat reliabilitas indikator, karena nilai $p\text{-value} < 0.05$ dan nilai $VIF < 3.3$.

Tabel 4.7
Hasil Uji Reliabilitas Indikator (*Indicators Weight*)

Variabel Penelitian	Indikator	Item Butir	P Value	VIF	Keterangan
Kesejahteraan Masyarakat (Y1)	Pendapatan keluarga (Y11)	Y111	<0.001	1.632	Valid
		Y112	<0.001	2.325	Valid
		Y113	<0.001	1.722	Valid
	Pendidikan keluarga (Y12)	Y121	<0.001	1.456	Valid
		Y122	<0.001	1.715	Valid
		Y123	<0.001	2.317	Valid
	Kesehatan keluarga (Y13)	Y131	<0.001	1.143	Valid
		Y132	<0.001	1.376	Valid
		Y133	<0.001	1.249	Valid
	Fasilitas penunjang usaha (Y14)	Y141	<0.001	1.288	Valid
		Y142	<0.001	1.167	Valid

Sumber: Pengolahan Data *Try Out*, 2017

2. Kolinieritas. Variabel dengan indikator formatif (variabel kesejahteraan masyarakat/Y1), memenuhi syarat kolinieritas jika nilai *variances inflation factor* (VIF) < 3.3 . Hasil analisis uji kolinieritas (*full collinearity VIFs*) dapat dilihat pada Tabel 4.8 di bawah.

Tabel 4.8
Hasil Uji Kolinieritas (Full Collinearity VIFs)

Full collinearity VIFs					
KLM	ISN	MDS	SCL	KSJ	PAR
2.863	3.159	1.163	3.276	2.652	2.258

Sumber: Pengolahan Data *Try Out*, 2017

Tabel 4.8, disimpulkan bahwa instrumen penelitian telah memenuhi syarat kolinieritas, karena nilai p-value <0.005 dan nilai VIF sebesar 2.652 (<3.3).

4.6 Analisis Data

4.6.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif pada dasarnya merupakan analisis untuk mendeskripsikan variabel penelitian tanpa menarik generalisasi (Neuman and Neuman, 2006). Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan persepsi responden terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian.

Analisis deskriptif dihitung berdasarkan persentase jawaban responden terhadap pertanyaan penelitian dengan menggunakan nilai rerata (*mean*) dari setiap indikator yang diajukan. Hal ini dilakukan untuk menggambarkan persepsi seluruh responden.

Interpretasi juga didasarkan pada nilai *loading factor* dari masing-masing indikator variabel untuk mengetahui sejauh mana kekuatan indikator dalam membentuk variabel laten yang digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini.

Tingkat penerimaan *loading factor* yang digunakan dalam penelitian ini minimal sebesar 0.5 sebagaimana yang ditentukan oleh Hair (2010). Interpretasi terhadap hasil *loading factor* digunakan pada variabel dengan indikator reflektif, yang dalam penelitian ini meliputi variabel: hubungan kelembagaan, insentif program partisipasi, modal sosial, *social learning*, dan partisipasi masyarakat.

Variabel kesejahteraan masyarakat, pengukuran kekuatan indikatornya

berdasarkan *indicator weight* karena variabel ini bersifat formatif. Nilai signifikansi bobot yang digunakan adalah minimal 0.2, sebagaimana pendapat Kock (2015).

4.6.2 Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisa yang menggunakan angka-angka dan perhitungan dengan metode statistik (Neuman and Neuman, 2006). Penelitian ini pada dasarnya ingin menguji pengaruh antar variabel dalam model penelitian yang telah dikembangkan dalam penelitian ini.

Variabel yang digunakan dalam penelitian secara keseluruhan merupakan variabel laten (variabel yang tidak dapat diukur secara langsung) dengan model hubungan bersifat rekursif. Selain itu indikator variabel dalam penelitian ini, ada yang terbentuk secara reflektif dan formatif. Pengukuran yang tepat, adalah dengan menggunakan metode *Structural Equation Model* (SEM) *WarpPLS* 5.0 (Solimun, 2017).

4.6.3 Analisis *Structural Equation Modelling* (SEM) PLS

Structural Equation Modelling (SEM) PLS adalah alat statistik yang dipergunakan untuk menyelesaikan model bertingkat secara serempak yang tidak dapat diselesaikan oleh persamaan regresi linier. SEM PLS dapat juga dianggap sebagai gabungan dari analisis regresi dan analisis faktor (Solimun, 2002).

Tahapan Analisis SEM dalam *WarpPLS*, dikelompokkan menjadi dua, yaitu: (1) Uji *Outer Model* (Model Pengukuran), yaitu analisis yang mengkaji hubungan variabel dengan indikatornya, meliputi: uji validitas konvergen (*convergent validity*), uji diskriminan (*discriminant validity*), reliabilitas komposit (*composite reliability*), dan multi kolinieritas, (2) Uji *Inner Model* (Model Struktural), yaitu menguji hubungan atau pengaruh antar variabel dalam model SEM. Pengujian *Outer Model* (model pengukuran) digunakan untuk menguji akurasi dan kehandalan instrumen penelitian. *Inner Model* (Pengujian Model)

digunakan untuk menguji hubungan antar konstruk (variabel) laten, dengan sebagaimana disajikan pada Tabel 4.9.

Model fit dan kualitas *indices* dapat dibuktikan dengan adanya nilai untuk *p-value* dari APC dan ARS harus lebih kecil dari 0.05, dikatakan signifikan. Selain itu, nilai AVIF multikolinieritas harus lebih kecil dari angka 5. Hasil analisis menunjukkan bahwa kriteria *goodness of fit* dengan nilai (APC)=0.283, dengan nilai *p-value* 0.012 (<0.05), dan nilai untuk *average R-squared* (ARS)=1.176, dengan *p-value* <0.001 (<0.05) dapat dikatakan juga signifikan, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9
Model Fit Indices dan P-Value (Inner Model) Try Out

No	Model Fit and Quality Indices	Hasil	p-value	Criteria Fit	Keterangan
1	Average path coefficient (APC)	0.283	0.012	$P < 0,05$	Fit
2	Average R-squared (ARS)	1.176	<0.001	$P < 0,05$	Fit
3	Average adjusted R-squared (AARS)	1.198	<0.001	$P < 0,05$	Fit
4	Average block VIF (AVIF)	3.290	Acceptable if ≤ 5	ideally ≤ 3.3	Diterima
5	Average full collinearity VIF (AFVIF)	2.295	Acceptable if ≤ 5	Acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3	Diterima
6	Tenenhaus Gof (GoF)	0.801	Large	Small ≥ 0.1 , medium ≥ 0.25 , large ≥ 0.36	Fit
7	Sympson's paradox ratio (SPR)	1.000	Acceptable if ≥ 0.7 ,	ideally =1	Diterima
8	R-squared contribution ratio (RSCR)	1.000	Acceptable if ≥ 0.9 ,	ideally =1	Diterima
9	Statistical suppression ratio (SSR)	1.000	Acceptable if ≥ 0.7 ,	ideally =1	Diterima
10	Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)	1.000	Acceptable if ≥ 0.7 ,	ideally =1	Diterima

Sumber: Data Try Out diolah, 2017

Tabel 4.10, menunjukkan bahwa kriteria *goodness of fit model* telah terpenuhi, karena nilai dari APC 0.283 dengan *p-value* 0.012 kurang dari 0.05 (<0.001 <0.05) signifikan. Nilai ARS sebesar 1.176 dengan *p-value* <0.001 kurang dari 0.05 (<0.001<0.05) signifikan. Nilai AARS sebesar 1.198 dengan *p-value* <0.001 kurang dari 0.05 (<0.001<0.05) signifikan. Nilai dari AVIF sebesar 3.290 dan nilai dari AFVIF sebesar 2.295 <5. Nilai dari Tenen GoFs sebesar 0.801, artinya model penelitian dalam penelitian ini termasuk kategori tinggi. Nilai RSCR sebesar 0.968 lebih besar dari 1.000, nilai SSR sebesar 1.000 lebih besar dari 0.7, dan nilai. Nilai SSR sebesar 1.000, lebih besar dari 0.7 (<0.7), artinya bahwa model dalam penelitian ini tidak terjadi *Statistical Suspression*, arah

hubungan antar variabel dalam hipotesisi sudah tepat dan penelitian ini telah memenuhi syarat *model of fit*.

4.6.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis pengaruh antar variabel sebagaimana yang dihipotesiskan dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis *Structural Equation Modelling* (SEM) PLS. SEM PLS memperhatikan hubungan kausalitas berbagai variabel dalam model, dan metode ini juga dapat mengidentifikasi dimensi dari sebuah konstruk sekaligus mengukur derajat hubungan antar variabel yang diidentifikasi dimensinya (Hair, 2010).

Hair (2010), mengatakan bahwa sebuah permodelan SEM yang lengkap pada dasarnya terdiri dari: (1) *measurement model*, yang digunakan untuk mengkonfirmasi dimensi atau faktor berdasarkan indikator-indikator empirisnya, dan (2) *structural model*, yaitu menggambarkan struktur hubungan yang membentuk atau menjelaskan kausalitas antar variabel.

Pengujian model dapat dilakukan dengan bantuan program WarpPLS 5.0 (Kock, 2015), dengan tujuan untuk menguji apakah model yang dikembangkan memiliki kesesuaian yang baik dan terdapat hubungan kausalitas sebagaimana yang dihipotesiskan.

Pengujian hipotesis dalam penelitian adalah: (1) **H1a**: hubungan kelembagaan berpengaruh positif signifikan terhadap partisipasi masyarakat, (2) **H1b**: kesejahteraan masyarakat memediasi pengaruh hubungan kelembagaan terhadap partisipasi masyarakat, (3) **H2a**: insentif program partisipasi berpengaruh positif signifikan terhadap partisipasi masyarakat, (4) **H2b**: kesejahteraan masyarakat memediasi pengaruh insentif program partisipasi terhadap partisipasi masyarakat, (5) **H3a**: modal sosial berpengaruh positif signifikan terhadap partisipasi masyarakat, (6) **H3b**: kesejahteraan masyarakat memediasi pengaruh modal sosial terhadap partisipasi masyarakat, (7) **H4a**:

social learning berpengaruh positif signifikan terhadap partisipasi masyarakat, (8)

H4b: kesejahteraan masyarakat memediasi pengaruh *social learning* terhadap partisipasi masyarakat, dan (9) **H5:** kesejahteraan masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat.

4.6.5 Analisis Jalur

Analisis jalur (*path analysis*) digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda, jika *independent* variabel mempengaruhi *dependent* variabel, baik secara langsung maupun secara tidak langsung (Byrne, 2013).

Structural Equation Modelling (SEM) PLS nilai koefisien jalur dinyatakan dengan " β " (beta) dan tingkat signifikansinya dinyatakan dengan notasi "p". Nilai koefisien jalur tersebut menunjukkan kekuatan pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. *P-value* adalah nilai peluang terkecil dari suatu pengujian hipotesis dan nilai statistik uji yang diamati masih berarti dan masih dianggap signifikansinya.

4.6.6 Efek Mediasi

Penelitian ini untuk menguji peran dan efek mediasi yang digunakan adalah pendekatan *causal step approach* yang dipopulerkan oleh Baron dan Kenny (1986). Pengujian menggunakan pendekatan ini yaitu: pertama dengan menguji efek utama dari variabel endogen ke variabel eksogen dan signifikan, kedua dilanjutkan dengan pengujian efek mediasi (Hair, Jr, et al. 2014).

Signifikansi *indirect effect* tidak dapat diketahui secara langsung, dan harus dihitung *manual* dengan rumus *Sobel Test*. Kelemahan dari *Sobel Test*, belum mampu menentukan apakah hasil analisis mediasi termasuk *non mediation*, *partial* atau *full mediation*.

Uji mediasi yang paling tepat adalah dengan menghitung nilai VAF (*Variance Accounted For*) yang dapat menentukan ukuran pengaruh hubungan

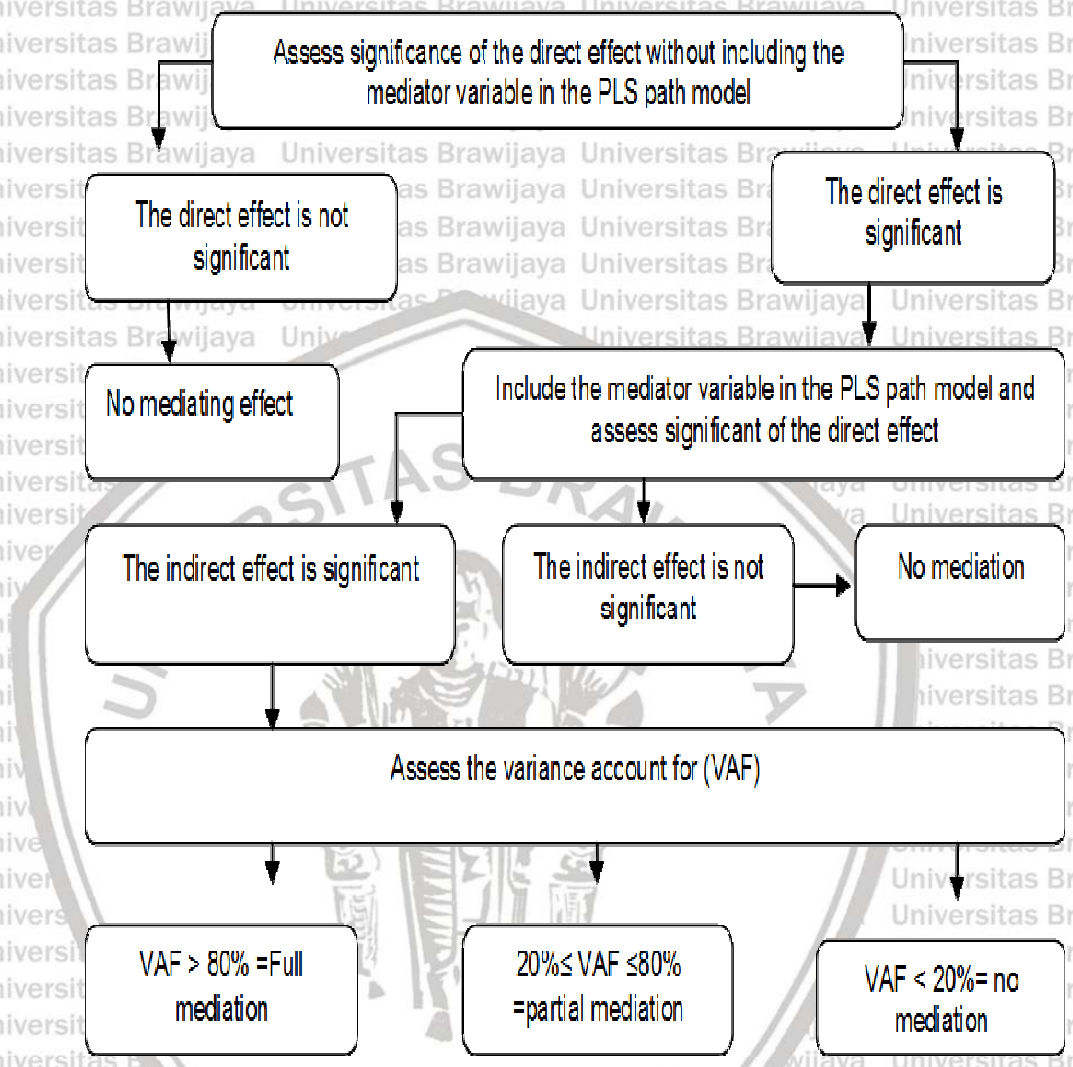
tidak langsung (indirect effect relation) terhadap pengaruh total effect (Hair, Jr, et al. 2014:225).

Efek mediasi dikatakan signifikan jika nilai *p-value indirect effect* kurang dari 0.05 (Hair, Jr, et al. 2014). Menurut Baron dan Kenny (1986) pendekatan *causal step approach* mempunyai 4 efek mediasi (Hair, Jr, et al. 2014:224), meliputi: (1) *non mediation*, terjadi apabila nilai VAF <20%; (2) *partial mediation*, terjadi apabila $20\% \leq VAF \leq 80\%$; (3) *full mediation*, terjadi apabila nilai VAF > 80%; dan (4) *supression mediation*, menandakan adanya tanda hubungan pengaruh *direct effect* berubah setelah variabel mediasi diikutkan.

Hair, Jr, et al. (2014), mengatakan bahwa prosedur analisis mediasi yang lebih baik dari *Sobel Test* yaitu dengan cara menghitung nilai *Variance Account For* (VAF) dengan terlebih dahulu: (1) peneliti harus memulai dengan analisis pengaruh langsung (*direct effect*) yang harus signifikan jika tanpa melibatkan mediasi dalam model, (2) tahap berikutnya dengan melibatkan analisis mediasi dalam model PLS jika ada hubungan pengaruh langsung antara variabel laten eksogen dan endogen, dimana ketika melibatkan pengaruh tidak langsung harus signifikan, (3) jika pengaruh tidak langsung hasilnya signifikan, maka variabel mediasi berpengaruh terhadap beberapa pengaruh langsung, (4) jika pengaruh tidak langsung signifikan, namun tidak berpengaruh terhadap variabel laten eksogen dan endogen, maka VAFnya rendah. Formula perhitungan adalah:
$$VAF = (p_{12} * p_{23}) / (p_{12} * p_{23} + p_{13})$$

Prosedur analisis mediasi SEM PLS lebih jelasnya disajikan pada gambar 4.1 sebagai berikut.

Gambar 4.1
Prosedur Analisis Mediasi SEM-PLS



Sumber: Hair, Jr, et al. (2014:224)

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Profil Taman Nasional Baluran

Luas Taman Nasional Baluran berdasarkan pengumuman Menteri Pertanian tanggal 6 Maret 1980, seluas 25.000 ha dan dikelola berdasarkan sistem zonasi. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 51/Kpts/Dj-VI/87 tanggal 12 Desember 1987, luas TN Baluran menjadi 28.750 ha, termasuk di dalamnya wilayah perairan seluas 3.750 ha.

Perubahan zonasi TN Baluran terjadi pada luasan zona rimba dan zona inti yang diubah berdasarkan analisis zonasi, dinamika kesosial kemasyarakatan dan kebijakan. Berdasarkan informasi dari Baluran (2014), bahwa TN Baluran mempunyai potensi hayati sebanyak 475 spesies yang termasuk dalam 100 famili. Sebanyak 475 spesies tersebut, ada 7 spesies termasuk spesies tumbuhan yang dilindungi, meliputi: *Buni*, *Kemiri*, *Kepuh*, *Kesambi*, *Mundu*, *Sonokeling*, dan *Trengguli*. Hutan Baluran juga memiliki aneka ragam spesies tumbuhan yang berkhasiat sebagai obat, dan banyak kajian dilakukan terhadap potensi tersebut.

Potensi non hayati dalam kawasan yang telah dikenali dan digali adalah struktur fisik *landscapes* yang menghasilkan keindahan alam sebagai daya tarik wisata hutan Baluran. Bentang pantai di hutan Baluran adalah potensi sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata, antara lain: pantai Bilik-Sijile, pantai Balanan, pantai Bama, dan pantai Candi Bang. Keindahan bawah laut dengan pemandangan terumbu karang dan kehidupan laut adalah potensi besar untuk pengembangan wisata pantai.

Perkembangan jumlah wisatawan yang datang ke TN Baluran, disajikan pada Tabel 5.1:

Tabel 5.1
Data Rekapitulasi Wisatawan TN Baluran Periode 2011-2016

No	Tahun	Pengunjung		Total
		Nusantara	Mancanegara	
1	2011	28,064	787	28,851
2	2012	31,475	1,199	32,674
3	2013	38,858	1,016	39,874
4	2014	59,089	1,212	60,301
5	2015	91,742	1,312	93,504
Total Keseluruhan		249,228	5,526	255,204

Sumber: Kantor Balai TN Baluran, 2017 (data diolah)

Tabel 5.1, menunjukkan jumlah pengunjung dalam kurun waktu 2011 sampai tahun 2015 cenderung naik. Terutama kunjungan wisatawan domestik dengan kenaikan 12%-15% pertahun. Pengelolaan hutan yang semakin baik khususnya di TN Baluran, berpotensi meningkatkan jumlah wisatawan melalui pengembangan pariwisata alam.

Usaha meningkatkan kualitas pengembangan *ecotourism*, peran serta masyarakat lokal sangat diperlukan. Salah satu tujuan pengembangan *ecotourism* adalah untuk memberikan alternatif tambahan peningkatan taraf hidup dan penyediaan lapangan kerja. Masyarakat harus terlibat dari proses awal perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan pengembangan *ecotourism* secara aktif. Pengembangan pariwisata alam yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, akan mampu menciptakan rasa tanggung jawab lokal (*local accountability*) dan rasa memiliki (*sense of belonging*) serta akan menjunjung tinggi keberadaan destinasi wisata di TN Baluran (Siswanto, 2010).

Upaya mendukung pelayanan pengunjung secara optimal dalam rangka peningkatan jumlah pengunjung di Taman Nasional Baluran, telah dilakukan berbagai kegiatan yang didukung oleh dana operasional divisi meliputi

pemantauan lokasi wisata alam yang ada di TN Baluran, kerjasama dengan dinas pariwisata Situbondo dan instansi maupun beberapa *stakeholder* lainnya.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari jasa lingkungan dan pelayanan di bidang pariwisata alam TN Baluran selama 5 (lima) tahun mengalami peningkatan dari 65 juta pada tahun 2011, menjadi 613 juta pada tahun 2015. Peluang untuk meningkatkan PNBP, yaitu melalui optimalisasi pariwisata alam dan pemanfaatan potensi hayati dan non hayati sebagai destinasi wisata andalan di dunia.

5.1.1. Ekosistem Taman Nasional Baluran

Tipe ekosistem di dalam kawasan TN Baluran meliputi: (1) hutan *mangrove*; (2) hutan payau; (3) hutan pantai; (4) savanna; dan (5) hutan musim.

Hutan payau merupakan tipe vegetasi yang umumnya berada di belakang formasi hutan *mangrove*, merupakan bentuk asosiasi tumbuhan mangrove dan tumbuhan darat di daerah pantai. Hutan pantai merupakan tipe vegetasi di daerah kering tepi pantai yang terletak di atas garis pasang tertinggi.

Savanna (padang rumput) yang ada di TN Baluran terdiri dua sub tipe yaitu: Savana Datar (*Flat savanna*); dan Savanna Berbukit/Bergelombang (*Undulating savanna*). Hutan Musim di TN Baluran memiliki dua sub tipe yaitu: Hutan musim dataran rendah yang dipengaruhi oleh kondisi iklim, didominasi jenis-jenis tumbuhan meranggas dan semusim; dan Hutan musim dataran tinggi, yang dapat dijumpai mulai ketinggian di atas 400 m dpl, hijau sepanjang tahun.

5.1.2. Profil Pegawai Balai TN Baluran Menurut Tingkat Pendidikan

Profil pegawai Balai TN Baluran dari 119 orang dapat dijelaskan bahwa: (a) pendidikan mayoritas pegawai adalah SLTA sebesar 55.5%; (b) status kepegawaian sebagian besar adalah pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 62.2%. Jabatan struktural sebanyak 4 orang berpendidikan lulusan perguruan tinggi. Pegawai non struktural sebanyak 24 orang, sebagian besar berpendidikan SLTA.

Tenaga fungsional meliputi: (a) polisi hutan sebanyak 31 orang (sebagian besar berpendidikan SLTA); (b) petugas ekosistem hutan (PEH) sebanyak 12 orang (dengan 50 % setingkat SLTA, dan 50 % setingkat sarjana); (c) penyuluh sebanyak 3 orang dengan pendidikan paling rendah setingkat SLTA; dan (d) tenaga upahan sebanyak 45 orang (dengan pendidikan sebagian besar Sekolah Dasar).

5.2. Profil Masyarakat Desa Penyangga Hutan TN Baluran

Masyarakat desa penyangga hutan merupakan masyarakat yang tinggal di sekitar atau di dalam kawasan hutan dan mempunyai potensi besar berinteraksi dengan hutan. Profil masyarakat desa penyangga hutan di TN Baluran disajikan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2
Profil Desa Penyangga TN Baluran

No	Nama Desa	Luas Wilayah (ha)	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1	Wonorejo	414.2	6,591	2,171
2	Sumber Waru	557,2	4,233	427
3	Sumber Anyar	145.0	15,338	5,594
4	Bajul Mati	411.4	5,112	3,850
5	Watu Kebo	235.0	3,115	320
	Jumlah	1,205.6	34,389	12,362

Sumber: Monografi Desa, 2017 (Data Diolah)

Tabel 5.2, menunjukkan bahwa sebaran penduduk antar desa sangat tidak merata. Desa yang berpenduduk paling sedikit adalah Desa Watu Kebo dengan jumlah 320KK, dan penduduknya paling banyak adalah Sumber Anyar sebesar 17x jumlah penduduk Desa Watu Kebo.

5.2.1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi: umur responden, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan jumlah tanggungan dalam keluarga. Karakteristik responden yang dominan (Tabel 5.3) meliputi: (1) umur responden sebagian besar masuk dalam usia produktif (77,5%); (2) dengan

didominasi kaum pria (90.%); (3) tingkat pendidikan setara sekolah lanjutan (86.67%); (4) pekerjaan utama penduduk adalah Petani termasuk Buruh Tani (67%); (5) pendapatan >10 juta pertahun (45,0%).

Tabel 5.3
Karakteristik Responden Kepala Rumah Tangga

Kriteria	Frekuensi (orang)	Persen (%)
Umur	18-28	8.33
	29-39	26.67
	40-50	42.50
	51-60	20.00
	≥ 61	2.50
Jumlah	120	100%
Jenis Kelamin	Pria	90.00
	Wanita	10.00
Jumlah	120	100%
Tingkat pendidikan	SD	0.0
	SLTP	49.17
	SLTA	37.50
	Sarjana	13.33
Jumlah	120	100%
Pekerjaan	Petani	45.00
	Buruh tani	22.50
	Wiraswasta	19.17
	Pedagang	1.67
	PNS	11.67
Jumlah	120	100%
Pendapatan/Th	<Rp. 5 juta	0.00
	Rp. 5-10 Juta	35.83
	>10 Juta	64.17
Jumlah	120	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2017.

Pendapatan rata-rata per kapita setiap kepala keluarga berkisar antara Rp.250.000-sampai Rp. 300.000 per bulan atau hanya Rp. 7.500 sampai Rp. 10.000 per hari untuk kebutuhan setiap hari. Artinya bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar hutan TN Baluran masih tergolong rendah, karena masih dibawah nilai rata-rata pendapatan per kapita kabupaten Situbondo sebesar Rp.

549.500 (BPS, 2017). Pendapatan per kapita kepala rumah tangga desa penyangga hutan TN Baluran, masih dibawah nilai rata-rata pendapatan per kapita kabupaten Situbondo.

Petani dan Buruh Tani secara keseluruhan yang ada di dalam kawasan hutan TN Baluran sebanyak 545 KK yang diberi ijin mengelola lahan hutan. Luas lahan kawasan yang tersedia seluas 875 ha untuk 545 KK. Setiap kepala keluarga mengelola lahan rata-rata seluas 1,5 ha untuk bertani atau berkebun.

Luasan lahan tersebut masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Petani dan Buruh Tani, dikarenakan lahan garapannya merupakan lahan kering yang hanya ditanami pada saat musim hujan. Tanaman yang ditanami adalah tanaman jagung, cabai, jeruk nipis, dan bawang merah, dengan masa panen maksimal dua kali dalam setahun.

5.3 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

5.3.1 Uji Validitas

Uji validitas pada dasarnya dilakukan untuk menguji sejauhmana alat ukur yang digunakan dalam penelitian mampu mengukur sesuatu yang akan diukur.

Instrumen penelitian dikatakan valid jika mampu mengungkapkan data-data dari variabel yang diteliti. Tahapan uji validitas instrumen pada penelitian ini telah dipaparkan pada Bab IV. Pembahasan uji validitas pada bab ini dimaksudkan untuk melakukan konfirmasi ulang atas kehandalan instrumen penelitian dengan mendasarkan pada data yang telah diambil. Fokus pembahasan uji validitas pada bab ini adalah pada validitas konstruk (*construct validity*).

Variabel dengan indikator reflektif, validitas data dilakukan dengan: (1) uji validitas konvergen (*convergent validity*) dengan parameter nilai *Average Variance Extracted (AVE)*; (2) validitas diskriminan (*discriminant validity*); dan (3) uji reliabilitas yang meliputi: (a) uji reliabilitas indikator (*Indicator Reliability*) dengan parameter *loading factor*, dan (b) reliabilitas internal konsistensi

(*consistency internal reliability*) yang dilakukan dengan uji: (1) reliabilitas komposit (*composite reliability*); dan (2) *cronbach alpha*.

Variabel dengan indikator formatif, uji validitasnya dilakukan dengan uji *significance weight* dengan parameter *indicators weight* atau bobot faktor dan kolinearitas (*collinierity*) dengan parameter *Variance Inflation Factor* (VIF).

Penggunaan analisis SEM PLS bertujuan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen, dilakukan pengukuran model yang disebut *outer model* (Kock, 2015). Analisis ini menspesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikator-indikatornya atau mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya.

Variabel dengan indikator reflektif dalam penelitian ini adalah variabel hubungan kelembagaan, insentif program partisipasi, modal sosial, *social learning*, dan partisipasi masyarakat. Variabel dengan indikator formatif adalah variabel kesejahteraan masyarakat, karena pengukurannya mengarah pada dimensi-dimensi atau aspek-aspek yang membentuk variabel kesejahteraan masyarakat.

a) Validitas Konvergen

Penghitungan uji validitas konvergen (*convergent validity*) untuk mengetahui item-item indikator instrumen yang dapat digunakan sebagai indikator dari sebuah variabel laten/konstruk.

Hasil uji validitas konvergen diukur berdasarkan besarnya nilai *loading factor* (*outer loading*) dari indikator konstruk. Hasil pengujian validitas konvergen (*convergent validity*) dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 5.4. Seluruh nilai *outer loading* dari masing-masing item indikator konstruk memiliki nilai lebih besar dari 0.5 (>0.5) dan *p-value* <0.05 adalah *valid*.

Tabel 5.4
Hasil Pengujian Validitas Convergent Post Test

Variabel	Indikator Variabel	Item Butir	Outer Loading	Keterangan	
Hubungan Kelembagaan (X₁)	Akuntabilitas (X _{1.1})	X111	0.619	Valid	
		X112	0.571	Valid	
		X121	0.639	Valid	
	Transparansi (X _{1.2})	X122	0.626	Valid	
		X131	0.625	Valid	
	Hubungan Berbasis Kepercayaan (X _{1.3})	X132	0.569	Valid	
		X141	0.741	Valid	
	Kesesuaian Pelaksanaan Peraturan Kehutanan (X _{1.4})	X142	0.743	Valid	
		X143	0.672	Valid	
		X151	0.574	Valid	
	Kemudahan Memperoleh informasi (X _{1.5})	X152	0.533	Valid	
		X211	0.549	Valid	
	Insentif Program Partisipasi (X₂)	Insentif Pelatihan (X _{2.1})	X212	0.517	Valid
			X213	0.568	Valid
			X221	0.684	Valid
Insentif Peralatan Pertanian (X _{2.2})		X222	0.760	Valid	
		X231	0.579	Valid	
Insentif Uang Tunai (X _{2.3})		X232	0.673	Valid	
		X241	0.778	Valid	
Insentif Pengelolaan Lahan Untuk Pertanian (X _{2.4})		X242	0.888	Valid	
		X311	0.660	Valid	
Modal Sosial (X₃)		Sikap Tolong Menolong (X _{3.1})	X312	0.670	Valid
	X313		0.604	Valid	
	X314		0.715	Valid	
	X321		0.518	Valid	
Kesepakatan Terhadap Norma Sosial (X _{3.2})	X322	0.529	Valid		
	X323	0.643	Valid		
	X324	0.575	Valid		
	X331	0.565	Valid		
Interaksi jejaring Masyarakat Dengan Lembaga Kehutanan (X _{3.3})	X332	0.578	Valid		
	X333	0.675	Valid		
	X334	0.555	Valid		
	X341	0.559	Valid		
Tingkat Kepercayaan pada Anggota Kelompok Masyarakat (X _{3.4})	X342	0.529	Valid		
	X343	0.536	Valid		
	X344	0.618	Valid		
	X351	0.547	Valid		
Bantuan Kelompok Desa Peny...	X352	0.596	Valid		
	X353	0.514	Valid		
	X354	0.601	Valid		
	X355	0.595	Valid		
	X356	0.573	Valid		
Social Learning (X₄)	Berbagi informasi atau Pengetahuan (X _{4.1})	X411	0.746	Valid	
		X412	0.744	Valid	
	Membangun komunikasi (X _{4.2})	X421	0.771	Valid	
		X422	0.569	Valid	
	Hubungan dengan stakeholder (X _{4.3})	X431	0.556	Valid	
		X432	0.510	Valid	
Partisipasi Perencanaan Program (Z _{1.1})	Z111	0.673	Valid		
	Z112	0.712	Valid		
Partisipasi Masyarakat (Z₁)	Partisipasi Pelaksanaan (Z _{1.2})	Z121	0.785	Valid	
		Z122	0.794	Valid	
	Partisipasi Penerimaan Manfaat (Z _{1.3})	Z131	0.632	Valid	
		Z132	0.578	Valid	
	Partisipasi Evaluasi dan Monitoring (Z _{1.4})	Z141	0.573	Valid	
		Z142	0.649	Valid	

Sumber: Hasil Analisis Data Primer, 2017.

Tabel 5.4, menjelaskan bahwa seluruh item-item indikator variabel yang meliputi: hubungan kelembagaan/KLM, insentif/ISN, modal sosial/MDS, social

learning/SCL, dan partisipasi masyarakat/PAR, adalah *valid* karena masing-masing item-item indikator tersebut, memiliki nilai *outer loading* lebih besar dari 0.5 (>0.5), dinyatakan valid dan sesuai dengan pernyataan Hair (2010) dalam Kock (2015).

b) Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*)

Validitas diskriminan bertujuan untuk melihat validitas item instrumen penelitian yang ada dalam model.

Tabel 5.5
Hasil Pengujian *Discriminant Validity* Tahap Post Test
(*Correlations Among Latent Variabels with Square Roots of AVEs*)

Variabel	Akar AVE	Skor Korelasi Antar Variabel Laten				
		X1	X2	X3	X4	Z1
Hubungan Kelembagaan (X1)	0.796		0.725	-0.255	0.115	0.466
Insentif Program Partisipasi (X2)	0.759	0.725		-0.121	0.266	0.633
Modal Sosial (X3)	0.520	-0.255	-0.121		0.023	0.025
<i>Social Learning</i> (X4)	0.644	0.115	0.266	0.023		0.233
Partisipasi Masyarakat (Z1)	0.651	0.466	0.633	0.025	0.233	

Sumber: Hasil Analisis Data Primer, 2017

Tabel 5.5, menunjukkan bahwa kelima variabel laten sebagai variabel dengan indikator relektif telah memiliki validitas diskriminan yang baik, dikarenakan nilai akar AVE (*average variance extracted*) semuanya berada di atas nilai korelasinya dengan variabel yang lain. Sebagai contoh pada variabel hubungan kelembagaan/KLM, memiliki nilai akar kuadrat AVE 0.796, dimana nilai ini lebih besar dibanding dengan nilai korelasi variabel tersebut dengan variabel lain, yaitu 0.725, -0.255, 0.115, dan 0.466) dan sesuai dengan pernyataan Hair (2010) dalam Kock (2015).

5.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas meliputi: (1) reliabilitas indikator; dan (2) reliabilitas internal konsistensi. Hasil uji reliabilitas indikator disajikan pada Tabel 5.6.

Tabel 5.6
Hasil Analisis Uji Reliabilitas Indikator Instrumen Post Test

Variabel	Indikator Variabel	Item Butir	Outer Loading	P-Value	Keterangan
Hubungan Kelembagaan (X₁)	Akuntabilitas (X _{1.1})	X111	0.619	<0.001	Valid
		X112	0.571	<0.001	Valid
	Transparansi (X _{1.2})	X121	0.639	<0.001	Valid
		X122	0.626	<0.001	Valid
	Hubungan Berbasis Kepercayaan (X _{1.3})	X131	0.625	<0.001	Valid
		X132	0.569	<0.001	Valid
	Kesesuaian Pelaksanaan Peraturan Kehutanan (X _{1.4})	X141	0.741	<0.001	Valid
		X142	0.743	<0.001	Valid
	Kemudahan Memperoleh informasi (X _{1.5})	X143	0.672	<0.001	Valid
		X151	0.574	<0.001	Valid
Insentif Program Partisipasi (X₂)	Insentif Pelatihan (X _{2.1})	X152	0.533	<0.001	Valid
		X211	0.549	<0.001	Valid
		X212	0.517	<0.001	Valid
	Insentif Peralatan Pertanian (X _{2.2})	X213	0.568	<0.001	Valid
		X221	0.684	<0.001	Valid
	Insentif Uang Tunai (X _{2.3})	X222	0.760	<0.001	Valid
		X231	0.579	<0.001	Valid
	Insentif Pengelolaan Lahan Untuk Pertanian (X _{2.4})	X232	0.673	<0.001	Valid
		X241	0.778	<0.001	Valid
	Modal Sosial (X₃)	Sikap Tolong Menolong (X _{3.1})	X242	0.888	<0.001
X311			0.660	<0.001	Valid
X312			0.670	<0.001	Valid
Kesepakatan Terhadap Norma Sosial (X _{3.2})		X313	0.604	<0.001	Valid
		X314	0.715	<0.001	Valid
		X321	0.518	<0.001	Valid
		X322	0.529	<0.001	Valid
Interaksi jejaring Masyarakat Dengan Lembaga Kehutanan (X _{3.3})		X323	0.643	<0.001	Valid
		X324	0.575	<0.001	Valid
		X331	0.565	<0.001	Valid
	X332	0.578	<0.001	Valid	
Tingkat Kepercayaan pada Anggota Kelompok Masyarakat (X _{3.4})	X333	0.675	<0.001	Valid	
	X334	0.555	<0.001	Valid	
	X341	0.559	<0.001	Valid	
	X342	0.529	<0.001	Valid	
Bantuan Kelompok Desa Penyangga (X _{3.5})	X343	0.536	<0.001	Valid	
	X344	0.618	<0.001	Valid	
	X351	0.547	<0.001	Valid	
	X352	0.596	<0.001	Valid	
Social Learning (X₄)	X353	0.514	<0.001	Valid	
	X354	0.601	<0.001	Valid	
	X355	0.595	<0.001	Valid	
	X356	0.573	<0.001	Valid	
Partisipasi Masyarakat (Z₁)	Berbagi informasi atau Pengetahuan (X _{4.1})	X411	0.746	<0.001	Valid
		X412	0.744	<0.001	Valid
	Membangun komunikasi (X _{4.2})	X421	0.771	<0.001	Valid
		X422	0.569	<0.001	Valid
Hubungan dengan stakeholder (X _{4.3})	X431	0.556	<0.001	Valid	
	X432	0.510	<0.001	Valid	
Partisipasi Masyarakat (Z₁)	Partisipasi Perencanaan Program (Z _{1.1})	Z111	0.673	<0.001	Valid
		Z112	0.712	<0.001	Valid
	Partisipasi Pelaksanaan (Z _{1.2})	Z121	0.785	<0.001	Valid
		Z122	0.794	<0.001	Valid
Partisipasi Penerimaan Manfaat (Z _{1.3})	Z131	0.632	<0.001	Valid	
	Z132	0.578	<0.001	Valid	
Partisipasi Evaluasi dan Monitoring (Z _{1.4})	Z141	0.573	<0.001	Valid	
	Z142	0.649	<0.001	Valid	

Sumber: Hasil Analisis Data Primer, 2017

Berdasarkan Tabel 5.6, dapat disimpulkan bahwa hasil uji reliabilitas Indikator dari kelima variabel dengan indikator reflektif telah memenuhi syarat reliabilitas indikator. Hal ini dikarenakan semua item indikator memiliki nilai *loading factor (outer loading)* >0.5 dengan p-value <0.001, dikatakan valid.

Uji reliabilitas internal konsistensi (*consistency internal reliability*) meliputi:

(a) uji reliabilitas komposit (*composite reliability*); dan (b) *cronbach alpha*. Uji reliabilitas internal konsistensi dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) Uji reliabilitas komposit (*Composite Reliability*)

Composite reliability diuji untuk tujuan pengujian validitas instrumen dalam sebuah model penelitian secara khusus untuk indikator variabel yang bersifat reflektif. Hasil pengujian reliabilitas komposit (*composite reliability*) dapat dilihat pada Tabel 5.7.

Tabel 5.7
Hasil Pengujian *Composite Reliability*

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	Keterangan
Hubungan Kelembagaan (X ₁)	0.838	<i>Reliable</i>
Insentif Program Partisipasi (X ₂)	0.868	<i>Reliable</i>
Modal Sosial (X ₃)	0.874	<i>Reliable</i>
<i>Social Learning</i> (X ₄)	0.803	<i>Reliable</i>
Partisipasi Masyarakat (Z ₁)	0.849	<i>Reliable</i>

Sumber: Hasil Analisis Data Primer, 2017

Tabel 5.7, memperlihatkan hasil pengujian dengan memuaskan, karena masing-masing variabel reflektif mempunyai nilai *composite reliability* untuk:

KLM/hubungan kelembagaan (X₁) sebesar 0.838, ISN/insentif program partisipasi (X₂) sebesar 0.868, MDS/modal sosial (X₃) sebesar 0.874, SCL/*social learning* (X₄) sebesar 0.803, dan PAR/partisipasi masyarakat (Z₁) sebesar 0.849, menunjukkan nilai lebih besar dari 0.70 sebagaimana dipersyaratkan Kock (2015). Disimpulkan bahwa seluruh indikator memang menjadi pengukur konstruksya masing-masing, artinya bahwa instrumen atau kuesioner penelitian

yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen yang handal atau konsisten.

b) Cronbach Alpha

Tabel 5.8
Hasil Uji Reliabilitas Internal Konsistensi

Variabel Penelitian	Cronbach's Alpha	Kriteria	Ket
Hubungan Kelembagaan (X_1)	0.786	≥ 0.60	Reliabel
Insentif Program Partisipasi (X_2)	0.827	≥ 0.60	Reliabel
Modal Sosial (X_3)	0.849	≥ 0.60	Reliabel
<i>Social Learning</i> (X_4)	0.704	≥ 0.60	Reliabel
Partisipasi Masyarakat (Z_1)	0.795	≥ 0.60	Reliabel

Sumber: Hasil Analisis Data Primer, 2017

Hasil uji reliabilitas internal konsistensi sebagaimana tertera pada Tabel 5.8, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian memenuhi syarat reliabilitas konsistensi, karena memiliki nilai *Cronbach Alpha* ≥ 0.60 .

Berdasarkan hasil uji reliabilitas sebagaimana dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa semua indikator yang dipakai di dalam penelitian ini adalah reliabel, karena nilai dari masing-masing indikator lebih besar dari 0.6.

Kesimpulan reliabilitas ini sesuai dengan ketentuan reliabilitas yang menyatakan bahwa reliabilitas instrumen penelitian dapat dilihat dari reliabilitas komposit dan

cronbach alpha, yang mana salah satu dari kedua uji reliabilitas, terutama uji reliabilitas komposit (*composite reliability*) atau kedua-duanya harus memiliki nilai

serendah-rendahnya 0.7 (Kock, 2015). Pengujian kualitas data dari variabel dengan indikator formatif, dapat dijelaskan melalui: (a) uji reliabilitas indikator;

dan (b) uji kolinieritas sebagai berikut:

1) Reliabilitas Indikator

Analisis lainnya untuk menguji reliabilitas yang bertujuan untuk mengukur kualitas data pada variabel dengan indikator formatif, adalah dengan mengukur

reliabilitas indikatornya. Hasil analisis yang digunakan adalah *significant of weights* atau *indicator weights*, sebagaimana disajikan pada Tabel 5.9.

Tabel 5.9
Hasil Uji Reliabilitas Indikator (*Indicators Weight*)

Variabel Penelitian	Indikator	Item Butir	VIF	P Value	Keterangan
Pendapatan keluarga (Y11)		Y111	2.281	<0.001	Valid
		Y112	2.452	<0.001	Valid
		Y113	3.277	<0.001	Valid
Pendidikan keluarga (Y12)		Y121	2.243	<0.001	Valid
		Y122	1.587	<0.001	Valid
		Y123	3.038	<0.001	Valid
Kesejahteraan Masyarakat (Y1)		Y131	1.822	<0.001	Valid
		Y132	2.782	<0.001	Valid
		Y133	3.114	<0.001	Valid
Kesehatan keluarga (Y13)		Y141	1.567	<0.001	Valid
		Y142	1.468	<0.001	Valid
		Y143	1.468	<0.001	Valid

Sumber: Hasil Analisis Data Primer, 2017

Tabel 5.9, dapat disimpulkan bahwa instrumen telah memenuhi syarat reliabilitas indikator, karena nilai p-value <0.05 dan nilai VIF <3.3.

2) Kolinieritas

Konstruk formatif merupakan hubungan regresi berganda dari indikator ke konstruk. Proses untuk menjamin akurasinya, maka pengujian kolinieritas merupakan hal yang harus dilakukan. Hasil analisis yang dapat digunakan untuk mendeteksi terjadinya multikolinieritas adalah nilai dari *full collinearity VIF (FVIF)*.

Tabel 5.10
Hasil Uji Kolinieritas (*Full Collinearity VIFs*)

<i>Full collinearity VIFs</i>					
KLM	ISN	MDS	SCL	KSJ	PAR
2.275	2.384	1.102	1.118	2.282	2.742

Sumber: Hasil Analisis Data Primer, 2017

Tabel 5.10, disimpulkan bahwa variabel kesejahteraan/KSJ sebagai variabel formatif, memiliki nilai VIF sebesar 2.282. Artinya bahwa instrumen penelitian ini telah memenuhi syarat kolinieritas, karena nilai p-value <0.005 dan nilai VIF <3.3 sebagaimana dipersyaratkan oleh (Kock, 2015).

5.4. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis deskriptif dilakukan untuk mendapatkan penilaian atau persepsi responden terhadap pertanyaan atau pernyataan yang diberikan terkait variabel-variabel penelitian yang digunakan. Analisis deskriptif dihitung berdasarkan persentase jawaban responden terhadap pertanyaan penelitian menggunakan nilai rerata (*mean*) skor dari setiap indikator yang digunakan. Gambaran penelitian atau persepsi seluruh responden, dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 Deskripsi Variabel Hubungan Kelembagaan

Hubungan kelembagaan dimaknai sebagai hubungan lembaga kehutanan TN Baluran yang diwujudkan melalui keeratan hubungan dengan prinsip-prinsip *good governance* kepada anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) sebagai lembaga masyarakat. Hubungan kelembagaan dalam penelitian ini direfleksikan dengan 5 (lima) indikator yakni: akuntabilitas, transparansi, hubungan berbasis kepercayaan, kesesuaian pelaksanaan peraturan kehutanan, dan kemudahan memperoleh informasi.

Tabel 5.11
Distribusi Frekuensi Indikator Variabel Hubungan Kelembagaan (X_1)

Variabel	Indikator	Item	Frekuensi Jawaban Responden (f) & Persentase (%)										Total	Mean Item	Mean Indikator
			STS (1)		TS (2)		N (3)		S (4)		SS (5)				
			f	%	f	%	f	%	f	%	f	%			
Hubungan Kelembagaan	Akuntabilitas ($X_{1.1}$)	X1.1.1	9	7.5	0	0.0	12	10.0	60	50.0	39	32.5	120	4.00	3.73
		X1.1.2	12	10.0	12	10.0	24	20.0	54	45.0	18	15.0	120	3.45	
	Transparansi ($X_{1.2}$)	X1.2.1	0	0.0	6	5.0	30	25.0	63	52.5	21	17.5	120	3.83	3.83
		X1.2.2	0	0.0	9	7.5	15	12.5	84	70.0	12	10.0	120	3.83	
	Hubungan Berbasis Kepercayaan ($X_{1.3}$)	X1.3.1	10	8.3	11	9.2	26	21.7	40	33.3	33	27.5	120	3.63	3.78
		X1.3.2	0	0.0	3	2.5	21	17.5	78	65.0	18	15.0	120	3.93	
	Kesesuaian Pelaksanaan Peraturan Kehutanan ($X_{1.4}$)	X1.4.1	0	0.0	6	5.0	15	12.5	57	47.5	42	35.0	120	4.13	4.00
		X1.4.2	0	0.0	12	10.0	24	20.0	54	45.0	30	25.0	120	3.85	
		X1.4.3	0	0.0	3	2.5	24	20.0	60	50.0	33	27.5	120	4.03	
	Kemudahan memperoleh informasi ($X_{1.5}$)	X1.5.1	0	0.0	3	2.5	21	17.5	93	77.5	3	2.5	120	3.80	3.79
		X1.5.2	0	0.0	6	5.0	33	27.5	63	52.5	18	15	120	3.78	
	Rata-Rata Skor Variabel Hubungan Kelembagaan														3.82

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2017

Tabel 5.11, menunjukkan indikator variabel hubungan kelembagaan memperoleh nilai rata-rata sebesar 3.82, sehingga hubungan kelembagaan TN

Baluran belum baik (<4.00). Kelima indikator tersebut, hanya ada satu indikator yang sudah baik yaitu kesesuaian pelaksanaan peraturan kehutanan (4.00).

Empat indikator lainnya (akuntabilitas, transparansi, hubungan berbasis kepercayaan dan kemudahan memperoleh informasi) belum baik (<4.00).

Indikator yang paling rendah nilai *mean* skornya adalah indikator akuntabilitas (3.73), menggambarkan bahwa akuntabilitas yang diwujudkan dalam laporan pertanggung jawaban lembaga dalam mengelola sumberdaya hutan, masih belum baik.

Indikator yang paling rendah selain indikator akuntabilitas adalah indikator hubungan berbasis kepercayaan sebagai indikator terendah kedua dengan nilai *mean* skor 3.78. Hubungan berbasis kepercayaan antara lembaga masyarakat dengan pihak lembaga belum baik. Pihak konsumen/masyarakat masih merasa kecewa atau kurang puas terhadap indikator hubungan berbasis kepercayaan antara lembaga masyarakat dengan pihak lembaga, sehingga dapat menyebabkan terjadinya *negative word of mouth* (NWOM). Hasil penelitian (Richins, 1984), mengatakan bahwa dampak dari *negative word of mouth* (NWOM) menyebabkan dampak buruk sebesar 1:13, artinya bahwa konsumen yang kecewa atau tidak puas, akan bercerita kepada setiap tiga belas orang lainnya tentang kekecewaan atau ketidak puasannya tersebut.

Individu atau masyarakat yang menilai kurang baik atau kecewa terhadap aspek: akuntabilitas, transparansi, hubungan berbasis kepercayaan, dan kemudahan memperoleh informasi program pengelolaan sumberdaya hutan TN Baluran, maka berdampak pada menurunnya tingkat partisipasi masyarakat sebagai akibat dari *negative word of mouth* (NWOM).

5.4.2 Deskripsi Variabel Insentif Program Partisipasi

Insentif program partisipas merupakan pemberian tambahan penghasilan bagi segenap masyarakat anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan

(SPKP) yang diberikan oleh pihak lembaga/pengelola hutan di TN Baluran dengan tujuan untuk menumbuhkan motivasi untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan. Insentif program partisipasi dalam penelitian ini direfleksikan dengan 4 (empat) indikator yakni: insentif pelatihan, insentif peralatan pertanian, insentif uang tunai, dan insentif pengelolaan lahan pertanian.

Tabel 5.12
Distribusi Frekuensi Indikator Variabel Insentif Program Partisipasi (X₂)

Variabel	Indikator	Item	Frekuensi Jawaban Responden (f) & Persentase (%)										Total	Mean Item	Mean Indikator
			STS (1)		TS (2)		N (3)		S (4)		SS (5)				
			f	%	f	%	f	%	f	%	f	%			
Insentif Program Partisipasi	Insentif Pelatihan (X _{2.1})	X2.1.1	7	5.8	3	2.5	20	16.7	66	55.0	24	20.0	120	3.81	3.94
		X2.1.2	0	0.0	3	2.5	30	25.0	63	52.5	24	20.0	120	3.90	
		X2.1.3	0	0.0	0	0.0	18	15.0	72	60.0	30	25.0	120	4.10	
	Insentif Peralatan Pertanian (X _{2.2})	X2.2.1	0	0.0	3	2.5	21	17.5	57	47.5	39	32.50	120	4.10	3.89
		X2.2.2	3	2.5	3	2.5	45	37.5	48	40.0	21	17.50	120	3.68	
	Insentif Uang Tunai (X _{2.3})	X2.3.1	0	0.0	6	5.0	21	17.5	63	52.5	30	25.0	120	3.98	3.80
		X2.3.2	3	2.5	15	12.5	24	20.0	60	50.0	18	15.0	120	3.63	
	Insentif Pengelolaan Lahan Pertanian (X _{2.4})	X2.4.1	0	0.0	6	5.0	18	15.0	81	67.5	15	12.5	120	3.88	3.98
		X2.4.2	0	0.0	6	5.0	9	7.5	75	62.5	30	25.0	120	4.08	
	Rata-Rata Skor Variabel Insentif Program Partisipasi														3.90

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2017.

Tabel 5.12, dapat dijelaskan bahwa indikator variabel insentif program partisipasi, dipersepsikan belum baik oleh responden dengan nilai rata-rata sebesar 3.90. Artinya insentif program partisipasi yang diberikan lembaga TN Baluran maupun oleh pemerintah masih belum baik. Empat indikator insentif program partisipasi dapat dikatakan masih belum baik (<4.00). Indikator insentif program partisipasi yang paling rendah nilai *mean* skornya adalah indikator insentif uang tunai (3.80). Insentif uang tunai dalam hal memperoleh bantuan uang sebagai modal usaha dan pinjaman secara cicilan, yang diberikan oleh pengelola TN Baluran, maupun oleh pemerintah kepada masyarakat desa penyangga masih belum baik.

Indikator insentif uang tunai merupakan indikator terendah (3.80), sedangkan indikator insentif peralatan pertanian merupakan indikator terendah kedua (3.89). Responden menyatakan bahwa insentif peralatan pertanian, masih

belum baik. Hasil penilaian responden yang kurang baik ini, harus menjadi perhatian pihak lembaga TN Baluran. Secara keseluruhan insentif program partisipasi bagi masyarakat masih belum baik dan berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat karena adanya *negative word of mouth (NWOM)*.

5.4.3. Deskripsi Variabel Modal Sosial

Modal sosial merupakan norma yang dapat mendorong adanya kerjasama anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) sebagai lembaga masyarakat yang diwujudkan dengan sikap saling percaya antar warga masyarakat dengan lembaga kehutanan TN Baluran.

Tabel 5.13
Distribusi Frekuensi Indikator Variabel Modal Sosial (X₃)

Variabel	Indikator	Item	Frekuensi Jawaban Responden (f) & Persentase (%)										Mean Item	Mean Indikator	
			STS (1)		TS (2)		N (3)		S (4)		SS (5)				Total
			f	%	f	%	f	%	f	%	f	%			
Modal Sosial	Sikap Tolong Menolong (X _{3.1})	X3.1.1	0	0.0	3	2.5	24	20.0	51	42.5	42	35.0	120	4.10	4.08
		X3.1.2	0	0.0	3	2.5	15	12.5	60	50.0	42	35.0	120	4.18	
		X3.1.3	0	0.0	6	5.0	24	20.0	54	45.0	36	30.0	120	4.00	
		X3.1.4	0	0.0	9	7.5	15	12.5	60	50.0	36	30.0	120	4.03	
	Kesepakatan Terhadap Norma Sosial (X _{3.2})	X3.2.1	0	0.0	6	5.0	15	12.5	57	47.5	42	35.0	120	4.13	3.99
		X3.2.2	0	0.0	6	5.0	39	32.5	57	47.5	18	15.0	120	3.73	
		X3.2.3	0	0.0	12	10.0	21	17.5	48	40.0	39	32.5	120	3.95	
		X3.2.4	0	0.0	6	5.0	9	7.5	63	52.5	42	35.0	120	4.18	
	Interaksi jejaring masyarakat dengan lembaga kehutanan (X _{3.3})	X3.3.1	0	0.0	0	0.0	18	15.0	54	45.0	48	40.0	120	4.25	4.02
		X3.3.2	0	0.0	0	0.0	21	17.5	81	67.5	18	15.0	120	3.98	
		X3.3.3	0	0.0	3	2.5	21	17.5	75	62.5	21	17.5	120	3.95	
		X3.3.4	0	0.0	0	0.0	27	22.5	78	65.0	15	12.5	120	3.90	
	Tingkat kepercayaan pada anggota kelompok masyarakat (X _{3.4})	X3.4.1	0	0.0	12	10.0	21	17.5	60	50.0	27	22.5	120	3.85	3.78
		X3.4.2	0	0.0	12	10.0	30	25.0	63	52.5	15	12.5	120	3.68	
		X3.4.3	0	0.0	6	5.0	36	30.0	63	52.5	15	12.5	120	3.73	
		X3.4.4	0	0.0	3	2.5	27	22.5	72	60.0	18	15.0	120	3.88	
	Bantuan kelompok desa penyangga (X _{3.5})	X3.5.1	20	16.7	16	13.3	14	11.7	30	25.0	40	33.3	120	3.45	3.85
		X3.5.2	10	8.3	18	15.0	45	37.5	21	17.5	26	21.7	120	3.29	
		X3.5.3	15	12.5	12	10.0	22	18.3	41	34.2	30	25.0	120	3.49	
		X3.5.4	0	0.0	3	2.5	18	15.0	42	35.0	57	47.5	120	4.28	
X3.5.5		0	0.0	0	0.0	30	25.0	39	32.5	51	42.5	120	4.18		
X3.5.6		0	0.0	3	2.5	15	12.5	30	25.0	72	60.0	120	4.43		
Rata-Rata Skor Variabel Modal Sosial													3.94		

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2017

Modal sosial dalam penelitian ini direfleksikan dengan 5 (lima) indikator yakni: sikap tolong menolong, kesepakatan terhadap norma sosial, interaksi

jejaring masyarakat dengan lembaga kehutanan, tingkat kepercayaan pada anggota kelompok masyarakat, dan bantuan kelompok desa penyangga.

Tabel 5.13, dijelaskan bahwa indikator variabel modal sosial memperoleh nilai *mean* skor sebesar 3.94. Menunjukkan bahwa modal sosial masyarakat desa penyangga belum baik (<4.00).

Indikator yang sudah baik, meliputi: (a) indikator sikap tolong menolong (4.08), dan (b) interaksi jejaring masyarakat dengan lembaga kehutanan (4.02).

Tiga indikator lainnya yaitu (a) kesepakatan terhadap norma sosial, (b) tingkat kepercayaan pada anggota kelompok masyarakat, dan (c) bantuan kelompok desa penyangga, masih belum baik (<4.00). Indikator terendah nilai *mean* skornya adalah indikator tingkat kepercayaan pada anggota kelompok masyarakat (3.78).

Indikator modal sosial yang nilainya paling rendah adalah indikator tingkat kepercayaan pada anggota kelompok masyarakat (3.78). Responden menilai bahwa indikator tersebut dikatakan masih belum baik dan harus menjadi perhatian pihak lembaga TN Baluran. Masyarakat masih merasa kecewa atau belum puas terhadap aspek tingkat kepercayaan pada anggota kelompok masyarakat, bantuan kelompok desa penyangga, dan kesepakatan terhadap norma sosial, dan berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat yang disebabkan oleh *negative word of mouth (NWOM)*.

5.4.4 Deskripsi Variabel *Social Learning*

Social learning merupakan pengembangan pengetahuan dengan cara berbagi pengetahuan atau informasi terkait, antara pengelola hutan dengan anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) untuk mengatasi permasalahan secara bersama dengan unsur/pelaku yang berbeda-beda (*different actors*). *Social learning* dalam penelitian ini direfleksikan dengan 3 (tiga)

indikator yakni: berbagi informasi atau pengetahuan, membangun komunikasi, dan hubungan dengan *stakeholder*.

Tabel 5.14
Distribusi Frekuensi Indikator Variabel *Social Learning* (X_4)

Variabel	Indikator	Item	Frekuensi Jawaban Responden (f) & Persentase (%)										Mean Item	Mean Indikator		
			STS (1)		TS (2)		N (3)		S (4)		SS (5)				Total	
			f	%	f	%	f	%	f	%	f	%				
<i>Social Learning</i>	Berbagi Informasi atau Pengetahuan ($X_{4.1}$)	X4.1.1	0	0.0	6	5.0	30	25.0	60	50.0	24	20.0	120	3.85	3.86	
		X4.1.2	3	2.5	0	0.0	27	22.5	69	57.5	21	17.5	120	3.88		
	Membangun Komunikasi ($X_{4.2}$)	X4.2.1	0	0.0	9	7.5	12	10.0	66	55.0	33	27.5	120	4.03		
		X4.2.2	0	0.0	3	2.5	30	25.0	60	50.0	27	22.5	120	3.93		
	Hubungan Dengan <i>Stakeholder</i> ($X_{4.3}$)	X4.3.1	0	0.0	6	5.0	9	7.5	69	57.5	36	30.0	120	4.13		3.95
		X4.3.2	0	0.0	3	2.5	36	30.0	66	55.0	15	12.5	120	3.78		
Rata-Rata Skor Variabel <i>Social Learning</i>												3.93				

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2017.

Tabel 5.14, menunjukkan bahwa indikator variabel *social learning* memperoleh nilai skor rata-rata sebesar 3.93. Artinya bahwa *social learning* masyarakat desa penyangga hutan TN Baluran belum baik. Indikator variabel *social learning* yang meliputi: berbagi informasi atau pengetahuan, membangun komunikasi, dan hubungan dengan *stakeholder*, masih belum baik (<4.00). Indikator yang paling rendah nilai *mean* skornya adalah berbagi informasi atau pengetahuan (3.86). Artinya bahwa proses *social learning* melalui berbagi informasi atau pengetahuan, masih belum baik. Indikator terendah kedua adalah hubungan dengan *stakeholder* belum baik (3.95).

Indikator *social learning* yang nilainya paling rendah adalah berbagi informasi atau pengetahuan (3.86). Responden menilai bahwa indikator ini dikatakan masih belum baik. Begitu pula dengan indikator hubungan dengan *stakeholder* masih belum baik (3.95). Responden menyatakan bahwa hubungan dengan *stakeholder* masih belum baik dan harus menjadi perhatian pihak lembaga TN Baluran. Masyarakat masih belum puas atau kecewa terhadap aspek berbagi informasi atau pengetahuan, membangun komunikasi, dan

hubungan dengan *stakeholder* serta berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat sebagai akibat dari *negative word of mouth (NWOM)*.

5.4.5. Deskripsi Variabel Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi rumah tangga anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) yang diukur berdasarkan pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas penunjang usaha.

Kesejahteraan masyarakat dalam penelitian ini direfleksikan dengan 4 (empat) indikator yakni: pendapatan keluarga, pendidikan keluarga, kesehatan keluarga, dan fasilitas penunjang usaha.

Tabel 5.15
Distribusi Frekuensi Indikator Variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y₁)

Variabel	Indikator	Item	Frekuensi Jawaban Responden (f) & Persentase (%)										Mean Item	Mean Indikator	
			STS (1)		TS (2)		N (3)		S (4)		SS (5)				Total
			f	%	f	%	f	%	f	%	f	%			
Kesejahteraan Masyarakat	Pendapatan Keluarga (Y _{1.1})	Y1.1.1	0	0.0	9	7.5	30	25.0	60	50.0	21	17.5	120	3.78	3.75
		Y1.1.2	0	0.0	15	12.5	21	17.5	69	57.5	15	12.5	120	3.70	
		Y1.1.3	0	0.0	12	10.0	18	15.0	75	62.5	15	12.5	120	3.78	
	Pendidikan Keluarga (Y _{1.2})	Y1.2.1	0	0.0	9	7.5	15	12.5	63	52.5	33	27.5	120	4.00	3.85
		Y1.2.2	0	0.0	6	5.0	33	27.5	66	55.0	15	12.5	120	3.75	
		Y1.2.3	0	0.0	9	7.5	24	20.0	69	57.5	18	15.0	120	3.80	
	Kesehatan Keluarga (Y _{1.3})	Y1.3.1	0	0.0	0	0.0	24	20.0	78	65.0	18	15.0	120	3.95	3.82
		Y1.3.2	0	0.0	6	5.0	36	30.0	63	52.5	15	12.5	120	3.73	
		Y1.3.3	0	0.0	6	5.0	30	25.0	69	57.5	15	12.5	120	3.78	
	Fasilitas Penunjang Usaha (Y _{1.4})	Y1.4.1	0	0.0	0	0.0	24	20.0	81	67.5	15	12.5	120	3.93	3.89
		Y1.4.2	0	0.0	3	2.5	27	22.5	75	62.5	15	12.5	120	3.85	
	Rata-Rata Skor Variabel Kesejahteraan Masyarakat													3.83	

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2017.

Tabel 5.15, indikator variabel kesejahteraan masyarakat memperoleh nilai skor rata-rata sebesar 3.83. Artinya bahwa kesejahteraan masyarakat desa penyangga hutan TN Baluran belum baik. Indikator variabel kesejahteraan masyarakat yang meliputi: pendapatan keluarga, pendidikan keluarga, kesehatan keluarga, dan fasilitas penunjang usaha, masih belum baik (<4.00). Indikator yang paling rendah nilai *mean* skornya adalah indikator pendapatan keluarga (3.75), belum baik.

Indikator kesejahteraan masyarakat yang nilainya paling rendah adalah pendapatan keluarga (3.75). Responden menilai bahwa indikator pendapatan keluarga dikatakan masih belum baik. Indikator terendah kedua adalah kesehatan keluarga memperoleh nilai *mean* skor 3.82, dan harus juga menjadi perhatian pihak lembaga TN Baluran. Pengelolaan hutan di TN Baluran belum mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar, sehingga dampaknya dapat menyebabkan adanya *negative word of mouth (NWOM)* serta menghambat motivasi masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan hutan.

5.4.6. Deskripsi Variabel Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) sebagai lembaga masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan pengelolaan hutan yang mencakup partisipasi perencanaan, pelaksanaan, penerimaan manfaat hingga kegiatan evaluasi dan monitoring. Partisipasi masyarakat dalam penelitian ini direfleksikan dengan 4 (empat) indikator yakni: partisipasi perencanaan program, partisipasi pelaksanaan, partisipasi penerimaan manfaat, dan partisipasi evaluasi dan monitoring.

Tabel 5.16
Distribusi Frekuensi Indikator Variabel Partisipasi Masyarakat (Z_1)

Variabel	Indikator	Item	Frekuensi Jawaban Responden (f) & Persentase (%)										Total	Mean Item	Mean Indikator
			STS (1)		TS (2)		N (3)		S (4)		SS (5)				
			f	%	f	%	f	%	f	%	f	%			
Partisipasi Masyarakat	Partisipasi Perencanaan Program ($Z_{1.1}$)	Z1.1.1	0	0.0	12	10.0	21	17.5	69	57.5	18	15.0	120	3.18	3.19
		Z1.1.2	3	2.5	6	5.0	39	32.5	60	50.0	12	10.0	120	3.20	
	Partisipasi Pelaksanaan ($Z_{1.2}$)	Z1.2.1	0	0.0	0	0.0	21	17.5	72	60.0	27	22.5	120	4.05	4.03
		Z1.2.2	0	0.0	0	0.0	27	22.5	66	55.0	27	22.5	120	4.00	
	Partisipasi Penerimaan Manfaat ($Z_{1.3}$)	Z1.3.1	3	2.5	6	5.0	15	12.5	75	62.5	21	17.5	120	3.88	3.83
		Z1.3.2	3	2.5	3	2.5	30	25.0	66	55.0	18	15.0	120	3.78	
	Partisipasi Evaluasi dan Monitoring ($Z_{1.4}$)	Z1.4.1	0	0.0	6	5.0	30	25.0	63	52.5	21	17.5	120	3.83	3.89
		Z1.4.2	0	0.0	3	2.5	24	20.0	69	57.5	24	20.0	120	3.95	
	Rata-Rata Skor Variabel Partisipasi Masyarakat													3.73	

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2017.

Tabel 5.16, indikator variabel partisipasi masyarakat memperoleh nilai skor rata-rata sebesar 3.73. Artinya bahwa partisipasi masyarakat desa penyangga dalam pengelolaan hutan TN Baluran belum baik. Indikator variabel partisipasi masyarakat yang meliputi: partisipasi perencanaan program, partisipasi pelaksanaan, partisipasi penerimaan manfaat, dan partisipasi evaluasi dan monitoring, masih belum baik (<4.00). Empat indikator partisipasi masyarakat tersebut, hanya ada satu indikator yang baik yaitu partisipasi pelaksanaan (4.03).

Indikator yang paling rendah nilai *mean* skornya adalah indikator partisipasi perencanaan program (3.19) belum baik.

Indikator partisipasi masyarakat yang nilainya paling rendah adalah indikator partisipasi perencanaan program (3.19). Responden menilai bahwa indikator partisipasi perencanaan program, dikatakan masih belum baik. Indikator terendah kedua adalah partisipasi penerimaan manfaat dengan nilai *mean* skor (3.83). Partisipasi masyarakat dalam aspek perencanaan program, penerimaan manfaat, evaluasi dan monitoring program pengelolaan hutan, masih belum baik, sehingga menyebabkan *negative word of mouth* (NWOM) yang berdampak pada menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan.

5.5. Analisis *Partial Least Square* (PLS)

5.5.1. Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Model fit (*goodness of fit models*) adalah indeks dan ukuran kebaikan hubungan antar variabel laten yang dikonstruksi dalam sebuah kerangka konsep penelitian (*Inner Model*). Hasil pengolahan data dengan menggunakan *software*

WarpPLS, *goodness of fit* dari kerangka konsep penelitian mengacu pada pendapat Kock (2015). Penilaian *goodness of fit* didasarkan pada ketentuan bahwa *p-value* untuk *Average Path Coefficient* (APC) dan *Average R-Squared* (ARS) harus lebih kecil dari 0.05, yang berarti mempunyai makna signifikan. Nilai

Average Block VIF (AVIF) sebagai indikator multikolinieritas juga telah terpenuhi, karena memiliki nilai lebih kecil dari angka 5.

Tabel 5.17
Model Fit Indices dan P-Value (Inner Model) Post Test

No	Model Fit and Quality Indices	Hasil	p-value	Criteria Fit	Keterangan
1	Average path coefficient (APC)	0.307	$P < 0.001$	$P < 0.05$	Fit
2	Average R-squared (ARS)	0.564	$P < 0.001$	$P < 0.05$	Fit
3	Average adjusted R-squared (AARS)	0.548	$P < 0.001$	$P < 0.05$	Fit
4	Average block VIF (AVIF)	2.165	Acceptable if ≤ 5	ideally ≤ 3.3	Diterima
5	Average full collinearity VIF (AFVIF)	2.317	Acceptable if ≤ 5	Acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3	Diterima
6	Tenenhaus Gof (GoF)	0.464	Large	Small ≥ 0.1 , medium ≥ 0.25 , large ≥ 0.36	Fit
7	Sympson's paradox ratio (SPR)	0.556	Acceptable if ≥ 0.7	ideally = 1	Diterima
8	R-squared contribution ratio (RSCR)	0.826	Acceptable if ≥ 0.9	ideally = 1	Diterima
9	Statistical suppression ratio (SSR)	1.000	Acceptable if ≥ 0.7	ideally = 1	Diterima
10	Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)	0.944	Acceptable if ≥ 0.7	ideally = 1	Diterima

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2017.

Tabel 5.17, evaluasi model struktural dapat disimpulkan bahwa model kerangka konsep penelitian yang dikembangkan dalam penelitian ini, telah memenuhi syarat *goodness of fit*, dikarenakan: (a) nilai dari APC sebesar 0.307 dengan p-value < 0.001 , (b) nilai ARS sebesar 0.564 dengan nilai p-value < 0.001 , signifikan, dan (c) nilai dari AVIF dan AFVIF adalah 2.165, dan 2.317 (< 3.3), artinya bahwa tidak ada masalah multikolinieritas data antar indikator maupun antar variabel.

Kekuatan model juga ditunjukkan oleh nilai *GoF* sebesar 0.464, maka model penelitian dalam penelitian ini termasuk kategori tinggi. Nilai *SPR* sebesar 0.556 dan *RSCR* 0.826, mendekati nilai 1, tidak terjadi masalah kausalitas dalam model. Nilai *SSR* sebesar 1.00 dan nilai dari *NLBCDR* adalah 0.944 dan lebih besar dari 0.7, artinya bahwa tidak terjadi *statistical suppression* dalam model, dan arah hubungan antar variabel dalam hipotesis sudah tepat.

5.5.2. Pengujian Loading Factor (Outer Model)

Pengujian *outer model* digunakan untuk menunjukkan bobot dari setiap indikator sebagai pengukur dari masing-masing variabel. Indikator dengan

loading factor besar menunjukkan bahwa indikator tersebut sebagai pengukur variabel yang terkuat (dominan) demikian sebaliknya.

Tabel 5.18
Nilai Outer Loading Variabel Penelitian

Variabel	Indikator Variabel	Item Butir	Outer Loading	P-Value	Keterangan	
Hubungan Kelembagaan (X ₁)	Akuntabilitas (X _{1.1})	X111	0.619	<0.001	Valid	
		X112	0.571	<0.001	Valid	
	Transparansi (X _{1.2})	X121	0.639	<0.001	Valid	
		X122	0.626	<0.001	Valid	
	Hubungan Berbasis Kepercayaan (X _{1.3})	X131	0.625	<0.001	Valid	
		X132	0.569	<0.001	Valid	
	Kesesuaian Pelaksanaan Peraturan Kehutanan (X _{1.4})	X141	0.741	<0.001	Valid	
		X142	0.743	<0.001	Valid	
		X143	0.672	<0.001	Valid	
	Kemudahan Memperoleh informasi (X _{1.5})	X151	0.574	<0.001	Valid	
		X152	0.533	<0.001	Valid	
	Insentif (X ₂)	Insentif Pelatihan (X _{2.1})	X211	0.549	<0.001	Valid
			X212	0.517	<0.001	Valid
			X213	0.568	<0.001	Valid
		Insentif Peralatan Pertanian (X _{2.2})	X221	0.684	<0.001	Valid
X222			0.760	<0.001	Valid	
Insentif Uang Tunai (X _{2.3})		X231	0.579	<0.001	Valid	
		X232	0.673	<0.001	Valid	
Insentif Pengelolaan Lahan Untuk Pertanian (X _{2.4})		X241	0.778	<0.001	Valid	
		X242	0.888	<0.001	Valid	
Modal Sosial (X ₃)		Sikap Tolong Menolong (X _{3.1})	X311	0.660	<0.001	Valid
			X312	0.670	<0.001	Valid
			X313	0.604	<0.001	Valid
	X314		0.715	<0.001	Valid	
	Kesepakatan Terhadap Norma Sosial (X _{3.2})	X321	0.518	<0.001	Valid	
		X322	0.529	<0.001	Valid	
		X323	0.643	<0.001	Valid	
		X324	0.575	<0.001	Valid	
	Interaksi jejaring Masyarakat Dengan Lembaga Kehutanan (X _{3.3})	X331	0.565	<0.001	Valid	
		X332	0.578	<0.001	Valid	
		X333	0.675	<0.001	Valid	
		X334	0.555	<0.001	Valid	
	Tingkat Kepercayaan pada Anggota Kelompok Masyarakat (X _{3.4})	X341	0.559	<0.001	Valid	
		X342	0.529	<0.001	Valid	
		X343	0.536	<0.001	Valid	
X344		0.618	<0.001	Valid		
Bantuan Kelompok Desa Penyangga (X _{3.5})	X351	0.547	<0.001	Valid		
	X352	0.596	<0.001	Valid		
	X353	0.514	<0.001	Valid		
	X354	0.601	<0.001	Valid		
	X355	0.595	<0.001	Valid		
Social Learning (X ₄)	Berbagi informasi atau Pengetahuan (X _{4.1})	X411	0.746	<0.001	Valid	
		X412	0.744	<0.001	Valid	
	Membangun komunikasi (X _{4.2})	X421	0.771	<0.001	Valid	
		X422	0.569	<0.001	Valid	
	Hubungan dengan stakeholder (X _{4.3})	X431	0.556	<0.001	Valid	
		X432	0.510	<0.001	Valid	
Kesejahteraan Masyarakat (Y ₁)	Pendapatan Keluarga (Y _{1.1})	Y111	0.505	<0.001	Valid	
		Y112	0.508	<0.001	Valid	
		Y113	0.510	<0.001	Valid	
	Pendidikan keluarga (Y _{1.2})	Y121	0.595	<0.001	Valid	
		Y122	0.514	<0.001	Valid	
		Y123	0.700	<0.001	Valid	
	Kesehatan keluarga (Y _{1.3})	Y131	0.682	<0.001	Valid	
		Y132	0.735	<0.001	Valid	
		Y133	0.773	<0.001	Valid	
	Fasilitas penunjang Usaha Keluarga (Y _{1.4})	Y141	0.832	<0.001	Valid	
		Y142	0.756	<0.001	Valid	
	Partisipasi Masyarakat (Z ₁)	Partisipasi Perencanaan Program (Z _{1.1})	Z111	0.673	<0.001	Valid
Z112			0.712	<0.001	Valid	
Partisipasi Pelaksanaan (Z _{1.2})		Z121	0.785	<0.001	Valid	
		Z122	0.794	<0.001	Valid	
Partisipasi Penerimaan Manfaat (Z _{1.3})		Z131	0.632	<0.001	Valid	
		Z132	0.578	<0.001	Valid	
Partisipasi Evaluasi dan Monitoring (Z _{1.4})		Z141	0.573	<0.001	Valid	
		Z142	0.649	<0.001	Valid	

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2017

Model *Partial Least Square* (PLS), *loading factor* untuk indikator reflektif dan indikator formatif adalah *outer loading*. Tabel 5.19, masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah valid dengan nilai *p-value* kurang dari 0.05 ($p\text{-value} < 0.05$) dan nilai *outer loading* lebih besar dari 0.5 (> 0.5).

5.6. Hasil Analisis Jalur

1. Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung

Hasil pengujian pengaruh langsung berdasarkan jalur *inner model* dalam *Partial Least Square* (PLS) dari 4 (empat) hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua pengaruh langsung yang signifikan (H1a, H2a) dan dua pengaruh yang hasilnya tidak signifikan (H3a, H4a) sebagaimana disajikan pada Tabel 5.19.

Tabel 5.19
Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung

Hipotesis	Pengaruh Langsung Antar Variabel			Koefisien Jalur	P-value	Keterangan
	Var. Bebas	Terhadap	Var. Terikat			
H1a	KLM	→	PAR	0.346	<0.001	Significant
H2a	ISN	→	PAR	-0.160	0.035	Significant
H3a	MDS	→	PAR	0.071	0.216	Non Significant
H4a	SCL	→	PAR	0.134	0.065	Non Significant

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2017.

Tabel 5.19 dapat dijelaskan hasil pengujian pengaruh langsung dari masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Hubungan Kelembagaan Terhadap Partisipasi Masyarakat.

Hasil pengujian pengaruh hubungan kelembagaan terhadap partisipasi masyarakat, memiliki nilai koefisien sebesar 0.346 dengan tingkat signifikansi (*p-value*) sebesar <0.001. Mengingat nilai *p-value* <0.001 lebih kecil dari 0.05 ($< 0.001 < 0.05$), maka terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis

H1a: bahwa “hubungan kelembagaan berpengaruh positif signifikan terhadap partisipasi masyarakat” (**H1a diterima**).

Koefisien jalur bertanda positif, mengindikasikan bahwa pengaruh langsung keduanya searah. Artinya, semakin tinggi hubungan kelembagaan, semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat. Demikian sebaliknya, semakin rendah hubungan kelembagaan, mengakibatkan semakin rendah pula tingkat partisipasi masyarakat.

2. Hubungan Insentif Program Partisipasi Terhadap Partisipasi Masyarakat.

Hasil pengujian pengaruh insentif program partisipasi terhadap partisipasi masyarakat, memiliki nilai koefisien sebesar -0.160 , dengan tingkat signifikansi (p -value) sebesar 0.035 . Mengingat nilai p -value 0.035 lebih kecil dari 0.05 ($0.035 < 0.05$), maka terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis **H2a**: bahwa “insentif program partisipasi berpengaruh positif signifikan terhadap partisipasi masyarakat dapat dibuktikan (**H2a diterima**).

Koefisien jalur bertanda negatif, mengindikasikan bahwa pengaruh langsung keduanya tidak searah. Artinya, insentif program partisipasi berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat, tidak secara positif. Dengan kata lain, insentif program partisipasi berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat, jika kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

3. Hubungan Modal Sosial Terhadap Partisipasi Masyarakat

Hasil pengujian pengaruh modal sosial terhadap partisipasi masyarakat, memiliki nilai koefisien sebesar 0.071 dengan tingkat signifikansi (p -value) sebesar 0.216 . Mengingat nilai p -value 0.216 lebih besar dari 0.05 ($0.216 > 0.05$), maka tidak terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis **H3b**: bahwa “modal sosial berpengaruh positif signifikan terhadap partisipasi masyarakat” (**H3b ditolak**).

Koefisien jalur bertanda positif, mengindikasikan bahwa pengaruh langsung keduanya searah. Artinya bahwa semakin baik modal sosial, tidak menyebabkan semakin baik tingkat partisipasi masyarakat. Begitu pula sebaliknya, rendahnya modal sosial, tidak menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.

4. Hubungan *Social Learning* Terhadap Partisipasi Masyarakat

Hasil pengujian pengaruh *social learning* terhadap partisipasi masyarakat, memiliki nilai koefisien sebesar 0.134 dengan tingkat signifikansi (*p-value*) sebesar 0.065. Mengingat nilai *p-value* 0.065 lebih besar dari 0.05 ($0.65 > 0.05$), maka tidak terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis **H4a**: bahwa “*social learning* berpengaruh positif signifikan terhadap partisipasi masyarakat”, (**H4a ditolak**).

Koefisien jalur bertanda positif, mengindikasikan bahwa pengaruh langsungnya searah. Artinya bahwa semakin tinggi *social learning*, tidak menyebabkan semakin tingginya tingkat partisipasi masyarakat. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah *social learning* tidak menyebabkan semakin rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.

5.7 Efek Mediasi

Penelitian ini untuk menguji peran atau efek mediasi digunakan *causal step approach* yang dipopulerkan oleh Baron dan Kenny (1986). Menurut Baron dan Kenny (1986), bahwa *causal step approach* mempunyai 4 efek mediasi (Hair, Jr, et al. 2014; 225), yaitu uji mediasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: (a) tahap pertama, bilamana pengaruh uji hipotesis secara langsung hasilnya signifikan/positif (Gambar 5.3); maka dilanjutkan ketahap berikutnya yaitu; (b) tahap kedua melibatkan pengaruh uji hipotesis tidak langsung (*indirect effect*) dengan melibatkan variabel mediasi (Gambar 5.4), jika hasilnya signifikan/positif; (c) tahap ketiga melakukan penilaian untuk VAF (*Variance Accounted For*)

dengan formula $VAF = \frac{(p_{12} \cdot p_{23})}{(p_{12} \cdot p_{23} + p_{13})}$. Ketentuan nilai VAF yaitu: (a) jika nilai VAF > 80% sebagai *full mediation*; 20% ≤ VAF ≤ 80% sebagai *partial mediation*; dan (b) jika nilai VAF < 20% sebagai *no mediation*. Selanjutnya efek mediasi dikatakan signifikan jika nilai *p-value indirect effect* kurang dari 0.05 (Hair, Jr., et al. 2014).

Gambar 5.1
Structural Equation Modelling (SEM) PLS Hipotesis Secara Langsung
(Direct Effect) Tanpa Mediasi



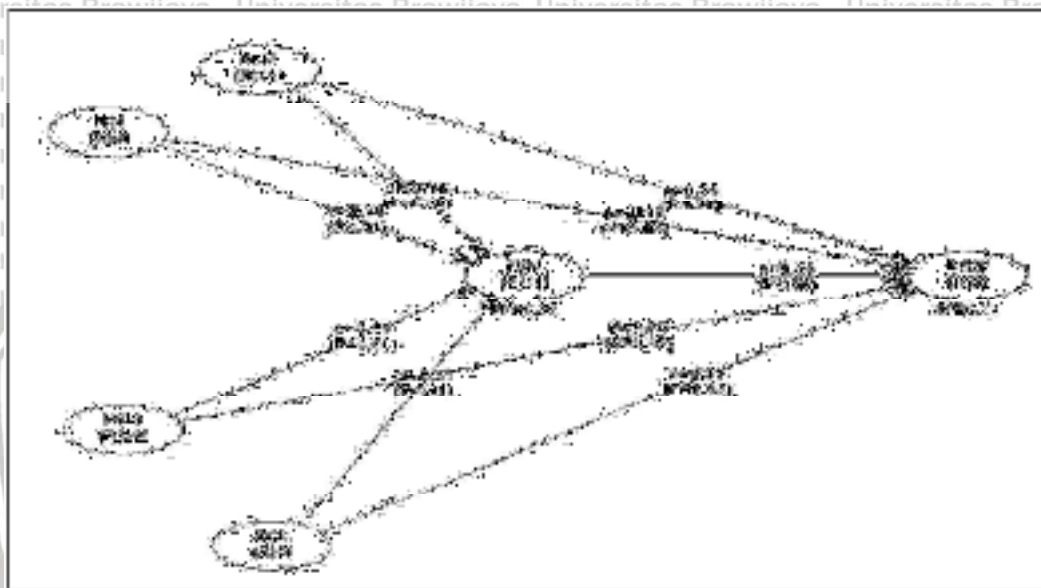
Sumber: Hasil Analisis SEM PLS, 2017.

Gambar 5.1, hipotesis secara langsung dengan hasil positif signifikan adalah: (1) hubungan kelembagaan berpengaruh positif signifikan sebesar 0.186 terhadap partisipasi masyarakat, dengan *p-value* 0.017, karena nilai *p-value* kurang dari 0.05 ($<0.001 < 0.05$), maka dikatakan signifikan; (2) insentif program partisipasi berpengaruh positif signifikan sebesar 0.527 terhadap partisipasi masyarakat, dengan *p-value* < 0.001, karena *p-value* kurang dari 0.05 ($<0.001 < 0.05$) maka dikatakan signifikan; (3) modal sosial berpengaruh positif signifikan sebesar 0.234 terhadap partisipasi masyarakat, dengan *p-value* 0.004, karena *p-value* kurang dari 0.05 ($<0.001 < 0.05$) maka dikatakan signifikan; (4) *social learning* berpengaruh positif signifikan sebesar 0.203 terhadap partisipasi

masyarakat, dengan p -value 0.011, karena p -value kurang dari 0.05 ($0.011 < 0.05$) maka dikatakan signifikan.

Tahap kedua, melibatkan pengaruh uji hipotesis tidak langsung (*indirect effect*) yaitu dengan melibatkan variabel mediasi dengan hasil signifikan/positif seperti pada Gambar 5.2.

Gambar 5.2
Structural Equation Modelling (SEM) PLS Dengan Mediasi



Sumber: Hasil Analisis SEM PLS, 2017.

Gambar 5.2 dapat dijelaskan bahwa hasil analisis hipotesis pengaruh tidak langsung (melibatkan variabel mediasi) dengan hasil signifikan adalah: (1) insentif program partisipasi berpengaruh positif signifikan terhadap partisipasi masyarakat, dengan nilai koefisien sebesar 0.760 melalui kesejahteraan masyarakat, dengan p -value < 0.001 , karena p -value kurang dari 0.05 ($< 0.001 < 0.05$) maka signifikan; (2) modal sosial berpengaruh positif signifikan terhadap partisipasi masyarakat, dengan nilai koefisien sebesar 0.193 melalui kesejahteraan masyarakat dengan p -value 0.014, karena p -value kurang dari 0.05 ($0.014 < 0.05$) maka signifikan; dan (3) *social learning* berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat, dengan nilai koefisien sebesar -0.209

melalui kesejahteraan masyarakat, dengan p -value 0.009, karena p -value kurang dari 0.05 ($0.009 < 0.05$) maka dikatakan signifikan, tetapi tidak secara positif.

Tahap tiga menghitung nilai VAF berdasarkan hasil analisis signifikansi hasil tahap satu dan tahap dua. Adapun Formula Perhitungan $VAF = (p_{12} * p_{23}) / (p_{12} * p_{23} + p_{13})$. Hasil analisis uji mediasi dengan menggunakan metode VAF sebagai berikut:

1. Insentif program partisipasi (ISN) berpengaruh positif signifikan terhadap partisipasi masyarakat (PAR) melalui kesejahteraan masyarakat (KSJ).

$$VAF = (0.760 \times 0.749) / (0.760 \times 0.749 + (-0.160))$$

$$VAF = (0.570) / (0.570 - 0.160)$$

$$VAF = 0.84$$

$$VAF = 84,0 \%$$

Hasil dari $VAF = 84,0\%$, artinya bahwa kesejahteraan masyarakat memediasi pengaruh insentif program partisipasi terhadap partisipasi masyarakat secara penuh (*full mediation*). Makna temuan penelitian efek mediasi bersifat *full mediation* adalah: (a) pertama, berdasarkan uji pengaruh langsung bahwa insentif program partisipasi terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap partisipasi masyarakat; (b) kedua, bahwa berdasarkan uji pengaruh tidak langsung, pengaruh insentif program partisipasi terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap partisipasi masyarakat melalui kesejahteraan masyarakat.

Artinya bahwa semakin tinggi insentif program partisipasi yang diberikan, maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat, jika kesejahteraan masyarakat juga semakin meningkat. Demikian pula sebaliknya, jika insentif program partisipasi yang diberikan semakin rendah, maka tingkat partisipasi masyarakat juga semakin rendah, jika kesejahteraan masyarakat juga semakin rendah.

Hasil uji efek mediasi, diperoleh hasil bahwa pengaruh insentif program partisipasi yang dimediasi oleh kesejahteraan terbukti memberikan kontribusi

yang signifikan sebesar 84,0% terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Artinya bahwa pengaruh insentif program partisipasi jauh lebih besar pengaruhnya terhadap tingkat partisipasi masyarakat, jika dimediasi oleh kesejahteraan masyarakat (84,0%).

2. Modal sosial (MDS) berpengaruh positif signifikan terhadap partisipasi masyarakat (PAR), melalui kesejahteraan masyarakat (KSJ).

$$VAF = (0.193 \times 0.749) / (0.193 \times 0.749 + 0.071)$$

$$VAF = (0.144) / (0.215)$$

$$VAF = 0.669$$

$$VAF = 66,9 \%$$

Hasil dari $VAF = 66,9 \%$, artinya bahwa kesejahteraan masyarakat memediasi pengaruh modal sosial terhadap partisipasi masyarakat secara parsial (*partial mediation*). Makna temuan penelitian efek mediasi bersifat *partial mediation* adalah: (a) pertama, bahwa berdasarkan hasil uji pengaruh langsung, diperoleh hasil bahwa modal sosial terbukti tidak signifikan pengaruhnya terhadap tingkat partisipasi masyarakat; (b) kedua, berdasarkan hasil uji pengaruh tidak langsung, diperoleh hasil bahwa modal sosial berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat, melalui kesejahteraan masyarakat. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat modal sosial masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat, jika tingkat kesejahteraan masyarakatnya semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat modal sosial masyarakat, maka tingkat partisipasi masyarakat semakin rendah, jika kesejahteraan masyarakatnya juga semakin rendah.

Hasil uji efek mediasi, diperoleh hasil bahwa pengaruh modal sosial yang dimediasi kesejahteraan masyarakat terbukti memberikan kontribusi yang signifikan sebesar 66,9% terhadap partisipasi masyarakat. Artinya bahwa

pengaruh modal sosial jauh lebih besar pengaruhnya terhadap tingkat partisipasi masyarakat, jika dimediasi oleh kesejahteraan masyarakat (66,9%).

3. *Social learning* (SCL) berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat (PAR), melalui kesejahteraan masyarakat (KSJ) tidak secara positif.

$$VAF = (-0.209 \times 0.749) / (-0.209 \times 0.749 + 0.134)$$

$$VAF = (-0.156) / (-0.022)$$

$$VAF = 7.090$$

$$VAF = 7,09 \%$$

Hasil dari $VAF = 7.09\%$ artinya bahwa kesejahteraan masyarakat tidak memediasi pengaruh *social learning* terhadap partisipasi masyarakat (*no mediation*). Makna dari temuan penelitian efek mediasi ini bahwa: (a) pertama, berdasarkan hasil uji pengaruh langsung (*direct effect*) diperoleh hasil bahwa *social learning* terbukti tidak berpengaruh positif signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Semakin tingginya *social learning*, tidak menyebabkan semakin tingginya tingkat partisipasi masyarakat. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah *social learning* tidak menyebabkan semakin rendahnya tingkat partisipasi masyarakat; (b) kedua, dari hasil pengaruh uji secara tidak langsung, bahwa *social learning* berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat, melalui kesejahteraan masyarakat, tidak secara positif. Artinya bahwa *social learning* lebih besar pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat melalui kesejahteraan masyarakat. *Social learning* tidak mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, akan tetapi lebih berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Hasil uji efek mediasi bahwa pengaruh *social learning* yang dimediasi kesejahteraan masyarakat sebesar 7,09% terhadap partisipasi masyarakat.

Artinya bahwa pengaruh *social learning* walaupun dimediasi oleh kesejahteraan

masyarakat berkontribusi sebesar 7,09% ($7,09\% < 20\%$), dikatakan tidak ada efek mediasinya (Hair, Jr, *et al.* 2014).

2. Pengujian Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung

Hasil pengujian pengaruh tidak langsung berdasarkan jalur *inner model* dalam *Partial Least Square* (PLS) dari 5 (lima) hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) pengaruh tidak langsung dengan hasil signifikan (H2b, H3b, H4b, 5), dan hanya satu yang tidak signifikan (H1b) sebagaimana terlihat pada Tabel 5.20.

Tabel 5.20
Analisis Signifikansi *Path Coefficient Indirect Effect*

Hipotesis	Pengaruh Tidak Langsung Antar Variabel			Koefisien Jalur	P-value	Keterangan
	Var. Bebas	Terhadap	Terikat			
H1b	KLM	PAR	KSJ	-0.138	0.061	Non Significant
H2b	ISN	PAR	KSJ	0.760	<0.001	Significant
H3b	MDS	PAR	KSJ	0.193	0.014	Significant
H4b	SCL	PAR	KSJ	-0.209	0.009	Significant
5	KSJ	→	PAR	0.749	<0.001	Significant

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2017.

Tabel 5.20, dapat dijelaskan masing-masing pengaruh tidak langsung masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Hubungan Antara Keeratan Hubungan Kelembagaan, Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, dan Tingkat Partisipasi Masyarakat

Hasil analisis pengaruh secara tidak langsung memiliki nilai koefisien sebesar -0.138, pengaruh hubungan kelembagaan terhadap partisipasi masyarakat melalui kesejahteraan masyarakat. Pengaruh pertama (**H1a**): hubungan kelembagaan berpengaruh positif signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Pengaruh kedua: pengaruh hubungan kelembagaan terhadap partisipasi masyarakat melalui kesejahteraan masyarakat adalah tidak positif signifikan dengan tingkat signifikansi (*p-value*) sebesar 0.061. Mengingat nilai *p-value* 0.061 lebih besar dari 0.05 ($0.061 > 0.05$), maka tidak terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis **H1b**: bahwa "kesejahteraan masyarakat

memediasi pengaruh hubungan kelembagaan terhadap partisipasi masyarakat”,

(H1b ditolak). Dikarenakan hasil uji pengaruh secara tidak langsungnya tidak signifikan, maka tidak dapat ditentukan efek mediasinya berdasarkan nilai VAFnya.

Koefisien jalur bertanda negatif, mengindikasikan bahwa pengaruh secara tidak langsungnya tidak searah. Artinya, semakin tinggi keeratan hubungan kelembagaan, tidak menyebabkan semakin tingginya tingkat partisipasi masyarakat, jika kesejahteraan masyarakat juga tidak semakin meningkat.

Demikian pula sebaliknya, semakin rendah keeratan hubungan kelembagaan, tidak menyebabkan semakin rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, jika kesejahteraan masyarakat juga semakin rendah.

2. Hubungan Antara Insentif Program Partisipasi, Kesejahteraan Masyarakat, dan Partisipasi Masyarakat

Hasil analisis pengaruh secara tidak langsung memiliki nilai koefisien sebesar 0.760, pengaruh insentif terhadap partisipasi masyarakat melalui kesejahteraan masyarakat. Pengaruh pertama (H2a): insentif program partisipasi berpengaruh positif signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Pengaruh kedua: pengaruh insentif program partisipasi terhadap partisipasi masyarakat melalui kesejahteraan masyarakat adalah positif signifikan, dengan tingkat signifikansi (*p-value*) sebesar <0.001 . Mengingat nilai *p-value* <0.001 lebih kecil dari 0.05 ($<0.001 < 0.05$), maka terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis

H2b: bahwa “kesejahteraan masyarakat memediasi pengaruh insentif program partisipasi terhadap partisipasi masyarakat”, **(H2b diterima).** Kesejahteraan masyarakat memediasi pengaruh insentif program partisipasi terhadap partisipasi masyarakat secara penuh (*full mediation*), dikarenakan hasil dari VAF (*Variance Account For*) sebesar 84,0 %.

Koefisien jalur bertanda positif, mengindikasikan bahwa pengaruh secara tidak langsungnya searah. Artinya bahwa semakin baik insentif program partisipasi, semakin baik pula tingkat partisipasi masyarakat, jika kesejahteraan masyarakat juga semakin baik. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah insentif program partisipasi, semakin rendah pula tingkat partisipasi masyarakat, jika kesejahteraan masyarakat juga semakin rendah.

3. Hubungan Antara Modal Sosial, Kesejahteraan Masyarakat, dan Partisipasi Masyarakat

Hasil analisis pengaruh secara tidak langsung memiliki nilai koefisien sebesar 0.193, pengaruh modal sosial terhadap partisipasi masyarakat melalui kesejahteraan masyarakat. Pengaruh pertama (H3a): modal sosial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Pengaruh kedua: pengaruh modal sosial terhadap partisipasi masyarakat melalui kesejahteraan masyarakat adalah signifikan, dengan tingkat signifikansi (*p-value*) sebesar 0.014. Mengingat nilai *p-value* 0.014 lebih kecil dari 0.05 ($0.014 < 0.05$), maka terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis **H3b**: bahwa “kesejahteraan masyarakat memediasi pengaruh modal sosial terhadap partisipasi masyarakat”, (**H3b diterima**). Kesejahteraan masyarakat memediasi pengaruh modal sosial terhadap partisipasi masyarakat secara parsial (*partial mediation*), dikarenakan hasil dari VAF (*Variance Account For*) sebesar 84,0 %

Koefisien jalur bertanda positif, mengindikasikan bahwa pengaruh secara tidak langsungnya searah. Artinya bahwa semakin baik modal sosial, semakin baik pula tingkat partisipasi masyarakat, jika tingkat kesejahteraan masyarakat juga semakin baik. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah modal sosial, semakin rendah pula tingkat partisipasi masyarakat, jika kesejahteraan masyarakat juga semakin rendah.

4. Hubungan Antara *Social Learning*, Kesejahteraan Masyarakat, dan Partisipasi Masyarakat

Hasil analisis pengaruh secara tidak langsung memiliki nilai koefisien sebesar -0.209, pengaruh *social learning* terhadap partisipasi masyarakat melalui kesejahteraan masyarakat. Pengaruh pertama (H4a): *social learning* tidak berpengaruh positif signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Pengaruh kedua: pengaruh *social learning* terhadap partisipasi masyarakat melalui kesejahteraan masyarakat adalah signifikan, tidak secara positif dengan tingkat signifikansi (*p-value*) sebesar 0.009. Mengingat nilai *p-value* 0.009 lebih kecil dari 0.05 ($0.009 < 0.05$), maka terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis **H4b**: bahwa “kesejahteraan masyarakat memediasi pengaruh *social learning* terhadap partisipasi masyarakat”, (**H4b diterima**). Kesejahteraan masyarakat tidak memediasi pengaruh *social learning* terhadap partisipasi masyarakat (*no mediation*), dikarenakan hasil dari VAF (*Variance Account For*) hanya sebesar 7.09%.

Koefisien jalur bertanda negatif, mengindikasikan bahwa pengaruh secara tidak langsungnya tidak searah. Artinya bahwa semakin tinggi *social learning*, tidak menyebabkan semakin tingginya tingkat partisipasi masyarakat, jika kesejahteraan masyarakat juga tidak semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah *social learning* tidak menyebabkan semakin rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, jika kesejahteraan masyarakat juga semakin rendah.

5. Hubungan Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat

Hasil analisis pengaruh secara tidak langsung memiliki nilai koefisien sebesar 0.749, pengaruh kesejahteraan masyarakat terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Pengaruh kesejahteraan masyarakat terhadap tingkat partisipasi masyarakat adalah positif signifikan, dengan tingkat signifikansi (*p-value*)

sebesar <0.001 . Mengingat nilai p -value <0.001 lebih kecil dari 0.05 ($<0.001 < 0.05$), maka terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis **H5**: bahwa “kesejahteraan masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat”, (**H5 diterima**).

Koefisien jalur bertanda positif, mengindikasikan bahwa pengaruh secara tidak langsungnya searah. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah tingkat kesejahteraan masyarakat, maka semakin rendah pula tingkat partisipasi masyarakat.

Berdasarkan analisis deskriptif, maka hasil pengujian pengaruh langsung dan tidak langsung (Tabel 5.19 dan Tabel 5.20), maka dapat dijelaskan bahwa pengaruh secara langsung (*direct effect*) dengan hasil tidak positif signifikan adalah: (a) modal sosial terhadap partisipasi masyarakat; dan (b) *social learning* terhadap partisipasi masyarakat. Pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) dengan hasil tidak positif signifikan adalah hubungan kelembagaan terhadap partisipasi masyarakat, melalui kesejahteraan masyarakat.

5.8. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan hasil penelitian, berusaha menjawab masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian (*research questions*). Hasil penghitungan *outer loading* menunjukkan bahwa semua indikator telah merefleksikan variabel penelitian dan terbukti semua nilai dari *outer loading* variabel lebih besar dari 0.50 (>0.50). Hasil penghitungan *outer loading* juga menghasilkan indikator dominan dan merefleksikan masing-masing variabel penelitian. Pembahasan setiap variabel berdasarkan nilai *outer loading* dan nilai rata-rata sebagaimana terlihat pada Tabel 5.21.

Penjelasan dari perbandingan antara nilai rata-rata (*mean*) dan nilai koefisien jalur *outer loading* indikator variabel menggunakan alat analisis *Partial*

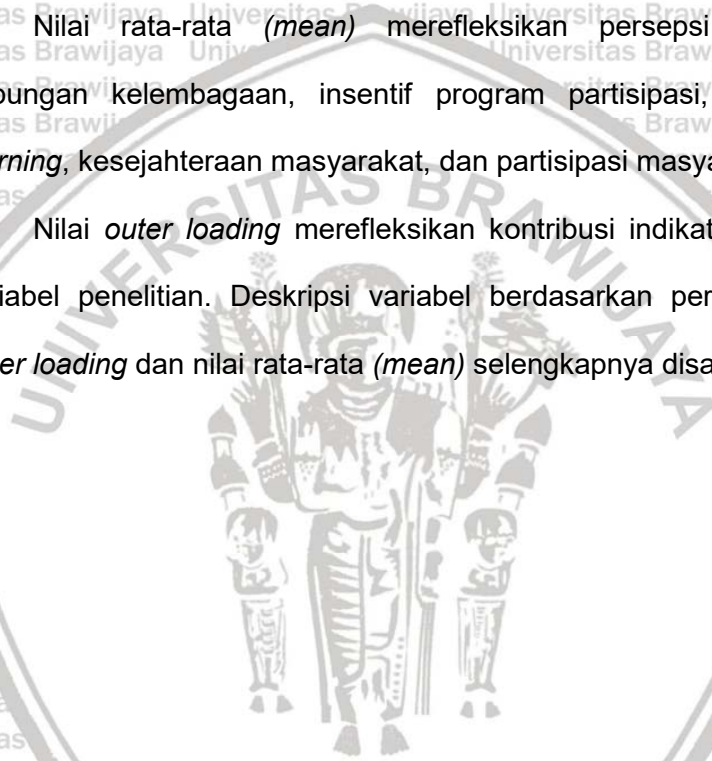
Least Square (PLS) dimaksudkan untuk mendeskripsikan setiap indikator variabel dan indikator variabel dominan berdasarkan persepsi responden, yang berkontribusi signifikan sebagai pembentuk variabel penelitian.

5.8.1. Deskripsi Variabel, Nilai *Outer Loading*, dan Nilai Rata-Rata (*Mean*)

Deskripsi variabel mendeskripsikan persepsi responden terhadap masing-masing indikator variabel berdasarkan nilai *outer loading* dan nilai rata-rata (*mean*) terhadap partisipasi masyarakat.

Nilai rata-rata (*mean*) merefleksikan persepsi responden tentang: hubungan kelembagaan, insentif program partisipasi, modal sosial, *social learning*, kesejahteraan masyarakat, dan partisipasi masyarakat.

Nilai *outer loading* merefleksikan kontribusi indikator sebagai pembentuk variabel penelitian. Deskripsi variabel berdasarkan persepsi responden, nilai *outer loading* dan nilai rata-rata (*mean*) selengkapnya disajikan pada Tabel 5.21.



Tabel 5.21
Persepsi Responden Berdasarkan Nilai *Outer Loading* dan Mean

Variabel	Indikator Variabel	Item Butir	<i>Outer Loading</i>	<i>P-Value</i>	Keterangan	
Hubungan Kelembagaan (X ₁)	Akuntabilitas (X _{1.1})	X111	0.619	<0.001	Valid	
		X112	0.571	<0.001	Valid	
	Transparansi (X _{1.2})	X121	0.639	<0.001	Valid	
		X122	0.626	<0.001	Valid	
	Hubungan Berbasis Kepercayaan (X _{1.3})	X131	0.625	<0.001	Valid	
		X132	0.569	<0.001	Valid	
	Kesesuaian Pelaksanaan Peraturan Kehutanan (X _{1.4})	X141	0.741	<0.001	Valid	
		X142	0.743	<0.001	Valid	
		X143	0.672	<0.001	Valid	
	Kemudahan Memperoleh informasi (X _{1.5})	X151	0.574	<0.001	Valid	
		X152	0.533	<0.001	Valid	
	Insentif (X ₂)	Insentif Pelatihan (X _{2.1})	X211	0.549	<0.001	Valid
			X212	0.517	<0.001	Valid
			X213	0.568	<0.001	Valid
		Insentif Peralatan Pertanian (X _{2.2})	X221	0.684	<0.001	Valid
X222			0.760	<0.001	Valid	
Insentif Uang Tunai (X _{2.3})		X231	0.579	<0.001	Valid	
		X232	0.673	<0.001	Valid	
Insentif Pengelolaan Lahan Untuk Pertanian (X _{2.4})		X241	0.778	<0.001	Valid	
		X242	0.888	<0.001	Valid	
Modal Sosial (X ₃)	Sikap Tolong Menolong (X _{3.1})	X311	0.660	<0.001	Valid	
		X312	0.670	<0.001	Valid	
		X313	0.604	<0.001	Valid	
		X314	0.715	<0.001	Valid	
	Kesepakatan Terhadap Norma Sosial (X _{3.2})	X321	0.518	<0.001	Valid	
		X322	0.529	<0.001	Valid	
		X323	0.643	<0.001	Valid	
		X324	0.575	<0.001	Valid	
	Interaksi jejaring Masyarakat Dengan Lembaga Kehutanan (X _{3.3})	X331	0.565	<0.001	Valid	
		X332	0.578	<0.001	Valid	
		X333	0.675	<0.001	Valid	
		X334	0.555	<0.001	Valid	
	Tingkat Kepercayaan pada Anggota Kelompok Masyarakat (X _{3.4})	X341	0.559	<0.001	Valid	
		X342	0.529	<0.001	Valid	
		X343	0.536	<0.001	Valid	
		X344	0.618	<0.001	Valid	
	Bantuan Kelompok Desa Penyangga (X _{3.5})	X351	0.547	<0.001	Valid	
		X352	0.596	<0.001	Valid	
		X353	0.514	<0.001	Valid	
		X354	0.601	<0.001	Valid	
		X355	0.595	<0.001	Valid	
Social Learning (X ₄)	Berbagi informasi atau Pengetahuan (X _{4.1})	X411	0.746	<0.001	Valid	
		X412	0.744	<0.001	Valid	
	Membangun komunikasi (X _{4.2})	X421	0.771	<0.001	Valid	
		X422	0.569	<0.001	Valid	
	Hubungan dengan <i>stakeholder</i> (X _{4.3})	X431	0.556	<0.001	Valid	
		X432	0.510	<0.001	Valid	
	Kesejahteraan Masyarakat (Y ₁)	Pendapatan Keluarga (Y _{1.1})	Y111	0.505	<0.001	Valid
			Y112	0.508	<0.001	Valid
			Y113	0.510	<0.001	Valid
Pendidikan keluarga (Y _{1.2})		Y121	0.595	<0.001	Valid	
		Y122	0.514	<0.001	Valid	
		Y123	0.700	<0.001	Valid	
Kesehatan keluarga (Y _{1.3})	Y131	0.682	<0.001	Valid		
	Y132	0.735	<0.001	Valid		
	Y133	0.773	<0.001	Valid		
Fasilitas penunjang Usaha Keluarga (Y _{1.4})	Y141	0.832	<0.001	Valid		
Partisipasi Masyarakat (Z ₁)	Partisipasi Perencanaan Program (Z _{1.1})	Z111	0.673	<0.001	Valid	
		Z112	0.712	<0.001	Valid	
	Partisipasi Pelaksanaan (Z _{1.2})	Z121	0.785	<0.001	Valid	
		Z122	0.794	<0.001	Valid	
	Partisipasi Penerimaan Manfaat (Z _{1.3})	Z131	0.632	<0.001	Valid	
		Z132	0.578	<0.001	Valid	
	Partisipasi Evaluasi dan Monitoring (Z _{1.4})	Z141	0.573	<0.001	Valid	
		Z142	0.649	<0.001	Valid	

Sumber: Hasil Analisis Data Primer Diolah, 2017.

Tabel 5.21, pembahasan persepsi responden berdasarkan nilai *outer loading* dan *mean* dilakukan terhadap enam variabel penelitian yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat sebagai berikut:

1. Pengaruh Hubungan Kelembagaan terhadap Partisipasi Masyarakat

Hubungan kelembagaan mencakup lima indikator, yaitu: akuntabilitas, transparansi, hubungan berbasis kepercayaan, kesesuaian pelaksanaan peraturan kehutanan, dan kemudahan memperoleh informasi, yang dipersepsikan belum baik oleh responden anggota kelompok Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP).

Hasil analisis data empirik menggunakan model *Structural Equation Modelling Partial Least Square* (SEM PLS), membuktikan bahwa indikator dominan pembentuk variabel hubungan kelembagaan adalah kesesuaian pelaksanaan peraturan kehutanan (Tabel 5.21). Kesesuaian pelaksanaan peraturan kehutanan, tercermin oleh adanya lembaga TN Baluran yang telah mensosialisasikan peraturan pengelolaan hutan kepada masyarakat dengan baik, sehingga berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Adanya sumbangan item butir (X_{142}) bahwa sepengetahuan anggota SPKP, lembaga TN Baluran telah mensosialisasikan peraturan pengelolaan hutan kepada masyarakat dengan baik. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya nilai *outer loading* terbesar sebesar 0.743. Sosialisasi peraturan pengelolaan hutan kepada masyarakat, berpengaruh terhadap anggota SPKP berpartisipasi memberikan sumbangan tenaga dalam pelaksanaan program pengelolaan hutan TN Baluran, dalam hal kegiatan reboisasi, pemadaman hutan ketika terjadi kebakaran hutan dengan melibatkan masyarakat peduli api (MPA), dan masyarakat mitra polisi hutan (MPH) sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap kelestarian hutan.

Hasil wawancara dengan pihak Penyuluh Kehutanan TN Baluran (Bapak

Siyanto), bahwa implikasi sosialisasi pelaksanaan peraturan kehutanan yang dilakukan oleh lembaga TN Baluran telah disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat tentang pengelolaan hutan. Dukungan adanya payung hukum atau peraturan pengelolaan hutan yang tegas, sangat diperlukan dalam kegiatan sosialisasi peraturan kehutanan.

Keberadaan lembaga TN Baluran sebagai lembaga yang akuntabel dan transparan dalam wujud sikap tanggung jawab lembaga untuk mengelola sumber daya hutan, pengelolaan sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja dinilai belum baik oleh responden. Tanggapan responden tentang lembaga TN Baluran untuk selalu berusaha mengedepankan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan sumberdaya hutan adalah belum baik dan harus mendapatkan perhatian lembaga TN Baluran untuk mencegah terjadinya *negative word of mouth* (NWOM).

Peningkatan partisipasi masyarakat, dapat juga dilakukan dengan cara lebih mengedepankan prinsip akuntabilitas dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban dalam mengelola sumberdaya hutan yang dapat diketahui oleh masyarakat luas secara transparan. Akuntabilitas yang kurang baik, menyebabkan: (a) rendahnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga kehutanan, (b) memicu rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, dan (c) menurunnya motivasi masyarakat untuk bergabung menjadi anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) sebagai kepanjangan tangan TN Baluran dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Keberadaan lembaga TN Baluran sebagai lembaga yang akuntabel dan transparan, berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan di TN Baluran.

Jalinan hubungan berbasis kepercayaan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat yang tercermin dalam hal penanganan program hibah atau dana

bantuan program pemberdayaan dari pemerintah daerah dan pusat, namun dinilai belum baik oleh responden.

Kegagalan pembangunan seringkali bersumber dari kegagalan pemerintah dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan yang benar serta mengabaikan pembangunan kelembagaan yang seharusnya menjadi dasar dari seluruh proses pembangunan baik sosial, ekonomi, politik, teknologi maupun pengelolaan sumber daya alam. Hasil penelitian ini mendukung dan memperkuat teori keeratan hubungan kelembagaan, sebagaimana dikemukakan oleh *Wold Bank* (2005).

Bukti empiris dalam penelitian menunjukkan bahwa hubungan kelembagaan berpengaruh positif signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Hubungan kelembagaan sebagai kunci utama suksesnya pengelolaan hutan, sebagaimana dikatakan oleh Baynes, *et al.* (2015). Akamani & Hall (2014), menyatakan bahwa keeratan hubungan kelembagaan kehutanan dilakukan berdasarkan aspek: (a) *trust-based relationships*; (b) *networks of reciprocity*; (c) *access to information*; dan (d) *other ancillary benefit*, yang diperoleh melalui hubungan kelembagaan kehutanan yang dapat diaplikasikan untuk pemecahan masalah kehidupan sosial. Keeratan hubungan kelembagaan kehutanan mempunyai pengaruh positif dalam proses *community forest management (CFM)*, karena adanya perspektif ketergantungan baik dimasa sekarang maupun masa yang akan datang. Pengelolaan hutan juga ditentukan secara luas oleh keeratan hubungan kelembagaannya. Muro (2015), mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proyek pembangunan, dipengaruhi oleh pemimpin yang berdasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*. Wietze (2000) mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan adalah karena adanya keeratan hubungan kelembagaan kehutanan dengan masyarakat.

2. Pengaruh Insentif Program Partisipasi Terhadap Partisipasi Masyarakat

Insentif program partisipasi dalam penelitian mencakup 4 (empat) indikator yakni: insentif pelatihan, insentif peralatan pertanian, insentif uang tunai dan insentif pengelolaan lahan pertanian, dipersepsikan belum baik oleh responden anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP).

Hasil analisis data empirik menggunakan model *Structural Equation Modelling Partial Least Square* (SEM PLS), membuktikan bahwa indikator dominan pembentuk variabel insentif program partisipasi adalah insentif pengelolaan lahan pertanian, dengan nilai *outer loading* untuk item butir (X_{242}) sebesar 0.888 (Tabel 5.21).

Insentif pengelolaan lahan pertanian, tercermin dalam hal ini pemberian hak guna usaha (HGU) lahan berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan di TN Baluran. Insentif pengelolaan lahan ini diterima masyarakat Petani dan Buruh Tani secara turun temurun. Hasil wawancara dengan para ketua SPKP, bahwa masyarakat yang memiliki hak guna usaha (HGU) lahan kebun seluas 0,5 -1,50 hektar, sebanyak 80 responden (66,67%). Petani yang memiliki hak guna lahan > 1,50 hektar, sebanyak 35 responden (29.17%). Insentif pengelolaan lahan dalam hal pemberian hak guna usaha (HGU) lahan berdampak pada partisipasi anggota SPKP untuk memberikan sumbangan tenaga dalam pelaksanaan program pengelolaan hutan TN Baluran.

Hasil wawancara dengan anggota dan ketua SPKP (Bapak Abrori, Widiatmoko, dan Ir. Hardiono), insentif pengelolaan lahan dirasa belum baik.

Lahan yang dikelola oleh masyarakat merupakan tanah lahan kering yang hanya dapat ditanami pada saat musim hujan dengan masa panen maksimal 2kali

dalam setahun, sehingga belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Insentif pelatihan tercermin dalam hal memperoleh pelatihan tentang pelayanan pengunjung ke TN Baluran dipersepsikan belum baik oleh responden.

Insentif pelatihan yang diterima masyarakat, meliputi: pelatihan pembuatan pupuk *silase*/biogas/pupuk organik/bokashi, kewirausahaan dan pelayanan

pengunjung bagi masyarakat masih perlu ditingkatkan. Dilihat dari rerata skor

indeks persepsi responden bahwa insentif pelatihan belum baik, perlu

peningkatan dan keberlanjutan program pelatihan. Pengaruh tingkat partisipasi

dalam pengelolaan hutan, yang disebabkan oleh kurang baiknya insentif

pelatihan, berdampak pada menurunnya kualitas sumberdaya manusia (SDM)

sebagai aset pembangunan khususnya untuk mengelola sumberdaya hutan.

Insentif peralatan pertanian, tercermin dalam hal pernah memperoleh

bantuan alat pertanian, dipersepsikan masih belum baik oleh responden. Insentif

peralatan pertanian meliputi: pemberian bantuan berupa mesin perontok padi,

mesin *hand tractor*, bantuan alat pembuatan biogas, bantuan alat pembuatan

pupuk organik, peralatan mencangkul, kereta kerinci serta peralatan pertanian

lainnya, masih perlu ditingkatkan.

Insentif uang tunai, merupakan indikator dengan nilai *mean* skor terendah.

Insentif uang tunai dicerminkan dalam hal pernah memperoleh bantuan uang

sebagai modal usaha, dipersepsikan belum baik dan belum mampu memotivasi

masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan program pengelolaan hutan TN

Baluran. Insentif uang tunai yang diberikan oleh lembaga TN Baluran kepada

masyarakat berasal dari dana: (a) bantuan program daftar isian pelaksanaan

anggaran (DIPA); (b) dana program pemberdayaan; dan (c) upah sebagai gaji

buruh dengan melibatkan masyarakat setempat program reboisasi, pembuatan

shelter, pembuatan barak atau pos keamanan, serta kegiatan kehutanan lainnya yang sifatnya insidental.

Hasil penelitian yang merupakan temuan penelitian, bahwa insentif program partisipasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Hasil penelitian secara teoritis mendukung dan memperkuat teori insentif partisipasi dari Adhikari, *et al.* (2014), bahwa insentif program partisipasi merupakan mekanisme yang berdampak positif terhadap sikap dan kebiasaan individu yang kemudian memotivasi dirinya untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan hutan secara kolektif (*collaborative forest management/CFM*), baik untuk pengelolaan pemerintahan dan sumberdaya hutan.

Hasil penelitian ini secara empiris juga mendukung penelitian dari Adhikari, *et al.* (2014); dan Djamhuri (2012), bahwa pengelolaan *social forestry*, memerlukan adanya insentif program partisipasi baik sebagai insentif *input* dan insentif *output* bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya. Bahkan konsep insentif program partisipasi telah diimplementasikan dalam pengelolaan hutan negara (*state forestry*) di Jawa sejak awal abad ke-19 dengan istilah yang populer "tumpang sari". Hasil penelitian secara empiris juga mendukung penelitian dari Kaseya & Kihonge (2016), bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara efektif, maka penting sekali adanya program insentif finansial yang berupa: insentif pengembalian uang transport (*transport refund*), dan insentif uang makan (*lunch allowances*).

Teori insentif Eleanor & Couper (2008), bahwa insentif uang (*monetary incentives*) diterapkan untuk memotivasi masyarakat dalam hal partisipasi *survey*. Adhikari, *et al.* (2015) bahwa Insentif program partisipasi merupakan mekanisme bantuan baik berupa materi dan non materi yang bertujuan untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta berdampak positif terhadap partisipasi masyarakat secara aktif dalam

pengelolaan hutan secara kolaborasi. Teori insentif program partisipasi, bahwa insentif program partisipasi dapat diimplementasikan dalam pengelolaan hutan konservasi/hutan lindung, dan hutan kemasyarakatan yang mempunyai kebijakan kerjasama dengan pihak lembaga kehutanan (Perhutani) dalam pengolahan lahan hutan untuk pertanian.

3. Pengaruh Modal Sosial terhadap Partisipasi Masyarakat

Modal sosial dalam penelitian mencakup lima indikator, yakni: sikap tolong menolong, kesepakatan terhadap norma sosial, interaksi jejaring masyarakat dengan lembaga kehutanan, tingkat kepercayaan kepada anggota kelompok masyarakat, dan bantuan kelompok desa penyangga, dipersepsikan belum baik oleh responden anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP).

Hasil analisis data empirik menggunakan model *Structural Equation Modelling Partial Least Square* (SEM PLS), membuktikan bahwa indikator dominan pembentuk variabel modal sosial adalah sikap tolong menolong dengan nilai *outer loading* untuk item butir (X_{314}) sebesar 0.715 (Tabel 5.21). Sikap tolong menolong yang dicerminkan dalam hal saling bantu membantu tidak hanya di antara anggota kelompok dalam kegiatan usaha, tetapi juga masyarakat secara umum dalam kehidupan sehari-hari, dipersepsikan baik oleh responden. Sikap tolong menolong tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam hal memberikan sumbangan tenaga dalam pelaksanaan program pengelolaan hutan TN Baluran. Sikap tolong menolong yang dilakukan, hanya terimplementasikan oleh orang-orang tertentu, sehingga tidak berdampak pada partisipasi masyarakat.

Indikator interaksi jejaring masyarakat dengan lembaga kehutanan, yang dicerminkan oleh anggota SPKP telah membina hubungan dengan pihak pengelola hutan di TN Baluran dengan baik. Interaksi jejaring masyarakat dengan lembaga kehutanan tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat

dalam hal memberikan sumbangan tenaga dalam pelaksanaan program pengelolaan hutan TN Baluran, dikarenakan yang melakukan interaksi jejaring tersebut terbatas pada orang-orang tertentu (ketua SPKP, ketua LSM dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya).

Indikator kesepakatan terhadap norma sosial, yang dicerminkan dalam hal kesepakatan terhadap norma sosial untuk mematuhi aturan dengan cara menysihikan dana sosial untuk kegiatan sosial belum terlaksana dengan baik, sehingga tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Dana sosial yang diperoleh dari anggota SPKP secara sukarala, belum dapat terimplementasi dengan baik untuk kegiatan sosial dan belum sepenuhnya dipatuhi oleh seluruh anggota secara baik, sehingga tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat.

Indikator bantuan kelompok desa penyangga, menggambarkan bahwa seluruh anggota SPKP untuk saling membantu dengan sesama anggota kelompok dinilai belum baik oleh responden, khususnya jika ada anggota yang memerlukan pinjaman modal. Anggota SPKP itu sendiri belum memiliki modal usaha yang baik, demikian juga anggota SPKP tingkat kesejahteraannya juga rata-rata masih rendah. Indikator bantuan kelompok desa penyangga, tidak berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, yang disebabkan oleh kurang baiknya bantuan kelompok desa penyangga dan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Indikator tingkat kepercayaan pada anggota kelompok masyarakat yang tercermin dalam hal anggota SPKP memperoleh kepercayaan dengan baik untuk mendapatka pinjaman dari kelompok, dinilai belum baik oleh responden.

Indikator tingkat kepercayaan pada anggota kelompok masyarakat tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat, karena kepercayaan yang diberikan oleh lembaga kehutanan TN Baluran bersifat terbatas kepada orang-

orang tertentu. Manfaat sebagai anggota SPKP untuk mendapatkan kepercayaan untuk memperoleh pinjaman dari kelompok masyarakat, terlihat belum baik. Begitu pula untuk memperoleh kepercayaan mendapatkan pinjaman dari kelompok masyarakat dengan bersedia mengembalikan pinjaman/kredit tepat waktu, terlihat belum baik juga.

Berdasarkan teori modal sosial oleh Fukuyama (1999), bahwa modal sosial merupakan norma yang dapat mendorong adanya kerjasama antar anggota masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, modal sosial akan tampak dari suasana saling percaya antar warga masyarakat. Selain itu Coleman (1999), menegaskan modal sosial sebagai alat untuk memahami aksi sosial secara teoretis yang mengkombinasikan perspektif sosiologi dan ekonomi. Pengertian ini dipertegas oleh Serageldin (1998), bahwa modal sosial selalu melibatkan masyarakat dan menjadikan masyarakat, dan muncul bukan semata dari interaksi pasar dan memiliki nilai ekonomis. Hasil penelitian ini mendukung dan memperkuat teori modal sosial sebagaimana dijelaskan diatas. Modal sosial selalu melibatkan masyarakat, menjadikan masyarakat, munculnya bukan semata dari interaksi pasar, melainkan karena memiliki nilai ekonomis.

Hasil penelitian secara teoritis mendukung dan memperkuat teori modal sosial dari Fukuyama (1999), bahwa modal sosial merupakan norma yang dapat mendorong adanya kerjasama antar anggota masyarakat. Secara empiris tidak mendukung penelitian dari: Sara, *et al.* (2011); dan Sharpe (2012), mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dan modal sosial mempunyai hubungan yang erat serta meningkatnya modal sosial juga akan meningkatkan partisipasi warga.

Hasil penelitian dalam penelitian ini merupakan temuan penelitian, menunjukkan bahwa modal sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat, dikarenakan modal sosial yang dicerminkan oleh sikap tolong menolong hanya dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu yaitu oleh

kelompok anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) dan tidak dilakukan oleh seluruh masyarakat desa penyangga. Modal sosial masyarakat desa penyangga juga belum tersentuh oleh motivasi eksternal secara optimal. Belum optimalnya bantuan modal ekonomi produktif dan penunjang aktifitas ekonomi lainnya, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah.

4. Pengaruh *Social Learning* Terhadap Partisipasi Masyarakat

Social learning dalam penelitian ini mencakup 3 (tiga) indikator, yaitu: berbagi informasi atau pengetahuan, membangun komunikasi, dan hubungan dengan *stakeholder*, dipersepsikan belum baik, oleh responden anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP).

Hasil analisis data empirik menggunakan model *Structural Equation Modelling Partial Least Square (SEM PLS)*, membuktikan bahwa indikator dominan pembentuk variabel *social learning* adalah membangun komunikasi dengan nilai *outer loading* untuk item butir (X_{421}) sebesar 0.771 (Tabel 5.21).

Membangun komunikasi yang dicerminkan dalam hal anggota SPKP menjalin komunikasi dengan sesama kelompok dan berdampak positif dalam hidupnya, terlihat belum baik. Implikasinya bahwa jalinan komunikasi yang dilakukan tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat, dikarenakan jalinan komunikasi yang dilakukan hanya dapat dilakukan oleh masyarakat tertentu. Membangun komunikasi tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dengan memberikan sumbangan tenaga dalam pelaksanaan program pengelolaan hutan TN Baluran, dikarenakan kurangnya koordinasi dan kerjasama yang baik atas dasar saling membutuhkan dari masing-masing kelompok SPKP (Wonorejo, Sumber Waru, dan Sumber Anyar). Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota SPKP, bahwa jalinan komunikasi dengan pihak TN Baluran, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan bahkan dengan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan, terlihat belum baik

dikarenakan peran lembaga TN Baluran untuk melibatkan peran anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) sebagai kepanjangan tangan TN Baluran, masih belum baik.

Indikator hubungan dengan *stakeholder* yang tercermin dalam hal menjalin hubungan dengan *stakeholder* program pengelolaan hutan di TN Baluran, dinilai belum baik oleh responden. Pengaruh tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, yang disebabkan oleh kurang baiknya hubungan masyarakat dengan *stakeholder*, dapat menyebabkan gagalnya pengelolaan hutan konservasi di TN Baluran.

Indikator berbagi informasi atau pengetahuan yang tercermin dalam hal anggota SPKP berkesempatan berbagi informasi dengan sesama anggota untuk meningkatkan pengetahuan, dinilai masih belum baik oleh responden. Berbagi informasi atau pengetahuan dalam proses *social learning* memegang peranan penting, namun demikian tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan di TN Baluran. Berbagi informasi atau pengetahuan hanya terbatas dan dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu, sehingga tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Berbagi informasi atau pengetahuan dengan sesama anggota SPKP perlu ditingkatkan untuk dapat meningkatkan pengetahuan, produktifitas, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga tingkat partisipasi masyarakat semakin baik.

Berdasarkan teori *social learning* oleh Albert Bandura, bahwa *social learning* dikembangkan dari tiga asumsi yaitu; 1). Individu melakukan pembelajaran dengan meniru apa yang ada di lingkungannya terutama tingkah laku orang lain; 2). terhadap hubungan yang kuat antara pelajar dengan lingkungannya; 3). hasil pembelajaran adalah berupa kode tingkah laku visual dan verbal yang diwujudkan dalam tingkah laku sehari-hari. Bandura juga mengemukakan bahwa dalam pandangan belajar fungsi psikologi diterangkan

sebagai interaksi yang *continue* dan timbal balik dari determinan pribadi dan lingkungan. Kusumanto, *et al.* (2005), mengatakan bahwa dimensi *social learning* merupakan: (1) kumpulan pengembangan pengetahuan diantara anggota kelompok; (2) adanya *sharing* pengetahuan dan informasi diantara pemangku kepentingan yang berbeda-beda, (3) membangun komunikasi dan hubungan diantara *stakeholder*; dan (iv) pembentukan kapasitas strategi.

Bukti empiris dalam penelitian ini merupakan temuan penelitian, menunjukkan bahwa *social learning* tidak berpengaruh positif signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Penyebabnya adalah *social learning* yang dicerminkan dalam hal membangun komunikasi antara anggota SPKP dengan sesama kelompok masyarakat, belum berdampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan dan tingkat partisipasi masyarakat.

Social learning dalam penelitian ini tidak berpengaruh positif signifikan terhadap partisipasi masyarakat, dikarenakan adanya indikasi: (a) latar belakang tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat yang masih rendah; (b) adanya *mindset* masyarakat yang sulit untuk menerima hal-hal baru; (c) masyarakat tidak mau ribet; dan (d) tidak mau diajak maju dan berkembang dalam usaha yang lebih maju melalui proses *social learning*; serta (e) peran kelembagaan TN Baluran untuk melibatkan anggota SPKP program pengelolaan hutan masih belum baik.

Social learning terdapat faktor-faktor pembatas terhadap partisipasi masyarakat, meliputi: (a) harus memenuhi komitmen waktu; (b) mengembangkan kapasitas fasilitasi; (c) bekerja dengan keragaman budaya; (d) mengatasi hubungan kekuasaan; dan (e) membayar biaya. *Social learning* merupakan proses yang panjang, banyak tahap yang bisa menjadi mahal (Louise, *et al.* 2005)

Hasil penelitian ini secara teoritis tidak mendukung teori *social learning* Albert Bandura dan secara empiris tidak mendukung penelitian dari: Berkes (2009); Fernandez, *et al.* (2008); dan Muro & Jeffry (2012), mengatakan bahwa *social learning* berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. Asumsinya bahwa *social learning* berpeluang adanya tukar pikiran, berbagi informasi dan pengetahuan.

5. Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dalam penelitian ini direfleksikan dengan 4 (empat) indikator yakni: pendapatan keluarga, pendidikan keluarga, kesehatan keluarga, dan fasilitas penunjang usaha, dipersepsikan belum baik, oleh responden anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP).

Hasil analisis data empirik menggunakan model *Structural Equation Modelling Partial Least Square (SEM PLS)*, membuktikan bahwa indikator dominan pembentuk variabel kesejahteraan masyarakat adalah indikator fasilitas penunjang usaha dengan nilai *outer loading* terbesar untuk item butir (Y_{141}) sebesar 0.832 (Tabel 5.21).

Fasilitas penunjang usaha yang tercermin dalam hal kepemilikan fasilitas alat-alat penunjang usaha untuk memenuhi kebutuhan transportasi untuk usaha maupun untuk keluarga, dengan menggunakan kendaraan milik sendiri, terlihat belum baik. Fasilitas penunjang usaha berpengaruh terhadap kesejahteraan dan partisipasi masyarakat anggota SPKP dalam memberikan sumbangan tenaga dalam pelaksanaan program pengelolaan hutan TN Baluran. Kebutuhan alat transportasi penunjang usaha bagi anggota SPKP belum terpenuhi dengan baik.

Pengaruh tingkat partisipasi dalam pengelolaan hutan, yang disebabkan oleh kurangnya fasilitas penunjang usaha keluarga yang dapat berpengaruh terhadap

tingkat kesejahteraan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan di TN Baluran.

Indikator pendidikan keluarga menggambarkan bahwa pendidikan keluarga yang ditempuh melalui jalur formal maupun non formal belum baik, dikarenakan sebagian besar masyarakat belum sejahteran dan hanya mampu menempuh pendidikan formal setingkat SLTP. Pendidikan keluarga berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat untuk memberikan: (a) sumbangan tenaga dalam pelaksanaan program pengelolaan hutan TN Baluran; (b) memberikan pendapat, saran dan usulan dalam penyusunan rencana program pengelolaan hutan TN Baluran. Pendidikan keluarga yang semakin baik, memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungannya.

Indikator kesehatan keluarga yang tercermin dalam hal fasilitas kesehatan dengan jaminan asuransi kesehatan yang dimiliki oleh anggota SPKP belum baik. Kesadaran untuk memiliki jaminan asuransi kesehatan oleh seluruh anggota SPKP, terlihat masih belum baik. Kesehatan keluarga berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat untuk dapat memberikan pendapat, saran dan usulan dan tenaga dalam penyusunan rencana program pengelolaan hutan TN Baluran.

Indikator pendapatan keluarga, yang dicerminkan dalam hal penghasilan keluarga anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) dari usaha utama dalam satu bulan, belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara baik. Perhatian dari pihak lembaga TN Baluran, untuk membantu dalam peningkatan sumber pendapatan masyarakat desa penyangga melalui program partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan sangat diperlukan.

Bukti empiris dalam penelitian merupakan temuan bahwa kesejahteraan masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat partisipasi

masyarakat. Hasil penelitian ini secara teoritis mendukung dan memperkuat teori kesejahteraan Menkokesra, (2010).

Hasil penelitian ini secara empiris mendukung penelitian dari Rahut, *et al.* (2015), mengatakan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat menurunkan tingkat kemiskinan rumah tangga. Rumah tangga yang ikut berpartisipasi aktif dalam pengelolaan hutan akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan rumah tangga (Akamani & Hall, 2014). Kesejahteraan masyarakat merupakan faktor pendorong partisipasi masyarakat untuk suksesnya program pengelolaan hutan.

6. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan di TN Baluran

Partisipasi masyarakat dalam penelitian mencakup 4 (empat) indikator yakni: partisipasi perencanaan program, partisipasi pelaksanaan, partisipasi penerimaan manfaat, dan partisipasi evaluasi dan monitoring, dipersepsikan oleh responden anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP), belum baik.

Hasil analisis data empirik menggunakan model *Structural Equation Modelling Partial Least Square (SEM PLS)*, membuktikan bahwa indikator dominan pembentuk variabel partisipasi masyarakat adalah partisipasi pelaksanaan dengan nilai *outer loading* terbesar untuk item butir (Z_{122}) sebesar 0.794 (Tabel 5.21).

Partisipasi pelaksanaan yang diwujudkan dalam hal anggota SPKP berpartisipasi memberikan sumbangan tenaga dalam pelaksanaan program pengelolaan hutan TN Baluran terlihat baik. Aspek berpartisipasi memberikan sumbangan tenaga dalam pelaksanaan program pengelolaan hutan TN Baluran, juga terlihat baik dalam hal kegiatan reboisasi hutan, pemadaman hutan yang terbakar dengan melibatkan masyarakat peduli api (MPA), masyarakat mitra polisi hutan (MPH) dan masyarakat sekitar (anggota SPKP).

Tiga indikator partisipasi lainnya yang meliputi: partisipasi perencanaan program, partisipasi penerimaan manfaat, dan partisipasi evaluasi dan monitoring, masih belum baik. Partisipasi evaluasi dan monitoring yang dicerminkan oleh anggota SPKP ikut memonitor kelestarian hutan TN Baluran, masih belum baik, karena tidak semua anggota SPKP mempunyai kesempatan yang baik untuk berpartisipasi dalam hal evaluasi dan monitoring keberadaan dan kelestarian hutan TN Baluran. Partisipasi evaluasi dan monitoring berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dengan cara memberikan sumbangan tenaga dalam pelaksanaan program pengelolaan hutan TN Baluran.

Indikator penerimaan manfaat yang tercermin adanya anggota SPKP ikut merasakan manfaat program pengelolaan hutan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga, dinilai masih belum baik oleh responden. Anggota SPKP merasa bahwa partisipasi penerimaan manfaat atas partisipasinya dalam program kehutanan belum mampu membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta lingkungan hidupnya. Partisipasi penerimaan manfaat yang baik, akan semakin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal berpartisipasi memberikan sumbangan tenaga dalam pelaksanaan program pengelolaan hutan TN Baluran.

Indikator partisipasi perencanaan program yang dicerminkan oleh anggota SPKP memperoleh undangan rapat untuk pengambilan keputusan yang diadakan oleh pihak TN Baluran, terlihat belum baik. Anggota SPKP tidak sepenuhnya memperoleh kesempatan yang sama dalam hal memberikan pendapat, saran dan usulan dalam penyusunan rencana program pengelolaan hutan TN Baluran. Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan yang disebabkan oleh lemahnya peran pengelola TN Baluran dalam melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan program pengelolaan hutan di TN Baluran, menjadi sebab gagalnya pengelolaan hutan itu sendiri.

Hasil penelitian ini secara teoritis mendukung teori partisipasi dari Arnstein, SR (1969); Darusman (2002); dan Daniel dan Nieldalina, (2006). Lembaga kehutanan, diharapkan mampu memberikan dukungan moral kepada masyarakat untuk menjamin keadilan, dan transparansi dalam pengelolaan hutan (Sarin, 1996; Silwal, 1986). Faktor identitas sosial sebagai kategorisasi diri, psikologi, organisasi dan sumber motivasi secara langsung akan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu organisasi (Himadri, 2000).

Hasil penelitian secara empiris mendukung penelitian Cohen (1997) bahwa inti dari pembangunan adalah pelaksanaan wujud nyata dari partisipasi masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan (merupakan tahapan penting dalam pembangunan), menikmati hasil sebagai indikator keberhasilan partisipasi masyarakat mulai tahap perencanaan dan pelaksanaan program, dan evaluasi dan monitoring yang merupakan tahap yang penting karena partisipasi masyarakat dalam tahap ini merupakan umpan balik yang dapat memberikan masukan untuk perbaikan bagi pelaksanaan program selanjutnya.

5.8.2 Analisis Kesejahteraan Masyarakat

Analisis kesejahteraan masyarakat, dalam penelitian ini didasarkan pada hasil analisis hipotesis secara tidak langsung (*indirect effect*) sebagai berikut:

1. Hubungan Antara Keeratan Hubungan Kelembagaan, Kesejahteraan Masyarakat, dan Partisipasi Masyarakat.

Pengaruh jalur secara tidak langsung diperoleh hasil bahwa hubungan kelembagaan tidak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat melalui kesejahteraan masyarakat. Makna dari temuan ini adalah meningkatnya keeratan hubungan kelembagaan, tidak menyebabkan meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat, jika kesejahteraan masyarakatnya rendah.

Bukti empiris dalam penelitian ini yang merupakan temuan bahwa berdasarkan hasil uji pengaruh secara tidak langsung, diperoleh hasil bahwa

hubungan kelembagaan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap partisipasi masyarakat melalui kesejahteraan masyarakat. Hasil analisis uji pengaruh secara langsung, bahwa hubungan kelembagaan memiliki pengaruh yang lebih besar berpengaruh positif signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Keeratan hubungan kelembagaan TN Baluran belum mampu mencerminkan sebagai lembaga yang mengedepankan prinsip-prinsip *good governance*. Keeratan hubungan kelembagaan tidak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat melalui kesejahteraan masyarakat. Lembaga kehutanan di TN Baluran masih belum optimal dalam hal mengimplementasikan aspek: akuntabilitas, transparansi, hubungan berbasis kepercayaan, dan kemudahan memperoleh informasi bagi masyarakat, sehingga menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat yang berdampak pada kegagalan dalam pengelolaan hutan konservasi yang lestari dan berkelanjutan berbasis partisipasi masyarakat.

Hasil penelitian ini secara empiris mendukung penelitian dari Wagener (2004); dan Akib, *et al.* (2016). Hubungan kelembagaan kehutanan dengan masyarakat merupakan faktor penting pendorong kebangkitan usaha pengelolaan hutan berdasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*. *Good governance* menciptakan keamanan, kepercayaan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, begitupula sebaliknya *bad governance* menciptakan ketidakpercayaan, kecemasan, dan ketidak pastian perekonomian. Kerja sama harmonis menuju kawasan hutan yang lestari berbasis partisipasi masyarakat.

Pentingnya profesionalisme kelembagaan kehutanan yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan pengelolaan yang efektif serta efisien untuk menjamin efektifitas pengelolaan hutan yang berkelanjutan berdasarkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

2. Hubungan Antara Insentif, Kesejahteraan Masyarakat, dan Partisipasi Masyarakat

Pengaruh analisis jalur tidak langsung diperoleh hasil bahwa insentif berpengaruh positif signifikan terhadap partisipasi masyarakat melalui kesejahteraan masyarakat. Analisis jalur langsung, diperoleh hasil bahwa insentif berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Makna dari temuan ini adalah meningkatnya atau menurunnya kesejahteraan masyarakat dan partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya insentif yang diberikan. Artinya bahwa semakin tinggi insentif yang diberikan kepada masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian secara empiris mendukung penelitian dari Rahut, *et al.* (2015); William & Elias, (2013); Das & Sarker (2010). Semakin besar kepemilikan lahan, maka semakin besar pula partisipasinya dalam program pengelolaan hutan masyarakat. Kepemilikan lahan hutan merupakan insentif untuk usaha pertanian, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan tingkat partisipasinya dalam pengelolaan *community forest/social forestry* (Rahut, *et al.* 2015). Masyarakat akan berpartisipasi dalam pengelolaan hutan secara meningkat jika: (1) adanya insentif akses yang lebih luas terhadap kawasan hutan kemasyarakatan; (2) adanya tingkat pendidikan yang baik; serta (3) semakin tingginya nilai transfer hasil pendapatan (William & Elias (2009).

Sementara Das & Sarker (2010) mengatakan bahwa pengelolaan sumberdaya hutan lokal mempunyai peranan penting bagi kehidupan masyarakat yang tinggal, baik didalam kawasan maupun yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

Insentif dari pengelolaan sumberdaya hutan akan mampu meningkatkan pendapatan bersih riil tahunan perkapita masyarakat miskin, dan berdampak pula pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan.

3. Hubungan Antara Modal Sosial, Kesejahteraan Masyarakat, dan Partisipasi Masyarakat

Pengaruh jalur secara tidak langsung diperoleh hasil bahwa modal sosial berpengaruh positif signifikan terhadap partisipasi masyarakat melalui kesejahteraan masyarakat. Hasil analisis secara langsung, diperoleh hasil bahwa modal sosial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap partisipasi masyarakat.

Pengaruh modal sosial lebih besar pengaruhnya secara tidak langsung terhadap partisipasi masyarakat melalui kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian ini adalah modal sosial berpengaruh positif signifikan terhadap partisipasi masyarakat melalui kesejahteraan masyarakat. Makna dari temuan ini bahwa semakin tinggi tingkat modal sosial masyarakat, semakin tinggi pula tingkat partisipasi masyarakat, jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi pula. Begitu pula sebaliknya, rendahnya tingkat modal sosial masyarakat, menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, jika kesejahteraan masyarakat juga semakin rendah.

Hasil penelitian secara empiris tidak mendukung penelitian dari: Sara, *et al.* (2011) dan Sharpe (2012). Secara teoritis mendukung teori modal sosial Grootaet (1999); Coleman (1999); dan Putnam (1993). Hasil penelitian ini secara empiris mendukung penelitian dari Grootaet (1999); Narayan & Pritchett (1997).

Potensi modal sosial memiliki hubungan positif dengan kesejahteraan apabila:

- (a) didukung *social network* yang tinggi; (b) saling percaya dengan sesama anggota masyarakat; (c) adanya jiwa kebersamaan yang tinggi; (d) saling bantu membantu; serta (e) adanya partisipasi masyarakat yang tinggi.

4. Hubungan Antara *Social Learning*, Kesejahteraan Masyarakat, dan Partisipasi Masyarakat

Pengaruh jalur secara tidak langsung diperoleh hasil bahwa *social learning* berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat, melalui kesejahteraan

masyarakat. Hasil analisis pengaruh langsung diperoleh hasil tidak signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Penelitian secara empiris tidak mendukung penelitian dari Berkes (2009); Fernandez, *et al.* (2015); dan Muro & Jeffry (2012), bahwa *social learning* telah berkembang pesat sebagai kunci komponen partisipasi dan diambil secara khusus sebagai elemen penting dari partisipasi dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Bukti empiris dalam penelitian ini yang merupakan temuan bahwa berdasarkan hasil uji pengaruh secara tidak langsung, diperoleh hasil bahwa *social learning* berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat, melalui kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam proses *Social learning* memungkinkan adanya tukar pikiran, berbagi informasi dan pengalaman antar anggota kelompok masyarakat, dan meningkatkan kreatifitas dan produktifitas masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Hasil penelitian ini mendukung secara empiris dari Hemerijck, (2005); dan Yamauchi (2005), mengatakan bahwa rumah tangga dari kalangan petani yang berpendidikan dan terlibat dalam proses *social learning*, mampu meraih pendapatan yang lebih tinggi daripada rumah tangga yang tidak berpendidikan.

5. Hubungan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Tingkat Partisipasi Masyarakat

Pengaruh jalur secara tidak langsung diperoleh hasil bahwa kesejahteraan masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Hasil penelitian secara teoritis mendukung teori kesejahteraan masyarakat dari Menkokesra, (2010); dan Agusta & Fujiartanto, (2014), mengatakan bahwa konstruk kesejahteraan umum merupakan standad material atau ekonomi masyarakat, pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik, peran serta atau partisipasi

masyarakat dalam pembangunan, lembaga kemasyarakatan dan lingkungan, pemerintahan dan ekonomi swasta.

Hasil penelitian secara empiris mendukung penelitian dari Rahut, *et al.* (2015); dan Akamani & Hall (2014). Usaha meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program *Collaborative Forest Management* (CFM), harus terlebih dahulu mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sumbangan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa penyangga, akan meningkatkan pula tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan di TN Baluran.

5.8.3 Kontribusi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Terhadap Pendapatan dan Kesejahteraan Keluarga

Hutan lindung merupakan salah satu aset daerah dan negara yang bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati secara spesifik sesuai habitatnya. Hutan lindung mempunyai peranan penting dalam mengatur hidro-orologis daerah di sekitarnya dan dapat pula dimanfaatkan untuk kepentingan budidaya, pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) serta penggunaan jasa lingkungan (Yudilastiantoro, 2003).

Potensi desa penyangga (Wonorejo, Sumber Waru, Sumber Anyar, Watu Kebo dan Bajul Mati), merupakan potensi yang meliputi: jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah KK, jumlah bangunan sekolah, produksi tanaman pertanian yang terdiri dari: padi, jagung, dan bawang merah, usaha ternak yang meliputi: ternak sapi, kambing dan ayam buras, serta usaha ekonomi produktif yang terdiri dari: kios, penginapan, dan gedung prasarana kesehatan.

Tabel 5.22, menunjukkan bahwa potensi kelima desa penyangga cukup berpotensi dan berkembang menjadi lebih besar, namun demikian memerlukan penataan tata ruang wilayah agar tidak mengganggu kelestarian hutan di TN Baluran yang berada di sekitarnya. Hasil hutan bukan kayu (HHBK) mempunyai

peranan dalam kehidupan sehari-hari dan juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 5.22
Potensi Desa Penyangga TN Baluran

Kriteria	Wonorejo	Sumber Waru	Sumber Anya	Bajul Mati	Watu Kebo	JUMLAH
Jumlah Penduduk	6,591	4,233	15,338	5,112	3,115	34,389
Luas Wilayah (ha)	414.2	557.2	145.0	411.4	235.0	1,206
Jumlah Rumah Tangga (KK)	3,171	2,427	2,594	2,850	1,320	12,362
Jumlah Bangunan Sekolah	22	34	35	25	17	133
Produksi Padi (ton)	5,808	45	4	369	285	6,511
Jagung (ton)	378	6	4	-	10	398
Bawang Merah (ton)	608	7	-	-	-	615
Ternak Sapi (ekor)	653	2,909	5,001	456	576	9,595
Ternak Kambing (ekor)	415	295	952	36	564	2,262
Ayam buras (ekor)	4,012	943	6,448	158	347	11,908
Kios (warung)	11	14	6	6	14	51
Penginapan	13	1	-	-	-	14
Gedung Prasarana Kesehatan	13	18	19	16	13	79

Sumber: Analisis Data Primer, 2017.

Sebagian besar masyarakat pedesaan dan masyarakat miskin secara umum sangat tergantung pada HHBK sebagai sumber mata pencaharian, obat, getah, dan lain-lain. Bahkan sebanyak hampir 80% dari populasi dunia berkembang mengandalkan hasil HHBK untuk tujuan kesehatan dan gizinya. Bahkan tidak jarang hasil HHBK dilakukan untuk mengetahui kebutuhan hidup sehari-hari sebagai sumber pencaharian, pendapatan rumah tangga khususnya bagi masyarakat pedesaan (FAO, 2001).

Kontribusi pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber pendapatan, berdasarkan laporan dari (TN Baluran, 1997; Syafi'i, *et al.* 2012; dan TN Baluran, 2014b), meliputi: (1) pendapatan dari hasil usaha tani (panen jagung, cabai, bawang merah dan jeruk nipis) diperoleh pendapatan Rp. 37.200.000 per tahun; (2) pendapatan dari hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang meliputi: pemanfaatan biji *acacia nilotica*, buah kemiri, gadung, kayu bakar dan rumput, diperoleh penghasilan sebesar Rp 39.600.000; (3) pendapatan dari usaha ternak (sapi, kambing dan ayam) pendapatan sekitar Rp 24.100.000 per tahun.

Tabel 5.23
Pendapatan Dari Hasil Usaha Tani/KK/Per Tahun

No	Jenis	Jumlah (Kg)/Ha	Jumlah Panen	Harga	Total
1	Jagung	400	2	10,000	8,000,000
2	Cabai	100	2	30,000	6,000,000
3	Jeruk Nipis	5,100	1	4,000	20,400,000
4	Bawang Merah	200	1	14,000	2,800,000
Pendapatan Usaha Tani Per Tahun					37,200,000

Sumber: TN Baluran, 1997; Syafi'i, *et al.* 2012; dan TN Baluran, 2014.

Tabel 5.23, menjelaskan bahwa pendapatan masyarakat dari hasil usaha tani Rp. 37.200.000 per tahun. Hal ini diasumsikan bahwa pada jumlah panen minimal dalam setahun, ditanaman pada waktu yang bersamaan dan berdasarkan harga jual nasional.

Tabel 5.24
Pendapatan Dari Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) /KK/Per Tahun

	Jenis	Hasil	Satuan	Harga	Total
1	Biji Acacia Nilotica	2	Karung	15,000	30,000
2	Buah Kemiri	1	Kg	35,000	35,000
3	Gadung	1	Kg	20,000	20,000
4	Kayu Bakar	3	Pikul	5,000	15,000
5	Rumput	1	Karung	10,000	10,000
Pendapatan Per Hari					110,000
Pendapatan Per Bulan					3,300,000
Pendapatan Per Tahun					39,600,000

Sumber: TN Baluran, 1997; Syafi'i, *et al.* 2012; dan TN Baluran, 2014.

Tabel 5.24, menjelaskan bahwa pendapatan masyarakat dari pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) sebesar Rp 39.600.000 per tahun.

Asumsinya bahwa pemanfaatan biji *acacia nilotica* yang dapat dikumpulkan masyarakat maksimal 2 karung dalam sehari, dan pemanfaatan rumput untuk pakan ternak sapi diasumsikan 1 ekor sapi dewasa menghabiskan 1 karung rumput setiap hari, serta berdasarkan harga jual nasional. Selain hasil hutan bukan kayu (HHBK), pendapatan masyarakat diperoleh juga dari hasil usaha ternak, sebagaimana disajikan pada Tabel 5.25.

Tabel 5.25
Pendapatan Dari Hasil Usaha Ternak /KK/Per Tahun

	Jenis	Jumlah (Kg)/Ha	Harga	Total
1	Sapi	2	10,000,000	20,000,000
2	Kambing	2	2,000,000	4,000,000
3	Ayam	2	50,000	100,000
Pendapatan Per Tahun				24,100,000

Sumber: TN Baluran, 1997; Syafi'i, *et al.* 2012; dan TN Baluran, 2014

Tabel 5.25, menjelaskan bahwa pendapatan masyarakat dari hasil usaha ternak mencapai Rp. 24.100.000 per tahun. Hal ini diasumsikan bahwa setiap kepala keluarga yang menjual jenis ternaknya masing – masing 2 ekor per tahun berdasarkan harga nasional.

Analisis pendapatan responden dalam penelitian ini mengacu pada (TN Baluran, 1997; Syafi'i, *et al.* 2012; dan TN Baluran, 2014b). Responden dalam penelitian ini adalah anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) sebanyak 120 KK yang berasal dari 5 (lima) desa penyangga yaitu: desa Wonorejo, Sumber Waru, Sumber Anyar, Bajul Mati dan Watu Kebo.

Adapun potensi dan kontribusi hasil hutan bukan kayu (HHBK) terhadap pendapatan keluarga/tahun, berdasarkan tiga jenis sumber pendapatan responden (Tabel 5.26), meliputi: (1) pendapatan dari hasil usaha tani; (2) pendapatan dari hasil usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK); dan (3) pendapatan dari usaha ternak.

Tabel 5.26
Kontribusi HHBK terhadap Pendapatan Responden Desa Penyangga

No	Nama Desa	Rata-Rata Pendapatan (Rp/Thn/KK)			Kontribusi HHBK (%)	
		Usaha Tani	HHBK	Usaha Ternak		
1	Wonorejo	18,500,000	7,500,000	11,900,000	37,900,000	19.8
2	Sumber Anyar	4,400,000	3,500,000	2,000,000	9,900,000	35.4
3	Sumber Waru	7,900,000	21,350,000	5,500,000	34,750,000	61.4
4	Bajul Mati	3,100,000	3,450,000	2,300,000	8,850,000	39.0
5	Watu Kebo	3,300,000	3,800,000	2,400,000	9,500,000	40.0
Jumlah		37,200,000	39,600,000	24,100,000	100,900,000	

Sumber: Hasil Analisis Data Primer Diolah, 2017.

Tabel 5.26, menunjukkan bahwa kontribusi hasil hutan bukan kayu (HHBK) berkisar antara 19.8 % sampai 61.4 % dari total pendapatan responden. Desa Sumber Waru mempunyai kontribusi pendapatan dari usaha HHBK tertinggi sebesar 61.4% ini menggambarkan bahwa masyarakat desa Sumber Waru tingkat ketergantungan terhadap produk hutan sangat tinggi. Desa Wonorejo memperoleh kontribusi pendapatan dari usaha HHBK terendah sebesar 19.8%.

Selain itu dapat digambarkan bahwa pendapatan seluruh masyarakat yang tinggal didalam dan sekitar kawasan hutan mencapai Rp. 100.900.000 per tahun (TN Baluran, 1997, Syafi'i, *et al.* 2012, dan TN Baluran, 2014b). Hal ini mengindikaikan bahwa tingkat ketergantungan masyarakat terhadap keberadaan hutan di TN Baluran sangat tinggi.

Hasil penelitian ini secara empiris mendukung penelitian dari Syafi'i, *et al.* (2012); Murniningtyas, (2015); dan Yudilastiantoro (2003), bahwa kontribusi hasil hutan bukan kayu (HHBK) masyarakat desa (Toro, Matauwe dan Bolapapu) terhadap pemanfaatan produk hutan lindung DAS Palu, Sulawesi Tengah berkisar antara 25,00% sampai 33,00% dari total pendapatan responden. Desa Toro mempunyai kontribusi dengan nilai tertinggi diantara dua desa lainnya sebesar 33%, dan terendah desa Matauwe dengan kontribusi HHBK terhadap pendapatan sebesar 25%.

5.9. Analisis Partisipasi Masyarakat Program Pengelolaan Hutan di TN Baluran-Situbondo-Jawa Timur

5.9.1 Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Program Perencanaan

Ratnaningsih (2010) menyatakan bahwa Taman Nasional sebagai sumberdaya alam dan bagian dari kepentingan pembangunan daerah harus dikelola secara terpadu mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya dalam konteks teknis, sosial ekonomi maupun kelebagaannya. Perencanaan yang disusun harus mampu menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat

maupun untuk keseimbangan lingkungan, serta perlu dilakukan identifikasi atas kebutuhan tersebut.

Menurut McDonough (2002), mengatakan ada empat langkah dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan, yaitu: (i) mengembangkan partisipasi masyarakat, (ii) menciptakan visi komunitas hutan yang berkelanjutan, (iii) menentukan kriteria dan indikator pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan (iv) mengumpulkan informasi kebijakan dalam pengelolaan hutan.

Tabel 5.27
Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pengelolaan Hutan

No	Partisipasi Perencanaan Program Pengelolaan Hutan	Kategori Partisipasi							
		Tinggi		Sedang		Rendah		Total	
		f	%	f	%	f	%	f	%
1	Anggota SPKP mendapat undangan rapat untuk pengambilan keputusan yang diadakan oleh pihak TN Baluran	18	15.0	69	57.5	33	27.5	120	100.0
2	Anggota SPKP mendapatkan kesempatan memberikan pendapat, saran dan usulan dalam penyusunan rencana program pengelolaan hutan TN Baluran	12	10.0	60	50.0	48	40	120	100.0

Sumber: Hasil Analisis Data Primer Diolah, 2017.

Kegiatan perencanaan pengelolaan hutan di TN Baluran, partisipasi masyarakat dapat ditunjukkan dengan beberapa aspek seperti: rapat untuk pengambilan keputusan program perencanaan yang diadakan oleh pengurus SPKP, dan rapat untuk pengambilan keputusan program perencanaan yang diadakan oleh pengelola hutan TN Baluran.

Tabel 5.27, menunjukkan bahwa masyarakat desa penyangga belum sepenuhnya dilibatkan dalam kegiatan perencanaan program pengelolaan dan pelestarian hutan di TN Baluran. Kegiatan rapat pengambilan keputusan perencanaan program pengelolaan hutan yang diadakan oleh pengurus SPKP (15.0%), dan rapat untuk pengambilan keputusan perencanaan program pengelolaan hutan yang diadakan oleh pihak TN Baluran sebesar 10.0%.

Hasil penelitian ini mendukung secara empiris penelitian dari Yudilastiantoro (2003), mengatakan bahwa masyarakat sekitarnya belum dilibatkan untuk melakukan kegiatan perencanaan terhadap pelestarian hutan

lindung. Kegiatan *survey* lapangan, hanya 7 responden atau 7,8%. yang pernah melakukan bersama dengan petugas dari Balai Taman Nasional Lore Lindu. Masyarakat yang aktif memberikan informasi kepada petugas kehutanan untuk pengelolaan hutan lindung hanya 2 responden atau 2,2% dan yang pernah mengajukan usul, saran atau pendapat hanya sebesar 5 responden atau 5,6 %.

Penelitian ini mendukung secara empiris penelitian dari Kumar, *et al.* (2012), menyatakan bahwa sumberdaya hutan di Bangladesh telah mengalami kerusakan baik dari luasan area dan kualitas sumberdaya itu sendiri.

Penyebabnya adalah karena adanya praktek pengelolaan hutan secara tradisional yang gagal memperbaiki situasi tersebut. Mengatasi permasalahan di bidang kehutanan, disarankan adanya pengelolaan hutan berbasis partisipasi (*participatory forest management*) yang telah terbukti sebagai strategi yang sukses untuk memecahkan permasalahan yang ada. *Participatory forest management* (PFM) berhubungan dengan desentralisasi dan partisipasi, pembangunan desa, kinerja pelayanan publik, kemiskinan, krisis pajak, politik, stabilitas makro ekonomi dan kesatuan tanah air dan bangsa.

5.9.2 Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program

Kegiatan pelaksanaan pengelolaan hutan di TN Baluran, bahwa partisipasi masyarakat ditunjukkan dengan beberapa aspek seperti berpartisipasi memberikan sumbangan (pemikiran, tenaga, dan tindakan) melalui rapat yang diadakan oleh pengurus SPKP, dan oleh pihak TN Baluran (Tabel 5.28).

Tabel 5.28
Partisipasi responden dalam Pelaksanaan Pengelolaan Hutan di TN Baluran

No	Partisipasi Pelaksanaan	Kategori Partisipasi							
		Tinggi		Sedang		Rendah		Total	
		f	%	f	%	f	%	f	%
1	Anggota SPKP berpartisipasi memberikan sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan program pengelolaan hutan TN Baluran	27	22.5	72	60.0	21	17.5	120	100.0
2	Anggota SPKP berpartisipasi memberikan sumbangan tenaga dalam pelaksanaan program pengelolaan hutan TN Baluran	27	22.5	66	55.0	27	22.5	120	100.0

Sumber: Hasil Analisis Data Primer Diolah, 2017

Tabel 5.28, menunjukkan bahwa masyarakat desa penyangga dalam berpartisipasi memberikan sumbangan (pemikiran, tenaga, dan tindakan) melalui rapat yang diadakan oleh pengurus SPKP (22.5%) begitu juga oleh pihak TN Baluran, sebesar 22.5 %.

Hasil penelitian ini mendukung secara empiris penelitian dari Syafi'i, *et al.* (2012); dan Yudilastiantoro (2003), mengatakan bahwa masyarakat setempat dalam memberikan sumbang saran masih rendah, dan hanya beberapa anggota masyarakat yang memberikan sumbang saran pikiran, tenaga maupun materi untuk pengelolaan hutan lindung yaitu sebesar 10% untuk sumbangan pikiran, untuk sumbangan tenaga 11 % dan sumbangan materi sebesar 2%.

Ketercapaian partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program, akan menghasilkan kondisi kemandirian masyarakat. Hal ini dikatakan oleh Bell & Morse (2008); Agusta (2014), bahwa : (1) memiliki kapasitas diri (*personal self capacity*) yang merupakan sikap tidak tergantung, mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan potensinya, menyelesaikan masalah yang dihadapi, secara ekonomi mampu menghasilkan (produksi dan pendapatan) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan dapat melakukan kontrol dalam masyarakat, (2) memiliki tanggung jawab kolektif (*collective responsibility*), yaitu adanya pengembangan kerjasama dan kemitraan antar warga masyarakat dalam mengatasi permasalahan dan memenuhi kebutuhan hidupnya, dan pengembangan jaringan sosial untuk mengakses berbagai peluang, (3) memiliki kemampuan berfikir dan bertindak secara berkelanjutan (*sustainable*) yaitu ikut menjaga kualitas lingkungan secara sistemik dan ikut memelihara pelayanan dan sumberdaya secara berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

5.9.3 Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Penerimaan Manfaat

Kegiatan penerimaans manfaat dari pengelolaan hutan di TN Baluran, bahwa partisipasi masyarakat dapat ditunjukkan dengan beberapa aspek seperti:

peningkatan pendapatan, pengertian manfaat hutan terhadap lingkungannya dan ketergantungan hidup masyarakat terhadap hutan.

Partisipasi masyarakat lebih tepat sebagai tujuan, karena lebih diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mencegah aktivitas eksploitasi pemanfaatan hasil hutan melalui program pemberdayaan masyarakat (Jim & Frank, 2008).

Tabel 5.29
Partisipasi Penerimaan Manfaat Pengelolaan Hutan di TN Baluran

Partisipasi Penerimaan Manfaat	Kategori Partisipasi							
	Tinggi		Sedang		Rendah		Total	
	f	%	f	%	f	%	f	%
anggota SPKP ikut merasakan manfaat program pengelolaan hutan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga	21	17.5	75	62.5	24	20.0	120	100.0
anggota SPKP ikut merasakan manfaat kelestarian hutan bagi lingkungan hidup	18	15.0	66	55.0	36	30.0	120	100.0

Sumber: Hasil Analisis Data Primer Diolah, 2017

Tabel 5.29, menunjukkan bahwa masyarakat berpartisipasi tinggi terhadap pengelolaan hutan di TN Baluran, jika ada insentif yang dapat memotivasi meningkatkan pendapatan masyarakat (17.5%) dan insentif manfaat hutan terhadap kelestarian lingkungan terutama hutan dapat mencegah erosi, tanah longsor, dan menyerap karbon dioksida (Co^2) sebesar 15.0%.

Hasil penelitian ini mendukung secara empiris penelitian dari Syafii, *et al.* (2012), mengatakan bahwa masyarakat yang berada di dalam *Resort* Labuhan Merak di TN Baluran, mengandalkan hidup pada kawasan hutan. Penyebabnya karena banyaknya jenis-jenis pemanfaatan yang dapat menjadi sumber penghasilan masyarakat. Masyarakat seringkali memperoleh pendapatan lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang bekerja di luar kawasan hutan.

Yudilastiantoro (2003), mengatakan bahwa masyarakat berpartisipasi tinggi terhadap pengelolaan hutan lindung apabila ada motivasi keuntungan meningkatkan pendapatan sebesar 23,3%. Masyarakat tidak tahu manfaat hutan terhadap kelestarian lingkungan terutama hutan dapat mencegah erosi dan

tanah longsor. Ketergantungan hidup terhadap hutan sedang, sebesar 93,3%; hal ini disebabkan karena mereka juga mengusahakan kebun di didalam kawasan hutan.

Penelitian ini juga mendukung secara empiris, penelitian dari Kaseya & Kihonge (2016), mengatakan bahwa strategi untuk memperbaiki partisipasi masyarakat, yaitu dengan memberikan insentif atau kompensasi (37,5%), dan harus diadakan pada waktu yang tepat (37,5%) responden menyatakan setuju, dan mengatakan tidak perlu kompensasi, hanya (12,5%).

5.9.4 Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi dan Monitoring

Menurut Mitchell, *et al.* (2015), mengatakan ada empat tingkatan partisipasi untuk menunjang kerjasama yang strategis meliputi: (1) *contributory partnership* atau kemitraan melalui kontribusi suatu kesepakatan sebuah organisasi swasta atau publik sebagai sponsor untuk mendukung dalam bentuk dana, dan kegiatan baik yang mempunyai sedikit pengaruh atau sama sekali tidak terhadap proses partisipasi; (2) *operational partnership* merupakan jenis kemitraan dengan peserta atau mitra melakukan pembagian kerja selain pengambilan keputusan; (3) *consultative partnership* yaitu bentuk kemitraan dimana instansi yang bertugas mengelola sumberdaya atau lingkungan secara aktif mencari masukan dari perseorangan, kelompok serta organisasi lain di luar pemerintah; dan (4) *collaborative partnership* merupakan bentuk pembagian kekuasaan dalam pengambilan keputusan yang sesungguhnya dilakukan dalam kemitraan kolaboratif untuk mencapai tujuan yang telah disepakati semua pihak, dengan informasi, dana, dan tenaga yang saling dipertukarkan (*sharing*).

Kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan di TN Baluran, bahwa partisipasi masyarakat dapat ditunjukkan dengan beberapa aspek seperti ikut memonitor hutan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pada hutan.

Tabel 5.30, menunjukkan bahwa masyarakat setempat masih rendah tingkat partisipasinya terhadap kegiatan mengevaluasi dan memonitor hutan di TN Baluran; yaitu sebesar 17.5%, dan 20.0%.

Tabel 5.30
Partisipasi Evaluasi dan Monitoring Pengelolaan Hutan di TN Baluran

No	Partisipasi Monitoring dan Evaluasi	Kategori Partisipasi							
		Tinggi		Sedang		Rendah		Total	
		f	%	f	%	f	%	f	%
1	anggota SPKP ikut mengevaluasi keberadaan hutan TN Baluran	21	17.5	63	52.5	36	30.0	120	100.0
2	anggota SPKP ikut memonitor kelestarian hutan TN Baluran	24	20.0	69	57.5	27	22.5	120	100.0

Sumber: Hasil Analisis Data Primer Diolah, 2017.

Hasil penelitian ini mendukung secara empiris penelitian dari Yudilastiantoro (2003), mengatakan bahwa masyarakat, masih rendah tingkat partisipasinya terhadap kegiatan memonitor, mengawasi dan mengevaluasi hutan lindung, yaitu sebesar 78 %, 82% dan 89%.

5.9.5 Analisis Klasifikasi Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan di TN Baluran

Mengacu pada pernyataan Cohen (1997), mengatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat tinggi, apabila responden terlibat dalam keempat proses kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penerimaan manfaat, evaluasi dan monitoring dengan skor >21. Tingkat partisipasi sedang apabila responden hanya terlibat dalam proses pelaksanaan, penerimaan manfaat dan monitoring & evaluasi, dengan skor 17 – 21. Tingkat partisipasi rendah apabila responden hanya terlibat dalam proses penerimaan manfaat dan monitoring & evaluasi, dengan skor < 17.

Tabel 5.31, menunjukkan bahwa sebagian besar responden tingkat partisipasinya rendah, yaitu sebesar 60.8 %, sedang 26.7 % dan tinggi 12.5 %.

Peran serta masyarakat desa penyangga dalam suatu rapat atau pertemuan,

khususnya yang diselenggarakan oleh pengelola TN Baluran, hanya melibatkan ketua atau pengurus suatu lembaga kemasyarakatan.

Tabel 5.31
Klasifikasi Partisipasi Responden Desa Penyangga TN Baluran

No	Kategori Tingkat Partisipasi	Nama Desa Penyangga					Jumlah Responden	Persentase (%)
		Wonorejo	Sumber Waru	Sumber Anyar	Bajul Mati	Watu Kebo		
1	Partisipasi Rendah (Skor <17)	25	20	13	6	9	73	60.8
2	Partisipasi Sedang (Skor 17-21)	11	12	9	0	0	32	26.7
3	Partisipasi Tinggi (Skor >21)	9	3	3	0	0	15	12.5
	Jumlah	45	35	25	6	9	120	

Sumber: Hasil Analisis Data Primer Diolah, 2017.

Creighton, SR (1986), mendeskripsikan hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat dan teknik partisipasi masyarakat. Menurut klasifikasi *Creighton* bahwa tingkat partisipasi dikatakan tinggi (*high forming*), jika: (a) masyarakat setuju terhadap suatu keputusan rapat/pertemuan yang dihadiri, meliputi: keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan (skala 1); keterlibatan untuk sarana konsiliasi dan mediasi (skala 2); keterlibatan untuk bantuan negosiasi (skala 3). (b) masyarakat memiliki pengaruh terhadap suatu keputusan, meliputi: keterlibatan dalam pemecahan masalah secara kolaborasi (skala 4); keterlibatan dalam fasilitasi (skala 5); keterlibatan dalam bantuan kelompok (skala 6). (c) masyarakat ikut didengar saran/usulnya sebelum pengambilan keputusan, meliputi: keterlibatan dalam seminar/konferen (skala 7), keterlibatan dalam *public hearing* (skala 8). (c) pengetahuan masyarakat dianggap rendah tentang suatu keputusan rapat, meliputi: keterlibatan dalam informasi publik (skala 9).

Tabel 5.32
Tipologi Partisipasi dan Hubungannya dengan Klasifikasi Creighton

Tingkat Partisipasi	Skala	Teknik
Kinerja Tinggi/Setuju Terhadap Keputusan (<i>High Forming/Agreeing to Decisions</i>)	1	Terlibat Pada Pembuatan Keputusan (<i>Joint Decision Making</i>)
	2	Konsiliasi/Mediasi (<i>Conciliation/Mediation</i>)
	3	Bantuan Negosiasi (<i>Assisted Negotiation</i>)
Mempunyai Pengaruh Terhadap Keputusan (<i>Having Influence on Decisions</i>)	4	Pemecahan Masalah Secara Kolaborasi (<i>Collaborative Problem Solving</i>)
	5	Fasilitasi (<i>Facilitation in Workshop Interactive</i>)
Didengar Sebelum Keputusan (Being Heard Before Decisions)	6	Task Force/Advisory Groups
	7	Konferen (<i>Conference</i>)
	8	<i>Public Hearing</i>
Pengetahuan Rendah Tentang Keputusan (<i>Low Knowledge About</i>)	9	<i>Public Information</i>

Sumber: Arstein, SR (1986)

Tipologi partisipasi Arnstein dan hubungannya dengan klasifikasi Creighton (Tabel 5.32), diperoleh hasil sama bahwa masyarakat terlibat dalam pembuatan keputusan, konsiliasi/mediasi, dan bantuan untuk negosiasi melalui pertemuan/rapat sebanyak 12.5%. Kegiatan perencanaan pengelolaan hutan di TN Baluran, belum sepenuhnya melibatkan masyarakat desa penyangga dalam kegiatan perencanaan program pengelolaan dan pelestarian hutan di TN Baluran, baik dari segi kegiatan *survey* lapangan dengan petugas lapangan dari Balai TN Baluran, maupun masyarakat yang ikut aktif memberikan informasi kepada petugas kehutanan untuk pengelolaan hutan, serta ikut aktif mengajukan usul, saran atau pendapat kepada pengelola masih rendah.

Hasil penelitian ini secara empiris mendukung penelitian dari Yudilastiantoro (2003), mengatakan bahwa sebagian besar responden (masyarakat desa Toro, Matauwe dan Bolapapu) kategori klasifikasi partisipasinya rendah sampai sedang sebesar 40 orang (44,44%) dan 37 orang (41,2%), serta berpartisipasi tinggi sebesar 13 orang (14,4%).

Kegiatan penerimaan manfaat dari pengelolaan lahan hutan di TN Baluran, menunjukkan bahwa masyarakat berpartisipasi tinggi terhadap pengelolaan hutan di TN Baluran, jika ada insentif yang dapat memotivasi meningkatkan keuntungan masyarakat, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat sebesar 39.2 % (Syafi'i, *et al.* 2012)..

Tabel 5.33
Luas Garapan Lahan (ha)/KK

NO	Luas Lahan (ha)	Jumlah Responden	Frekuensi %
1	<0.5	5	4.17
2	0.5-1.5	80	66.67
3	> 1.5	35	29.17
	Jumlah	120	100

Sumber: Hasil Analisis Data Primer Diolah, 2017.

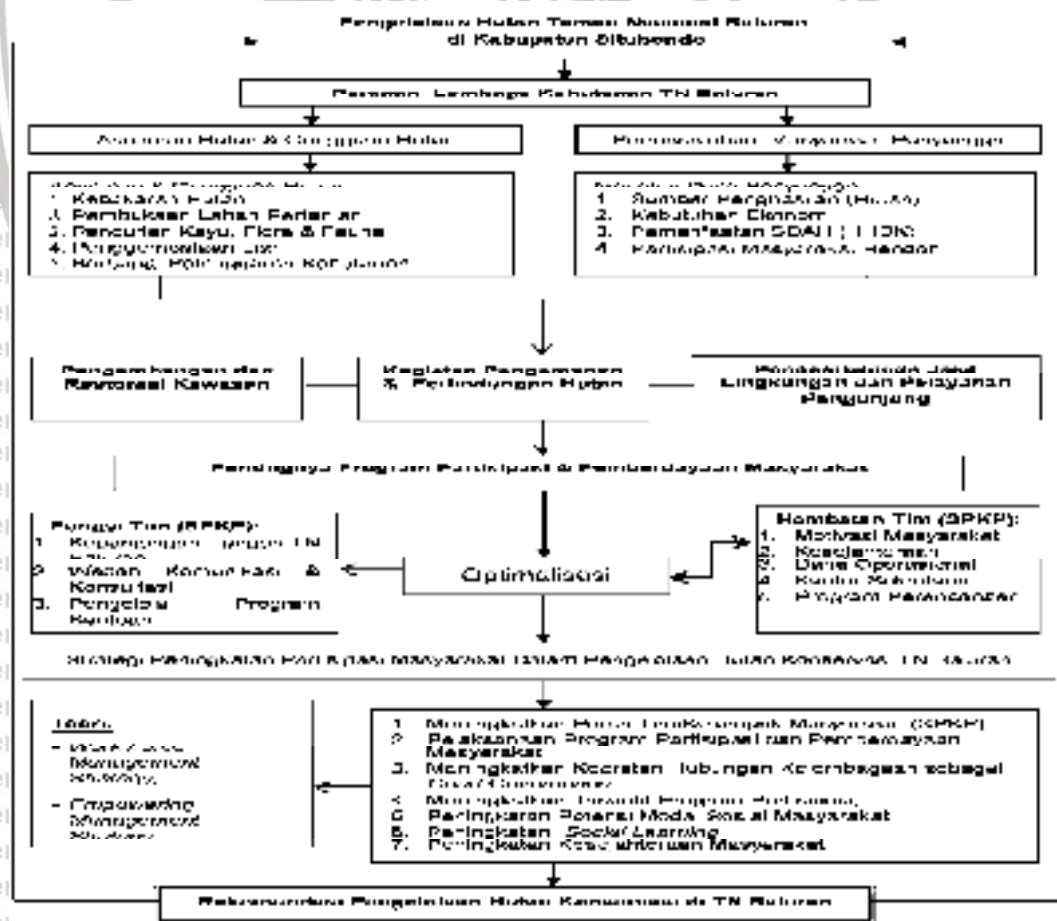
Tabel 5.33, menunjukkan bahwa sebagian besar luas garapan lahan yang dikelola oleh masyarakat, rata-rata seluas 0.5-1.5 ha (66,67 %) dan seluas lebih

dari 1.5 ha (29.17 %) sebanyak 35 responden. Luasan lahan yang digarap, belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena lahan yang digarap selain lahan kering yang hanya dapat ditanami tanaman semusim (jagung, kacang tanah, dan jeruk nipis), susahnya sistem irigasi, dan kesuburan lahan menjadi kendala dalam peningkatan produktifitas hasil pertanian masyarakat.

5.10 Perumusan Strategi Pengelolaan Hutan Konservasi di TN Baluran

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, maka hasil penelitian ini memberikan pemikiran yang sistematis tentang rumusan strategi pengelolaan hutan konservasi TN Baluran (Gambar 5.3).

Gambar 5.3
Alur Pikir Perumusan Strategi Pengelolaah Hutan di TN Baluran



Sumber: Hasil Analisis Penelitian, 2017

Gambar 5.3, dapat dikemukakan alur pikir perumusan strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan konservasi TN Baluran, yaitu dengan meningkatkan: (1) peran lembaga kehutanan; (2) peran tim/kelompok SPKP; (3) program partisipasi dan pemberdayaan; (4) keeratan hubungan lembaga sebagai *good governance*; insentif program partisipasi; potensi modal sosial; *social learning* sebagai upaya peningkatan kualitas hidup yang lebih baik, dan program kesejahteraan masyarakat.

5.10.1 Peran Lembaga Kehutanan TN Baluran Dalam Pengelolaan Hutan

Peran lembaga kehutanan TN Baluran dalam pengelolaan hutan, merupakan hal penting. Siswanto, *et al.* (2014), mengatakan bahwa peranan lembaga kehutanan yang bersih dan berwibawa yang diwujudkan melalui adopsi prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi prasyarat lain yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan kehutanan di Indonesia.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, ditentukan oleh peran lembaga kehutan itu sendiri. Hal ini merupakan strategi dan solusi untuk mencegah adanya ancaman dan gangguan pada kawasan konservasi (Muntasib, 1999; PHKA, 2008). Peran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan diharapkan mampu memberikan nilai manfaat baik secara ekonomis, sosial, budaya, politik, serta keberlanjutan program pengelolaan.

Peranan lembaga kehutanan di TN Baluran dalam upaya pengelolaan hutan meliputi: (1) peningkatan partisipasi masyarakat dibidang pengamanan hutan, (2) peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pengembangan dan restorasi kawasan, (3) peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa lingkungan dan pelayanan pengunjung, dan (4) solusi pemecahan masalah dengan masyarakat desa penyangga. Penjelasan dari ke-empat isu upaya

prevention of threats and disturbances in the forestry field that can be done by the forestry institution is as follows:

1. Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pengamanan Hutan

Forestry protection activities in TN Baluran are intended to reduce and prevent the occurrence of forest degradation, both by human and natural factors. Forestry protection efforts are based on the problems faced by TN Baluran, especially the problems related to the community around the forest.

Forestry protection efforts include: (a) forest fire prevention (both intentional or natural factors); (b) resolution of criminal and penal cases; and (c) mitigation of increasing forest area in the forest.

Forestry protection efforts in TN Baluran include: (a) outreach to the community around the forest in the form of participating in forest protection; (b) investigation and reporting of criminal and penal cases.

Increasing community participation in forest protection in TN Baluran can be done by the institution in the following ways: (1) providing assistance in making alternative biomass (BBM) alternative biogas to reduce dependence on wood use from the forest; (2) providing education and training such as: training in making organic fertilizer in cooperation with forestry and animal husbandry; (3) entrepreneurship training to create community independence; (4) recruiting community environmental awareness and conservation as forest police partners and community forest care volunteers; (5) providing environmental awareness and conservation (welfare service) to all layers of the community;

(6) meningkatkan kerjasama dan keterlibatan pemerintah, *stakeholder* dan kelompok atau organisasi sadar lingkungan dan konservasi program pengelolaan hutan; (7) memberikan insentif program partisipasi kepada masyarakat peduli lingkungan dan konservasi yang telah bekerja sama dengan pihak pengelola TN Baluran dalam upaya ikut menanggulangi tindak kriminalitas dan pelanggaran di bidang kehutanan; (8) melakukan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana dan kriminalitas di bidang kehutanan dan menjadikan pelaku sebagai kerabat; (9) melakukan pendekatan dan pembinaan secara rutin kepada mantan pelaku tindak pidana dan kriminalitas di bidang kehutanan; (10) memberikan bantuan modal usaha melalui koperasi konservasi hutan di TN Baluran kepada masyarakat; (11) memberikan bantuan kepada para seniman di desa penyangga dalam bentuk bantuan alat musik dan kesenian untuk menunjang atraksi dan destinasi desa wisata; (12) untuk mengatasi meningkatnya perburuan satwa ditempuh dengan cara penangkaran satwa dengan kerjasama masyarakat dibawah pengawasan pengelola; (13) memberikan bantuan informasi dan komunikasi bagi masyarakat desa penyangga.

2. Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pengembangan dan Restorasi Kawasan

Kegiatan di bidang pengembangan dan restorasi kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati oleh TN Baluran bertujuan untuk melindungi dan melestarikan potensi keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh TN Baluran.

Keanekaragaman hayati merupakan ciri khas dan keunikan yang harus dipelihara dan tidak boleh punah. Hal ini yang membedakan TN Baluran dengan

Taman Nasional lain baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di manca negara. Kegiatan konservasi keanekaragaman hayati yang telah dilakukan oleh

TN Baluran meliputi konservasi mamalia besar, jenis flora dan fauna, serta jenis ikan.

Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengembangan dan restorasi kawasan hutan dapat dilakukan dengan cara: (1) peningkatan populasi spesies prioritas (Banteng) untuk mengurangi ancaman kepunahan satwa dengan dukungan dan kepedulian masyarakat luas; (2) melakukan pengembangan ekowisata dengan terlebih dahulu dilakukan analisis kelayakan atraksi baru, pengembangan atraksi dan meningkatkan jejaring peran serta masyarakat; (3) meningkatkan pengelolaan hutan secara kolaboratif dengan cara penguatan komunikasi dan kerjasama pihak TN Baluran; (4) pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan dengan melakukan perbaikan sistem pemberdayaan, melakukan pemetaan kebutuhan dan peluang, serta meningkatkan keterlibatan semua pihak pemangku kepentingan; (5) melakukan usaha perlindungan dan pengamanan kawasan hutan dan penegakan hukum; (6) mengembangkan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) dan kelembagaan dengan cara pengadaan diklat SDM pengelola hutan Baluran, penguatan sarana-prasarana, dan penguatan organisasi dan badan layanan umum; (7) melakukan kajian zonasi untuk pemantapan kawasan (Murniningtyas, 2015; dan Baluran, 2014).

3. Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Jasa Lingkungan dan Pelayanan Pengunjung

Langkah-langkah atau upaya yang dapat dilakukan oleh lembaga kehutanan dalam usaha untuk peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa lingkungan dan pelayanan pengunjung, yaitu dengan cara: (1) pengembangan komitmen yang kuat dari pemerintah atau lembaga kehutanan terhadap peran partisipasi masyarakat lokal; (2) adanya program perencanaan pengelolaan hutan yang baik dan berkesinambungan; (3) penciptaan kemungkinan sistem pengelolaan hutan/berbasis resort dan partisipatif; (4) kinerja yang tepat dan bertanggung jawab berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*; (5) keberlanjutan pengukuran dan perbaikan kebijakan program pengelolaan hutan

(6) memberikan pendidikan sadar lingkungan dan konservasi bagi generasi muda; (7) memberikan diklat atau pelatihan kewirausahaan, agribisnis dan kegiatan lainnya yang dapat menunjang kemandirian dan produktifitas masyarakat; (8) membentuk kelompok masyarakat sadar lingkungan dan sadar wisata; (9) membentuk kelompok pelayanan pengunjung melalui penyediaan transportasi, penginapan, dan informasi bagi pengunjung (Murniningtyas, 2015; dan Baluran, 2014).

4. Upaya Pemecahan Masalah Masyarakat Desa Penyangga

Upaya pemecahan masalah kehutanan dengan masyarakat desa penyangga, khususnya terkait adanya bentuk-bentuk gangguan dan ancaman yang dilakukan oleh masyarakat semakin kompleks, sebagai berikut:

Penggembalaan liar yang dapat menurunkan kualitas savanna karena meningkatnya intensitas penggembalaan liar oleh masyarakat di sekitar kawasan. Kegiatan ini banyak ditemukan terutama di kawasan TNB bagian utara. Penggembalaan ini telah dilakukan masyarakat secara turun temurun dan dari waktu ke waktu jumlah ternak yang digembalakan semakin banyak. Setiap hari ditemukan sekitar 1600 ekor sapi dan 400 ekor domba/kambing digembalakan secara liar di kawasa Baluran bagian utara. Padahal daya dukung savana diduga di bawah jumlah ternak yang digembalakan, menyebabkan terjadinya *overgrazing* yang berat dan mengancam kelestarian ekosistem savana di kawasan ini.

Kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor manusia. Hal ini merupakan tindak kriminalitas dibidang kehutanan yang dilakukan masyarakat dan memerlukan penyelesaian kasus baik secara pidana dan perdata

Masyarakat desa penyangga hutan TN Baluran merupakan masyarakat yang tinggal baik di dalam atau di sekitar kawasan hutan. Masyarakat desa

penyangga sebagai pengguna sumberdaya hutan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan kebutuhan hidup keluarga. Hal ini dilakukan karena hutan dianggap sebagai sumber penghasilan dan jaminan kehidupan.

Tabel 5.34
Tindak Kriminalitas Pembakaran Hutan Periode 2011-2015
TN Baluran Situbondo

No	Tahun	Frekuensi Kebakaran	Luas Lahan Terbakar	Rata-Rata Luas Kebakaran (ha)
1	2011	21	1,082.90	51.57
2	2012	79	2,638.58	33.40
3	2013	85	2,705.04	31.82
4	2014	71	1,595.00	22.46
5	2015	132	2,005.90	15.20

Sumber: Balai TN Baluran, 2017. (Data diolah).

Berdasarkan Tabel 5.34, bahwa frekuensi kebakaran meningkat dari tahun ketahun. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pada tahun 2015 mengalami frekuensi kebakaran dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Penyebab sebagian besar kebakaran hutan Baluran yaitu: (a) adanya perilaku masyarakat yang tidak bertanggung jawab; (b) kurangnya penjagaan dari tenaga pengamanan hutan; dan (c) lemahnya penegakan hukum.

Kebakaran hutan ini sangat berpengaruh terhadap flora dan fauna.

Kasus lain di bidang kehutanan di TN Baluran meliputi: perburuan liar yang terdiri dari perburuan jenis burung, mamalia (baik perburuan tanduk, kulit, bulu, tulang dan telur); penebangan liar (*illegal logging*) untuk kayu bakar dan *mebeler*; pencurian hasil non kayu seperti: buah kemiri, asam, akasia, gebang, klanting; dan bahan jamu-jamuan terdiri dari: kayu pahit, widoro gunung, tanaman merambat (liana).

Strategi yang dapat dilakukan oleh lembaga kehutanan TN Baluran dalam upaya mengatasi permasalahan dengan masyarakat desa penyangga, meliputi:

(1) meningkatkan pengelolaan hutan dengan cara pemanfaatan potensi sumberdaya alam melalui pengembangan pariwisata alam (*eco-tourism*) untuk

menciptakan kesempatan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat; (2) meningkatkan program pemberdayaan dan partisipasi masyarakat melalui bantuan ekonomi produktif untuk menciptakan kemandirian masyarakat; (3) memberikan insentif program partisipasi melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) kepada anggota masyarakat yang berpartisipasi ikut menjaga dan melestarikan sumberdaya hutan; (4) meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat dari proses perencanaan program pengelolaan hutan, hingga tahap evaluasi dan monitoring.

5.10.2 Pentingnya Program Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Konservasi di TN Baluran

Kegagalan pembangunan seringkali bersumber dari kegagalan pemerintah dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan yang benar serta mengabaikan pembangunan kelembagaan yang seharusnya menjadi dasar dari seluruh proses pembangunan baik sosial, ekonomi, politik, teknologi maupun pengelolaan sumber daya alam (Djogo, *et al.* 2003).

Lembaga kehutanan sebagai wadah untuk menampung opini masyarakat bekerja sama dengan Perum Perhutani dan pihak-pihak lainnya yang terkait. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) diharapkan sebagai pelaku praktis terhadap pengelolaan hutan bagi kepentingan desanya. Perum Perhutani dan LMDH dari masing-masing desa bekerjasama membentuk peraturan yang tertulis dalam *Memorandum of Understanding/MoU*. Termasuk bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam program PHBM dan memanfaatkan sumberdaya hutan dengan baik.

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) menerima manfaat dari hasil hutan dari are hutan yang dikelolanya, yang bervariasi dari masing-masing desa. Konsultasi dengan LMDH, masyarakat dibawah naungan program PHBM mempunyai wewenang untuk memutuskan bagaimana pembagian keuntungan

akan diimplementasikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Anggota masyarakat diijinkan mengolah lahan untuk tanaman pangan diantara tanaman hutan (padi, jagung, ketela, kacang dan jenis sayuran).

Masyarakat juga mempunyai hak akses produk hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti: kayu bakar, dan daun jati untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang implikasinya bahwa program PHBM berpotensi mampu memberikan penghasilan tambahan bagi para petani melalui LMDH. Pada saat yang sama, pelaksanaan program PHBM dengan anggota masyarakat berpartisipasi memelihara pohon di dalam kawasan hutan dan menjaga keamanan hutan dari berbagai macam gangguan, seperti *illegal logging* dan kebakaran hutan (Djamhuri, 2012, dan Lestari, *et al.* 2015).

Hubungan kelembagaan ditinjau dari aspek akuntabilitas, transparansi, hubungan berbasis kepercayaan, kesesuaian pelaksanaan peraturan kehutanan, dan kemudahan memperoleh informasi masih belum baik. Kesesuaian pelaksanaan peraturan kehutanan sudah baik. Artinya bahwa lembaga kehutanan TN Baluran telah mensosialisasikan tentang peraturan pengelolaan hutan untuk dipahami oleh masyarakat dengan baik. Perlunya dukungan oleh payung hukum atau peraturan pengelolaan hutan yang tegas.

Keberadaan lembaga kehutanan TN Baluran sebagai lembaga yang akuntabel dan transparan masih belum dapat menunjukkan yang baik, dalam hal mengelola sumber daya hutan, pengelolaan sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja. Hubungan berbasis kepercayaan dengan masyarakat belum terjalin dengan baik, khususnya mengenai penanganan program hibah atau dana bantuan program pemberdayaan dari pemerintah daerah dan pusat.

Lembaga kehutanan TN Baluran belum secara baik mengedepankan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Hal ini harus

mendapatkan perhatian lembaga TN Baluran dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu dengan cara lebih mengedepankan prinsip akuntabilitas dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban dalam mengelola sumberdaya hutan yang dapat diketahui oleh masyarakat luas secara transparan.

Akuntabilitas yang kurang baik, memicu rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dan menurunnya motivasi masyarakat untuk bergabung menjadi anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) sebagai kepanjangan tangan TN Baluran untuk mengelola sumber daya hutan.

Strategi peningkatan partisipasi masyarakat anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP), melalui keeratan hubungan kelembagaan kehutanan meliputi: (1) meningkatkan sistem akuntabilitas lembaga kehutanan dalam usaha pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan; (2) meningkatkan kualitas pengelolaan hutan secara transparan untuk menumbuhkan sikap kepercayaan dari masyarakat lokal kepada lembaga/pengelola hutan; (3) meningkatkan hubungan berbasis kepercayaan dengan segenap lembaga masyarakat (SPKP), kelompok masyarakat, LSM, dan tokoh masyarakat) dalam hal pelaksanaan program bantuan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat secara bottom up; (4) menegakkan payung hukum di bidang kehutanan agar terbentuk kesesuaian pelaksanaan peraturan kehutanan tanpa dipengaruhi oleh unsur politik dan kepentingan dari golongan tertentu; (5) meningkatkan kemudahan dalam mengakses informasi program pengelolaan hutan bagi masyarakat luas.

A. Optimalisasi Fungsi Tim/Kelompok SPKP

Tim atau kelompok Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) sebagai mitra atau kepanjangan tangan TN Baluran adalah penting bagi keberadaan dan program pengelolaan hutan. Alasannya adalah SPKP merupakan

kelompok lembaga masyarakat sebagai kelompok peduli lingkungan yang senantiasa ikut menjaga dan melestarikan sumberdaya hutan.

Program dan kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh tim atau kelompok SPKP, meliputi: (a) pembinaan/peningkatan kapasitas anggota SPKP; (b) pertemuan di sekretariat SPKP (minimal 1 kali dalam satu bulan dan saat panen tiba); (c) menyebarluaskan informasi melalui berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik; (d) pemasangan papan-papan informasi atau peringatan/himbauan; (e) melakukan kaderisasi Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM); dan (f) demonstrasi dan percontohan pembuatan kompos organik. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, diketahui bahwa dari masing-masing program dan kegiatan tersebut, tidak dapat berjalan dengan baik. Penyebabnya adalah: ((a) SPKP tidak mempunyai kantor administrasi yang tetap, (b) terbatasnya biaya operasional, (c) terbatasnya waktu luang, (d) kesibukan warga masyarakat dengan pekerjaan utama, dan (e) program dan kegiatan SPKP masih belum mampu memberikan nilai manfaat secara baik, khususnya dalam meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi tim atau kelompok SPKP ini sebagai lembaga masyarakat yang diberi wewenang oleh lembaga atau pengelola TNB untuk mengelola program bantuan dari pemerintah pusat dan daerah. Tugas dan tanggung jawab SPKP adalah: (a) mengajak masyarakat dan tokoh masyarakat untuk sadar dan peduli terhadap lingkungan dan hutan, (b) mengelola program bantuan yang diberikan oleh TN Baluran dari pemerintah baik pusat dan daerah, (c) sebagai wadah komunikasi, koordinasi dan kolaborasi diantara TN Bauran dengan masyarakat sekitar, (d) sebagai penampung aspirasi masyarakat dalam program pengelolaan hutan di TN Baluran

Strategi optimalisasi fungsi tim atau kelompok Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP), merupakan strategi dalam peningkatan partisipasi

masyarakat program pengelolaan hutan konservasi di TN Baluran. Peranan kelompok SPKP sebagai kepanjangan tangan TN Baluran belum dapat difungsikan dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari: (1) masih lemahnya pihak pengelola dalam melibatkan peranan SPKP dalam program rencana pengelolaan hutan; (2) belum sepenuhnya melibatkan kelompok SPKP untuk berpartisipasi dari proses perencanaan program, pelaksanaan, penerimaan manfaat, hingga tahap evaluasi dan monitoring; dan (3) belum sepenuhnya melibatkan kelompok SPKP dalam pengelolaan program bantuan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi melalui program pemberdayaan masyarakat.

Keanggotaan SPKP berasal dari anggota kelompok peternak, kelompok tani dan kelompok lembaga masyarakat desa hutan (LMDH). Kelompok peternak merupakan kelompok masyarakat yang berprofesi sebagai peternak sapi dan menerima bantuan ternak dari pemerintah pusat. Kelompok tani merupakan kelompok masyarakat yang berprofesi sebagai petani yang meliputi 3 (tiga) desa yaitu Wonorejo, Sumber Waru, dan Sumber Anyar. Kelompok lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) juga berasal dari 3 (tiga) desa yaitu Sumber Anyar, Sumber Rejo, dan Banyu Putih.

Tidak seluruh anggota kelompok tani, kelompok peternak dan LMDH semuanya menjadi anggota SPKP. Bahkan sebagian anggota keluarga yang telah bergabung sebagai anggota SPKP, ada yang berhenti atau tidak aktif sebagai anggota.

Kelompok SPKP yang dibentuk oleh TN Baluran bersama masyarakat dan tokoh masyarakat, harus dapat difungsikan perannya menjadi wadah komunikasi dan konsultasi baik dengan pengelola ataupun antar masyarakat.

Selain itu, SPKP sebagai lembaga masyarakat harus diberi wewenang oleh

pengelola untuk mengelola program bantuan pemberdayaan dari pemerintah pusat dan daerah dengan lebih optimal.

Mengingat jumlah anggota SPKP (120 KK) yang masih aktif, dan hanya sekitar 0,97% dari jumlah kepala keluarga dari lima desa penyangga (12.362 KK). Hal ini harus menjadi perhatian pihak TN Baluran untuk mengevaluasi dan mengkaji penyebab rendahnya minat masyarakat untuk menjadi mitra TN Baluran, yaitu dengan bersedia bergabung sebagai anggota kelompok SPKP.

Tim atau kelompok SPKP sebagai kelompok masyarakat yang mempunyai tujuan yang sama, memiliki kinerja dan bertanggung jawab terhadap kesuksesan program pengelolaan hutan konservasi di TN Baluran. Perlunya optimalisasi fungsi tim atau kelompok Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP), sebagai kelompok masyarakat yang dibentuk atau diprakarsai oleh tokoh masyarakat dan pengelola hutan yang memiliki tanggung jawab bersama untuk mensukseskan program pengelolaan hutan di TN Baluran, sebagaimana dikemukakan oleh Chang & Curtin (2001).

B. Hambatan Tim/Kelompok SPKP

Hasil wawancara dengan ketua SPKP (Wonorejo, Sumberwaru, dan Sumber Anyar), dan Penyuluh kehutanan untuk menggali informasi yang bersifat kualitatif dari satu atau beberapa responden melalui pertanyaan-pertanyaan yang bebas tidak terstruktur sebagai tambahan informasi telah dilakukan. Wawancara khususnya terkait dengan rendahnya motivasi masyarakat menjadi anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP), dan hambatan-hambatan yang dihadapi, meliputi: (1) sebagian masyarakat beranggapan bahwa menjadi anggota SPKP tidak ada manfaat yang dirasakan; (2) kegiatan atau program yang direncanakan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (3) banyaknya program atau rencana tidak berjalan dengan baik, karena terbatasnya dana operasional; (4) terbatasnya waktu luang (*sparetime*) untuk dapat

berpartisipasi dalam program yang direncanakan oleh SPKP; (5) kebutuhan ekonomi masyarakat yang semakin tinggi sejalan dengan meningkatnya kebutuhan keluarga; (6) pertemuan dan koordinasi program tidak teratur dan cenderung jarang dilakukan (diadakan pertemuan jika ada musim panen); (7) SPKP dari tiga desa tidak mempunyai kantor sekretariat tetap (pinjam kantor desa setempat); (8) usia kepala rumah tangga yang tidak berpotensi untuk menjadi anggota SPKP secara aktif; (9) tuntutan profesi atau pekerjaan utama masyarakat yang tidak dapat ditinggalkan, dan memicu untuk fokus pada pekerjaan utama yang dapat memberikan keuntungan dan kesejahteraan bagi keluarga; (10) tidak mau ribet dengan urusan SPKP; dan (11) tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat yang masih rendah akan nilai-nilai kawasan konservasi.

C. Solusi Hambatan Tim/Kelompok SPKP

Menurut Yumi (2016), bahwa sejak tahun 2015, Pusat Penyuluhan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM telah memprogramkan kegiatan Pos Penyuluhan Kehutanan Pedesaan. Program ini dapat dianggarkan melalui anggaran APBN dan dana anggaran khusus (DAK) dari dinas kehutanan kabupaten/kota.

Salah satu upaya atau solusi untuk percepatan proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha dalam memperoleh akses informasi, teknologi, dan pasar untuk meningkatkan: (a) produktivitas; (b) pendapatan; (c) kesejahteraan; serta (d) kesadaran dalam pelestarian fungsi kelestarian lingkungan hidup.

Pos Penyuluhan Kehutanan Pedesaan dibentuk dan dikembangkan terutama di desa-desa di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki intensitas interaksi masyarakat yang relatif tinggi dengan sumber daya hutan. Implementasi program atau kegiatan dari Pos Penyuluhan Kehutanan

Pedesaan, merupakan solusi untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh kelompok Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) yang sebenarnya sangat potensial untuk ditingkatkan dan dikembangkan fungsinya dengan lebih luas menjadi Pos Penyuluhan Kehutanan Pedesaan.

D. Pembentukan Tim/Kelompok Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP)

Krajewski (1999:167), dalam konsepnya tentang *workforce management strategy*, menyatakan bahwa salah satu cara untuk menciptakan keterlibatan tenaga kerja, yaitu dengan pemanfaatan peranan tim/kelompok. Tim/kelompok merupakan kelompok kecil yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama, memiliki kinerja yang tinggi dan bertanggung jawab terhadap kesuksesan suatu perusahaan.

Berdasarkan pada konsep *workforce management strategy*, maka pembentukan tim/kelompok masyarakat seperti: lembaga swadaya masyarakat lokal (LSM), kelompok Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP), kelompok peternak, kelompok tani, kelompok PKK dan darma wanita, serta kelompok-kelompok masyarakat lainnya, sangat diperlukan untuk menunjang kesuksesan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Pembentukan Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) didorong atas dasar pertimbangan perlunya kegiatan pemberdayaan masyarakat di TN Baluran. Kesuksesan program pemberdayaan masyarakat ini perlu didukung oleh adanya organisasi kemasyarakatan dibidang kehutanan yang dapat dijadikan mitra TN Baluran, dan muncullah inisiatif dari pihak TN Baluran untuk membentuk kelompok organisasi Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP).

Pembentukan Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) oleh pihak TN Baluran yang dikelola oleh masyarakat bertujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dalam mendukung program yang dibuat oleh TN Baluran untuk membantu kesejahteraan keluarga. Pembentukan SPKP ini muncul karena adanya aktifitas atau kegiatan masyarakat yang bekerja atau masuk ke kawasan hutan.

Motivasi masyarakat memanfaatkan hutan sebagai tempat mencari sumber kehidupan sehari-hari yaitu didasarkan atas kebutuha ekonomi. Keadan ekonomi yang serba kekurangan menimbulkan sikap ketergantungan terhadap hutan semakin tinggi. Motivasi masyarakat bekerja di hutan sebagai upaya mempertahankan kelangsungan hidup. Hal ini terlihat adanya motivasi internal yaitu bertahan hidup, dan motivasi eksternal yaitu motif ekonomi dan sosial.

Saat ini ada 3 (tiga) SPKP meliputi: (i) SPKP Wonorejo; (ii) SPKP Sumber Waru; dan (iii) SPKP Sumber Anyar. SPKP di desa Wonorejo dibentuk pada tahun 2006, meliputi: 62 orang dari desa Wonorejo, 15 orang dari desa Watu Kebo; dan 10 orang dari desa Bajul Mati. SPKP di desa Sumber Anyar juga dibentuk pada tahun 2006, dengan jumlah anggota 50 orang. SPKP Sumber Waru dibentuk pada tahun 2015 dengan jumlah anggota 33 orang. SPKP Sumber Waru merupakan organisasi kemasyarakatan yang relatif paling muda.

Keseluruhan jumlah anggota keluarga (KK) dari lima desa penyangga mencapai 12.362 KK, hanya 1,4 % yang bersedia atau mau menjadi anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat secara umum kurang peduli dengan keberadaan dan kelestarian hutan di TN Baluran. Dengan kata lain partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan di TN Baluran, dapat dikatakan masih rendah. Untuk meningkatkan jumlah anggota keluarga yang bersedia menjadi mitra atau kepanjangan tangan TN Baluran melalui keanggotaan SPKP, maka pihak pengelola diharapkan, (a)

meningkatkan insentif program partisipasi bagi anggota SPKP yang bersedia berpartisipasi dalam pengelolaan hutan di TN Baluran, (b) meningkatkan program pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh lembaga masyarakat yaitu SPKP, (c) meningkatkan program bantuan, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota SPKP.

E. Pelaksanaan Program Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan program partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di TN Baluran dimulai sejak tahun 1996. Era tahun 1996, belum terbentuknya kelompok Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP). Dengan belum terbentuknya SPKP, maka kegiatan program partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mekanisme: (a) pemberian bantuan secara langsung ke masyarakat /penerima bantuan; (b) dilakukan secara *top down*; (c) pengelolaan bantuan masih belum terkoordinir dengan baik, dan potensi kegagalan bantuan dan program masih cukup besar.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang harus ditempuh pengelola kawasan hutan di TN Baluran dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat yang ada di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Setiap individu/masyarakat sekitar hutan memiliki potensi terhadap alam untuk mengolah: lahan garapan, tanaman kehutanan maupun sumber daya manusia (SDM), serta potensi fisik, kearifan, akal, dan hati nurani.

Melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, dapat menumbuhkan kebersamaan, dan melahirkan kepercayaan. Melalui kepercayaan dapat tercipta kerjasama dengan menerapkan prinsip saling pengertian antara pengelola kawasan dengan masyarakat.

Melalui kebersamaan dan kerjasama dapat ditingkatkan pemanfaatan potensi produktif sumberdaya hutan, menggunakan pengetahuan/teknologi yang ada, dan menghidupkan lembaga-lembaga sosial dan ekonomi.

Melalui pemberdayaan terjadilah perubahan ekonomi, sosial, kelembagaan atau perubahan lain yang mengarah kepada pertumbuhan, seperti: perluasan lapangan kerja, perluasan lapangan usaha dan perubahan sikap masyarakat yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan.

Program partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa penyangga meliputi: pengembangan Semut Rang-Rang untuk menghasilkan produk Kroto, pemberian bantuan modal usaha, bantuan pembuatan pupuk organik, biogas, bantuan peralatan pertanian (*handtractor*, mesin perontok padi), pemberian bantuan kredit mikro, bantuan alat transportasi (perahu dan kereta kerinci), pembentukan SPKP, dan penguatan kapasitas penyiar Radio Suara Baluran 104.1 FM.

Kegiatan program partisipasi masyarakat dan pemberdayaan desa penyangga sebagian besar kurang berhasil. Hal ini dikarenakan: (a) keberlanjutan program tergantung pada dana operasional; (b) tujuan program tidak sejalan dengan hasil yang diharapkan karena kurangnya rasa tanggung jawab dan rasa memiliki dari masing-masing desa; (c) kurangnya evaluasi dan monitoring; dan (d) kurangnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat yang dirasakan dari program bantuan partisipasi dan pemberdayaan.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan dan pemanfaatan hutan secara formal masih sangat terbatas. Program partisipasi dan pemberdayaan masyarakat adalah penting. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, masih dipandang sebagai musuh hutan daripada potensi mereka

yang dapat mendukung pemanfaatan hutan secara lestari. Program partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan TN Baluran dapat dilakukan melalui tim atau kelompok SPKP.

Partisipasi masyarakat dapat dikembangkan melalui pemberdayaan masyarakat berdasarkan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki masyarakat desa penyangga TN Baluran. Peranan masyarakat lokal, lembaga swadaya masyarakat/LSM, dan kelompok masyarakat sentra penyuluhan kehutanan/SPKP) dalam pengelolaan hutan di TN Baluran sangat diperlukan.

Hal ini diperlukan agar masyarakat bersedia menerima program-program pemberdayaan untuk menciptakan kemandirian dan kesejahteraan.

Berdasarkan program bantuan pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat oleh pihak TN Baluran merupakan langkah yang tepat. Belum mampu sepenuhnya memaksimalkan fungsi dan peranan tim atau kelompok Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) sebagai wadah komunikasi dan konsultasi masyarakat dengan pihak pengelola. Keberadaan SPKP sebagai kepanjangan tangan TN Baluran, belum sepenuhnya difasilitasi oleh pemerintah dan pengelola karena terbatasnya sumber dana operasional. Pengelolaan program bantuan pemberdayaan masyarakat sangat memerlukan peran tim atau kelompok atau lembaga kemasyarakatan dalam hal ini SPKP. Dalam hal ini diperlukan kepercayaan dari pengelola TN Baluran untuk mengelola program bantuan melalui organisasi kelompok SPKP.

Kegiatan program partisipasi masyarakat dan pemberdayaan desa penyangga sebagian besar kurang berhasil, dikarenakan karena belum sepenuhnya memanfaatkan fungsi dan peranan tim atau kelompok SPKP sebagai mitra TN Baluran. Keberlanjutan program pemberdayaan tidak dapat dilakukan secara rutin dan tergantung pada dana operasional. Tujuan program tidak sejalan dengan hasil yang diharapkan. Kurangnya rasa tanggung jawab

dan memiliki dari masing-masing masyarakat desa penyangga terhadap program pemberdayaan, kurangnya evaluasi dan monitoring juga sebagai penyebab gagalnya program.

F. Peningkatan Keeratan Hubungan Lembaga Kehutanan Sebagai Good Governance

Keeratan hubungan kelembagaan kehutanan dalam upaya pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan, merupakan hal yang sangat penting. Kompleksitas permasalahan pengelolaan dan pembangunan kehutanan semakin meningkat hingga ke sektor lain yang menuntut kawasan hutan sebagai lahan publik sebagai lahan persediaan bagi pembangunan wilayah, baik melalui proses negosiasi politik dan kekuasaan.

Keeratan hubungan kelembagaan kehutanan sebagai pihak pengelola hutan, merupakan hal yang mutlak. Sumberdaya hutan menuntut adanya perencanaan pembangunan yang harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian (*precautionary principles*), prinsip keadilan lintas generasi (*intergenerational equity*), prinsip kelestarian (*sustainability*), serta prinsip kesetaraan akses dan pembagian manfaat hasil hutan secara merata (Siswanto, *et al.* 2014).

Keeratan hubungan kelembagaan kehutanan dengan segenap anggota masyarakat, kelompok masyarakat (SPKP, LSM), dan *stakeholder* harus terjalin dengan baik sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan. Keeratan hubungan lembaga kehutanan harus mencerminkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta terwujud melalui implementasi prinsip-prinsip *good governance*, sebagai prasyarat yang dapat menentukan keberhasilan pembangunan kehutanan di Indonesia pada umumnya dan khususnya di kawasan hutan konservasi TN Baluran.

Keeratan hubungan lembaga kehutanan diharapkan mampu meningkatkan kinerja pengelolaan dan pembangunan kehutanan agar kapasitas

lembaga/pemerintah semakin kuat. Keeratan hubungan lembaga kehutanan berdampak pada kemampuan menangani berbagai permasalahan kehutanan seperti: rendahnya kemantapan kawasan hutan yang diakibatkan oleh lemahnya kebijakan dalam hal penanganan konflik dengan masyarakat sekitar, lemahnya kapasitas penegakan hukum di bidang kehutanan, lemahnya kapasitas institusi sebagai pengelola hutan, bahkan adanya birokrasi pengelolaan hutan yang semakin kompleks.

Berdasarkan Undang-undang No. 41 Tahun 1999, tentang kehutanan, bahwa kelembagaan kehutanan memiliki peran dan wewenang dalam: (1) melakukan perencanaan kehutanan; (2) melakukan pengelolaan kehutanan; (3) melakukan penelitian, pengembangan dan diklat atau penyuluhan; (4) melakukan pengawasan; (5) penyerahan kewenangan; (6) penanganan keberadaan masyarakat hukum adat; dan (7) penanganan peran serta atau partisipasi masyarakat (Siswanto, *et al.* 2014).

Keeratan hubungan lembaga kehutanan, diharapkan mampu meningkatkan integritas dan tata kelola pemerintahan sebagai *good governance* dalam kewenangannya melakukan pengelolaan hutan dengan baik. Rendahnya integritas lembaga kehutanan dapat menyebabkan terjadinya penurunan kontribusi ekonomi sektor kehutanan, penurunan fungsi ekosistem hutan, seperti: (a) kerusakan habitat, (b) tata air, serta (c) terganggunya fungsi-fungsi kultural masyarakat sekitar hutan.

G. Peningkatan Insentif Program Partisipasi Bagi Tim atau Kelompok Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP)

Peningkatan Insentif program partisipasi bagi tim atau kelompok SPKP, merupakan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan konservasi TN Baluran, yang meliputi: insentif pelatihan,

insentif peralatan pertanian, insentif uang tunai dan insentif pengelolaan lahan pertanian masih belum baik.

Insentif program partisipasi yang diberikan oleh lembaga kehutanan atau pemerintah selama ini masih tergantung pada: (1) dana daftar isian pengadaan anggaran (DIPA); (2) terbatasnya dana operasional; dan (3) tergantung ada tidaknya program bantuan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Kerjasama sinergi antara pengelola hutan, *stakeholder*, pemerintah daerah dan pusat, akademisi, tokoh masyarakat, tim atau kelompok SPKP, memegang peranan penting sebagai lembaga masyarakat, serta unsur-unsur lain yang berkepentingan dalam proses pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Insentif program partisipasi sebagaimana disebutkan, dapat diberikan berupa: (1) insentif berupa pendidikan; (2) insentif bantuan bibit tanaman pertanian (padi, jagung, kacang); serta (3) insentif dalam bentuk penyediaan data dan informasi terkait program pengelolaan hutan (Siswanto *et al.* 2014).

Strategi peningkatan partisipasi masyarakat kelompok Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP), dapat dilakukan melalui peningkatan insentif program partisipasi, meliputi: (1) meningkatkan insentif pelatihan dalam hal: pelatihan pembuatan pupuk silase/biogas/pupuk organik/bokashi, kewirausahaan, pelatihan pelayanan pengunjung secara berkelanjutan guna menciptakan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan produktifitas dan kemandirian masyarakat; (2) meningkatkan insentif bantuan peralatan pertanian secara intensif; (3) meningkatkan insentif uang tunai (*cash payment*) sebagai modal usaha, dan bantuan uang pinjaman dengan cara cicilan secara tepat sasaran melalui kelompok SPKP dan kelompok masyarakat lainnya; dan (4) insentif pengelolaan lahan pertanian, namun demikian harus diadakan evaluasi pemberian hak guna usaha (HGU) lahan pertanian sebagai usaha peningkatan

kesejahteraan masyarakat agar termotivasi ikut berpartisipasi dan menjaga kelestarian sumberdaya hutan TN Baluran.

H. Peningkatan Potensi Modal Sosial Masyarakat Anggota Sentra

Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP)

Kepastian tata ruang dan kebijakan pengelolaan kehutanan yang berorientasi pada penguatan modal sosial (*social capital*) dan sumberdaya manusia yang handal, terampil dan professional, mampu menciptakan pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan (Siswanto, *et al.* 2014).

Modal sosial masyarakat anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) ditinjau dari aspek: sikap tolong menolong, kesepakatan terhadap norma sosial, interaksi jejaring masyarakat dengan lembaga kehutanan, tingkat kepercayaan kepada anggota kelompok masyarakat, dan bantuan kelompok desa penyangga, masih belum baik.

Modal sosial masyarakat masih belum tersentuh oleh motivasi eksternal secara optimal. Belum optimalnya bantuan modal ekonomi produktif dan penunjang aktifitas ekonomi lainnya, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah.

Strategi peningkatan partisipasi masyarakat anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP), melalui pemanfaatan potensi modal sosial masyarakat, yaitu: (1) mempertahankan sikap tolong menolong dalam hal: saling menjaga keamanan lingkungan, saling memfasilitasi pemecahan masalah lingkungan, serta saling bantu membantu tidak hanya di antara anggota kelompok dalam kegiatan usaha, tetapi juga masyarakat secara umum dalam kehidupan sehari hari; (2) meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap norma sosial untuk disepakati bersama dalam hal: mematuhi aturan yang berlaku di masyarakat, mematuhi norma sosial untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, kesepakatan untuk menyisihkan dana sosial, serta selalu mengikuti

pertemuan atau rapat yang telah disepakati bersama; (3) meningkatkan interaksi jejaring masyarakat dengan lembaga kehutanan dalam hal: membina hubungan baik dengan pihak pengelola hutan, membina hubungan baik dengan pengurus SPKP, membangun hubungan yang lebih baik dengan pemerintah setempat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, serta membangun hubungan yang baik dengan masyarakat diluar desa penyangga; (4) meningkatkan kepercayaan kepada anggota kelompok masyarakat, melalui: pinjaman dari kelompok, dapat membeli barang dengan cara kredit, bersedia mengembalikan pinjaman kredit tepat waktu, serta meningkatkan kepercayaan mengelola program bantuan dari TN Baluran; dan (5) meningkatkan bantuan kelompok desa penyangga dalam hal: permintaan bantuan pinjaman dari sesama anggota kelompok, mendapat bantuan, baik yang berkaitan dengan pengembangan usaha maupun diluar dari pengembangan usaha, memperoleh bantuan dari pemerintah yang bermanfaat baik untuk kelompok maupun untuk diri sendiri, mengutamakan bantuan dengan kerjasama dalam mengatasi masalah usaha, serta sumber pendanaan kelompok sangat bermanfaat untuk membantu kelompok yang memerlukan.

I. Peningkatan Produktifitas Masyarakat Anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) Melalui Proses *Social Learning*

Melalui proses *social learning*, masyarakat akan menjadi semakin kompeten terhadap berbagai persoalan di lingkungan komunitasnya maupun di lingkungan yang lebih makro (Siswanto, *et al.* 2014).

Kompetensi warga masyarakat dapat ditunjukkan oleh dua komponen yaitu tanggung jawab sosial dan kapasitas. Bertanggung jawab untuk selalu berusaha memperbaiki kondisi kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, harus dilakukan baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bersama dalam suatu tim atau kelompok masyarakat (SPKP), melalui proses *social learning*. Proses *social learning* dengan cara membangun komunikasi dengan stakeholder (LSM,

pengelola, pemerintah daerah/pusat, akademisi/praktisi, dan masyarakat) akan mampu meningkatkan kompetensi, dan produktifitas serta kesejahteraan masyarakat, jika faktor-faktor penunjang keberhasilan *social learning* dapat terpenuhi dengan baik (Siswanto, *et al.* 2014).

Strategi peningkatan partisipasi masyarakat anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP), melalui proses *social learning* yaitu: (1) meningkatkan *sharing* ilmu dan pengetahuan bagi masyarakat dalam hal: meningkatkan pengetahuan, dan produktifitas masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan; (2) meningkatkan komunikasi dengan sesama kelompok SPKP, dan atau organisasi masyarakat lainnya; (3) meningkatkan hubungan dengan *stakeholder* dalam hal ikut melestarikan hutan di TN Baluran; dan (4) membantu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan formal dan informal; (5) bersedia menerima hal-hal baru melalui proses *social learning*; (6) mempunyai sikap untuk maju dan berkembang dalam usaha yang lebih maju melalui proses *social learning* untuk meningkatkan produktifitas; dan (7) peningkatan peranan lembaga kehutanan TN Baluran untuk melibatkan anggota SPKP melalui program partisipasi pengelolaan hutan.

J. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) Melalui Program Pengelolaan Hutan

Kesejahteraan masyarakat dilihat dari aspek: pendapatan keluarga, pendidikan keluarga, kesehatan keluarga, dan fasilitas penunjang usaha, masih belum baik. Strategi peningkatan partisipasi masyarakat anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP), melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, meliputi: (1) peningkatan keeratan hubungan lembaga kehutanan dengan masyarakat anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) dalam pemanfaatan sumberdaya alam; (2) peningkatkan insentif program partisipasi bagi masyarakat yang telah berpartisipasi dalam program pengelolaan

hutan; (3) pemanfaatan potensi modal sosial masyarakat sebagai modal pembangunan; (4) peningkatkan *social learning* masyarakat untuk bersikap terbuka dalam hal: berbagi informasi dan pengetahuan baik dengan sesama kelompok SPKP, masyarakat, *stakeholder*, pengelola dan pemerintah setempat; dan (5) perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat melalui pengembangan pariwisata alam (*eco-tourism*) yaitu dengan cara menganalisis kelayakan atraksi baru sebagai destinasi wisata untuk menciptakan lapangan kerja yang semakin luas bagi masyarakat (Siswanto, *et al.* 2014).

5.10.3 Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Hutan di TN Baluran

Strategi dan kebijakan pengelolaan hutan di TN Baluran, setidaknya ada 5 (lima) kunci utama dalam pengelolaan hutan, yaitu: (1) pengembangan komitmen yang kuat dari pemerintah/lembaga kehutanan melalui pengelolaan hutan yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (2) adanya perencanaan yang baik dan berkesinambungan; (3) penciptaan kemungkinan sistem; (4) kinerja yang tepat dan bertanggung jawab; dan (5) keberlanjutan pengukuran dan perbaikan kebijakan program (UNEP, 2004).

Perlunya kelembagaan dan tim atau kelompok organisasi masyarakat (SPKP) dalam pengelolaan hutan. Hal ini dikarenakan program-program pemerintah untuk peningkatan produktivitas hutan (hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi) masih banyak mengalami hambatan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan adanya tim atau kelompok dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keberhasilan implementasinya, baik dalam hal perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan program-program, penjaminan terhadap keamanan dan kelestarian hutan. Dapat menekan dampak negatif penguasaan kawasan hutan (Siswanto, *et al.* 2014).

Pengelolaan kawasan di TN Baluran dibagi dalam dua wilayah seksi pengelolaan taman nasional (SPTN), yaitu SPTN I Bekol dan SPTN II Karang

tekok. SPTN merupakan pemangku tingkat seksi yang membawahi resort-resort pengelolaan dan bertugas untuk mengkoordinasi kerja masing-masing resort yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya, pengelolaan kawasan konservasi, TN Baluran sejak tahun 2008, berdasarkan SK nomor: 01/KPTS/BTN-Blrn I/2008, telah menerapkan sistem pengelolaan taman nasional berbasis resort yang bertujuan untuk mengoptimalkan peran resort sebagai ujung tombak pengelolaan di tingkat lapangan. Selain itu, tujuan pengelolaan berbasis resort adalah untuk: (1) pelaksanaan usaha perlindungan/pengamatan, pelestarian/pengawetan dan pemanfaatan secara efektif dan efisien; (2) dalam aspek pemanfaatan sumberdaya dan jasa lingkungan (pariwisata), maka resort dapat membantu pelaksanaan dan memonitor aktifitas pemanfaatannya dan melaporkan hasilnya kepada SPTN terkait; (3) meningkatkan kinerja lembaga kehutanan TN Baluran dalam melaksanakan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati dengan lebih baik (Baluran, 2014a).

Pengelolaan kawasan hutan konservasi akan dikelola dengan baik, harus diarahkan agar memenuhi fenomena: (1) *the law of globalization*; (2) kearifan lokal; dan (3) *ethical technology*, serta (4) manajemen kolaboratif yaitu dengan mengakomodasikan seluruh pihak meliputi: pemilik usaha yang memiliki modal, *partnership* bisnis, tenaga kerja, masyarakat sekitar, pelanggan, dan pemerintah (Fandeli, 2012).

Pengelolaan hutan konservasi sering kali dipengaruhi oleh berbagai perubahan kebijakan kehutanan yang disebabkan oleh: (1) upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan di sekitar hutan yang bertinteraksi secara langsung dengan upaya pengelolaan, (2) keterkaitan antar sektor untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional, (3) perubahan iklim dan efek gas rumah kaca sebagai pengaruh posisi hutan di Indonesia terhadap

dunia, (4) partisipasi semua pihak (pemerintah, masyarakat, stakeholder, dan LSM) sebagai penentu keberhasilan suatu program (Utari, 2010).

Sementara kebijakan hutan konservasi dan tata kelola hutan harus mencakup: (1) peningkatan kualitas pengelolaan kawasan konservasi melalui perbaikan tata kelola hutan yang mencakup penyelesaian tata batas, perbaikan rencana pengelolaan, dan pelibatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi; (2) peningkatan populasi species terancam punah melalui kerjasama pihak ketiga dan upaya penangkaran mandiri oleh pengelola kawasan konservasi; (3) peningkatan penerimaan dari jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu terutama melalui upaya jasa wisata alam, retribusi air baku, karbon dan bio-prospecting; (4) pencegahan dan penurunan terjadinya kebakaran khususnya yang terjadi dalam kawasan hutan; dan (5) peningkatan kuantitas tenaga pengaman hutan disertai perbaikan kualitas sarana dan prasarana (Murniningtyas, 2015).

Program pengelolaan hutan dimaksudkan untuk: (1) memberikan arahan, berbagi pengetahuan dan memberikan panduan pengelolaan sumberdaya hutan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, kualitas kehidupan masyarakat, serta kemampuan ekonomi dan sosial dengan cara mengkoordinasikan peran dan tanggung jawab pihak *state forest company* (Perum Perhutani), masyarakat lokal, stakeholders, serta pihak lain yang terkait untuk mengelola sumberdaya hutan; (2) untuk meningkatkan kualitas sumberdaya hutan, produktifitas hutan, dan keamanan hutan berdasarkan fungsi keberlanjutan serta nilai manfaat dari sumberdaya hutan tersebut. Pada program ini, prinsip-prinsip pembagian keuntungan (*benefit sharing*) harus diterapkan, dan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan diberi kesempatan untuk berpartisipasi sukarela dalam pengelolaan hutan dari proses perencanaan sampai pada menikmati hasil (Djajanti, 2005, Perum Perhutani, 2007, dan Prambudiarto, 2008).

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikemukakan rekomendasi dan langkah-langkah untuk menciptakan pengelolaan hutan konservasi yang berkualitas dan berkelanjutan yang dapat dilakukan oleh pihak pengelola hutan TN Baluran meliputi: (1) menerapkan sistem pengelolaan hutan secara kolaborasi (*collaborative forest management/CFM*) yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan; (2) perlu adanya kebijakan kehutanan yang berorientasi pada peran partisipasi masyarakat sebagai subyek pembangunan; (3) setiap program yang direncanakan harus berpusat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; (4) penanggulangan tindak pelanggaran dan kriminalitas di bidang kehutanan melalui program *social forestry* atau lebih dikenal dengan pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM); (5) memberikan program *benefit sharing* kepada masyarakat atau *stakeholder* yang telah terlibat langsung dari proses perencanaan program pengelolaan hutan hingga evaluasi dan monitoring; (6) peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan atau diklat yang mencakup *general training*, *administrative training* dan *technical training*; (7) peningkatan kapasitas SDM anggota SPKP yang dimulai dari perubahan pola pikir ke-akuan menjadi kita; (8) filosofi kerja sama, gotong royong dan guyub perlu ditumbuhkan melalui tim atau kelompok masyarakat SPKP; (10) meningkatkan keeratan hubungan lembaga kehutanan dengan segenap tim/kelompok SPKP dan lembaga masyarakat lainnya; (11) peningkatan bantuan insentif program partisipasi; (12) peningkatan potensi modal sosial yang dipercaya dapat mengubah nasib petani hutan rakyat menjadi pengusaha hutan rakyat; (13) peningkatan faktor-faktor pendukung suksesnya *social learning* untuk meningkatkan pengetahuan dan produktifitas masyarakat; (14) pembentukan tim/kelompok SPKP dan lembaga masyarakat lainnya, harus berdasarkan syarat-syarat pembentukan tim yang efektif (Smither, 1996; Krajewski, 1999:167; dan Katzebach & Smith, 1993).

Keterbatasan penelitian yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah: (1) terbatasnya waktu luang responden dengan sebagian besar mata pencaharian hidupnya adalah Petani dan Buruh Tani, sehingga sulit memperoleh informasi secara luas dengan responden. Responden sebagian besar mempunyai waktu luang pada malam hari dengan waktu yang terbatas; (2) tingkat pendidikan responden sebagian besar adalah setingkat SLTP, sehingga tingkat pemahaman terhadap isi pertanyaan dalam kuisisioner tidak dapat dipahami dengan baik; (3) aspek sosial budaya masyarakat yang spesifik yaitu adanya *mindset* responden yang tidak mau ribet dengan proses *social learning* melalui membangun komunikasi dengan *stakeholder*, sehingga tidak dapat menunjang produktifitas dan tidak berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan dan partisipasi masyarakat; (4) responden kurang terbuka didalam memberikan informasi tentang partisipasi penerimaan manfaat yang dirasakan dengan adanya pengelolaan hutan di TN Baluran (5) jadwal pertemuan anggota SPKP tidak terlaksana dengan teratur, hal ini terbukti selama proses penelitian hampir tidak ditemukana adanya pertemuan atau rapat anggota SPKP.

5.11 Temuan Penelitian

Temuan penelitian yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah memberikan dasar konfigurasi pengembangan pemodelan dalam satu kesatuan model yang utuh (tidak sendiri-sendiri) diperoleh hasil:

1. Kesejahteraan masyarakat tidak memediasi pengaruh hubungan kelembagaan terhadap partisipasi masyarakat. Hal ini dikarenakan keeratan hubungan kelembagaan TN Baluran belum mampu mencerminkan sebagai lembaga yang mengedepankan prinsip-prinsip *good governance*.
2. Kesejahteraan masyarakat memediasi pengaruh insentif program partisipasi terhadap partisipasi masyarakat secara penuh (*full mediation*). Artinya bahwa pengaruh insentif program partisipasi, jauh lebih besar pengaruhnya

terhadap tingkat partisipasi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, jika dimediasi oleh kesejahteraan masyarakat (84,0%).

3. Kesejahteraan masyarakat memediasi pengaruh modal sosial terhadap partisipasi masyarakat secara parsial (*partial mediation*). Artinya bahwa pengaruh modal sosial terhadap partisipasi masyarakat, terbukti lebih besar pengaruhnya, baik terhadap partisipasi masyarakat, maupun terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, jika dimediasi oleh variabel kesejahteraan masyarakat dengan kontribusi sebesar 66,9%.

4. Kesejahteraan masyarakat tidak memediasi pengaruh *social learning* terhadap partisipasi masyarakat. Artinya bahwa *social learning* berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat, yang dimediasi oleh variabel kesejahteraan masyarakat, hanya sebesar 7.09%, tidak ada efek mediasi (*no mediation*).

5. Kesejahteraan masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Pengaruh jalur secara tidak langsung diperoleh hasil bahwa kesejahteraan masyarakat berpengaruh positif signifikan sebesar 0.749 terhadap tingkat partisipasi masyarakat dengan p-value 0.001 (<0.05). Hasil penelitian secara teoritis mendukung teori kesejahteraan masyarakat dari menkokesra (2010); dan Agusta & Fujiarto(2014), dan secara empiris mendukung penelitian dari Rahut, *et al.* (2015); dan Akamani & Hall (2014).

Hal ini dikarenakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan hutan, terlebih dahulu harus mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam setiap programnya.

5.12 Kontribusi Penelitian

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian, kontribusi dapat dijelaskan baik kontribusi teoritis dan praktis sebagai berikut:

5.12.1 Kontribusi Teoritis

Kontribusi teoritis dari temuan penelitian ini, berupa sumbangan pemikiran yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan (*knowledge management*) terkait teori: hubungan kelembagaan, insentif, modal sosial, *social learning*, kesejahteraan masyarakat dan partisipasi masyarakat. Pertama, penelitian ini menganalisis dan menjelaskan: (a) pengaruh hubungan kelembagaan, insentif program partisipasi, modal sosial, dan *social learning* terhadap partisipasi masyarakat; (b) kesejahteraan masyarakat didalam memediasi pengaruh hubungan kelembagaan, insentif program partisipasi, modal sosial, dan *social learning* terhadap partisipasi masyarakat; dan (c) pengaruh kesejahteraan masyarakat terhadap tingkat partisipasi masyarakat.

Kedua, hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap hubungan kausalitas antar variabel laten dalam penelitian ini, secara teoritis telah mampu membangun model teoritik tentang peran dan pengaruh hubungan kelembagaan, insentif program partisipasi, modal sosial, *social learning* dan kesejahteraan masyarakat terhadap tingkat partisipasi masyarakat.

Ketiga, berdasarkan hasil analisis menggunakan model struktural SEM PLS, ditemukan bahwa: (a) kesejahteraan masyarakat tidak memediasi pengaruh hubungan kelembagaan terhadap partisipasi masyarakat; (b) kesejahteraan masyarakat memediasi pengaruh insentif program partisipasi terhadap partisipasi masyarakat secara penuh; (c) kesejahteraan masyarakat memediasi pengaruh modal sosial terhadap partisipasi masyarakat secara parsial; (d) kesejahteraan masyarakat tidak memediasi pengaruh *social learning* terhadap partisipasi masyarakat; dan (e) kesejahteraan masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, diperoleh kontribusi teoritis dari temuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Memperkuat konsep *workforce management strategy* (Krajewski, 1999) menyatakan bahwa salah satu cara untuk menciptakan keterlibatan tenaga kerja, yaitu dengan pemanfaatan peranan tim/kelompok (dalam hal ini adalah tim atau kelompok SPKP).
2. Memperkuat temuan dari Baynes, *et al.* (2015); Akamani & Hall, (2014); Muro, (2015), dan Wietze, (2000) yang mengatakan bahwa pengelolaan hutan lindung, dan/atau hutan masyarakat (HKM) sangat memerlukan adanya keeratan hubungan lembaga kehutanan. Keeratan hubungan lembaga kehutanan dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam implementasi program pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
3. Memperkuat temuan dari Akib, *et al.* (2016), dan Wagener, (2004) bahwa *good governance* menciptakan keamanan, kepercayaan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, sebaliknya *bad governance* menciptakan ketidakpercayaan, kecemasan, dan ketidakpastian perekonomian.
4. Memperkuat temuan dari Adhikari, *et al.* (2014); Djamhuri, (2012); Kaseya & Kihonge, (2016) bahwa program insentif finansial yang meliputi insentif pengembalian uang transport (*transport refund*), dan insentif uang makan (*lunch allowances*) secara efektif mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara efektif sebesar 62,5%. Hal ini dikarenakan, insentif program partisipasi merupakan mekanisme yang berdampak positif terhadap sikap dan kebiasaan individu yang kemudian memotivasi dirinya untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan hutan secara kolektif (*collaborative forest management/CFM*), baik untuk pengelolaan pemerintahan dan sumberdaya hutan.
5. Memperkuat temuan dari Rahut, *et al.* (2015); William & Elias, (2013); Das & Sarker, (2010) mengatakan bahwa *joint forest management (JFM)* atau pengelolaan hutan secara kolaborasi memberikan dampak positif dan

berkontribusi dalam bentuk insentif program partisipasi yang dapat meningkatkan pendapatan bersih riil tahunan perkapita masyarakat miskin, untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat program *joint forest management/JFM* di West Bengal-India.

6. Memperkuat teori modal sosial Grootaet (1999); Coleman (1999); dan Putnam (1995) yang mengatakan bahwa modal sosial memiliki hubungan positif dengan kesejahteraan apabila didukung *social network* yang tinggi, saling percaya dengan sesama anggota masyarakat, adanya jiwa kebersamaan yang tinggi, saling bantu membantu serta adanya partisipasi masyarakat yang tinggi. Dalam penelitian ini, modal sosial masyarakat belum baik, dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan modal sosial masyarakat desa penyangga belum tersentuh oleh motivasi eksternal secara optimal, yaitu belum optimalnya bantuan modal ekonomi produktif dan penunjang aktifitas ekonomi lainnya, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah.

7. Tidak memperkuat teori *social learning* berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Secara empiris tidak mendukung penelitian dari Berkes, (2009); Fernandez, *et al.* (2015; Muro & Jeffry (2012) yang mengatakan bahwa *social learning* telah berkembang pesat sebagai kunci komponen partisipasi dan diambil secara khusus sebagai elemen penting dari partisipasi dalam pengelolaan sumberdaya alam. *Social learning* dalam penelitian ini, tidak berpengaruh positif signifikan terhadap partisipasi masyarakat, dikarenakan;

- adanya indikasi latar belakang tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat yang masih rendah;
- adanya *mindset* masyarakat yang sulit untuk untuk menerima hal-hal baru;
- masyarakat tidak mau ribet;
- tidak mau diajak maju dan berkembang dalam usaha yang lebih maju melalui proses *social learning*.

8. Kontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen, yaitu bahwa perlunya pengembangan teori *social learning* yang dicerminkan dalam hal membangun komunikasi dengan *stakeholder* dalam pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan. Pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan, dapat meningkatkan kesejahteraan dan tingkat partisipasi masyarakat yang didukung adanya kolaborasi dan peran serta semua pihak untuk mengatasi faktor-faktor pembatas *social learning* terhadap partisipasi masyarakat, yaitu dengan cara: (a) mempunyai komitmen waktu dalam proses *social learning*; (b) mengembangkan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki melalui proses *social learning* untuk meningkatkan produktifitas, namun harus tetap mendapatkan fasilitas dari pemerintah; (c) bekerja dengan keragaman budaya masyarakat sekitar; (d) berusaha mengatasi dan menjalin hubungan yang baik dengan lembaga kehutanan sebagai pengambil kebijakan dan kekuasaan; dan (e) bersedia membayar biaya yang diperlukan dalam proses *social learning* baik berupa materi dan tenaga, karena *social learning* merupakan proses yang panjang, banyak tahap yang bisa menjadi mahal sebagaimana dikemukakan oleh Louise, *et al.* (2005).
9. Memperkuat teori *social learning*, berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat, melalui kesejahteraan masyarakat. Mendukung secara empiris penelitian dari Hemerijck, (2005); dan Yamauchi (2005) yang mengatakan bahwa rumah tangga dari kalangan Petani yang berpendidikan dan terlibat dalam proses *social learning*, mampu meraih pendapatan yang lebih tinggi daripada rumah tangga yang tidak berpendidikan.
10. Memperkuat temuan dari Rahut, *et al.* (2015); dan Akamani & Hall, (2014) bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat yang makin baik akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan masyarakat (*community forest management/CFM*).

11. Pengertian partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan konservasi adalah kesediaan masyarakat yang tinggal, baik didalam maupun di sekitar kawasan hutan, yang tumbuh dan termotivasi melalui pembentukan tim atau kelompok masyarakat yang didukung oleh adanya keeratan hubungan kelembagaan, insentif program partisipasi yang dapat memotivasi tingkat partisipasi masyarakat dan kesejahteraan, adanya potensi modal sosial, dan *social learning* yang dapat dijadikan modal dalam perencanaan pembangunan, serta memprioritaskan kesejahteraan masyarakat dalam setiap program pengelolaannya.

5.12.2 Kontribusi Praktis

Bahan masukan dan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan di TN Baluran yang dimediasi oleh kesejahteraan. Memberikan informasi kepada pengelola hutan di TN Baluran, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal bahwa:

1. Tingkat partisipasi masyarakat rendah terhadap pengelolaan hutan konservasi di TN Baluran. Hal ini disebabkan karena masyarakat sekitar belum sepenuhnya dilibatkan dari proses perencanaan hingga evaluasi dan monitoring.
2. Terdapat kontribusi hasil hutan bukan kayu (HHBK) terhadap pendapatan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hutan cukup tinggi.
3. Partisipasi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat berpengaruh terhadap suksesnya program pengelolaan hutan konservasi di TN Baluran.
4. Peran kelembagaan merupakan faktor suksesnya pengelolaan hutan, dengan mengedepankan prinsip-prinsip *good governance* dan meningkatkan partisipasi masyarakats pada aspek: (a) perencanaan program hingga monitoring dan evaluasi; (b) pengamanan hutan; (c) pengembangan dan

restorasi kawasan; dan (d) pemanfaatan jasa lingkungan dan pelayanan pengunjung.

5. Pengaruh secara langsung variabel laten yang meliputi: hubungan kelembagaan, insentif program partisipasi, modal social, *social learning* dan kesejahteraan masyarakat terhadap partisipasi masyarakat berkontribusi sebesar 77%, selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Hal ini ditunjukkan dengan nilai (R^2) untuk partisipasi masyarakat sebesar 0.768

6. Pengaruh secara tidak langsung variabel laten melalui kesejahteraan masyarakat, berkontribusi sebesar 36% dan selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Hal ini dibuktikan dengan nilai R^2 untuk kesejahteraan masyarakat sebesar 0.360.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, interpretasi yang mengacu pada beberapa teori dan hasil penelitian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan kelembagaan, dan insentif program partisipasi terbukti berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat.
2. Modal sosial, dan *social learning* tidak terbukti berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat.
3. Kesejahteraan masyarakat memediasi pengaruh insentif program partisipasi terhadap partisipasi masyarakat secara penuh.
4. Kesejahteraan masyarakat memediasi pengaruh modal sosial terhadap partisipasi masyarakat secara parsial.
5. Kesejahteraan masyarakat tidak memediasi pengaruh hubungan kelembagaan dan *social learning* terhadap partisipasi masyarakat..
6. Kesejahteraan masyarakat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat.
7. Bangunan model *integrative* yang digunakan dalam penelitian ini telah terbukti bahwa: (a) hubungan kelembagaan, insentif program partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat terbukti berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat; (b) modal sosial, dan *social learning* terbukti tidak berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat.

8. Hasil hutan bukan kayu (HHBK), hasil usaha tani dan usaha ternak, dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

9. Partisipasi masyarakat dilihat dari aspek perencanaan program, pelaksanaan, penerimaan manfaat, evaluasi dan monitoring pengelolaan hutan di TN Baluran, masih relatif rendah.

6.2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya melibatkan responden sebagai penerima manfaat yaitu kepala rumah tangga sebagai anggota Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP), sedangkan pihak penyedia manfaat (*provider*) tidak dilibatkan. Persepsinya sepihak, karena tidak melibatkan dua pihak (penerima dan penyedia manfaat).
2. Tidak menguji karakteristik sosio-demografi yang diprediksi berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat.

6.3 Saran

Berdasarkan pada hasil temuan penelitian ini, dapat dikemukakan saran-saran yang menjadi rekomendasi penelitian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemudahan informasi dengan cara mensosialisasikan tentang tugas dan wewenang lembaga kehutanan kepada masyarakat dengan baik.
2. Meningkatkan keeratan hubungan kelembagaan ditinjau dari aspek mengedepankan prinsip akuntabilitas dan laporan pertanggung jawaban lembaga dalam hal mengelola sumberdaya hutan, masih perlu ditingkatkan.
3. Meningkatkan insentif program partisipasi, khususnya insentif pelatihan secara berkelanjutan, sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas dan *profesionalisme* masyarakat desa penyangga dan pegawai TN Baluran.

4. Meningkatkan bantuan kelompok desa penyangga dan kelompok SPKP melalui program bantuan pemberdayaan dan partisipasi secara berkelanjutan.
5. Meningkatkan kualitas *social learning* dengan cara menjalin hubungan lembaga dengan kelompok SPKP dan *stakeholder* (pengelola, pemerintah daerah, pemerintah pusat dalam hal ini kementerian kehutanan, LSM, akademisi dan praktisi) dalam usaha pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan berbasis partisipasi masyarakat.
6. Fasilitas penunjang usaha keluarga masyarakat anggota SPKP masih rendah dan memerlukan solusi untuk membantu meningkatkan kesejahteraannya.
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dari proses awal perencanaan program dengan cara mengikut sertakan masyarakat dan kelompok SPKP dalam suatu pertemuan atau rapat dengan memberikan kesempatan dalam hal *sharing* pendapat, saran dan usulan dalam penyusunan rencana program pengelolaan hutan TN Baluran
8. Mengevaluasi dan menindak lanjuti keberhasilan program Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) sebagai mitra TN Baluran. Hal ini dapat dilakukan dengan cara: (a) memfasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan; (b) memberi dukungan untuk keberhasilan program yang direncanakan; (c) memberi bantuan baik di bidang administrasi dan kesekretariatan serta kantor untuk kegiatan operasional yang permanen; dan (d) mendorong anggota SPKP untuk melakukan pertemuan secara rutin.
9. Memberikan kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat lokal melalui pengembangan pariwisata berbasis alam (*ecotourism*), dengan cara

meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang jasa layanan pariwisata alam untuk meningkatkan jumlah wisatawan.

10. Menyamakan visi misi dan komitmen kuat diantara pemangku kepentingan (pihak pengelola, *stakeholder*, pemerintah daerah dan pemerintah pusat) dalam pelaksanaan program pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

11. Menegakkan hukum dan peraturan kehutanan secara tegas dan transparan yang didukung semua pihak (lembaga kehutanan, pemerintah daerah, pemerintah pusat, akademisi, LSM, *stakeholder*, dan tokoh masyarakat) untuk mendukung program pengelolaan kehutanan tanpa adanya unsur kepentingan dan politik.

12. Perlunya pengembangan konsep-konsep insentif dalam pemberdayaan masyarakat pada sektor manajemen publik program partisipasi masyarakat.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR PUSTAKA

- Adhikari, Sunit, and Kingi Tanira, Ganesh Siva (2014). Incentive for community participation in the governance and management of common property resources: the case of community forest management in Nepal. *Journal of Forest Policy and Economic*, Vol: 44. No. 9 doi: 10.1016/j.forpol.2014.04.003
- Agusta, Ivanovich & Fujiartanto. 2014. *Indeks Kemandirian Desa: Metode, Hasil dan Alokasi Program Pembangunan* (Vol. Cetakan Pertama). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Akamani, Kofi & Hall, Troy E. 2015. Determinants of the process and outcomes of household participation in collaborative forest management in Ghana: A quantitative test of a community resilience model. *Journal of Environmental and Management*, 147 (1-11.). doi: doi: 10.1016/j.jenvman.2014.09.007
- Akib, Mulyati, Habbe, Abdul Hamid, Rura, Yohanis, and Hakim, Adnan. 2016. Relationship Good Governance with Welfare Society Mediated by Local Government Financial Disclosure and Audit Report Opinion (Study on Local Government South Southeast Sulawesi). *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 5 (2).
- Angelia, Yumi. 2016. SPKP Maju Bersama Sangat Potensial Dikembangkan Menjadi Pos Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (Posluhutdes). *Makalah PK Madya Pusat Penyuluhan*
- Arief, A. 1994. *Hutan: Hakikat dan Pengaruhnya terhadap Lingkungan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Arnoldo C. Hax, and S.Majluf, Richard. 1984. *Strategic Management: an Integrative Perspective*. Prentice Hall: Englewood Clif.
- Arnstein, SR. 1986. *A Ladder of Citizen Participation*. *J Am inst planners* 35, 216-224.
- Bakhdal, Kasim, dan Darmawan, Aji. 2007. Problematik Lembaga Pengelolaan Hutan Lindung di Pasaman, Sumatera Barat. *Prosiding Ekspose hasil penelitian*.
- Baluran, Taman Nasional. 1997. *Laporan Inventarisasi Hasil Hutan Non Kayu yang Dimanfaatkan Masyarakat Serta Penyebarannya pada Taman Nasional Baluran*. Situbondo: Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, Balai TN. Baluran, Banyuwangi.
- . 2014a. *Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Baluran Tahun 2014-2023*. Situbondo: Direktorat Jenderal Kehutanan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan.
- . 2014b. *Statistik Balai Taman Nasional Baluran. Bantuan: Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Dalam Rangka Kegiatan Pembinaan Daerah Penyangga*.

Baron, Reuben M. and Kenny, David A. 1986. The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations. *Journal of Personality and Social Psychology*, Vol. 51(No. 6), 1173-1182.

Baynes, Jack, Herbohn, John, Smith, Carl, Fisher, Robert, Bray, David. 2015. Key factors which influence the success of community forestry in developing countries. *The Journal of Global Environmental Change*, 35. doi: 10.1016/j.gloenvcha.2015.09.011

Beckley, T., Parkins, J., and Sheppard, S. 2005. *Public Participation In Sustainable Forest Management: A Reference Guide*. Edmonton, Alberta, Canada: Sustainable Forest Management Network.

Berkes, Fikret. 2009. Evolution of Co-Management: Role of Knowledge Generation, Bridging Organizations and Social Learning. *Journal of Environmental Management*.

Bourdieu. 1986. *The Form of Capital*. New York: Greenwood Press.

BPS. 2017. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Situbondo 2017*. Retrieved Diakses Juli 2017

Burn, R.B. 2004. *Konsep Diri: Teori, Pengukuran, Perkembangan dan Perilaku* (A. B. Eddy Ed.). Jakarta: Arcan.

Byrne, B. M. 2013. *Structural Equation Modelling with AMOS*: Routledge.

Chambers, Robert. 1996. *Participatory Rural Appraisals: Memahami Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Chang, Richard Y & Curtin Mark J. 2001. *Membangun Tim Mandiri*. Penerjemah Martina Indriadi. Jakarta: Penerbit PPM.

Cohen, Uphoff. 1997. *Rural Development Participation: Concept and Measures for Project Design Implementation and Evaluation*. New York: Rural Development Committee-Cornel University.

Coleman, J. 1999. *Social Capital in the Creation of Human Capital*. Cambridge Mass: Harvard University Press.

Creighton, H. 1986 *Law Every Nurse Should Know*. Philadelphia: W. B. Saunders.

Creswell, J. W., Plano Clark, V. L., Gutmann, M. L. & Hanson, W. E. 2003. *Advanced Mixed Methods Research Designs*: Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

D, Djajanti. 2005. *Managing Forest with Community (PHBM) in Central Java: Promoting Equity in Access to NTFPs*. Regional Community Forestry Training Center for Asia and the Pacific. pp. 63-82.

D'Aveni, A. and Robert, Gunter. 1994. *Hypercompetition: Managing Dynamic of Strategic Maneuvering*. New York: New York: The Free.

Daft, Richard L. 2000. *Management*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.

Daniel, Moehar dan Nieldalina, Darmawati. 2006. *Participatory Rural Appraisal Pendekatan Efektif Mendukung Penerapan Penyuluhan Partisipatif dalam Upaya Percepatan Pembangunan Pertanian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Darusman, D. 2002. *Pembenahan Hutan Indonesia. Bandung: Laboratorium Politik Ekonomi dan Sosial Kehutanan*. IPB.

Das, Nimai & Sarker, Debnarayan. 2010. Joint Forest Management Program: A Beneficial Relationship between State and Community. *International Journal of Joint Forest Management Program*.

Dephut. RI. 1999. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Jakarta: Kopkar Hutan.

Djamhuri, Tri Lestari. 2012. The effect of incentive structure to community participation in a social forestry program on state forest land in Blora District, Indonesia. *The Journal of Forest Policy and Economics*, Vol. 25(18). doi: doi: 10.1016/j.forpol.2012.02.004

Djogo, Tony, Sunaryo, Suharjito, Didik dan Sirait, Mar tua. 2003. *Kelembagaan dan Kebijakan Dalam Pengembangan Agroforestri*. Bogor-Indonesia: World Agroforestry Centre (ICRAF).

Eleanor, Singer and Couper, Mick P. 2008. Do Incentives Exert Undue Influence on Survey Participation? Experimental Evidence. *Journal of Survey Research Center of the Institute for Social Research at the University of Michigan*, 3 (3), 49–56. doi: 10.1525/jer.2008.3.3.49

Fandeli, Chafid. 2012. *Bisnis Konservasi Pendekatan Baru Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup*. Cetakan Pertama: Gajah Mada University Press.

FAO. 2001. *Human Energy Requirements Report of a Joint FAO/WHO/UNU*.

Fernandez, Gimenez, E., Ballard, H.I., Sturtevant. 2008. Adaptive Management and Social Learning in Collaborative and Community Based Monitoring: A Study of Five Community-Based Forestry Organizations in the Western USA. *Journal of ecology and society*. Available from: <http://www.ecologyandsociety.org/vol/iss2/art4> (accessed 15.05.09), 13 (2). 4.

Fukuyama. 1999. Social capital and civil society. Paper presented at the Paper presented at the IMF Conference on Second Generation Reforms, Washington, DC.

Griffin. 2004. *Komitmen Organisasi*. Terjemahan. Jakarta: Erlangga.

Grootaet. 1999. Social Capital, Household Welfare and Poverty in Indones. Local level Institutions working Paper No. 6. Washington, D.C, The World Bank;1999.

Hair, J. F. 2010. *Multivariate Data Analysis: A Global Perspective (Vol. Vol. 7th edition)*. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education.

Hair, J. F. Jr, G. Thomas M. Hult, Christian M. Ringle, Marka Sarstedt. 2014. *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*:

SAGE Publications, Inc. 1 Oliver's Yard. 55 City Road. London EC 1Y1SP. United Kingdom.

Hariandja, T.E. Marihot. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Pengadaan, Pengembangan, Pengkompensasian, dan Peningkatan Produktivitas Pegawai)*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Hartono, Jogiyanto. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis. Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman* (2004/2005 ed). Yogyakarta: BPFE.

-----, 2008. *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Hemerijck, Anton. 2005. Welfare Recalibration as Social Learning. *Journal of Rivista Italiana Politiche Pubbliche*, 3 (2008), 21-52.

Himadri, Sinha. 2000. *Forest and People: Understanding the Institutional Governance, Social Identity, and People's Participation in Indian Forest Management*.

Huck, S. W., W. H. Cormier, and W.G. Bounds. 2012. *Reading Statistics and Research* (Vol. Six Edition). New York: Harper & Row

Huraerah, Abu. 2008. *Community empowerment regarding to the concept of strategic development based on community in Indonesia*: Michigan University.

Ife, Jim & Tesoreiro, Frank. 2008. *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

ILO. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Kerjasama dan Usaha yang Sukses. Edisi Bahasa Indonesia*. Jakarta: International Labour Office.

International Association of Public Participation/IAP2. 2007. Core values. <http://www.iap2.org/associations/4748/files/CoreValues.pdf>

International Association of Public Participation/IAP2. 2010. Code of ethics. <http://www.iap2.org/associations/4748/files/CodeofEthics.pdf>. (accessed 11.2017).

Jim, Ife and Frank, Tesoreiro. 2008. *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kartodihardjo, H. 2011. *Pembangunan Kesatuan Pengelolaan hutan (KPH) Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi. Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Penggunaan Kawasan Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan*.

-----, 2013. Membangkitkan Kehutanan Indonesia: Kristalisasi Konsep dan Strategi Implementasi. *Makalah Seminar dalam rangka 50 tahun Fakultas Kehutanan, IPB*

Kaseya, Cleophas Ndiege & Kihonge, Ephantus. 2016. Factors Affecting the Effectiveness of Public Participation in County Governance in Kenya: A Case of Nairobi County. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 6 (10).

Kock, N. 2015. *WarpPLS 5.0. User Manual*. Texas, USA: Laredo, TX: Script Warp System.

Krajewski, Lee.J & Ritzman, Larry. P. 1999. *Operations Management Strategy & Analysis* (Fifth Edition ed.). Massachusetts-Menlo Park, California-New York: An Imprint of Addition Wesley Longman, Inc.

Kumar Dhali Panchanon, Pretzsch Jurgen, Romisch Klaus, and Mullick Abdus Subhan. 2012. People's Participation in Participatory Forest Management in the Sal Forest of Bangladesh: an Explorative Study. *International Journal of Social Forestry*, 5 (1), 38-56

Kusumanto, T., Yuliani, E.L. Macoun, P. Indriatmoko, Y. and Adnan, H. 2005. *Learning to Adapt: Managing Forests Together in Indonesia*. Bogor: CIFOR.

Lise, W. 2000. Factors Influencing People's Participation In Forest Management In India. *Journal of Ecological Economics* 34 (2000), 379-392.

Louise E.Buck, Eva Wollenberg and David Edmunds. 2005. *Pembelajaran Sosial Dalam Pengelolaan Kolaboratif Hutan Komunitas: Pelajaran Dari Lapangan* (Vol. Edisi pertama: November 2005): Pustaka LATIN Press, kerjasama dengan CIFOR atas bantuan dana dari MFP dan IDRC.

Maipita, Indra. 2014. *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan* (Vol. 1). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

McDonough, Maureen H, Spence, Leigh Ann, & Sanders, Wendy Hinrichs. 2002. *Sustainable Forest Management Community Handbook: The Great Lakes Forest Alliance*.

Menkokesra. 2010. *Data dan Informasi Bidang Kesejahteraan Rakyat*.

Mitchell, Bruce, Setiawan, B, Rahmi, Dwi Hadi. 2015. *Resources and Environmental Management. Edisi Bahasa Indonesia* (Cetakan kelima ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Morse, Bell &. 2008. *Indeks Kemandirian Desa: Metode, Hasil dan Alokasi Program Pembangunan*.

Muller, Johannes. 2006. *Perkembangan Masyarakat Lintas-Ilmu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Muntasib, H. 1999. *Hutan dan Lingkungan*. Bogor: Fakultas Kehutanan IPB.

Murniningtyas, Endah. 2015. Kebijakan Nasional Pembangunan Bidang SDA dan Lingkungan Hidup 2015 (pp. (pp. 27).). Bogor.

Muro, J.E & Namusonge, G.S. 2015. Governance Factors Affecting Community Participation in Public Development Projects in Meru District in Arusha in Tanzania. *Journal of Scientific & Technology Research*, 4(06).

Muro, Melanie, & Jeffry, Paul. 2012. *Social learning – a useful concept for participatory decision-making processes?* UK: School of Water Sciences, Cranfield University, UK. Cranfield University, Cranfield MK43 0AL.

Narayan, D, dan L. Pritchett. 1997. Cents And Sociability: Household Income and Social Capital in Rural Tanzania. *Journal of Economic Development and Cultural Change*, 47(4), 871-897.

Neuman, W.L., and W. L. Neuman. 2006. *Social Research Methods: Quantitative and Qualitative Approaches*.

Nugroho, Adi, B. Tri, Undaharta, NK. Erosi, Siregar, Mustaid. 2008. Interaksi Masyarakat Sekitar Hutan Terhadap Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati di Kawasan Ekosistem Hutan Alami Bedugul-Pancasari-Bali. *Jurnal Biodiversitas*, 9 (3).

Perhutani, Perum. 2007. *Pedoman Pembinaan LMDH Dalam Rangka Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat*.

PHKA, Dirjen. 2008. *Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Di Daerah Penyangga* (Vol. Dipa BA-29 Tahun 2008): Satker Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam Direktorat Jenderal PHKA.

-----, 2008b. *Pedoman Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Penyangga*. Dipa BA-29 Tahun 2008. Jakarta: Direktorat Jenderal PHKA.

Prahalad, C.K. and Gary Hamel. 1990. *The Core Competence of The Corporation*: Harvard Business Review. May-June 1990.

Prambudiarto. 2008. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). *Master Thesis*: Institut Pertanian Bogor, Indonesia).

Putnam, Robert. D 1993. The Prosperous Community: Social Capital and Public Life. *The American Prospect Journal*, No. 13, Spring.

Rahut, Dil Bahadur, Ali, Akhter, Behera, Bhagirath. 2015. Household participation and effects of community forest management on income and poverty levels: Empirical evidence from Bhutan. *Journal of Forest Policy and Economics*, 61. doi: 10.1016/j.forpol.2015.06.006

Ratnaningsih, Maria. 2010. Valuasi Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan. *Makalah* disampaikan pada Kongres MKTI tahun 2010. Jambi.

Richins, Marsha, L. 1984. Word of Mouth Communication as Negative Information. *International Journal of Advances in Consumer Research*, 11, 697-702.

Robbins, Stephen P. dan Judge, Timothy A. 2008. *Organizational Behaviour* (12th edition ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Robert, Fisher, Ravi Prabhu and Cynthia McDougall. 2007. *Adaptive Collaborative Management of Community Forests in Asia Experiences from Nepal, Indonesia and the Philippines*. Bogor 16000, Indonesia: Center for International Forestry Research (CIFOR). P.O. Box 0113 BOCBD.

Sabarno, M. Yusuf. 2001. Savana di Taman Nasional Baluran. *Jurnal Biodiversitas*, 3(1), 207-221.

Sara, Zare, Namiranian M, Fahmi H, Shabanali, Javad, Ghasemi. 2011. The Role of Social Capital on Citizen's Participation in the Management of Forest Parks (Case Study: Tehran City). *Iranian Journal of Forest*, 2(4), 273-285.

Sarin, M. 1996. *From Conflict To Collaboration: Institutional Issues In Community Management* (M. P. B. McGean Ed.). Delhi: India: Oxford University Press.

Sekaran, U. 2006. *Research Methods for Business*: John Wiley & Sons.

Serageldin, Ismail. 1998. Making Development Sustainable: From Concept to Action. *Paper* presented at the Environmentally Sustainable Development Occasional, Washington DC Shardlow.

Sharpe, Barrie. 2012. First the Forest': Conservation, 'Community' and 'Participation' in South-West Cameroon. *Journal of the International African Institute*. Published by: Cambridge University Press on behalf of the International African Institute, 68(1), 25-45.

Silwal, U. K. 1986. Attitude, Awareness, And Level of People's Participation In Community Forestry Development Programme. *Paper* presented at the Forestry Research Nepal

Siswanto, Adil. 2010. Strategi Pengembangan Ecotourism Taman Nasional Baluran di Kabupaten Situbondo. *Master Thesis*: Universitas Udayana, Denpasar-Bali.

Siswanto, Wandojo, R. Putro, Haryanto, Soedomo, Sudarsono, Said, Bahruni, Naiem, Mohammad, Prayitno, Tibertius Agus, Karunia, Mahawan. 2014. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Kehutanan 2015-2019 *Final Report Background Study*. Jakarta: The Japan International Cooperation Agency (JICA), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.

Smither, R.D., Houston, J.M, McIntire, S.A. 1996. *Organization Development: Strategies for changing environments*. New York: Harper Collins College Publishers.

Solimun. 2002. *Structural Equation Modelling LISREL dan AMOS*. Malang.

----- . 2010. *Analisis Multivariat Pemodelan Struktural: Metode Partial Least Square-PLS*. Malang: Citra Press.

----- . 2017. Penguatan Confirmatory Research Pemodelan Persamaan Struktural Pendekatan WarpPLS. *Modul* Disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Pemodelan Persamaan Struktural (SEM). Malang: Fakultas MIPA Universitas Brawijaya.

Syafi'i, Ardyan, Manikasari, Giska Parwa, Wistantama, Hale Azarya, Janiawati, Ida Ayu Ari, dan Satria, Ryan Adi. 2013. *Laporan Hasil Praktik Pengelolaan Kawasan Konservasi Resort Labuhan Merak Taman Nasional Baluran*. Yogyakarta.

Tracy, Brian. 2006. *Pemimpin Sukses*. Cetakan Keenam, Jakarta: Pustaka Delapatrasa.

Ujud, Tahajuddin. 2015. *Pengelolaan Sumber Daya Hutan: Suatu Tantangan. Pengelolaan Hutan Lestari: Partisipasi, Kolaborasi, dan Konflik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

UNEP. 2004. Community Participation: Enhancing Local Programmes. *Journal of Environmental Management*.

Utari, Ayu D. 2010. *Penerapan Strategi Hutan Rakyat Opsi Penyelamatan Kehancuran Hutan Negara* (Vol. 1). Yogyakarta: Cakrawala

Wagener, Hans Jurgen. 2004. Good Governance, Welfare, and Transformation. *The European Journal of Comparative Economics* 1 (1).

Wandrial, Son. 2004. Perkembangan Manajemen Strategi. *Journal The Winners*, 5 (1).

Widodo, Joko. 2001. *Good Governance*. Surabaya: Insan Cendekia Press.

William, M. Fonta & Elias T. Ayuk. 2013. Measuring the Role of Forest Income in Mitigating Poverty and Inequality: Evidence from South Eastern Nigeria. *Journal of Forests, Trees and Livelihoods*.

Williams, Pat. 2008. *The Magic of Team Work*. Terjemah, Jakarta: Grassindo.

Woolcock, Michael. 1998. *Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework*. Theory and Society, Vol. 27 (Issue No. 1).

World Bank. 2005. *Forest Institution in Transition: Experiences and Lessons From Eastern Europe*. Europe and Central Asia Region. ECSSD: The World Bank.

Yamauchi, Futoshi. 2005. *Social Learning, Neighborhood Effects, and Investment in Human Capital: Evidence from Green-Revolution India*. International Food Policy Research Institute.

Yudilastiantoro, C. 2003. *Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Hutan Lindung di DAS Palu (hulu), Sulawesi Tengah*.

Zikmund, William G, Babin, Barry J, Carr, Jon C, & Griffin, Michh. 2013. *Business Research Method* (M. Roche Ed. Vol. 9). USA: South Western Cengage Learning.